QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 – 2035

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa Kabupaten Pidie Jaya memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TAHUN 2015 – 2035.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya periode 2015 – 2035, dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Rincian dari program pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 3

RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

Berpedoman kepada RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 pada setiap tahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sejalan dengan pergantian Bupati akan disusun RPJM Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB VI	: KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	: PENUTUP

Pasal 6

(1) RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.
(2) RPJP Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK Pidie Jaya untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
(2) RKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya tahun berikutnya.

BAB III ...

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 9

(1) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang RPJP Kabupaten Pidie Jaya ini.
(2) Bentuk pemberian sanksi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) RPJP Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2035 dalam perjalanannya bila diperlukan revisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang telah disusun dan ditetapkan sebelum qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 23 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan diMeureudu
pada tanggal 23 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 1.
NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2018, Nomor : (1/11/2018).

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR ..1.. TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 – 2035

I. UMUM

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang dibagi dalam bentuk tahapan pembangunan tiap 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah dan menjadi dasar bagi calon pimpinan daerah yang akan menyusun visi dan misi pembangunan priode berikutnya, sehingga pembangunan daerah yang dihasilkan akan berkesinambungan dan berhasil guna dengan baik. RPJPD akan dijabarkan dalam dokumen berikutnya yang berupa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMD juga ditetapkan dengan peratuaran daerah untuk masa 5 (lima) tahun kepeminpinan kepala daerah terpilih, selanjutnya setiap tahun pelaksanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. RPJPD akan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama priode kepemimpinan kepala daera yang bersangkutan.

b. RPJPD Kabupaten Pidie Jaya disusun dengan berpedoman kepada RPJP Provinsi Aceh dan RPJP Nasional, hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional priode 2005 – 2025, Tahun 2014 Kabupaten Pidie jaya telah menetapkan Qanun daerah dengan nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 – 2034 yang merujuk kepada RTRW Provinsi Aceh yang merupakan bahagian yang tidak bertentangan dengan RTRW Nasional 2007 – 2027, dengan berpedoman kepada RTRW Kabupaten tersebut maka penyusunan RPJP Kabupaten Pidie Jaya diharapkan sejalan dan searah dengan RTRW yang telah ditetapkan. RPJPD ini juga memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang ada dan dikembangkan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang Islami, Sejahtera, Makmur, Adil, Aman dan Damai, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu qanun tentang pengelolaan sampah dalam Kabupaten Pidie Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Maksud dari RPJP Kabupaten Pidie tahun 2015-2035, bukan untuk membatasi kewenangan kabupaten/kota, tetapi diharapkan adanya perencanaan yang sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan SKPK) dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 1

LAMPIRAN

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 – 2035

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN 2018

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN DAN AKRONIM		
ABH	:	Angka Buta Huruf
AKABA	:	Angka Kematian Balita
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
ANC	:	*Ante Natal Care*
AMH	:	Angka Melek Huruf
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	:	Association of South East Asia Nation
ASI	:	Air Susu Ibu
ATDC	:	*Aceh Trade and Distribution Center*
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BCG	:	*Bacillus Calmette-Guerin*
BI	:	Bank Indonesia
BIBD	:	Balai Inseminasi Buatan Daerah
BKPG	:	Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
BKRA	:	Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BLUD	:	Balan Layanan Umum Daerah
BP3K	:	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kahutanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRA	:	Badan Reintegrasi Aceh
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BUMA	:	Badan Usaha Milik Aceh
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
CAT	:	Cekungan Air Tanah
CDR	:	*Case Detection Rate*
CPR	:	*Contraceptive Prevalence Rate*
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Alokasi Khusus
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
DI	:	Daerah Irigasi
DM	:	Diabetes Mellitus
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPT	:	Difteri, Pertusis dan Tetanus
GDI	:	*Gender Development Index*

SINGKATAN DAN AKRONIM		
GEM	:	*Gender Empowerment Index*
GI	:	Gardu Induk
GKG	:	Gabah Kering Giling
GKP	:	Gabah Kering Panen
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAS	:	Hutan Suaka Alam
HDI	:	Human Development Index
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGS	:	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	:	*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*
HL	:	Hutan Lindung
HM	:	Hak Milik
HMT	:	Hijauan Makanan Ternak
HP	:	*Hand Phone*
HPA	:	Hutan Pelestarian Alam
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
IB	:	Inseminasi Buatan
IJSP		Industri Jasa Sektor Pertanian
IKK	:	Ibukota Kecamatan
IMR	:	*Infant Mortality Rate*
IPHP	:	Industri Pengolahan Hasil Pertanian
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPMP	:	Industri Peralatan Mesin Pertanian
IPTEK	:	Ilmu pengetahuan dan Teknologi
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IW	:	*Indeks Williamson*
JTM	:	Jaringan Tegangan Menengah
KA	:	Kawin Alami
KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
KB	:	Keluarga Berencana
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KIP	:	Komisi Independen Pemilihan
KK	:	Kepala Keluarga
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLDK	:	Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPI	:	*Key Performance Indicators*
KPMG	:	Kegiatan Pembangunan Masyarakat Gampong
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MBS	:	Manajemen Berbasis Sekolah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MDG's	:	*Millenium Development Goals*
MEA	:	Masyarakat Ekonomi Asean

SINGKATAN DAN AKRONIM		
MINERBA	:	Mineral dan Batubara
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MSR	:	Multi Stakeholder Review
MW	:	Mega Watt
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NBM	:	Neraca Bahan Makanan
NPL	:	Non Performing Loan
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTP	:	Nilai Tukar Petani
ODHA	:	Orang Dengan HIV-AIDS
OTSUS	:	Otonomi Khusus
PAA	:	Pendapatan Asli Aceh
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PD PGSI	:	Pengurus Daerah Persatuan Gulat Seluruh Indonesia
PDRB	:	*Product Domestic Regional Bruto*
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHBS	:	Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKIB	:	Pendataan Kemiskinan yang Menggunakan Indikator Baru
PKL	:	Pusat Kegiatan Lokal
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKPN	:	Program Kredit Peumakmue Nanggroe
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PLN	:	Perusahaan Litrik Negara
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal DaLam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMT-AS	:	Pembarian Makanan Tambahan Anak Sekolah
PNPM	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pol WH	:	Polisi Wilayatul Hisbah
PON	:	Pekan Olah Raga Nasional
POPDA	:	Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
POPNAS	:	Pekan Olah Raga Pelajar Nasional
PORDA	:	Pekan Olah Raga Aceh

SINGKATAN DAN AKRONIM		
POSPENAS	:	Pekan Olah Raga Siswa Pesantren Nasional
PPB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
Puslitbang	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan
PT	:	Perguruan Tinggi
PTAI	:	Perguran Tinggi Agama Islam
PTAIS	:	Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
Pusdalop	:	Pusat Pengendalian Operasi
PWS-KIA	:	Pemantuan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAT	:	Rapat Anggota Tahunan
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RISTEK	:	Riset dan Teknologi
RPJM	:	Rencana Jangka Menengah
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RR	:	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
RSH	:	Rumah Siap Huni
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDG's	:	*Sustainable Development Goals*
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SNP	:	Standar Nasional Pendidikan
SPAM	:	Sistem penyediaan air minum
SR	:	Sambungan Rumah
TBM	:	Tanaman Belum Menghasilkan
TM	:	Tanaman Menghasilkan
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TR	:	Tanaman Rusak
TTM	:	Tanaman Tidak Menghasilkan
WPN	:	Wilayah Pencadangan Negara
WPR	:	Wilayah Pertambangan Rakyat
WTP	:	*Water Treatment Plant* (instalasi Pengolahan Air)
WUP	:	Wilayah Usaha Pertambangan

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM ---------- i
DAFTAR ISI ---------- v
DAFTAR TABEL ---------- ix
DAFTAR GAMBAR ---------- xii

BAB I PENDAHULUAN ---------- I - 1

1.1. Latar Belakang ---------- I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---------- I - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya ---------- I - 6
1.4. Sistematika Penulisan ---------- I - 9
1.5. Maksud dan Tujuan ---------- I - 9
1.5.1. Maksud ---------- I - 9
1.5.2. Tujuan ---------- I - 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ---------- II - 1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- II – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ---------- II – 1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ---------- II – 1
2.1.1.2. Kondisi Topografi ---------- II – 2
2.1.1.3. Kondisi Klimatologi ---------- II – 3
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi ---------- II – 4
A. Air Permukaan ---------- II – 5
B. Air Bawah Tanah ---------- II – 6
2.1.1.5. Kondisi Geologi ---------- II – 7
2.1.1.6. Penggunaan Lahan ---------- II – 8
2.1.1.7. Potensi dan Pengembangan Wilayah ---------- II – 10
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya II – 13
A. Gempa Bumi ---------- II – 13
B. Tsunami/ Gelombang Pasang ---------- II – 13
C. Banjir dan Erosi ---------- II – 15
2.1.2. Demografi ---------- II – 27
2.1.2.1. Jumlah Penduduk ---------- II – 27
2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk ---------- II – 28
2.1.2.3. Proyeksi Jumlah Penduduk ---------- II – 29
2.1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ---------- II – 30
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- II – 33
2.2.1. Fokus Pemerataan Ekonomi ---------- II – 33
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB ---------- II – 33
2.2.1.2. Tingkat Inflasi ---------- II – 35
2.2.1.3. Pendapatan per Kapita ---------- II – 35
2.2.1.4. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Jaya ---------- II – 36
2.2.1.5. Angka Pengangguran ---------- II – 39
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ---------- II – 41
2.2.2.1. Pendidikan ---------- II – 41
A. Angka Melek Huruf ---------- II – 41
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ---------- II – 42
C. Angka Partisipasi Kasar (APK) ---------- II – 43

D. Angka Partisipasi Murni (APM) ---------- II – 45
2.2.2.2. Kesehatan ---------- II – 46
A. Angka kelangsungan hidup bayi ---------- II – 46
B. Angka Kematian Bayi (AKB) ---------- II – 46
C. Angka Kematian Balita (AKABA) ---------- II – 47
D. Persentase balita gizi buruk ---------- II – 47
E. Angka usia harapan hidup ---------- II – 48
F. Angka Kematian Ibu ---------- II – 49
G. Angka keluhan kesehatan (sakit) ---------- II – 49
2.2.2.3. Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ---------- II – 50
2.2.3. Fokus Keistimewaan ---------- II – 54
2.2.3.1. Pelaksanaan Syariat Islam ---------- II – 54
A. Peningkatan Pemahaman Syariat Islam ------- II – 56
B. Sarana Dan Prasarana Peribadatan ---------- II – 58
C. Pengembangan Syiar Islam ---------- II – 59
2.2.3.2. Baitul Mal ---------- II – 61
2.2.3.3. Peranan Majelis Adat Daerah ---------- II – 63
2.2.3.4. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) ---------- II – 66
2.2.3.5. Pendidikan Dayah ---------- II – 68
2.3. Aspek Pelayanan Umum ---------- II – 79
2.3.1. Fokus Pelayanan Dasar (Urusan Wajib) ---------- II – 79
2.3.1.1. Pendidikan ---------- II – 79
A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) ---------- II – 79
B. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah ---------- II – 70
C. Rasio Siswa per Sekolah dan Rasio Guru Terhadap Siswa ---------- II – 71
D. Perkembangan Hasil Ujian Nasional (UN) ---- II – 72
E. Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah terhadap Penduduk Usia Sekolah ---------- II – 73
2.3.1.2. Fokus Seni dan Budaya ---------- II – 73
2.3.1.3. Kesehatan ---------- II – 75
A. Rasio puskesmas, polindes, pustu per satuan penduduk ---------- II – 77
B. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk ----- II – 78
C. Rasio dokter per satuan penduduk ---------- II – 79
D. Rasio tenaga medis per satuan penduduk ---- II – 80
E. Cakupan peserta KB aktif ---------- II – 81
2.3.1.4. Lingkungan Hidup dan Persampahan ---------- II – 82
A. Lingkungan Hidup ---------- II – 82
B. Persampahan ---------- II – 83
2.3.1.5. Sarana dan Prasarana Jalan Raya ---------- II – 84
A. Klasifikasi jalan Menurut Wewenang ---------- II – 85
B. Klasifikasi Jalan Menurut peran dan fungsi --- II – 86
2.3.1.6. Daerah Irigasi ---------- II – 90
2.3.1.7. Perumahan ---------- II – 92
2.3.1.8. Perhubungan ---------- II – 95
2.3.2. Fokus Pelayanan Penunjang ---------- II – 99
2.3.2.1. Penanaman Modal (Investasi) dan Pelayanan Terpadu ---------- II – 99
2.3.2.2. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah -------- II – 104
2.3.2.3. Sosial dan Keluarga Sejahtera ---------- II – 105

2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ---- II – 106
2.3.2.5. Statistik, Kearsipan ---- II – 107
2.3.2.6. Ketertiban dan Keamanan ---- II – 108
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ---- II – 119
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ---- II – 119
2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ---- II – 119
2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita ---- II – 110
2.4.1.3. Nilai Tukar Petani ---- II – 110
2.4.1.4. Produksi Total Daerah ---- II – 112
A. Pertanian ---- II – 112
B. Perkebunan ---- II – 117
C. Produktivitas Peternakan ---- II – 120
D. Produktivitas Kelautan dan Perikanan ---- II – 123
2.4.1.5. Perindustrian dan Perdagangan ---- II – 126
2.4.1.6. Sumberdaya Energi dan Mineral ---- II – 127
A. Sumber Daya Energi ---- II – 127
B. Sumber Mineral ---- II – 128
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur ---- II – 129
2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah ---- II – 129
2.4.2.2. Penataan Wilayah ---- II – 129
2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih ---- II – 132
2.4.2.4. Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi ---- II – 134
A. Fasilitas Listrik ---- II – 134
B. Sistem Jaringan Telekomunikasi ---- II – 135
2.4.2.5. Ketersediaan Penginapan dan Restoran ---- II – 136
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ---- II – 136
2.4.3.1. Keamanan dan ketertiban ---- II – 136
2.4.3.2. Pengenaan pajak daerah, perda (jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi) ---- II – 137
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia ---- II – 137
2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja ---- II – 137
2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan ---- II – 138
2.4.4.3. Aparatur Pemerintah ---- II – 139

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ---- III - 1

3.1. Indikator Makro Pembangunan ---- III - 1
3.2. Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan ---- III - 2
3.3. Pemanfaatan Sumberdaya Energi Terbaharukan ---- III - 4
3.4. Integrasi Infrastruktur ---- III - 4
3.5. Kualitas Sumber Daya Manusia ---- III - 5
3.6. Kualitas Pelayanan Publik ---- III - 6
3.7. Budaya Kreatif Inovatif ---- III - 6
3.8. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup ---- III - 7

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH ---- IV - 1

4.1 Visi Kabupaten Pidie Jaya ---- IV - 1
4.2 Misi Kabupaten Pidie Jaya ---- IV - 2

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH ---- V - 1

5.1. Sasaran Pokok Pembangunan ---- V - 1

5.2. Arah Kebijakan---------- V - 2
5.2.1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam, Budaya dan Adat Istiadat. ---------- V - 2
5.2.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik---------- V - 3
5.2.3. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan---------- V - 4
5.2.4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas ------ V - 5
5.2.5. Mewujudkan Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera------ V - 6
5.2.6. Mewujudkan Pidie Jaya yang Demokratis, Aman, Damai dan Bersatu Berlandaskan Hukum ---------- V - 7

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN ---------- VI - 1

6.1. Tahapan dan Prioritas---------- VI - 1
6.1.1. Tahap Pembangunan Ke-1 Tahun 2015-2020 ---------- VI - 1
6.1.2. Tahap Pembangunan Ke-2 Tahun 2021-2025---------- VI - 3
6.1.3. Tahap Pembangunan Ke-3 Tahun 2026-2030---------- VI - 5
6.1.4. Tahap Pembangunan Ke-4 Tahun 2031-2035---------- VI - 6
6.2. Prinsip Kaidah Pelaksanaan ---------- VI - 6
6.3. Mekanisme Pengendalian Dan Evaluasi---------- VI - 7
6.3.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pidie Jaya ---------- VI - 7
6.3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya ---------- VI - 8

BAB VII PENUTUP ---------- VII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sinkronisasi Agenda Pembangunan antara RPJP NASIONAL dengan RPJP ACEH	I – 8
Tabel 2.1	Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya	II – 2
Tabel 2.2	Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya	II – 3
Tabel 2.3	Data Curah Hujan dan Hari Hujan Station SMPK BPN Meureudu Selama Kurun Waktu 10 Tahun	II – 4
Tabel 2.4	Data Panjang dan Debit sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya	II – 5
Tabel 2.5	Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya	II – 6
Tabel 2.6	Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya	II – 9
Tabel 2.7	Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami di Kabupaten Pidie Jaya	II – 14
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Dari Tahun 2010 - 2015	II – 27
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011-2015	II – 28
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk dan Persentase Jumlah Jiwa/KK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015	II – 28
Tabel 2.11	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Sampai Tahun 2035 Dengan Menggunakan Metoda Proyeksi Polinomial (Jiwa)	II – 29
Tabel 2.12	Perbandingan IPM Kabupaten Pidie Jaya dengan IPM Provinsi Aceh Tahun 2010 - 2015	II – 32
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pidie Jaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 - 2015 (Juta Rupiah)	II – 34
Tabel 2.14	Tingkat Inflasi di Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Propinsi Aceh Bulan November dan Desember Tahun 2014	II – 35
Tabel 2.15	Pendapatan Regional Per Kapita Tahun 2010 – 2015 (Juta Rupiah)	II – 36
Tabel 2.16	Persentase penduduk Miskin Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2015 -	II – 37
Tabel 2.17	Jumlah KK Miskin Per Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016	II – 38
Tabel 2.18	Jumlah rumah tangga (RT) menurut status kesejahteraan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016	II – 39
Tabel 2.19	Provinsi dengan Angka Pengangguran Tertinggi di Indonesia Tahun 2015	II – 40
Tabel 2.20	Penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang Bekerja, Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2009–2015	II – 40
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2016	II – 42
Tabel 2.22	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Pidie Jaya	II – 43
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2016	II – 44
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2016	II – 45

Tabel 2.25 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2016 ---------- II – 46
Tabel 2.26 Angka Kematian Balita di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 – 2016 ------ II – 47
Tabel 2.27 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2016----- II – 48
Tabel 2.28 Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2015 --------- II – 48
Tabel 2.29 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012-2016 ---------- II – 49
Tabel 2.30 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2015 ---------- II – 50
Tabel 2.31 Sepuluh Penyakit Terbanyak sesuai dengan Keluhan Masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016---------- II – 50
Tabel 2.32 Daftar Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2017---------- II – 51
Tabel 2.33 Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 52
Tabel 2.34 Peringat pada Keikutsertaan POPDA Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2008 - 2016 ---------- II – 53
Tabel 2.35 Jenis dan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Pidie Jaya ---------- II – 54
Tabel 2.36 Pengajian Rutin Peningkatan Pemahaman Syariat Islam---------- II – 57
Tabel 2.37 Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2016 ---------- II – 57
Tabel 2.38 Jumlah Mesjid Dan Meneunasah Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2016---------- II – 58
Tabel 2.39 Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya ---------- II – 59
Tabel 2.40 Jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2017---------- II – 59
Tabel 2.41 Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2017---------- II – 61
Tabel 2.42 Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 dan Tahun 2016---------- II – 62
Tabel 2.43 Jumlah Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 dan Tahun 2016---------- II – 63
Tabel 2.44 Rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 ---------- II – 67
Tabel 2.45 Jumlah Dayah, Guru, dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012-2017 ---------- II – 68
Tabel 2.46 Jumlah Balai Pengajian, Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 dan 2017 ---------- II – 69
Tabel 2.47 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2015 Kabupaten Pidie Jaya---------- II – 70
Tabel 2.48 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009-2016 Kabupaten Pidie Jaya---------- II – 70
Tabel 2.49 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 – 2016 Kabupaten Pidie Jaya---------- II – 71
Tabel 2.50 Nilai rata-rata dan Angka Kelulusan Ujian Nasional Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2016 Kabupaten Pidie Jaya ---------- II – 73

Tabel 2.51 Jumlah Sanggar Seni Budaya dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 --- II – 74
Tabel 2.52 Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun 2012-2016 Kabupaten Pidie Jaya ---------- II – 75
Tabel 2.53 Distribusi SDM Kesehatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016 ---------- II – 76
Tabel 2.54 Distribusi Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan dalam Kabupaten Pidie jaya tahun 2016 ---------- II – 77
Tabel 2.55 Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2010-2015 ---- II – 78
Tabel 2.56 Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dan Kepemilikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 79
Tabel 2.57 Rasio Dokter di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016---------- II – 79
Tabel 2.58 Standar Ketenagaan Puskesmas---------- II – 81
Tabel 2.59 Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010-2015 ----- II – 81
Tabel 2.60 Kondisi Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 ---------- II – 88
Tabel 2.61 Kondisi Jalan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 ---------- II – 88
Tabel 2.62 Jumlah dan Panjang Jembatan (plat beton/prestres) dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2017---------- II – 89
Tabel 2.63 Kondisi Jalan Lingkungan dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2017 ------- II – 90
Tabel 2.64 Jumlah Daerah Irigasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 91
Tabel 2.65 Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 - 2016-------- II – 92
Tabel 2.66 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2016 ---------- II – 93
Tabel 2.67 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tangga Tidak Layak Huni di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013-2016 ---------- II – 93
Tabel 2.68 Data Panjang dan Kondisi Drainase Perkotaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 94
Tabel 2.69 Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah tersedia di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 96
Tabel 2.70 Titik Kemacetan pada Jalan tertentu dan Kebutuhan Personil PAM LALIN di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017---------- II – 96
Tabel 2.71 Jumlah kenderaan yang di uji dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 - 2016 ---------- II – 99
Tabel 2.72 Jenis Angkutan Penumpang dalam Kabupaten Pidie Jaya ---------- II – 98
Tabel 2.73 Jenis Kendaraan dan Barang Angkutan di Kabupaten Pidie Jaya---------- II – 98
Tabel 2.74 Jumlah Peningkatan Tower Telekomunikasi di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2011 - 2015 ---------- II – 101
Tabel 2.75 Jumlah Perkembangan Investasi di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2010 - 2016 ---------- II – 101
Tabel 2.76 Jumlah Koperasi, UKM dan UMKM di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 - 2016 ---------- II – 104
Tabel 2.77 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 - 2016 ---------- II – 105

Tabel 2.78 Jumlah Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2016 ---------- II – 107
Tabel 2.79 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2016 ---------- II – 107
Tabel 2.80 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2010 – 2015 ---------- II – 110
Tabel 2.81 Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Tahun 2010 -2015---------- II – 111
Tabel 2.82 Luas Baku Lahan Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ------ II – 112
Tabel 2.83 Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Pangan di Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ---------- II – 114
Tabel 2.84 Produksi Komoditas Pangan di Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ---------- II – 114
Tabel 2.85 Produktivitas Komoditas Pangan di Pidie Jaya Tahun 2010-2015---------- II – 115
Tabel 2.86 Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2010 - 2015 - II – 117
Tabel 2.87 Rekapitulasi Lahan Perkebunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ------- II – 119
Tabel 2.88 Rekapitulasi Lahan Perkebunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ------- II – 119
Tabel 2.89 Jumlah Populasi Ternak Ruminasia Besar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 - 2015 ---------- II – 122
Tabel 2.90 Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Kecil Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 - 2015 ---------- II – 122
Tabel 2.91 Potensi Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Padang Penggembalaan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 ---------- II – 122
Tabel 2.92 Jumlah Populasi Ternak Unggas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 ------- II – 123
Tabel 2.93 Luas Areal Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 124
Tabel 2.94 Jumlah Produksi Budidaya Air Payau Menurut Kecamatan di Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 125
Tabel 2.95 Jumlah Hasil Tangkapan Ikan di Pidie Jaya Tahun 2014---------- II – 125
Tabel 2.96 Potensi Material Galian Di Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II – 129

Tabel 2.97 Proyeksi Kebutuhan Air Hingga Tahun 2031 ---------- II – 134
Tabel 2.98 Potensi Pembangunan PLTMH di Kabupaten Pidie Jaya ---------- II – 135
Tabel 2.99 Jumlah Tindak Pindana Menonjol di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2015 ---------- II – 136
Tabel 2.100 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2014---------- II – 138
Tabel 2.101 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2015---------- II – 139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 2
Gambar 2.2.	Persentase Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya ----------	II – 9
Gambar 2.3.	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 --	II - 12
Gambar 2.4.	Peta Sesar Aktif dan Sebaran Pusat Gempa Bumi Merusak di Indonesia -----	II - 13
Gambar 2.5.	Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Indonesia----------	II - 14
Gambar 2.6.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 15
Gambar 2.7.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 16
Gambar 2.8.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 17
Gambar 2.9.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 17
Gambar 2.10.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 18
Gambar 2.11.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 19
Gambar 2.12.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kec. Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 19
Gambar 2.13.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kec. Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 20
Gambar 2.14.	Peta delapan ruas sungai yang melintasi Pemukiman Penduduk di Pidie Jaya, yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya---------	II - 20
Gambar 2.15.	Sungai Lueng Putu yang melintasi pemukiman penduduk di Kecamatan Bandar Baru dan bermuara di garis pantai Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 21
Gambar 2.16.	Sungai Cubo Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya.----------	II - 22
Gambar 2.17.	Sungai Trienggadeng, yang melintasi pemukiman penduduk di Kecamatan Trienggadeng dan bermuara di garis pantai Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 23
Gambar 2.18.	Sungai Beuracan Pangwa Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 23
Gambar 2.19.	Sungai Meureudu Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ----------	II - 24
Gambar 2.20.	Sungai Ulim dan Bandar Dua Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Ulim dan Bandar Dua Serta Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Ulim dan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. ----------	II - 24
Gambar 2.21.	Sungai Jeulanga Yang Menjadi Ruas Anakan Dari Sungai Ulim Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Bandar Dua dan Ruas Akhirnya Bergabung Dengan Ruas Krueng Ulim di Desa Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya----------	II - 25

Gambar 2.22. Sungai Kiran Yang Memiliki Ruas Hulu di Pegunungan Selatan Kecamatan Bandar Dua dan Bermuara ke Garis Pantai Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 25
Gambar 2.23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011 – 2015 ---------- II - 33
Gambar 2.24. Pendapatan Regional per Kapita tahun 2010 – 2015 (jutaan rupiah) -- II - 36
Gambar 2.25. Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Provinsi dan Nasional ---------- II - 37
Gambar 2.26. Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 ---------- II - 38
Gambar 2.27. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2011- 2016 ---------- II - 43
Gambar 2.28. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi (Ha), 2010-2016 ---------- II - 113
Gambar 2.29. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Jagung (Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ---------- II - 113
Gambar 2.30. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Kedelai (Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ---------- II - 114
Gambar 2.31. Produktifitas Padi (Ton/Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ---------- II - 115
Gambar 2.32. Produktifitas Jagung (Ton/Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ---------- II - 116
Gambar 2.33. Produktifitas Jagung (Ton/Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016 ---------- II - 116

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu bagian kabupaten di Provinsi Aceh dengan Ibukota Meureudu. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683), pada tanggal 2 Januari 2007. Dalam sejarah Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai Ibu Kota Kerajaan Aceh, Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai Kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas. Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan Kerajaan Aceh.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia-red) pada tahun 1613 dan singgah di Negeri Meureudu untuk menjumpai Teungku Ja Pakeh atau Teungku Muhammad Jalaluddin yang merupakan ulama dan diplomat yang memiliki garis keturunan dengan Bangsa Arab. Ia berasal dari Madinah, namun orang-orang di Meureudu suka memanggilnya dengan nama yang singkat yaitu Teungku Ja Pakeh atau Ja Madinah dikarena beliau selain seorang diplomat juga seorang ulama ahli Fiqah (fiqih), Ja yang berarti ahli dan Pakeh yaitu Fiqih. Teungku Ja Pakeh mendirikan Ma'had Baital Makdis Raweu sebagai pusat pelatihan militer dan mengangkat Malem Dagang (saudara se-wali dengan Teungku Ja Pakeh) sebagai pimpinan pada pusat pelatihan militer tersebut. Raweu merupakat daerah savana yang luasnya ribuan hektar dan setiap tahunnya banyak binatang seisi rimba yang turun ke daerah tersebut, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tempat latihan militer karena tentara Kerajaan Aceh yang dilatih di tempat itu akan sangat mudah mendapatkan makanan yang kadar kalori dan gizinya cukup, sementara disebelah utara Raweu terbentang sawah yang luas sebagai tempat penghasil beras. Keberadaan Pusat pendidikan Raweu ini sangat besar pengaruhnya terhadap Kerajaan Aceh. Untuk mengembangkan pusat pelatihan militer Raweu menjadi pusat pelatihan yang lebih baik, Sulthan Aceh menjalin kerjasama dengan Turki. Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undang (UU) nya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F Van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di Negeri Belanda.

Meureudu pernah dicalonkan sebagai Ibu Kota Kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu

lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya Ibu Kota Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu yang dikenal saat ini dengan nama Benteng Kuta Batee.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang yang berasal dari Madinah sebagai Panglima Perang dan didampingi oleh Teungku Ja Pakeh sebagai penasehat perang. Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu Sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu. Negeri Meureudu negeri yang langsung berada dibawah Kesultanan Aceh dengan status Nenggroe Bibeueh. penduduk Negeri Meureudu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Sri Muda Pahlawan Raja Negeri Meureudu. Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1946 - 1967 Meureudu berubah menjadi Pusat Kewedanaan sekaligus Pusat Kecamatan, kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Daerah kewedanan Meureudu kemudian dijadikan sebagai Kabupaten Baru (Pidie Jaya) yang membawahi delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya (pecahan Bandar Dua), Kecamatan Ulim, Kecamatan Meureudu, kecamatan Meurah Dua (Pecahan Meureudu), Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja (Pecahan Trienggadeng) dan Kecamatan Bandar Baru. Delapan kecamatan di bagian timur Kabupaten Pidie ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai Ibu Kotanya.

Pada tanggal 15 Agustus 2005, penandatanganan Nota Kesepakatan Damai (MoU) yang dilaksanakan di Helsinki - Swedia merupakan tahapan penting bagi Aceh dalam memasuki kehidupan damai yang didambakan masyarakat Aceh menjadi modal dasar pembangunan di Aceh dan khususnya Kabupaten Pidie Jaya, sesuai dengan motto Daerah " ***PEUGAH LAGE***

BUET, PEUBUET LAGE NA" Yang bermakna bahwa Masyarakat Kabupaten pidie Jaya akan selalu berbuat dengan apa yang telah diikrarkan, berpegang teguh pada komitmen, Lambang daerah berbentuk lima segi yang bermakna Lima Sila Pancasila dan Rukun Islam Lima Perkara, Lambang Daerah mengadung 7 (tujuh) Unsur perlambangan yaitu : 1). Untaian Padi dan Rangkaian Tandan Kapas Bermakna Kemakmuran Rakyat Pidie Jaya yang Adil dan Merata; 2). Buku/Kitab dan Pena bermakna Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Cita-cita agar Kabupaten Pidie Jaya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi; 3). Rencong bermakna Kepahlawanan dan Keperkasaan serta menjunjung Tinggi budaya leluhur; 4). Timbangan dan Neraca bermakna Pemerintah yang adil di Kabupaten Pidie Jaya; 5). Kubah Mesjid dengan Bintang Bulan diatasnya bermakna Syariat Islam yang merupakan Falsafah Hidup bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya; 6). Delapan Pintu di bawah Kubah bermakna bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki Delapan Kecamatan dalam Wilayahnya; 7). Pita merah bertulisan Pidie Jaya bermakna masyarakat Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan.

Dengan warna dasar biru tua di bagian bawah bermakna potensi laut di seluruh Kabupaten Pidie Jaya, dan warna Biru Dasar Muda bagian Atas bermakna Warna ankasa yang bersih sebagai cita-cita masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, maka sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Kabupaten untuk 20 tahun ke depan dengan perpedoman kepada, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun dokumen perencanaan daerah berupa dokumen, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) priode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) priode 5 tahun dan Rencana Pembangunan jangka Pendek atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan, pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota yang berdasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang dibagi dalam bentuk tahapan pembangunan tiap 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah dan menjadi dasar bagi calon pimpinan daerah yang akan menyusun visi dan misi pembangunan priode berikutnya, sehingga

pembangunan daerah yang dihasilkan akan berkesinambungan dan berhasil guna dengan baik. RPJPD akan dijabarkan dalam dokumen berikutnya yang berupa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMD juga ditetapkan dengan peratuaran daerah untuk masa 5 (lima) tahun kepeminpinan kepala daerah terpilih, selanjutnya setiap tahun pelaksanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. RPJPD akan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama priode kepemimpinan kepala daera yang bersangkutan.

RPJPD Kabupaten Pidie Jaya disusun dengan berpedoman kepada RPJP Provinsi Aceh dan RPJP Nasional, hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional priode 2005 – 2025, Tahun 2014 Kabupaten Pidie jaya telah menetapkan Qanun daerah dengan nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 – 2034 yang merujuk kepada RTRW Provinsi Aceh yang merupakan bahagian yang tidak bertentangan dengan RTRW Nasional 2007 – 2027, dengan berpedoman kepada RTRW Kabupaten tersebut maka penyusunan RPJP Kabupaten Pidie Jaya diharapkan sejalan dan searah dengan RTRW yang telah ditetapkan. RPJPD ini juga memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang ada dan dikembangkan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang Islami, Sejahtera, Makmur, Adil, Aman dan Damai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Qanun Aceh nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Aceh Tahun 2012 – 2032
25. Qanun Aceh nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033;

26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 – 2034.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini, RPJP Kabupaten Pidie Jaya merujuk pada RPJP Provinsi Aceh dan mengacu kepada RPJP Nasional 2005 - 2025.

Tahap I (2005-2009) :
1. Menata kembali NKRI.
2. Membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. (perlu ada RPJM)

Tahap II (2010-3014) :
1. Memantapkan penataan kembali NKRI.
2. Meningkatkan keualitas SDM.
3. Membangun Iptek.
4. Memperkuat daya saing perekonomian.

Tahap III (2015-2019) :
1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia.
2. SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek.

Tahap IV (2020-2024) : Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

RPJP Nasional 2005 – 2025 dengan Visi " ***INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR*** " Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu; 1). Mewujudkan Msayarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2). Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing; 3). Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum; 4). Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5). Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6). Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7). Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan berbasiskan kepentingan nasional; 8). Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional.

RPJP Provinsi Aceh priode tahun 2012 – 2032 yang ditetapkan dengan Qanun nomor 9 tahun 2012 dengan Visi" ***ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA***" untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Aceh yaitu; 1). Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami; 2). Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kehidup-an secara ekonomi, sosial dan spiritual; 3). Mewujudkan Aceh

yang demokratis berlandaskan hukum; 4). Mewujudkan Aceh yang aman, damai dan bersatu; 5). Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, adil dan merata; 6). Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana. Selanjutnya kaidah pelaksanaan RPJP Aceh bedasarkan pentahapan berdasarkan situasi dan fokus pembangunan digambarkan sebagai berikut:

Tahap I (2005-2012) :
1. *Putting Aceh on growth ladder.*
2. Reintegrasi.
3. Kapitas Produksi.
4. Rehabilitasi Lingkungan.

Tahap II (2013-3017) :
1. Consolidation.
2. Fokus Ke Industri Pertanian (*Agro-Industry*).
3. Pencapaian MDGs.

Tahap III (2018-2022) :
1. Maturation.
2. Fokus pada Pengembangan Industri Pengolahan (Manurfaktur).

Tahap IV (2023-2025) :
1. *Competitiveness.*
2. Fokus pada daya saing.
3. Peletakan dasar-dasar *knowledge based society.*

Penelaahan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi dilakukan untuk menjamin keselarasan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan kebijakan pembangunan Nasional, demikian juga halnya dengan Penelaahan RTRW Nasional, RTRW Provinsi harus sinkron dengan RTRW Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang tidak saling bertentangan. Hubungan antar dokumen sebagaiman digambarkan pada alur perencanaan di bawah ini.

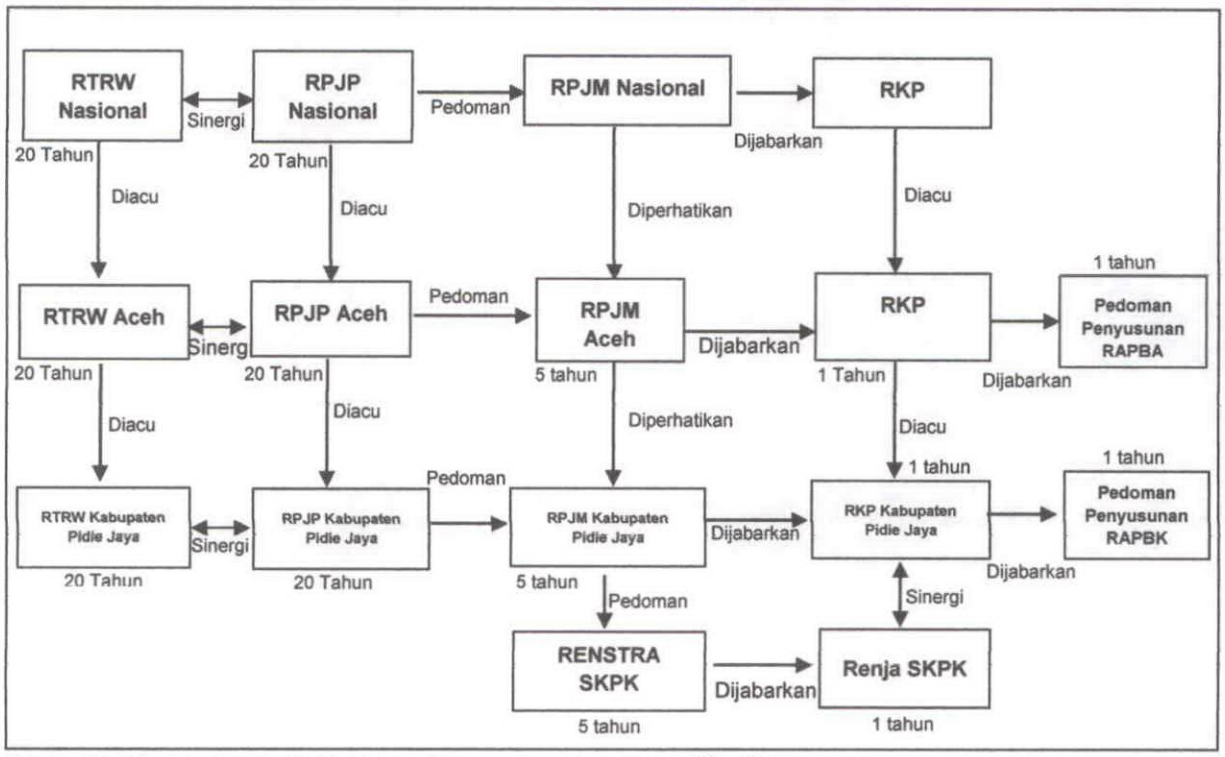

Catatan : Dijabarkan : Hal-hal yang dianggap mendasar harus identik
Dipedoman : Hal-hal yang memberikan arah dan koridor

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Sinkronisasi agenda pembangunan antara RPJP Aceh dengan RPJP Nasional dan RPJP Kabupaten Pidie Jaya diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Sinkronisasi Agenda Pembangunan antara RPJP NASIONAL, RPJP ACEH, dengan

NO	RPJP NASIONAL (2005 - 2025)		RPJP ACEH (2012 - 2032)		RPJP PIDIE JAYA (2015 - 2035)
1	**Visi : Nasional**		**Visi : Provinsi Aceh**		**Visi : Pidie Jaya**
	" INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR "		**"ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA "**		**" PIDIE JAYA YANG ISLAMI, BERKUALITAS, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA"**
2	**8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional**		**6 (enam) Misi Pembangunan Aceh**		**6 (enam) Misi Pembangunan Pidie Jaya**
1	Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami	1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam, Budaya dan Adat Istiadat
2	Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing	2	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kehidup-an secara ekonomi, sosial dan spiritual	2	Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum	3	Mewujudkan Aceh yang demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan Pidie Jaya yang demokratis, aman, damai dan bersatu berlandaskan hukum
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan Aceh yang aman, damai dan bersatu	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, adil dan merata	5	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	6	Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana	6	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional				

1.4. Sistematika Penulisan

RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015–2035 disusun berdasarkan sistematika penulisan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut Sistematika penulisan RPJPD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

2.5.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 - 2035, disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan program prioritas dan kegiatan yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya; dan
2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa yang akan datang.

2.5.2. Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 - 2035, disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelasakan gambaran umum kondisi Kabupaten Pidie Jaya, anailisi isu-isu strategis, visi dan misi kabupaten Pidie Jaya, arah kebijakan dan kaedah pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten pidie jaya sesuai dengan wilayah ruang dan waktu
3. Mendukung jalinan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian masyarakat Pidie Jaya yang sesuai dengan visi dan misi daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan kondisi geografis, perkembangan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selain menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, ternyata juga cukup banyak tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Karenanya, masih diperlukan upaya untuk mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Aceh, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dengan letak geografis 96°3'16,62" sampai dengan 96°20'40,5" Bujur Timur dan 5°18'6,607" sampai dengan 4°56'42,1" Lintang Utara.

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, dan 222 Gampong. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie (Kecamatan Kembang Tanjong);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong).

Posisi Kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya sangat strategis karena berada pada lintas jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh – Medan. Hal ini memudahkan akses terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kecamatan tersebut. Kota Meureudu ditunjuk sebagai Ibu Kota Kabupaten yang posisi berada di tengah-tengah kecamatan lainnya

Lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya dapat di lihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	
		(km²)	Gampong (desa)	Kemukiman
1	Bandar Baru	281,24	43	8
2	Panteraja	40,04	10	2
3	Trienggadeng	128	27	5
4	Meureudu	156,74	30	4
5	Meurah Dua	292,2	19	3
6	Ulim	60,73	30	5
7	Jangka Buya	29.63	18	2
8	Bandar Dua	174,26	45	5
	Jumlah	**1.162,84**	**222**	**34**

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

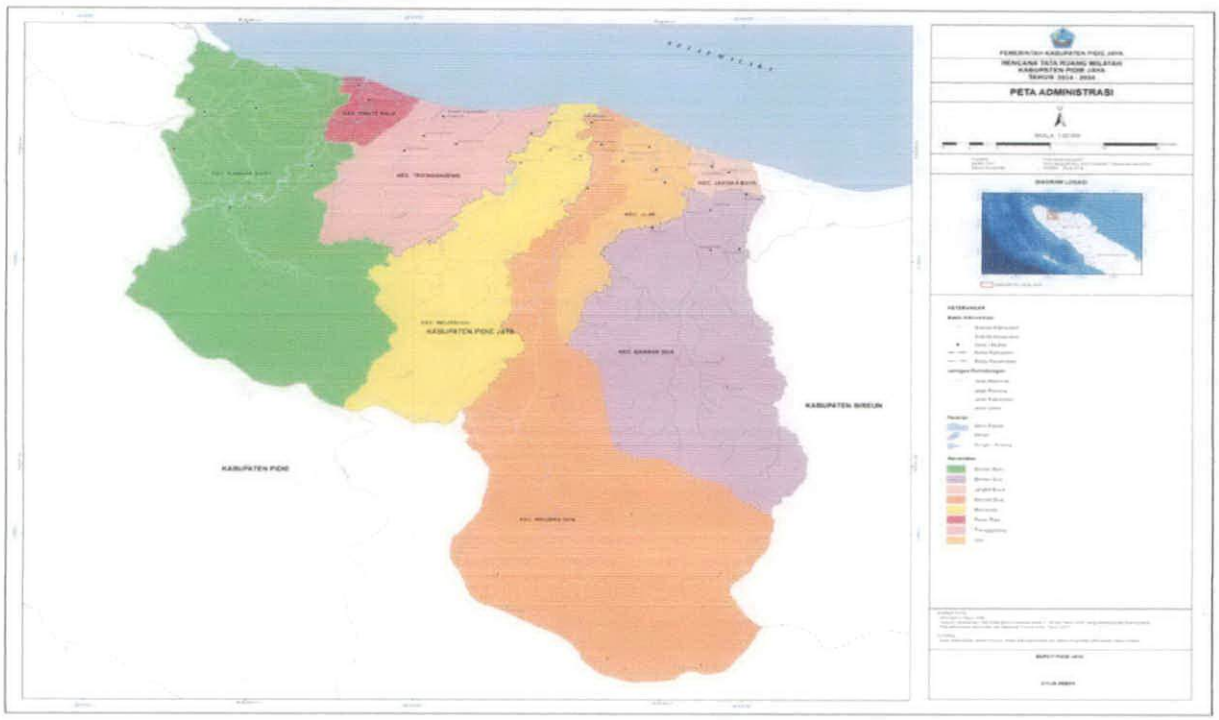

. Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi kabupaten Pidie Jaya relatif tidak datar dengan ketinggian bervariasi antara 0 – 8 mdpl (meter diatas permukaan laut) hingga >1500 mdpl. Luas dataran dengan ketinggian 0 – 8 mdpl 28,53 persen dari luas keseluruhan kabupaten, sedangkan sisanya berada di daerah selatan mempunyai kontur ketinggian permukaan tanah yang sangat variatif atau perbukitan dengan tingkat kemiringan lereng antara 25 – 40 persen. Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan

terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40 persen akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Gambaran kondisi kelerengan Kabupaten Pidie Jaya bisa dilihat melalui Table 2.2 Berikut ini.

Tabel 2.2
Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Lereng Kelas (%)					
		(0 - 3)	(4 - 8)	(9 - 15)	(16 - 25)	(26 - 40)	>40
1	Bandar Baru	22.36	29.24	16.63	12.23	9.28	10.26
2	Panteraja	44.01	46.41	9.58	-	-	-
3	Trienggadeng	44.01	46.41	9.58	-	-	-
4	Meureudu	4.82	10.39	11.12	2.20	40.74	30.74
5	Meurah Dua	4.82	10.39	11.12	2.20	40.74	30.74
6	Ulim	59.02	19.44	12.55	3.39	2.58	3.01
7	Jangka Buya	-	-	-	-	-	-
8	Bandar Dua	8.34	7.88	4.05	5.71	11.56	54.46

Sumber : Atlas Pengembangan Kakao Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010

Kemiringan lahan dikelompokkan kedalam 5 (lima) lereng yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 8 persen (kelerengan tingkat I). Lahan dengan kemiringan seperti ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil.
2. Kemiringan lereng 8 – 15 persen (kelerengan tingkat II/landai). Lahan dengan kemiringan lereng seperti ini dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan masih mungkin terjadi erosi.
3. Kemiringan lereng 15 – 25 persen (kelerengan tingkat III/agak curam) kemungkinan terjadi erossi lebih besar.
4. Kemiringan lereng 25 – 45 persen (kelerengan tingkat IV/curam), jika tumbuhan menutupi permukiman lahan ditebang, maka lereng akan mudah tererosi.
5. Kemiringan lereng 45 persen (kelerengan tingkat V/sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatan harus bersifat nonbudidaya. Apabila terjadi penebangan hutan, akan membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan yang lebih luas.

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan jumlah bulan kering dan bulan basah maka tipe curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya adalah tipe A sesuai rumus Schmidt dan Ferguson. Temperatur berkisar dari suhu minimum 19 °C – 22 °C sampai dengan suhu maksimum 30 °C – 35 °C.

Menurut Atlas Curah Hujan Bakosurtanal, Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi 4 kawasan curah hujan, yaitu :

a. Wilayah pantai utara mempunyai curah hujan 1.500 mm/tahun;
b. Wilayah daratan rendah dengan ketinggian 50 – 100 mdpl bercurah hujan 1.500 – 2.000 mm/tahun;
c. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 – 200 mdpl bercurah hujan 2.000 – 2.500 mm/tahun;
d. Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian >400 mdpl bercurah hujan 2.500 – 3.000 mm/tahun.

Tingkat curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya tertinggi terjadi pada bulan Januari mencapai 280 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada bulan Februari dan Agustus. Rata – rata curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2015 sebesar 203,42 mm per bulan atau sebanyak 2.441 mm setahun. Untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan dan hari hujan selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2005 sampai tahun 2015 hampir rata rata 3 sampai 4 bulan dalam setahun hari hujan, malah pada tahun 2015 jumlah hari hujan yang paling sedikit selam 10 tahun terakhir hanya 64 hari atau dua bulan hari hujan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Curah Hujan dan Hari Hujan Station SMPK BPN Meureudu
Selama Kurun Waktu 10 Tahun

Bulan	Tahun																					
	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH
Januari	167	8	341	11	241	5	276	7	316	6	259	11	178	9	259	11	423	13	88	4	280	13
Februari	149	6	370	12	211	6	117	2	61	7	83	7	143	9	83	6	208	10	31	4	25	3
Maret	195	9	141	6	115	7	258	8	175	6	373	7	139	17	373	7	7	3	48	5	72	6
April	140	6	202	8	325	8	193	5	14	2	225	12	103	9	225	12	284	11	23	2	74	5
Mei	196	10	60	6	175	5	98	5	80	14	72	2	124	15	72	12	209	6	151	11	110	5
Juni	74	5	165	6	131	7	27	3	46	3	16	5	40	3	16	5	28	4	7	1	104	2
Juli	98	7	189	10	31	3	220	9	17	7	122	4	41	5	122	4	57	4	27	3	78	12
Agustus	163	7	134	11	74	5	319	12	112	12	17	3	132	11	17	3	57	4	160	13	32	4
September	96	8	29	2	166	8	21	4	103	9	168	16	99	10	168	16	57	6	135	10	174	10
Oktober	230	10	231	9	211	912	5	15	124	8	85	9	179	14	85	9	20	3	164	18	137	9
November	531	15	143	10	251	11	438	18	156	10	176	16	146	16	176	16	226	13	131	9	104	14
Desember	169	4	358	13	296	10	507	15	245	9	251	13	823	21	251	13	132	11	241	11	251	10
Jumlah	2208	95	2363	104	2227	84	2599	103	1204	84	1847	105	2147	139	1847	114	1708	88	1208	89	2441	64

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Pidie Jaya, 2016

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat nomor 04/PRTM/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah Sungai, Kabupaten Pidie Jaya mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan wewenang pemerintah Pusat yang langsung di Bawah Pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I. Berikut adalah Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Data Panjang dan Debit sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya

No	Kode BWS I	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (Km)
1	015	Kr. Putu	12.780	37,02
2	016	Kr. Panteraja	22.780	43,02
3	017	Kr. Pangwa	1.479	8,10
4	018	Kr. Beuracan	9.640	28,32
5	019	Kr. Meureudu	38.660	55,99
6	020	Kr. Jeulanga	12.090	34,54
Jumlah Total			**97.239**	**206,99**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya/Tim Gis Pengairan Tahun 2017

A. Air Permukaan

Kabupaten Pidie Jaya mempunyai area konservasi air yang cukup luas yaitu di area hutan lindung atau hutan produksi yang berada pada sisi barat yaitu deretan pegunungan Bukit Barisan. Areal pertanian tanaman pangan atau persawahan ada di lembah atau bagian timur yang bertopografi datar. Area perkebunan ada di perbukitan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, oleh karena itu fungsi hutan sebagai penyangga sumber daya alam dan sumber daya air bagi wilayah permukiman dan pertanian mempunyai arti yang sangat penting. Secara Geografis, potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Pidie Jaya, sangat dimungkinkan untuk membangun satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Tower air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat perkotaan/pedesaan, perumahan, perkantoran, dan zona Industri dalam kurun waktu 5 s.d 20 tahun ke depan.

Pemanfaatan lahan dataran lereng pegunungan dan dataran tinggi untuk tanaman perkebunan yang mempunyai arti penting karena selain penghasil bahan industri atau bahan ekspor juga berperan dalam hidrologi wilayah. Sungai besar maupun kecil yang mengarah ke timur, mata airnya ada di areal hutang lindung.

Adapun sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah sungai Krueng Kalla di Kecamatan Bandar Baru perbatasan dengan Kabupaten Pidie, sungai Krueng Cubo berada di Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Trienggadeng, Krueng Beuracan yang membelah Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu, Krueng Meureudu yang membelah Kecamatan Meureudu dengan Kecamatan Meurah Dua, Krueng Ulim yang melintas Kecamatan Ulim dan Krueng Jeulanga yang melintas Kecamatan Bandar Dua dan Jangka Buya. Wilayah sungai yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah Wilayah Sungai (WS Aceh – Meureudu) yang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS); a). DAS Krueng Lueng Putu; b). DAS Krueng Pante Raja; c). DAS Krueng Beuracan; d). DAS Krueng Meureudu; e). DAS Krueng Ulim; f). DAS Krueng Jeulanga; dan h). DAS Krueng Kiran.

Air permukaan yang terdapat di wilayah kota Meureudu adalah sungai Krueng Beuracan dan sungai Krueng Meureudu. Sungai Krueng Meureudu ini mempunyai panjang 45 Km, dengan luas DAS 3.770 Km2. Dewasa ini penggunaan badan air tersebut hanya terbatas untuk menampung dan mengalirkan aliran drainase. Sejalan dengan rencana penerapan sempadan sungai dan perlakuan yang baik terhadap sungai diharapkan kualitas air sungai dapat diperbaiki.

B. Air Bawah Tanah

Berdasarkan Peta hidrogeologi Indonesia dapat diidentifikasikan jenis litologi batuan (lithological rock types) serta potensi dan prospek air tanah (groundwater potential and prospects). Pada Peta Hidrogeologi Indonesia ditunjukkan adanya indikasi sesar/patahan yang relatif memanjang mengikuti pola pegunungan yang ada di wilayah Aceh (relatif berarah barat laut – tenggara). Terkait dengan aspek hidrogeologi di atas, selanjutnya dikemukakan juga mengenai cekungan air tanah (CAT) yang ada di wilayah Pidie Jaya. Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasikan ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Pidie Jaya. Berdasarkan qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Cekungan Air Tanah (CAT) seluas 22.380,29 Ha meliputi: a). CAT Sigli seluas 6.354,10 Ha, meliputi Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja; b). CAT Kemiki seluas 3.471,55 Ha, meliputi Kecamatan Merah Dua. C). CAT Jeunib seluas 12.554,63 Ha, meliputi Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Untuk lebih jelasnya seperti dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Cekungan	Luas (ha)
1	Bandar Baru	Sigli	4.566,18
2	Bandar Dua	Jeunib	3.992,11
3	Jangka Buya	Jeunib	926,15
4	Meurah Dua	Kemiki	3.471,55
5	Meurah Dua	Jeunib	1.704,11
6	Meureudu	Jeunib	2.260,97
7	Pante Raja	Sigli	1.236,61
8	Trienggadeng	Jeunib	426,36
9	Trienggadeng	Sigli	551,32
10	Ulim	Jeunib	3.244,94
Jumlah			**22.380,30**

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2014

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/penduduk di Kabupaten Pidie Jaya harus dengan kapasitas yang optimum. Ketersediaan Air bersih sangat tergantung

pada sumber air yang dapat di olah dan dimanfaatkan. Sistem distribusi dalam pengadaan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya dengan 2 cara yaitu: melalui jaringan sistem perpipaan PDAM, dan sistem non perpipaan (swadaya masyarakat).

Kondisi sekarang ini, pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat yaitu: Meureudu, Panteraja, Ulim, dan PDAM Pidie. Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum terlayani oleh PDAM, kebutuhan air bersih pada umumnya diambil dari sumur galian, mata air dan sungai. Sasaran akhir RPJP Kabupaten Pidie Jaya tahun 2035 dalam hal ini daerah perkotaan di Pidie Jaya dapat terlayani jaringan sistem perpipaan PDAM dengan baik

2.1.1.5. Kondisi Geologi

Jenis Geologi yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari batuan sedimen kuarter dan tersier yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta batuan sedimen pra tersier yang umumnya berada di bagian selatan Pidie Jaya. Susunan formasi batuan dan endapan yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari *aluvium, campuran estuarin* dan *marin* yang masih muda, *aluvium* sungai muda, gambut yang berada di bagian tengah Pidie Jaya (di sepanjang jalan arteri), *aluvium*, endapan laut yang muda (pasir-pasir pantai, kerikil) yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta formasi batuan *basalt, andesit, tefra berbutir halus* dan *tefra berbutir kasar* yang berada di bagian selatan Pidie Jaya, Jenis tanah yang terdapat di Pidie Jaya sangat beragam. Sebagian besar merupakan jenis tanah kambisol yang bercampur dengan jenis tanah lainnya, seperti *gleisol, regosol, andosol, aluvial dan podsolik.*

Tanah *Gleisol*, yang terdiri atas *Gleisol Eutrin, Gleisol Fleirik*, dan *Gleisol Halik* merupakan tanah yang mempunyai prosentase liat yang tinggi dengan pengaruh reduksi unsur besi (fe). Umumnya dijumpai pada dataran datar. Umumnya dijumpai pada tanah datar. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng.

Tanah *Alluvial*, merupakan jenis tanah timbunan sehingga belum mempunyai perkembangan horizon lebih lanjut. Lapisan atasnya masih selalu mendapat bahan tambahan yang kadang-kadang mengandung zat organik. Di Kabupaten Pidie Jaya, jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Trienggadeng, Panteraja dan Bandar Baru.

Tanah *Regosol,* merupakan tanah yang terdiri dari lapisan gambut (bahan organik) di atas tanah mineral yang mengalami *gleisasi.* Ditemukan di daerah rawa-rawa yang terus menerus tergenang atau daerah yang lebih tinggi yang drainase nya sangat buruk dengan curah hujan yang tinggi. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu.

Tanah *Podsolik,* berwarna merah sampai kuning dengan perkembangan yang sedang dan kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini umumnya ditemukan pada wilayah yang mempunyai ketinggian 50-1.000 meter dari permukaan laut. Jenis tanah ini ditemukan di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Tanah *Latosol,* adalah tanah yang mempunyai distribusi kadar liat yang tinggi dengan tingkat kelapukan yang telah lanjut. Stabilitas agregat adalah tinggi dengan tanah warna merah , coklat kemerahan, coklat kekuningan atau kuning. Tanah ini banyak ditemukan pada tanah yang mempunyai ketinggian 0 – 900 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng.

Tanah Komplek *Podsolik* Merah Kuning dan *Litosol,* merupakan gabungan dari sifat-sifat tanah di atas. Jenis tanah ini dijumpai di wilayah tengah sampai pegunungan, seperti di Kecamatan Bandar Baru, Meuredu dan Bandar Dua.

Tanah Komplek *Rendzina dan Litosol,* merupakan jenis tanah gabungan antara jenis tanah *rendzina* dan *litosol*. Tanah *Rendzina* merupakan tanah yang mempunyai horizon permukaan *mollik* dan dibawahnya langsung berupa batu kapur. Sedangkan jenis tanah *litosol* adalah tanah dangkal yang berada di atas batu keras sampai dengan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah serta belum ada perkembangan profil lebih lanjut akibat pengaruh erosi yang kuat. Jenis tanah komplek *rendzina* dan *litosol* ini ditemukan di kecamatan Bandar Baru walaupun dalam luasan yang relatif kecil.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Pidie Jaya terletak pada posisi koordinat 04° 06' – 04° 07' Lintang Utara dan 95° 52' – 96° 30' Bujur Timur. Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas 3 (tiga) karakteristik kawasan yang berbeda yaitu kawasan pantai, kawasan daratan, dan kawasan pegunungan. Kawasan pantai dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya air payau dan perikanan tangkap. Kawasan daratan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perikanan air tawar, dan peternakan. Kawasan pegunungan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan tanaman perkebunan, kehutanan, pengembangan hortikultura dan peternakan.

Adapun peruntukan untuk wilayah laut yang luasnya sebesar 210,84 km² melalui pengembangan budidaya perikanan tangkap, tripang, dan potensi laut lainnya. Berdasarkan ketentuan penggunaan wilayah laut untuk kabupaten/kota berjarak 4 mil dari tepi pantai. Pengembangan sektor kelautan sangat memberikan harapan dan menjanjikan jika dikelola secara baik. Pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya

No	Peruntukan	Luas (Ha)	Prosentase
	Kawasan Lindung	**50.946,86**	**53,51**
1	Hutan Lindung	48.004,21	50,42
2	Sempadan Sungai	2.067,15	2,17
3	Sempadan Pantai	228,57	0,24
4	Sungai	646,93	0,68
	Kawasan Budidaya	**44.264,10**	**46,49**
5	Hutan Pendidikan	150,21	0,16
6	Hutan Produksi Terbatas	4.865,11	5,11
7	Hutan Rakyat	1.225,39	1,29
8	Pengembangan Lahan Basah	75,30	0,08
9	Kawasan Hankam	19,94	0,02
10	Kawasan Pendidikan	110,16	0,12
11	Kawasan Hortikultura	2.331,68	2,45
12	Kawasan Industri Perikanan	19,63	0,02
13	Kawasan Industri	91,27	0,10
14	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	21,05	0,02
15	Lahan Program PLKSDA-BM	201,86	0,21
16	Lokasi Transmigrasi	561,28	0,59
17	Pemukiman Pedesaan	3.769,41	3,96
18	Pemukiman Perkotaan	2.754,51	2,89
19	Perikanan	24,34	0,03
20	Perkebunan Rakyat	17.004,26	17,86
21	Pertanian Lahan Basah	7.739,21	8,13
22	Pertanian Lahan Kering	365,56	0,38
23	Peternakan	1.271,55	1,34
24	Tambak	1.662,38	1,75
	Total	**95.210,96**	**100,00**

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

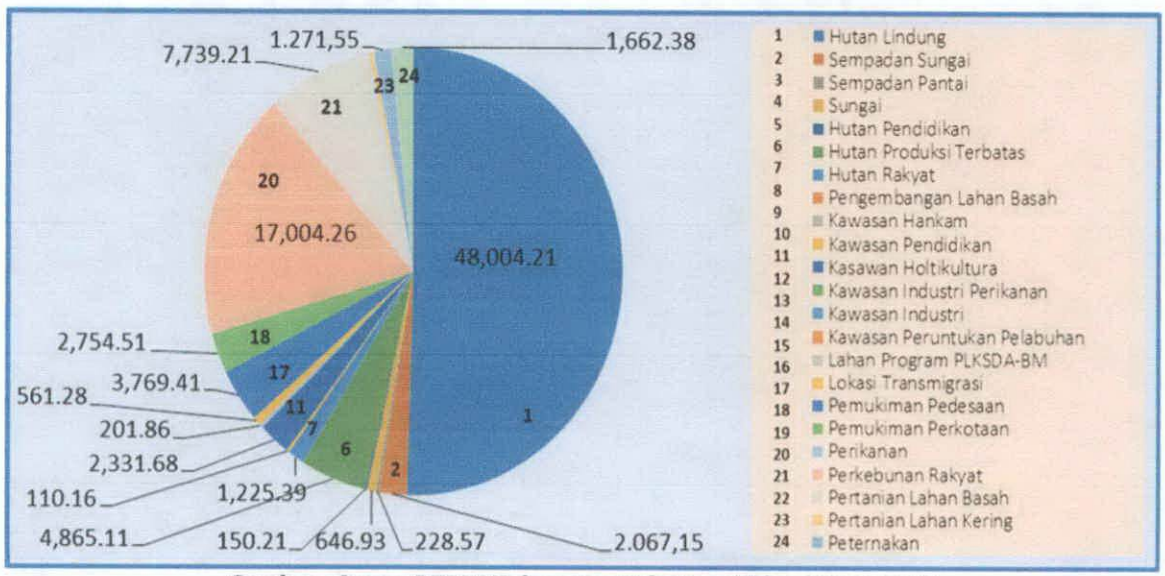

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

Gambar 2.2. Persentase Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 2.2 memberikan informasi bahwa persentase pembagian pola pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya yaitu pola pemanfaatan ruang Kabupaten Pidie Jaya yang pertama didominasi oleh kawasan lindung seluas 53,51 persen atau 50.946,86 hektar dan kawasan budidaya seluas 46,49 persen atau 44.264,10 hektar sesuai dengan tata ruang nasional. Kawasan lindung di Kabupaten Pidie Jaya dimanfaatkan sebagai wilayah serapan yang tidak dapat diganggu keberadaannya yang berada di lima Kecamatan sebagai barikut:

a. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 8.333,03 Ha, meliputi Gampong Abah lueng, Gampong Meunasah Jiem Jiem dan Gampong Sarah Panyang.
b. Kecamatan Trienggadeng, dengan luas 1,32 Ha, terletak di Gampong Panton Raya.
c. Kecamatan Meureudu dengan luas 4.859,48 Ha, meliputi Gampong Lampoh Lada, dan Gampong Glumpang tutong.
d. Kecamatan Meurah Dua, dengan luas 24.720,08 Ha, meliputi Gampong Lhok Sandeng.
e. Kecamatan Bandar Dua, dengan luas 10.090,38 Ha, meliputi Gampong Kumba Ateueh, Cot Keng, Blang Miro, Krueng Kiran, Kumba, Cot Geurufai, Lhok Pusong, Gaharu, dan Alue Sane

2.1.1.7. Potensi dan Pengembangan Wilayah

RTRW Kabupaten Pidie Jaya telah merumuskan rencana kawasan strategis kabupaten, kawasan ini merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Perincian kawasan strategis Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

1. **Kawasan Kota Meureudu Raya,** Secara geografis Perkotaan Meureudu memiliki potensi cukup besar untuk berkembang di masa mendatang karena terkait dengan fungsi dan peranannya sebagai Ibukota Kabupaten Pidie Jaya. Kawasan perkotaan Meureudu diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kabupaten. Posisi Perkotaan Meureudu yang dilewati jalan arteri primer Banda Aceh – Medan menjadi kekuatan utama perkembangan dan pertumbuhan perkotaan Meureudu. Untuk mendorong prioritas pembangunan, maka ditetapkan Meureudu sebagai kawasan strategis Kota Meureudu Raya;

   Meureudu Raya merupakan rencana pengembangan Kota Meureudu 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan menggabungkan batas sungai beuracan dan Kuta Rentang Meurah Dua (batas Kecamatan Meurah Dua-Kecamatan Ulim).
2. **Kawasan Perkotaan,** Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pidie Jaya harus ditetapkan juga sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL. Kawasan Strategis Kabupaten yang berupa

kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, diantaranya meliputi : a). KSK Perkotaan Lueng Putu, Kawasan Perkotaan Lueng Putu diarahkan sebagai sub pusat kegiatan di wilayah barat Kabupaten Pidie Jaya; b). KSK Perkotaan Ulee Gle, Kawasan Perkotaan Ulee Gle diarahkan sebagai sub pusat kegiatan di wilayah timur Kabupaten Pidie Jaya;

3. **Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten,** Kawasan Strategis Provinsi yang direncanakan di Kabupaten Pidie Jaya adalah Kawasan KSP kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) zona utara; dan KSP kawasan agrowisata. Selain itu di bagian selatan Kabupaten Pidie Jaya juga terdapat Kawasan Strategis Ulu Masen. Kawasan ekosistem Ulu Masen merupakan area yang berhutan meliputi 7,000 km^2 meliputi sejumlah tipe habitat, termasuk hutan Montana, hutan hujan dataran rendah, hutan rawa, dan di sebelah utara terdapat hutan karst;
4. **Kawasan Strategis Agropolitan,** Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kota pertanian (agropolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan kajian Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pidie Jaya, Kawasan Agropolitan meliputi: a). Kawasan Agroplitan Bandar Baru; b). Kawasan Agropolitan Bandar Dua;
5. **Kawasan Strategis Minapolitan,** Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan issue dan permasalahan pembangunan pedesaan yang terjadi, pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (pedesaan). Kawasan minapolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat minapolitan dan desa-desa disekitarnya membentuk Kawasan Minapolitan. Berdasarkan hasil kajian minapolitan di Kabupaten Pidie Jaya, kawasan minapolitan meliputi:
   a. Kawasan Minapolitan Jabulbimbaraksa (Jangka Buya-Ulim-Lueng Bimba-Meuraksa);
   b. Kawasan Minapolitan Rajacanjong (Panteraja-Lancang Paru-Njong);
6. **Kawasan Agrowisata,** Agrowisata atau wisataagro adalah kegiatan wisata yang berlokasi atau berada di kawasan pertanian secara umum. Pengembangan agrowisata pada konsep umum dapat ditempuh melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas. Objek wisataagro tidak hanya terbatas kepada objek dengan skala hamparan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi

objek wisata yang menarik. Kawasan Agrowisata di Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi pengembangan tanaman hortikultura pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik yang dikembangkan secara monokultur maupun secara polikultur yang kemudian dapat diolah sehingga bisa menghasilkan nilai tambah dari komoditas yang diunggulkan. Kawasan Agrowisata di Kabupaten Pidie Jaya meliputi Kawasan Agrowisata Cariheu Gajah (Blang Cari – Blang Rheue – Lhok Gajah) di Kecamatan Ulim, Bandar Baru di Abah Lueng, Meureudu di Krueng Tije serta Bandar Dua di Lhok Pusong.

7. **Kawasan Gampong Terpadu,** Gampong binaan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Gampong terpadu diarahkan menjadi kawasan mandiri energi, mandiri pangan dan mandiri generasi. Kawasan Gampong terpadu direncanakan di Kemukiman Nanggroe, Kecamatan Ulim. a). **Kawasan Historis Blang Raweue,** Kawasan wisata sejarah yang dahulu adalah kawasan militer Kerajaan Aceh. Lokasi Kawasan Historis Blang Raweue berada di Kecamatan Meurah Dua, dimana masuk kedalam Kawasan Strategis Provinsi Ulu Masen; b). **Kawasan Strategis Pariwisata,** Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi wisata pesisir pantai di Kecamatan Trienggadeng. Posisi Kecamatan Trienggadeng di sepanjang pesisir pantai timur memiliki akses yang mudah karena dilewati jalan utama arteri primer Banda Aceh – Medan. Pengembangan prasarana penunjang wisata di kawasan pantai tersebut menjadikan perkotaan Trienggadeng dan sekitarnya menjadi PKLp. Diharapkan kawasan ini dapat menjadi kawasan yang tumbuh cepat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya.

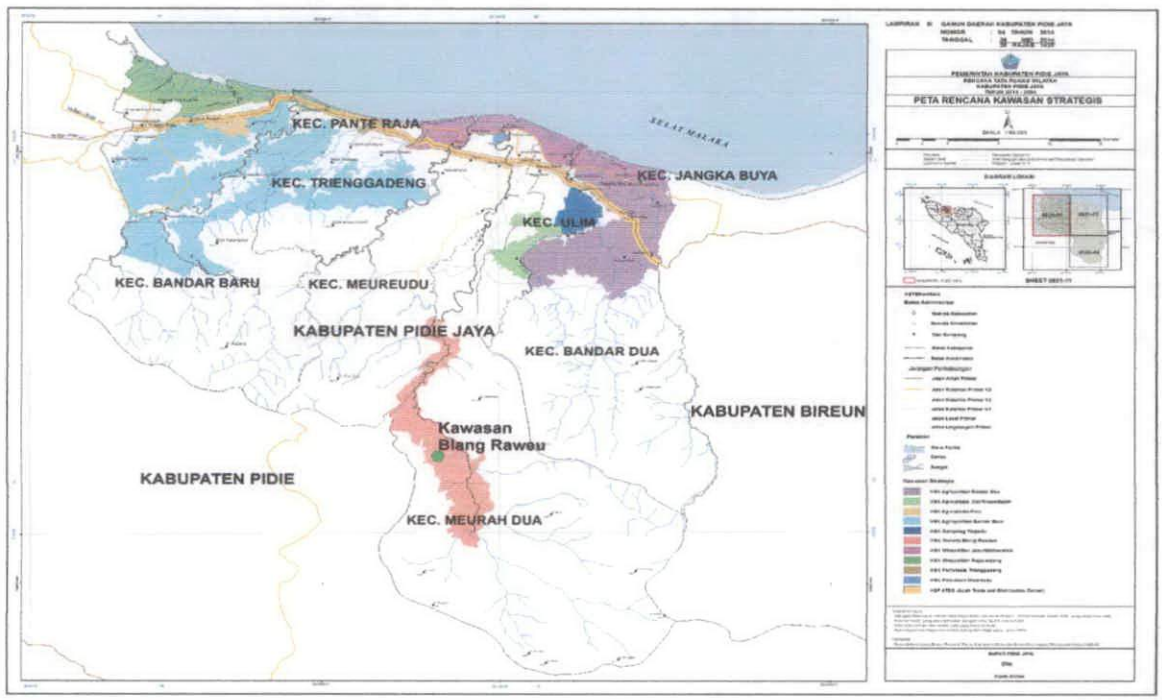

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

Gambar 2.3. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya

A. Gempa Bumi

Wilayah *Provinsi Aceh* merupakan salah satu dari 25 Wilayah Rawan Gempabumi Indonesia dapat dilihat pada dibawah ini. Seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari 8 kecamatan, 222 desa dan 34 Kemukiman merupakan daerah potensi rawan bencana gempa bumi karena Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan pulau Jawa, lepas pantai Selatan kepulauan Nusatenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua. Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Itulah sebabnya mengapa di pulau-pulau sekitar pertemuan 3 lempeng itu sering terjadi gempabumi.

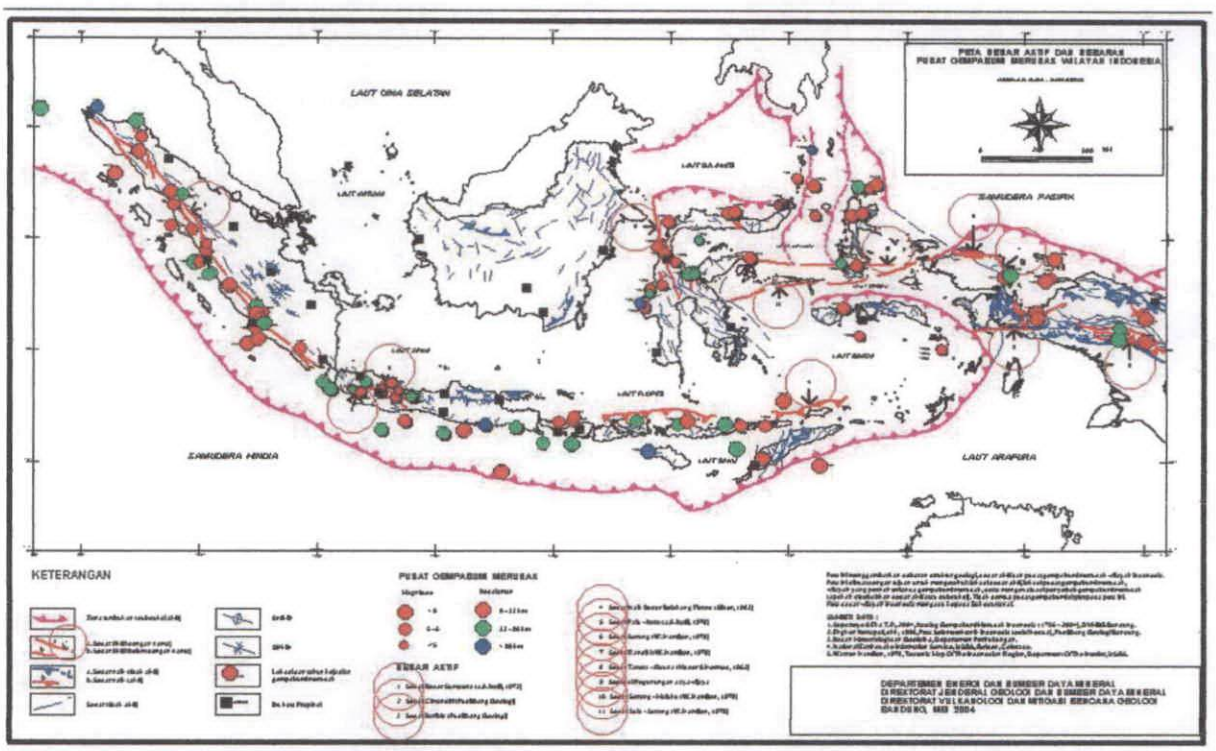

Gambar 2.4. Peta Sesar Aktif dan Sebaran Pusat Gempa Bumi Merusak di Indonesia

B. Tsunami/ Gelombang Pasang

Wilayah *Propinsi Aceh* merupakan salah satu dari 21 wilayah rawan bencana tsunami di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.5. Daerah/wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berada di pesisir pantai merupakan daerah/ wilayah potensi rawan bencana tsunami/ gelombang pasang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kecamatan Bandar Baru meliputi Gampong : Cut Njong, Mns.Baro, Sawang, dan Lancang, Paru

2. Kecamatan Penteraja meliputi Gampong : Keude Pante Raja, Reudeup, Peurade dan TU.
3. Kecamatan Trienggadeng meliputi Gampong : Mns. Keude, Meue, Cot Lheue Rheng dan Deah Pangwa
4. Kecamatan Meureudu meliputi Gampong : Meuraksa dan Mns. Balek
5. Kecamatan Meurah Dua meliputi Gampong : Mns Jurong, Lueng Bimba dan Buangan
6. Kecamatan Ulim meliputi Gampong : Tijien Husen, Gelanggang
7. Kecamatan Jangka Buya meliputi Gampong Cot

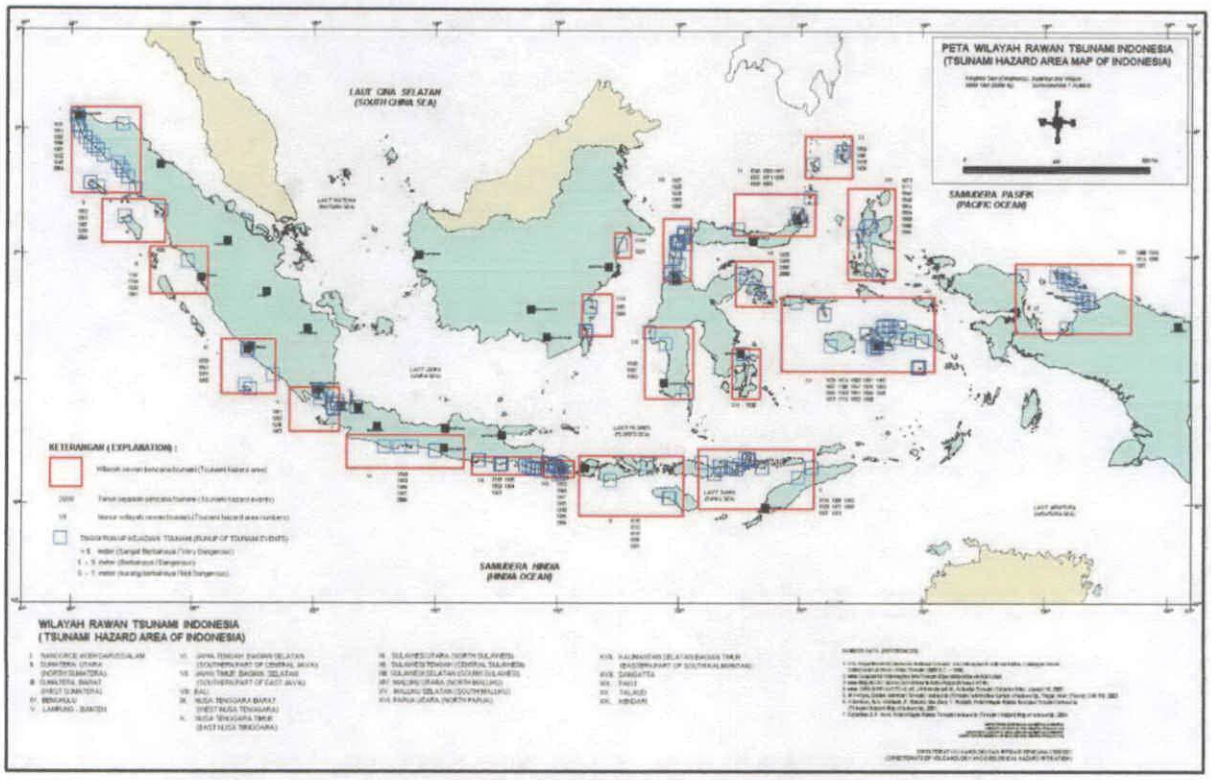

Gambar 2.5. Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Indonesia

Jumlah korban baik yang meninggal, hilang luka-luka dan pengungsi wilayah Kabupaten Pidie Jaya pasca tsunami di sajikan pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Korban (jiwa)			
		Meninggal	Hilang	Luka-Luka	Pengungsi (jiwa)
1	Bandar Baru	15	-	-	1.080
2	Pante Raja	191	9	-	3.022
3	Trienggadeng	310	35	-	1.668
4	Meureudu	11	-	-	110
5	Meurah Dua	1	-	-	175
6	Ulim	8	-	-	577
7	Jangka Buya	25	27	2	1.534
8	Bandar Dua	-	0	-	-
	Jumlah	**561**	**62**	**2**	**8.166**

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya, 2006

Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 menyebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan trauma untuk kembali ke tempat tinggal asalnya. akibatnya terjadi pengungsian yang jumlahnya mencapai 59.058 orang tersebar di sekitar 55 titik, baik yang merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya maupun penduduk yang mengungsi ke Kabupaten Pidie.

C. Banjir dan Erosi

Banjir merupakan Fenomena alam yang terjadi di kawasan yang banyak di aliri oleh aliran air sungai atau bisa juga di definisikan sebagai hadirnya air disuatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam hal ini Kabupaten Pidie Jaya sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, sehingga secara keseluruhan kawasannya rawan terhadap banjir. Berikut peta rawan banjir per wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.

C.1. Peta Rawan Banjir

C.1.1. Kecamatan Bandar Baru

Kecamatan Bandar Baru, ibukotanya Lueng Putu merupakan wilayah yang paling sering terdampak banjir. Dari 43 gampong (desa), terdapat 23 desa yang terdampak banjir (Lihat Gambar). Aliran air sungai bermula dari Abah Lueng sampai ke Blang Iboh. Kemudian, aliran air di wilayah Pueb Lueng Nibong berasal dari luapan sungai Teupin Raya (Kabupaten Pidie) Sampai Ke Meunasah Udeung.

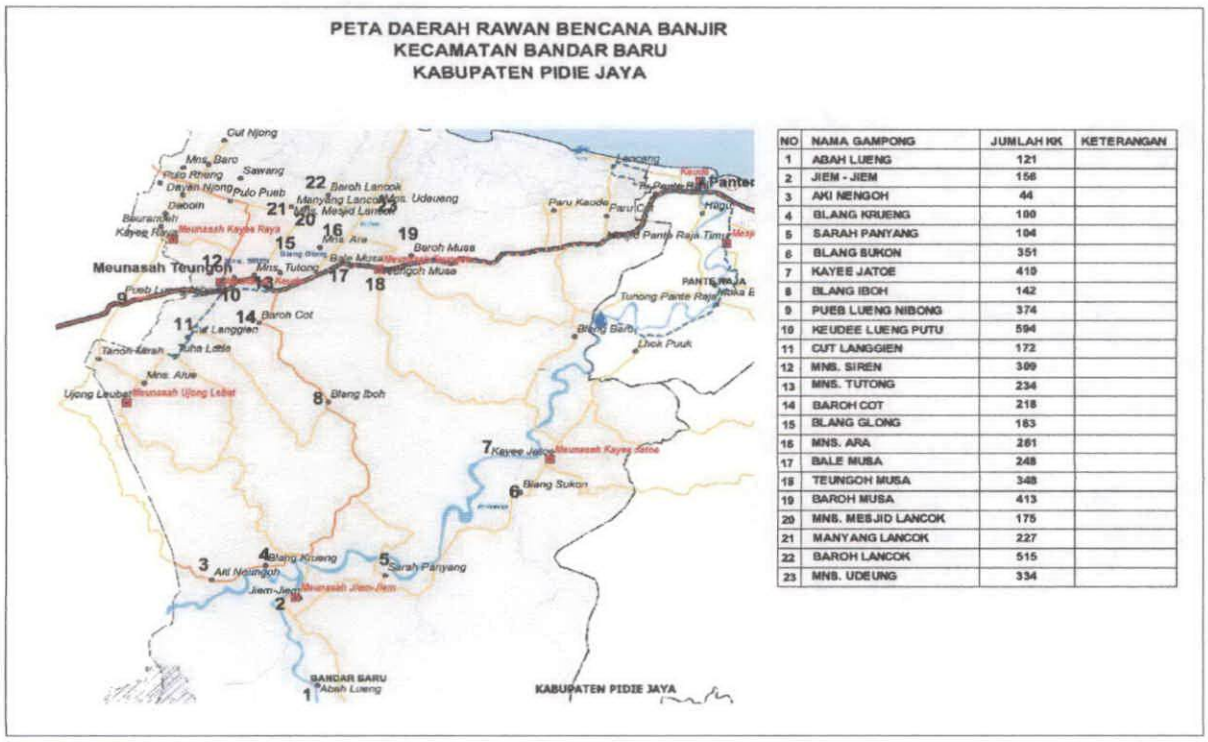

NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	ABAH LUENG	121	
2	JIEM - JIEM	158	
3	AKI NENGOH	44	
4	BLANG KRUENG	180	
5	SARAH PANYANG	104	
6	BLANG SUKON	351	
7	KAYEE JATOE	410	
8	BLANG IBOH	142	
9	PUEB LUENG NIBONG	374	
10	KEUDEE LUENG PUTU	594	
11	CUT LANGGIEN	172	
12	MNS. SIREN	309	
13	MNS. TUTONG	234	
14	BAROH COT	218	
15	BLANG GLONG	183	
16	MNS. ARA	261	
17	BALE MUSA	248	
18	TEUNGOH MUSA	348	
19	BAROH MUSA	413	
20	MNS. MESJID LANCOK	175	
21	MANYANG LANCOK	227	
22	BAROH LANCOK	515	
23	MNS. UDEUNG	334	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.6. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya

Langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Bandar Baru dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) Pembersihan Sungai (Krueng); dan 2) Peningkatan Tebing Sungai (Bronjong) dalam ini sangat di prioritaskan.

C.1.2. Peta Kecamatan Bandar Dua

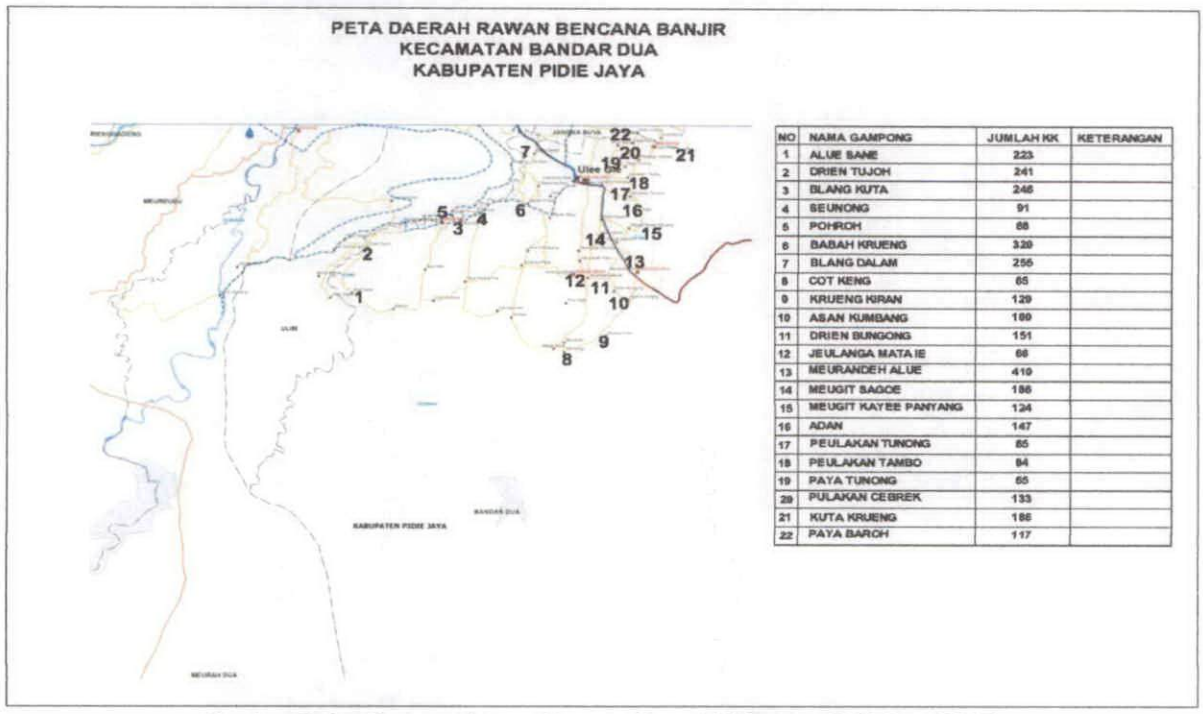

NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	ALUE SANE	223	
2	DRIEN TUJOH	241	
3	BLANG KUTA	246	
4	SEUNONG	91	
5	POHROH	88	
6	BABAH KRUENG	320	
7	BLANG DALAM	255	
8	COT KENG	65	
9	KRUENG KIRAN	129	
10	ASAN KUMBANG	180	
11	DRIEN BUNGONG	151	
12	JEULANGA MATA IE	68	
13	MEURANDEH ALUE	410	
14	MEUGIT SAGOE	186	
15	MEUGIT KAYEE PANYANG	124	
16	ADAN	147	
17	PEULAKAN TUNONG	85	
18	PEULAKAN TAMBO	84	
19	PAYA TUNONG	65	
20	PULAKAN CEBREK	133	
21	KUTA KRUENG	186	
22	PAYA BAROH	117	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.7. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan Bandar Dua dengan ibukota kecamatan adalah Ulee Glee yang terdiri dari atas 45 (empat puluh lima) Gampong. Di kecamatan tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) gampong yang sering dilanda musibah banjir. Banjir bermula dari aliran sungai di Alue Sane Sampai ke Paya Baroh. Adapun langkah-langkah pencegahan banjir di Kecamatan Bandar Dua dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) pembagunan talud; dan 2) pembagunan rongkong.

C.1.3. Peta Kecamatan Meurah Dua

Kecamatan Muerah Dua merupakan kawasan rawan banjir. daerah yang paling banyak terdapat banjir adalah Meunasah Jurong, dan Meunasah Bie. Sedangkan Pante Beureune merupakan dataran yang paling rendah di kecamatan Meurah Dua Sehingga hujan dengan curah rendah pun bisa mengakibatkan banjir. Langkah-langkah pencegahan Banjir di Kecamatan Meurah Dua antara lain: 1). menbudayakan kearifan lokal khusus untuk Gp. Pante beuruene; 2) menanam pohon; 3) penggarukan sungai; dan 4) peningkatan tebing sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.8.



NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	LHOK SANDENG	70	
2	BARAH MANE	73	
3	SEUNONG	277	
4	LANCOK	159	
5	MEUNASAH KULAM	148	
6	MEUNASAH TEUNGOH	163	
7	GENTENG	203	
8	MANYANG CUT	493	
9	MEUNASAH BIE	325	
10	MEUNASAH RAYA	277	
11	MEUNASAH LHOK	316	
12	BLANG CUT	117	
13	MEUNASAH MANCANG	113	
14	BEURINGIN	267	
15	MEUNASAH JURONG	338	
16	PANTE BEUREUNE	100	
17	BUANGAN	191	
18	LUENG BIMBA	279	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.8. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

C.1.4. Peta Kecamatan Meureudu

Kecamatan Muerudu merupakan Pusat Kota di Kabupaten Pidie Jaya, Letaknya strategis dan padat penduduk, hampir semua wilayahnya terdampak banjir. Wilayah yang paling besar terdampak adalah Meunasah Balek. Peta daerah rawan banjir di Kecamatan Meureudu dapat dilihat pada Gambar 2.9.



NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	LAMPOH LADA	96	
2	MULIENG	184	
3	DAYAH TUHA	190	
4	RUMPUEN	238	
5	MEUNASAH KULAM	163	
6	BULOH	95	
7	RAMBONG	419	
8	GRONG-GRONG	327	
9	KUTA TRIENG	172	
10	RHING KRUENG	194	
11	TEUPIN PERAHO	309	
12	RHING BLANG	218	
13	MEURAKSA	441	
14	BLANG AWE	284	
15	GAMPONG BLANG	89	
16	BEURAWANG	243	
17	DAYAH USEN	74	
18	KOTA MEUREUDU	233	
19	MEUNASAH BALEK	555	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.9. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Bandar Baru dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) memperbaiki saluran Air; 2) membuang sampah pada tempatnya; 3) menanam pohon; dan 4) Peningkatan Tebing Sungai.

C.1.5. Peta Kecamatan Ulim

PETA DAERAH RAWAN BENCANA BANJIR
KECAMATAN ULIM
KABUPATEN PIDIE JAYA

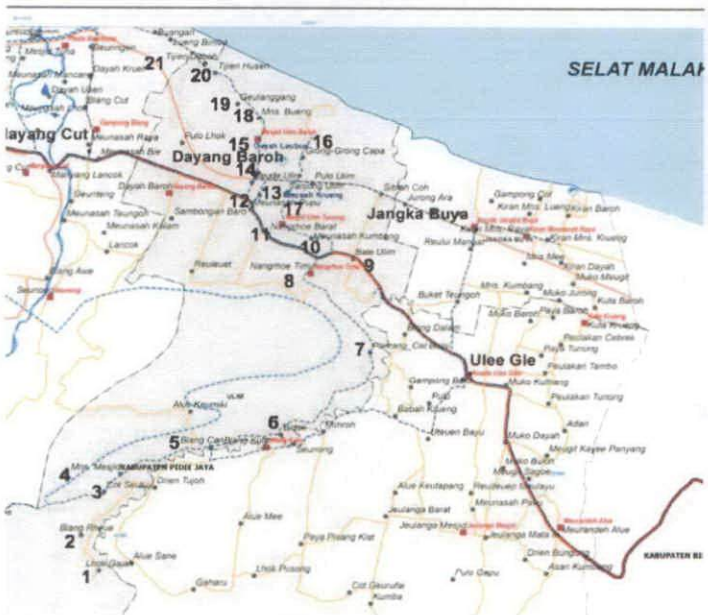

NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	LHOK GAJAH	29	
2	BLANG RHEUE	35	
3	COT SEUTUI	89	
4	MESJID ULIM BAROH	77	
5	BLANG CARI	58	
6	BIDOK	108	
7	PANTANG COT BALOI	132	
8	NANGGROE TIMU	285	
9	BALE ULIM	207	
10	MEUNASAH KUMBANG	137	
11	NANGGROE BARAT	291	
12	MEUNASAH PUPU	104	
13	MEUNASAH KRUENG	111	
14	KEUDE ULIM	102	
15	DAYAH LEUBUE	291	
16	GRONG-GRONG CAPA	347	
17	MESJID ULIM TUNONG	58	
18	MEUNASAH BUENG	132	
19	GEULANGGANG	303	
20	TIJIEN USEN	127	
21	TIJIEN DABOH	184	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.10. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan Gambar 2.10 dapat dilihat bahwa Kecamatan Ulim merupakan kecamatan yang sering dilanda banjir. Kecamatan dengan ibukotanya Ulim terdiri dari 30 desa dan 21 desa merupakan desa sering terkena dampak banjir. Banjir ini akibatkan oleh meluapya air sungai bersamaan dengan terjadinya pasang air laut. Langkah – langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Ulim dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) peningkatan tebing sungai; 2) pembangunan tanggul pemecah ombak; dan 3) perbaikan saluran air agar tidak terjadi genangan.

C.1.6. Peta Kecamatan Trienggadeng

Kecamatan Trienggadeng ibukotanya Trienggadeng terdiri dari 27 gampong, dan ada 13 desa yang terdampak banjir (Gambar 2.10). Namun banjir yang paling besar dampaknya terdapat di 3 (tiga) desa yakni; Reusep, Dee Puduek Tunong, dan Deah Teumanah. Langkah – langkah Pencegahan antara lain: 1) normalisasi sungai; dan 2) perbaikan waduk yang telah jebol/rusak.



NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	COT MAKASO	121	
2	MEUCAT PANGWA	156	
3	KUTA PANGWA	44	
4	MEE PANGWA	104	
5	DEAH PANGWA	351	
6	KEUDE TRIENGGADENG	410	
7	PAYA TRIENGGADENG	142	
8	SAGOE	374	
9	MEUNASAH MEE	504	
10	MESJID PUDUEK BAROH	172	
11	REUSEP	309	
12	DEE PUDUEK TUNONG	234	
13	DEAH TEUMAMAH	218	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.11. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

C.1.7. Peta Kecamatan Jangka Buya

Di Kecamatan Jangka Buya terdapat beberapa wilayah yang sering terdampak banjir diantaranya Gampong Mukoe Jurong, Gampong Krung Kumbang, Gampong Kiran Meunasah Krueng, Gampong Kiran Beurembang, Gampong Meunasah Mee. Kecamatan yang hanya terdiri dari 18 Gampong ini merupakan kecamatan di hulu sungai sehingga dampak banjir sering terjadi akibat hujan deras sehingga air sungai meluap dan kepermukiman penduduk. Oleh karena itu, langka-langka yang dapat dilakukan untuk pencagahan banjir tersebut antara lain: 1) menbuat bendungan; 2) menanam pohon; 3) melestarikan hutan; dan 4) mengeruk sungai.



NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	KUTA BAROH	108	
2	MUKO JURONG	75	
3	MUKO MEUGIT	76	
4	KIRAN DAYAH	106	
5	MEUNASAH KUMBANG	112	
6	MEUNASAH MEE	139	
7	KIRAN MNS. KRUENG	153	
8	KIRAN MNS RAYA	139	
9	KIRAN BAROH	167	
10	KIRAN MNS LUENG	102	
11	KIRAN MNS BEUREMBANG	134	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.12. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kec. Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya

C.1.8. Peta Kecamatan Panteraja



NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	LHOK PUUK	149	
2	BLANG BARO	156	
3	MEUNASAH TEUNGOH	199	
4	MUKA BLANG	233	
5	MEUNASAH MASJID	396	
6	HAGU	123	
7	KEUDE PANTERAJA	557	
8	TU PANTERAJA	227	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.13. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kec. Panteraja Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan Panteraja ibukotanya Panteraja terdiri 10 desa, yang terdampak banjir ada 8 desa. Yang paling berat terdampak banjir adalahdesa Meunasah Mesjid, Hagu dan Meunasah Teungoh. Banjir di sebabkan karena luapan air sungai bertemu dengan air laut pasang. Langkah – langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Panteraja dapat dilakukan antara lain: 1) perbaikan tanggul yang roboh sepanjang sungai yang mengaliri wilayah Panteraja; dan 2) perbaikan saluran pembuangan air di sekitar pemukiman penduduk.

C.2. Aliran Sungai

Kabupaten Pidie Jaya memiliki delapan ruas sungai besar yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya. Kedelapan sungai itu adalah Sungai Lueng Putu, Sungai Cubo, Sungai Trienggadeng, Sungai Beuracan-Pangwa, Sungai Meureudu, sungai Ulim, sungai Jeulanga, dan Sungai Kiran (untuk selanjutnya dalam kearifan lokal Pidie Jaya yang umumnya bersuku Aceh nama sungai dibahasakan sebagai "Krueng").

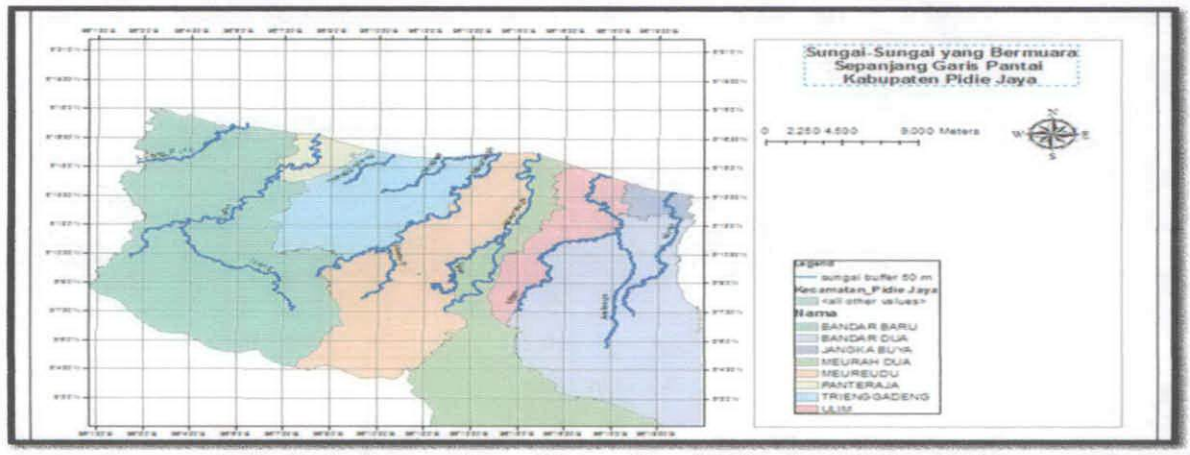

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.14. Peta delapan ruas sungai yang melintasi Pemukiman Penduduk di Pidie Jaya, yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya

Krueng Lueng Putu, adalah sungai yang memiliki hulu di daerah kabupaten tetangga Pidie, yang lintasan ruas sungainya sejajar/ di tepi jalan negara yang membelah ibukota Kecamatan Bandar Baru, Lueng Putu, ruasan sungai dilanjutkan pada desa Blang Glong dan berakhir di muara yang umumnya daerah tambak ikan di desa Udeng dan Baroh Lancok.

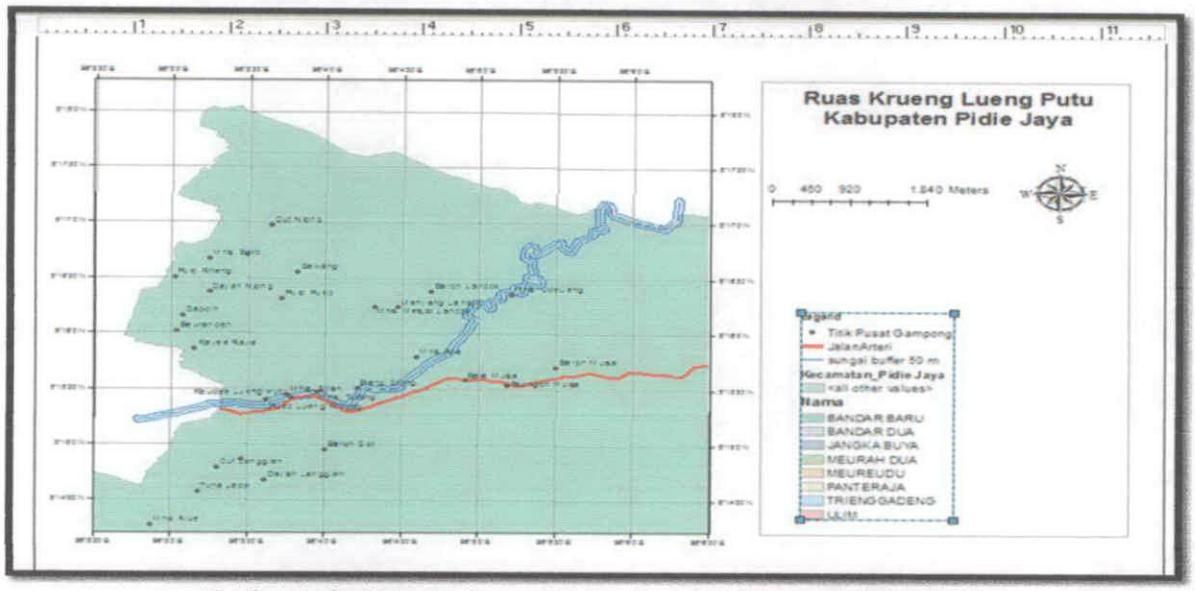

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.15. Sungai Lueng Putu yang melintasi pemukiman penduduk di Kecamatan Bandar Baru dan bermuara di garis pantai Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan Rekam Jejak Bencana pada September-Desember 2008, November 2009, November 2010, dan Desember 2011 yang berlanjut pada Januari 2013, luapan air sungai ini telah menyebabkan genangan setinggi 0 sd 40 cm di desa Blang Glong, Ara, Udeung, dan memberikan dampak erosi pengikisan yang cukup parah sepanjang jalan negara yang menghancurkan pengaman tebing sungai di beberapa titik Kota Lueng Putu pada tahun 2010 dan 2011. Penanganan secara alamiah dengan penanaman kembali rumpun bambu dan pembangunan tebing pengaman dinding sungai telah dilakukan pada tahun 2009, dan dilanjutkan kembali dengan rekonstruksi ulang dinding pengaman tebing sungai pada tahun 2012.

Krueng Cubo, adalah sungai yang memiliki hulu di daerah pegunungan selatan Kabupaten Pidie dan Pidie jaya. Sungai ini pada ruasan terakhirnya merupakan gabungan dua sungai besar yaitu Krueng Inong dan Krueng Agam, yang ruasan sungai melintasi pemukiman penduduk di dua kecamatan, yaitu mengairi ruas sungai di pemukiman Kecamatan Bandar Baru, dan Kecamatan Panteraja. Muara sungai ini berada di garis pantai Kecamatan Panteraja.

Pada Bagian hulu sungai, erosi yang diakibatkan aliran sungai Cubo mengakibatkan ancaman pada fasilitas Irigasi, pengikisan tebing di komplek perumahan/fasilitas militer yang dimiliki kompi C Senapan Bhirawa Yudha, yang terjadi pada musim penghujan tahun 2009, 2010, dan 2011. Pada bagian ruas di sekitar desa Blang Sukon dan Kayee Jatoe, juga terjadi erosi sungai yang luar biasa karena dipicu galian C yang eksplorasinya telah dihentikan pada tahun 2011. Desa Sarah Panyang, Blang Sukon, Kayee Jatoe adalah desa-desa yang mengalami pengikisan tebing sungai terparah selama tiga tahun terakhir (2009 s.d 2011) yang mengancam keberadaan perkebunan penduduk,

terutama Perkebunan Kakao. Aliran sungai ini juga membawa dampak erosi pada pondasi jembatan rangka Baja yang terdapat di dua titik yaitu titik Blang Krueng dan Kaye Jatoe.

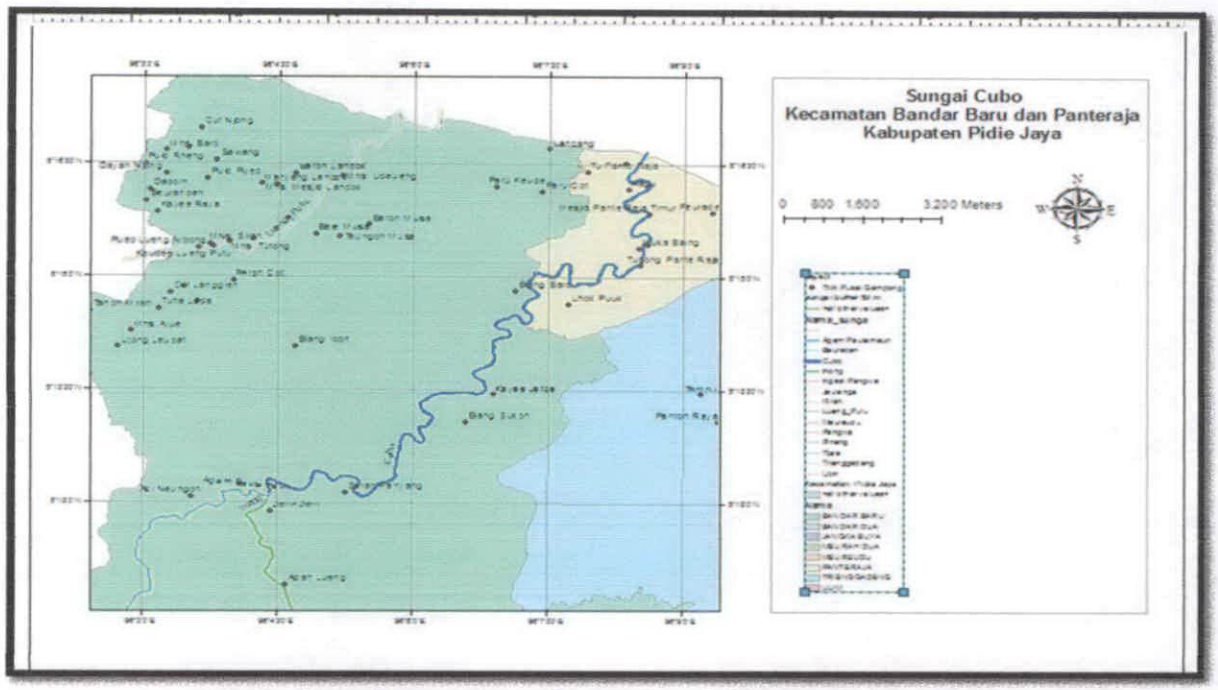

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.16. Sungai Cubo Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya.

Pada daerah Kecamatan Panteraja, sungai Cubo melalui beberapa desa mulai dari desa Lhok Puuk sampai ke muara sungai di Keude Panteraja (Gambar 2.16). Berdasarkan rekam jejak bencana tahun 2008 sampai dengan 2011, beberapa desa seperti Desa Mesjid, Muka Blang, Meunasah Teungoh, dan Hagu, pada musim penghujan sering terjadi genangan setinggi 50 cm pada badan jalan, Lapangan Bola Desa Mesjid dan pemukiman penduduk. Sementara erosi tebing sungai Cubo di desa Lhok Puuk telah mengancam fasilitas olahraga masyarakat berupa Lapangan Sepakbola Lhok Puuk. Khusus untuk desa Lhok Puuk, erosi diperparah dengan adanya pengambilan rumpun bambu yang berfungsi menyangga keutuhan tebing sungai.

Sungai Ketiga yang bermuara di garis pantai Pidie Jaya adalah Krueng Trienggadeng (Gambar 2.17). Sungai ini terbentuk seperti alur kecil yang sumber mata airnya adalah embung (daerah tangkapan air) di daerah Tampui dan Panton Raya. Panjang ruas sungai ini relatif pendek (sekitara 4500 meter), namun erosi yang ditimbulkan telah mengakibatkan kerusakan badan jalan kabupaten dan tebing pengaman jalan kabupaten di beberapa desa dalam kecamatan Trienggadeng, seperti Desa Meunasah Sagoe, Mee Peuduk dan Keude Trienggadeng.

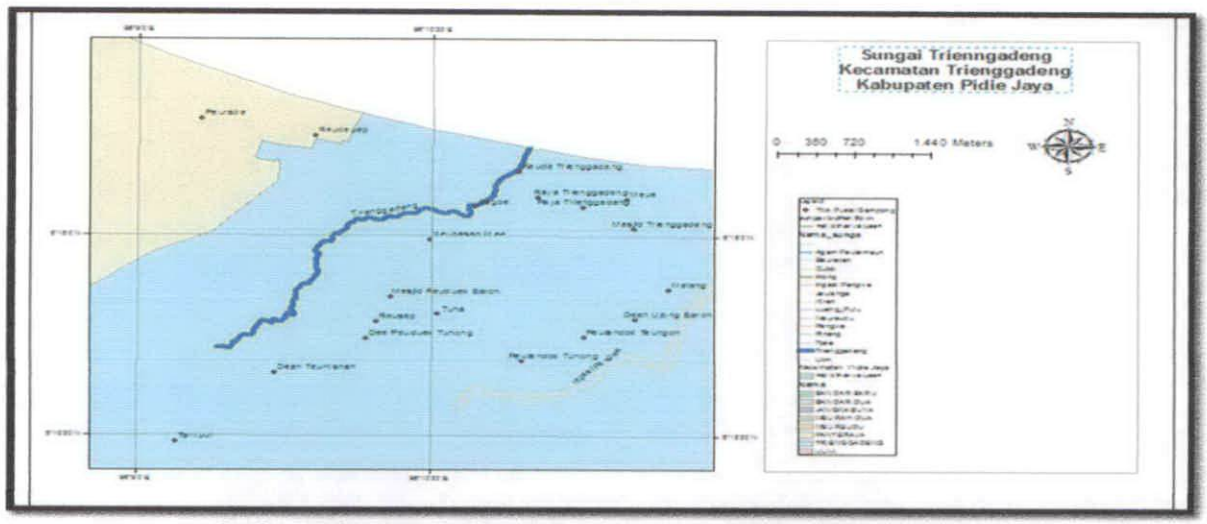

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.17. Sungai Trienggadeng, yang melintasi pemukiman penduduk di Kecamatan Trienggadeng dan bermuara di garis pantai Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Sungai Keempat adalah sungai Beuracan Pangwa (Gambar 2.18), sungai ini berasal dari pegunungan selatan Pidie Jaya dan menjadi tapal batas antara Kecamatan Trienggadeng dan Kecamatan Meureudu. Gerusan erosi yang diakibatkan aliran sungai Beuracan Pangwa in mengancam beberapa fasilitas mulai dari Bangunan Irigasi Alue Demam, Jembatan Gantung di Desa Lampoh Lada dan Buloh, Jembatan Beton di Jalan Negara di perbatasan Beuracan Pangwa. Aliran sungai juga mengancam kebun, pemukiman dan sawah penduduk di dua Kecamatan. Di Kecamatan Trienggadeng Desa Buloh, Meucat Panwa, Deah Pangwa, dan di Kecamatan Meureudu seperti Desa Rumpun, Grong-grong Krueng, Rambong, Kuta Trieng, Teupin Peuraho,sampai dengan Rhing Krueng. Muara sungai ini bersisian dengan tiga desa yaitu desa Rhing Krueng, Meuraksa, dan Rhing Blang di Kecamatan Meureudu.

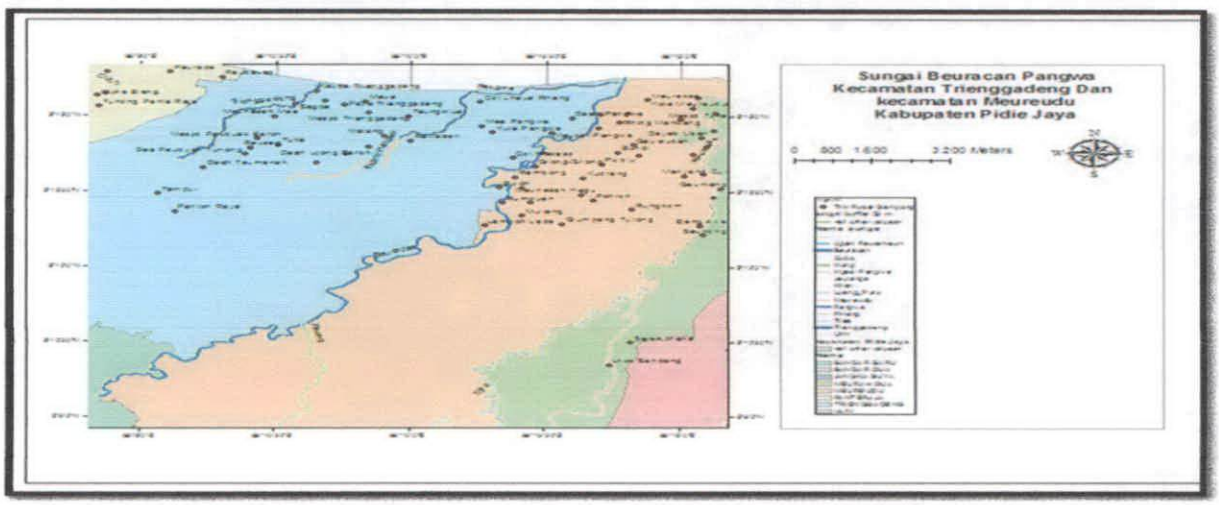

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.18. Sungai Beuracan Pangwa Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Sungai Kelima yang melintasi Pidie Jaya adalah Sungai Meureudu. Krueng Meureudu adalah sungai yang termasuk dalam empat sungai beraliran deras dibagian timur Kabupaten Pidie Jaya. Empat sungai di bagian Barat, seperti Putu, Cubo, Trienggadeng, dan Beuracan, memiliki ferhang (kemiringan aliran) yang lebih rendah dibanding dengan keempat sungai di Bagian Timur Pidie Jaya. Pada 19 Desember 2009, pukul 21.00 WIB, keempat sungai di bagian Timur Pidie Jaya ini pernah mengakibatkan bencana banjir besar yang mengenang 40 (empat puluh) desa, yang meliputi desa dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, dan Jangka Buya (Gambar 2.19).



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 2.19. Sungai Meureudu Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

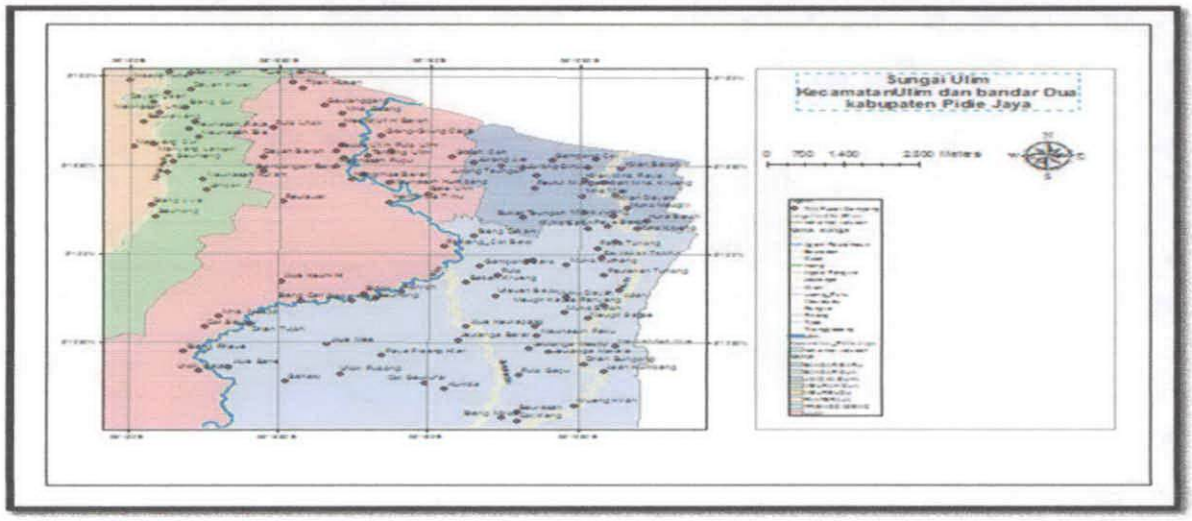

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 2.20. Sungai Ulim dan Bandar Dua Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Ulim dan Bandar Dua Serta Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Ulim dan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Krueng Jeulanga adalah Sungai yang memiliki hulu di daerah selatan pegunungan Pidie Jaya yang memiliki alur akhir bergabung dengan ruas sungai Ulim, pertemuan ruas sungai Jeulanga dan Ulim ini berimpitan di desa Babah Krueng, untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.

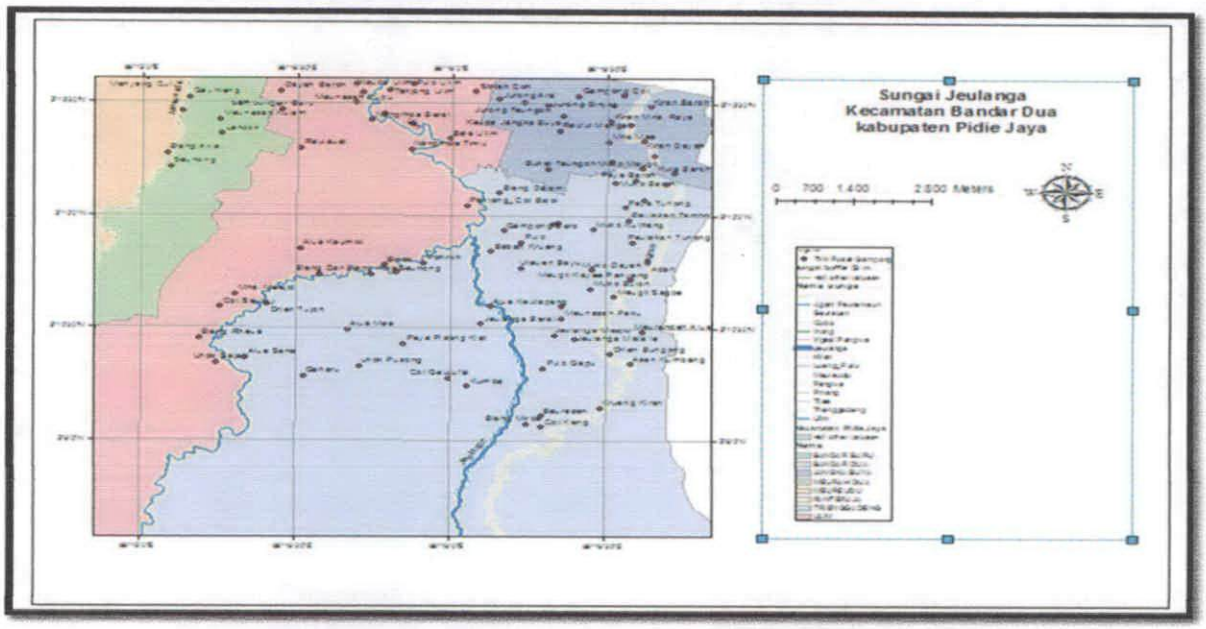

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 2.21. Sungai Jeulanga Yang Menjadi Ruas Anakan Dari Sungai Ulim Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Bandar Dua dan Ruas Akhirnya Bergabung Dengan Ruas Krueng Ulim di Desa Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Krueng Kiran adalah sungai yang memiliki ruas hulu di pegunungan selatan kecamatan Bandar Dua dan bermuara ke garis pantai Kecamatan Jangka Buya, untuk ebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.22.

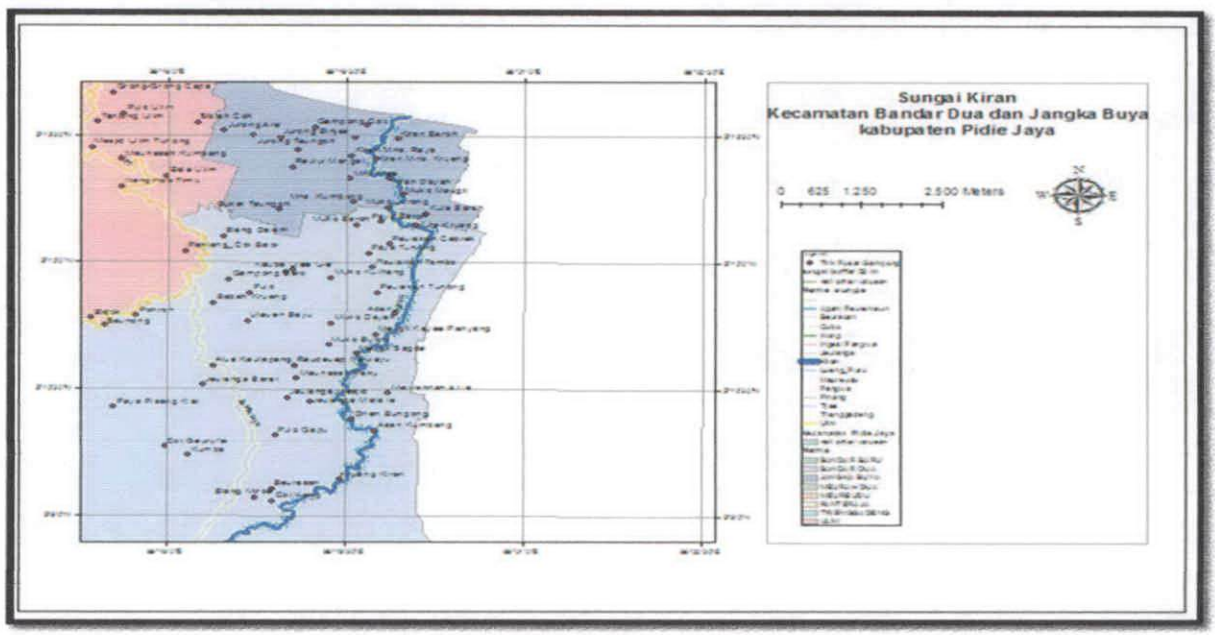

Sumber : BPBD Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 2.22. Sungai Kiran Yang Memiliki Ruas Hulu di Pegunungan Selatan Kecamatan Bandar Dua dan Bermuara ke Garis Pantai Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya

3. Letusan Gunung Berapi

Walaupun Pidie Jaya tidak memiliki gunung berapi yang aktif, namun dengan adanya Gunung Peut Sagoe yang berada 1 km dari perbatasan Kecamatan Meurah Dua (Pidie Jaya) dengan Kecamatan Geumpang (Pidie), telah memberikan ancaman potensi banjir lahar dan debu panas. Tercatat pada tahun 1974 Gunung Berapi Peut Sagoe yang berada pada Kabupaten tetangga Pidie Jaya (Kabupaten Pidie) pernah meletus dan mengirimkan lahar sampai memasuki kawasan Pidie Jaya sejauh 35 Km, mengakibatkan banyaknya endapan lahar yang menggenangi lembah Blang Raweu, sehingga menimbulkan endapan komposit mineral andesit yang cukup banyak. Sementara debu dan awan panas yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kenyamanan pada penduduk yang berada di beberapa desa seperti Sarah Mane, Lhok Sandeng di Kecamatan Meurah Dua, dan Lhok Gajah di Kecamatan Ulim.

4. Tanah Longsor

Tanah Longsor adalah fenomena geologis yaitu pergerakan tanah, misalnya jatuhnya bebatuan, aliran reruntuhan, yang bisa terjadi di lepas pantai, pinggir pantai dan di daratan. Klasifikasi gerakan tanah di Kabupaten Pidie Jaya antara lain: Menengah: Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim. Rendah : Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Pante Raja, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim. Tinggi: Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Meurah Dua.

5. Angin Kencang/Puting Beliung

Kondisi kebencanaan angin puting beliung dipicu oleh kondisi pertemuan kondisi udara kering di pesisir lautan utara Pidie Jaya dengan kondisi kelembaban udara di daerah pegunungan bagian selatan. Catatan menunjukkan angin puting beliung tercatat pernah melanda daerah Ujong Leubat, Paru di Kecamatan Bandar Baru, kemudian daerah Peulandok Tengoh Kecamatan Trienggadeng. Kemudian daerah Jangka Buya, di Keudai Jangka Buya dan Jurong tengoh.

Klasifikasi angin puting beliung yang ada di Kecamatan Pidie Jaya meliputi: a). Bahaya Menengah: Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru; b). Bahaya Rendah: Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Bandar Baru; c). Bahaya Tinggi: Kecamatan Ulim, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru.

6. Kebakaran

Pidie Jaya sebagai kabupaten pemekaran yang PDRB nya 68 persen tergantung dari Sektor Pertanian, umumnya memiliki pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan bangunan yang mudah terbakar. Kota-kota di Kecamatan yang menjadi pasar lokal bagi penduduk sekitar

juga memiliki bangunan pertokoan yang berbahan kayu (semi permanen). Kebakaran besar yang terjadi dalam PB di Pidie Jaya adalah pada tanggal 8 Agustus 2012 yang menghanguskan 21 rumah penduduk di Kecamatan Panteraja.

7. Abrasi

Pengembangan budidaya di sepanjang pantai Kabupaten Pidie Jaya, kurang memperhatikan wilayah sempadan pantai, dan penebangan hutan bakau secara liar. Kondisi ini akan menyebabkan pengikisan pantai yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Abrasi pantai terutama terjadi pada wilayah sempadan pantai yang telah terpakai untuk kegiatan budidaya (pertambakan, industri pembuatan garam, industri arang kayu). Selain terjadi abrasi, sebagian wilayah di pantai Kabupaten Pidie Jaya telah terkena air laut (intrusi air laut) terutama di kecamatan Meureudu, Trienggadeng, Panteraja serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Pengaruh air laut ini telah merambah ke arah tengah, yang salah satunya diakibatkan terjadinya perambahan hutan bakau.

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Potensi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi dan karakteristik pembangunan penduduk dalam suatu daerah. Pembangunan bidang kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan dilakukan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui keluarga sejahtera dan mandiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2010 yaitu 133.918 jiwa meningkat sampai tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya menjadi 148.719 jiwa, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.8 di bawah memperlihatkan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bandar Baru, yaitu 35.052 jiwa, sedangkan Kecamatan Panteraja adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu dengan jumlah penduduk 8.426 jiwa.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Dari Tahun 2010 - 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Meureudu	18.521	18.918	19.279	19.761	20.134	20.567
2.	Meurah Dua	10.164	10.382	10.579	10.844	11.048	11.287
3.	Bandar Dua	23.825	24.337	24.801	25.422	25.901	26.461
4.	Jangka Buya	8.776	8.965	9.136	9.364	9.541	9.748
5.	Ulim	13.432	13.721	13.983	14.333	14.604	14.918
6.	Trienggadeng	20.048	20.477	20.867	21.389	21.793	22.260
7.	Pante Raja	7.588	7.751	7.898	8.096	8.249	8.426
8.	Bandar Baru	31.564	32.241	32.856	33.678	34.314	35.052
	Jumlah	**133.918**	**136.792**	**139.399**	**142.887**	**145.584**	**148.719**

Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya 2016

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya sempat menurun pada tahun 2005 dikarenakan musibah gempa bumi dan tsunami. Setelah tahun 2005, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya berfluktuasi antara 2,15 tahun 2011 menurun menjadi 1,91 tahun 2012 dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 2,50 sedangkan tahun 2014 menurun lagi menjadi 1,89 sedangka pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk Pidie Jaya sebesar 2,15 persen sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)					Rata-rata pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Meureudu	2,14	1,91	2,50	1,89	2,15	2.118
2	Meurah Dua	2,14	1,90	2,50	1,88	2,16	2,116
3	Bandar Dua	2,15	1,91	2,50	1,88	2,16	2,120
4	Jangka Buya	2,15	1,91	2,50	1,89	2,16	2,122
5	Ulim	2,15	1,91	2,50	1,89	2,16	2,122
6	Trienggadeng	2,14	1,90	2,50	1,89	2,15	2,116
7	Pante Raja	2,15	1,90	2,51	1,89	2,15	2,120
8	Bandar Baru	2,14	1,91	2,50	1,89	2,15	2,118
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten		2,15	1,91	2,50	1,89	2,15	2.12

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2016

Tabel 2.9 memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk hampir merata diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Pidie Jaya yaitu sebesar 2,12 persen, angka ini tentu masih diatas angka pertumbuhan penduduk yang diharapkan secara nasional yaitu sebesar 2,00 persen.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk dan Persentase Jumlah Jiwa/KK
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Prosentase Jiwa/KK
1	Meureudu	124,79	20.567	164,81	5.532	3,72
2	Meurah Dua	287,07	11.287	39,32	3.103	3,64
3	Bandar Dua	174,32	26.461	151.80	6.175	4,29
4	Jangka Buya	9,35	9.748	1.042,57	2.488	3,92
5	Ulim	41,75	14.918	357,32	3.813	3,91
6	Trienggadeng	79,37	22.260	280,46	6.048	3,68
7	Pante Raja	15,00	8.426	561,73	2.049	4,11
8	Bandar Baru	220,47	35.052	158,99	8.813	3,98
Jumlah		**952,12**	**148.719**	**148.719**	**38.021**	**3,91**

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2016

Sebagaimana Tabel 2.10 diatas, Kepadatan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015 sebesar 156,99 jiwa/km^2 yang menggambarkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya masih belum padat. Sedangkan prosentase jumlah jiwa/KK adalah 3.91 persen, Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jangka Buya, ini disebabkan karena luas wilayah yang tidak terlalu besar, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Meurah Dua karena luas wilayahnya merupakan terbesar dari 7 kecamatan lainnya. Untuk kecamatan Meureudu yang merupakan ibu kota Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kepadatan penduduk 164,81 jiwa/km^2.

2.1.2.3. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya sampai akhir tahun perencanaan 2031 dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk setiap kecamatan agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Dasar pertimbangannya adalah bahwa setiap kecamatan memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda dan terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perkembangan penduduk wilayah tersebut. Model yang digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk disesuaikan dengan karakteristik perkembangan penduduk setiap kecamatan. Teknik proyeksi yang digunakan adalah polinomial. Dengan demikian jumlah penduduk akan membawa konsekuensi bertambahnya penduduk.

Dengan menggunakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya sebesar 0,83 persen pertahun, maka pada akhir tahun perencanaan jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 288.120 jiwa. Jumlah penduduk hasil proyeksi pada tahun-tahun perencanaan akan menjadi dasar dalam penentuan jumlah sarana dan utilitas wilayah perencanaan, sehingga pemenuhan sarana-sarana akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Tabel 2.11
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Sampai Tahun 2035 Dengan Menggunakan Metoda Proyeksi Polinomial (Jiwa)

Kecamatan	Proyeksi Penduduk				
	2015	2020	2025	2030	2035
Meureudu	23.321	27.192	31.706	36.969	43.106
Meurah Dua	12.333	14.380	16.767	19.551	22.796
Bandar Dua	27.333	31.870	37.161	43.329	50.522
Jangka Buya	10.022	11.686	13.625	15.887	18.525
Ulim	16.277	18.979	22.129	25.803	30.086
Trienggadeng	22.495	26.229	30.583	35.660	41.580
Pante Raja	8.606	10.035	11.700	13.643	15.907
Bandar Baru	35.489	41.380	48.249	56.259	65.598
JUMLAH	**155.826**	**181.751**	**211.922**	**247.101**	**288.120**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya (diolah), 2017

2.1.2.4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Sejak tahun 1990, angka IPM telah menjadi salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu bangsa. Seperti yang dinyatakan dalam laporan yang dirilis oleh UNDP. Dalam laporan tersebut, tercakup 187 negara yang sudah terukur capaian IPM beserta semua komponen pembentuknya. Secara internasional, terdapat pembagian kelompok negara-negara berdasarkan nilai IPM nya, yaitu sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Di kawasan regional negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, hanya dua negara yang berhasil menduduki peringkat dalam 50 tertinggi di dunia atau kelompok negara dengan IPM tertinggi pada tahun 2013. Mereka adalah Singapura (rank 9) dan Brunai Darussalam (rank 30). Sementara dua negara tetangga lainnya, yaitu Malaysia dan Thailand tergolong ke dalam kelompok negara ber-IPM tinggi, dengan peringkat masing-masing yaitu 62 dan 89. Tertinggal cukup jauh dan berada pada kelompok negara dengan nilai IPM menengah, Indonesia pada tahun 2013 hanya mampu mencapai prestasi IPM di peringkat 108 dari 187 negara. Namun demikian, hasil tersebut telah lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Komponen IPM Indonesia sejatinya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi belum mampu meningkatkan IPM secara umum. Terbukti dari masih bertahannya IPM pada kategori menengah, belum mampu naik kelas pada kategori IPM tinggi. Dari sisi level maupun peringkat, nampaknya Indonesia belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Namun sejarah pernah mencatat, kecepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia patut diapresiasi karena Indonesia masuk dalam World's Top Movers in HDI improvement pada periode 1970-2010. Selain dalam pencapaian HDI, Indonesia juga masuk dalam peringkat 10 besar pencapaian Non-income HDI dan Income.

Perspektif baru yang dibangun oleh dunia internasional adalah kaitan pembangunan manusia dengan aspek kerentanan. Masyarakat dengan pembangunan manusia yang lebih tinggi terutama dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik lebih tahan banting dibandingkan dengan mereka yang kekurangan gizi dan rendah pendidikannya. Sehingga masyarakat yang rentan ini akan menghadapi kesulitan dalam mengubah nasibnya ketika terjadi gunjangan maupun bencana. Pendekatan berbasis resiko akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan dalam hal pengelolaan resiko. Sama pentingnya dengan pendekatan pembangunan manusia yang membentuk kekuatan individu maupun masyarakat dalam upaya mengurangi kerentanan dan membangun ketahanan secara sosial maupun ekonomi.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, dalam rangka melihat kemajuan pembangunan dalam jangka menengah, publikasi ini

dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM pada tahun 2009-2013.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pidie Jaya terus mengalami kemajuan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2004 hingga 2013. IPM Pidie Jaya telah mengalami kenaikan dalam rentang waktu satu dekade. Capaian IPM yang terus meningkat tersebut merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Pidie Jaya dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah semakin membaik. Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikelompokkan menjadi kategori tinggi (IPM > 80), kategori menengah atas (66 < IPM < 80), kategori menengah bawah (50 < IPM < 66), dan kategori rendah (IPM < 50).

Sejak saat itu, dengan berkembangnya pembangunan di bidang pendidikan (bangunan sekolah baru, dan sebagainya), bidang kesehatan (rumah sakit dan fasilitas kesehatan baru dan lebih memadai) serta perbaikan dan kemajuan beberapa sektor bidang ekonomi (perdagangan, hotel, restoran dan sebagainya), Selain IPM, indikator lainnya yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia adalah reduksi *shortfall*.

Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal. Indikator ini digunakan karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM di suatu wilayah pada satu waktu, melainkan juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Dalam rangka mencapai nilai ideal IPM yaitu 100, tentunya dibutuhkan kecepatan peningkatan IPM. Semakin tinggi nilai reduksi shortfall maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal.

Sesuai dengan rekomendasi PBB melalui UNDP, terdapat tiga komponen utama dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, yaitu umur dan kesehatan (Angka Harapan Hidup), pengetahuan (Angka Melek Huruf), dan standar hidup layak (Pengeluaran Per kapita). Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah indikator yang menggambarkan keadaan manusia pada suatu daerah dalam aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi AHH maka semakin tinggi kemampuan untuk hidup lebih lama.

Pencapaian nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2015 adalah 70,49 termasuk kedalam kategori menengah atas (66 < IPM < 80). Sedangkan IPM Provinsi tahun 2015 sebesar 69,45, Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya semakin membaik. Manusia yang sehat adalah investasi penting bagi kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kesehatan yang terjamin dari kecukupan rasio tenaga kesehatan versus jumlah penduduk serta memadainya

fasilitas kesehatan sampai di tingkat terkecil dan daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga harus menggalakkan program hidup sehat untuk pencegahan penyakit melalui penyuluhan dan sosialisasi dalam menjaga lingkungan masyarakat senantiasa bersih.

Aspek berikutnya yang menjadi tolak ukur pembangunan manusia adalah aspek pendidikan. Pada IPM, aspek ini dicerminkan oleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Secara nasional, pemerintah mengklaim telah berhasil menekan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas selama periode tahun 2010-2014. Hal ini diperlihatkan dari tercapainya target tahunan sesuai yang dicanangkan dalam RPJMN. Bahkan pada tahun 2012, Indonesia memperoleh penghargaan dari badan yang membawahi pendidikan dan kebudayaan di PBB, yaitu UNESCO atas keberhasilan meminimalisir angka buta aksara penduduk, salah satunya melalui program taman bacaan masyarakat (kemdiknas.go.id, 2014). Sementara itu, kabar baik tentang pemberantasan buta huruf juga terjadi sampai ke tingkat Kabupaten.

Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Artinya telah terjadi penurunan Angka Buta Huruf (ABH) penduduk usia 15 tahun ke atas, jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang telah terbebas dari buta aksara tercatat sebesar 93,90 persen. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi sebanyak 96,32 persen atau hanya sebanyak 3,68 persen penduduk pada kelompok umur tersebut yang belum mampu membaca.

Selain AMH, komponen pendidikan lain yang digunakan untuk dalam penghitungan IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (MYS). MYS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Variabel pembentuk komponen MYS ini adalah angka partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang pernah dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Di Kabupaten Pidie, angka MYS ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.12
Perbandingan IPM Kabupaten Pidie Jaya dengan IPM Provinsi Aceh Tahun 2010 - 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pidie Jaya	68,38	68,69	68,90	69,26	69,89	70,49
2	Provinsi	67,09	67,45	67,81	68,,30	68,81	69,45

Sumber : Analisis IPM Kab. Pidie Jaya Tahun 2016.

Aspek terakhir yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak yang digambarkan melalui indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Purchasing Power Parity – PPP). Indikator ini menunjukkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk konsumsi barang maupun jasa. Gambar 2.22

merupakan gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2010-2015 dibandingkan dengan Indek Pembangunan manusia (IPM) Aceh pada tahun yang sama, IPM Kabupaten Pidie Jaya masih lebih baik selama kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.12 diatas dan gambar 2.23 dibawah.

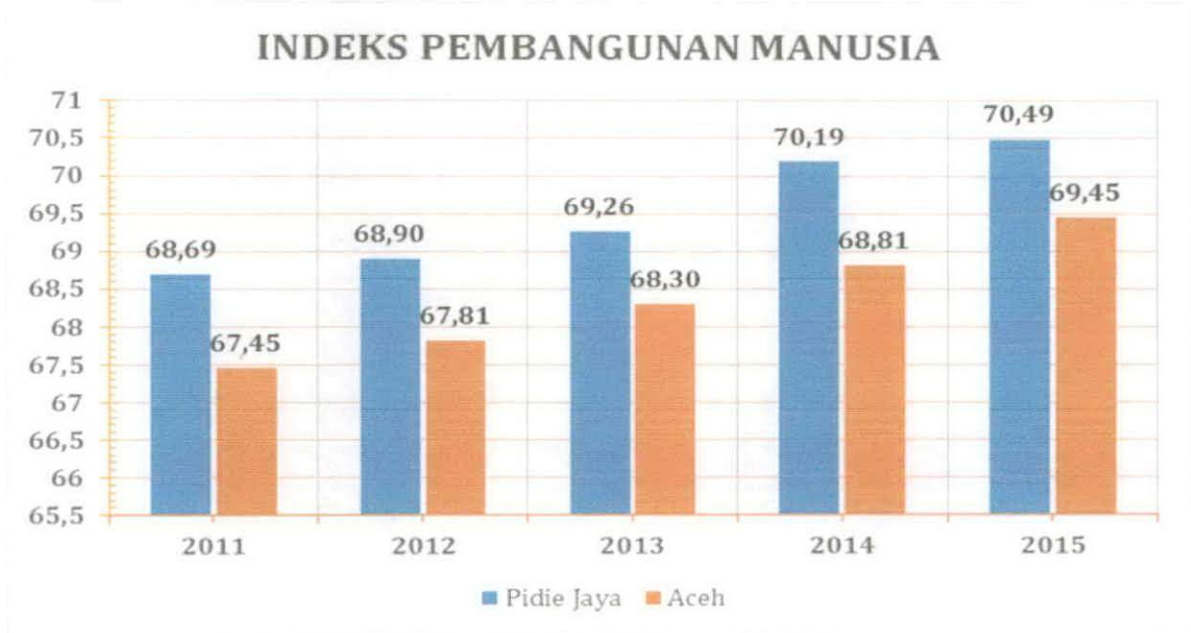

Sumber : Analisis IPM Kab. Pidie Jaya Tahun 2016.

Gambar 2.23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011 – 2015

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Pemerataan Ekonomi

Berbagai indikator penting guna melihat tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya seperti Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hasil maksimal perlu percepatan pertumbuhan sektor-sektor pendukung perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan dan energi, industri pengolahan, konstruksi/bangunan perdagangan, transportasi dan jasa-jasa.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satunya indikator makro yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah laju pertumbuhan PDRB. Pada periode tertentu selama 3 (tiga) tahun atau lebih, semakin lama tinjauan perkembangan ekonomi suatu daerah semakin baik dan hasil proyeksi akan tepat. Struktur ekonomi Kabupaten Pidie Jaya relatif tidak mengalami perubahan, ada beberapa sektor utama yang mendorong pertumbuhan perekonomian adalah terutaman sektor pertanian, industri non migas dan sektor jasa-jasa.

Pada tahun 2011 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,13 persen meningkat cukup tinggi sampai 4,55 persen pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan PDRB hanya sebesar 3,57 persen dalam hal ini terjadi perlambatan yang disebabkan oleh melemahnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang berperan sebagai lapangan usaha dengan kontribusi terbesar trehadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya, melemahnya pertumbuhan lapangan usaha tersebut diakibatkan terjadinya bencana kekeringan dan banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2014, pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB Kabupaten Pidie Jaya sangat menggembirakan yaitu sebesar 4,98 persen walaupun angka ini masih sangat sementara, untuk lebih jelasnya seperti disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pidie Jaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 - 2015 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014*	2015**
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**3.92**	**4.13**	**4.05**	**1.58**	**4.97**
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4..41	4.72	3.99	1.23	5.39
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-0.28	-0.25	4.68	2.44	-1.31
	3. Perikanan	2.02	1.49	4.31	3.67	3.94
B	**Pertambangan dan Penggalian**	**3.68**	**3.79**	**2.77**	**2.28**	**2.45**
C	**Industri Pengolahan**	**3.16**	**3.68**	**4.42**	**4.97**	**5.26**
	1. Industri Pengolahan Migas	-	-	-	-	-
	2. Industri Pengolahan Non Migas	3.16	3.68	4.42	4.97	5.26
D	**Pengadaan Listrik dan Gas**	**6.68**	**5.87**	**4.49**	**6.01**	**6.91**
E	**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang**	**4.01**	**4.81**	**3.22**	**2.94**	**4.04**
F	**Konstruksi**	**5.50**	**6.97**	**6.70**	**5.34**	**6.18**
G	**perdagangan Besar dan Encera; Respirasi Mobil dan sepeda Motor**	**3.43**	**3.91**	**4.54**	**4.86**	**4.98**
H	**Transportasi dan Pergudangan**	**5.17**	**4.30**	**2.63**	**3.46**	**3.85**
I	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	**4.64**	**4.53**	**3.81**	**4.42**	**5.62**
J	**Informasi dan Komunikasi**	**3.66**	**3.51**	**4.35**	**4.87**	**4.54**
K	**Jasa Keuangan dan Asuransi**	**6.62**	**47.25**	**80.20**	**95.33**	**28.97**
L	**Real Estate**	**3.77**	**3.90**	**4.09**	**4.31**	**4.01**
M, N	**Jasa Perusahaan**	**3.59**	**2.53**	**2.23**	**4.38**	**2.59**
O	**Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**	**4.69**	**4.34**	**5.44**	**5.89**	**4.06**
P	**Jasa Pendidikan**	**5.23**	**3.46**	**6.52**	**5.99**	**4.26**
Q	**Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial**	**4.96**	**5.82**	**4.66**	**5.24**	**6.75**
R,S,T,U	**Jasa Lainnya**	**4.78**	**2.70**	**3.32**	**3.51**	**3.9**
Produk Domestik Regional Bruto		**4.13**	**4.33**	**4.55**	**3.57**	**4.98**

Sumber: Pidie Jaya dalam Angka 2016
*Keterangan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi di Kabupaten Pidie Jaya dimotori oleh kegiatan di sektor pertanian, artinya sebagian besar penduduk Kabupaten Pidie Jaya menggantungkan nafkah kehidupannya pada hasil kegiatan pertanian

secara luas seperti bertani padi, palawija, buah-buahan, beternak, berkebun, budidaya ikan, menangkap ikan di laut dan membudidayakan kehutanan. Hal ini sesuai dengan keadaan geografis dari Kabupaten Pidie Jaya yang terletak di dataran rendah dan pesisir laut.

2.2.1.2. Tingkat Inflasi

Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan perkapita yang diperoleh dari aktivitas yang mereka lakukan. Salah satu faktor yang juga sangat menentukan kualitas kesejahteraan mereka adalah seberapa besar tingkat kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang harus dibeli setiap harinya. Semakin tinggi fluktuasi kenaikan harga-harga barang sembako, misalnya, akan mengakibatkan kualitas kesejahteraan hidup menjadi menurun, khususnya bagi mereka yang tergolong kedalam kelompok berpendapatan tetap seperti PNS, atau yang berpendapatan tidak pasti seperti buruh, pekerja lepas/harian, tukang becak, supir angkutan dan lain-lain. Oleh karenanya tingkat inflasi juga menjadi salah satu ukuran dalam menilai kinerja ekonomi makro, baik secara nasional maupun daerah (regional).

Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya saat ini mengikuti laju inflasi kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe. Prediksi laju inflasi Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan berkisar 8,18 persen (antara 7,83-8,53) pada tahun 2014. Inflasi Aceh (year to year) mencapai 8,02 persen, secara umum penyebab utama inflasi Aceh berada pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 5,21 persen. Sedangkan bahan makanan menduduki urutan ke dua yaitu 4,37 persen dan disusul dengan kelompok perumahan, air, listrik dan kelompok bahan bakar lainnya sejumlah 0,64 persen. Umumnya perngaruh naiknya harga beberapa kelompok komoditi disebabkan tidak stabilnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan cendrung terus naik, mengakibatkan beberapa komoditi ikut naik. Besaran inflasi yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dapat dicermati dari angka inflasi yang terjadi di daerah yang terdekat yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Provinsi Aceh, secara rinci disampaikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Tingkat Inflasi di Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Propinsi Aceh Bulan November dan Desember Tahun 2014

Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan (2013-2014)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Kota Banda Aceh	4,64	3,32	2,17	6,39	7,83	1,44
Kota Lhokseumawe	7,19	3,55	3,37	8,27	8,53	0,26
Kabupaten Pidie Jaya*	5,92	3,44	3,01	7,22	8,18	0,96

Sumber: BPS Aceh dan Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2015, (Data diolah)
**) Angka Sementera*

2.2.1.3. Pendapatan per Kapita

Pada tahun 2010 pendapatan regional per kapita penduduk Pidie Jaya berdasarkan harga berlaku tercatat sebesar 13,19 juta rupiah mmeningkat menjadi 17,57 juta per tahun pada tahun

2015, atau mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen dibandingkan tahun 2008 yang nilainya mencapai 8,720 juta rupiah. Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan per kapita dari PDRB harga konstan penduduk Pidie Jaya pada tahun 2010 sebesar 13,19 juta rupiah meningkat menjadi 14,66 juta pada tahun 2015 yang berarti selama kurun waktu lima tahun pendapatan perkapita rata-rata mengalami peningkatan yang cukup berarti. Perkembangan pendapatan perkapita penduduk Pidie Jaya dapat dilihat Tabel 2.15 dan Gambar 2.24.

Tabel 2.15
Pendapatan Regional Per Kapita Tahun 2010 – 2015 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Perkapita ADHB	13,19	13,92	14,70	15,52	16,44	17,57
2	PDRB Perkapita ADHK	13,19	13,44	13,76	14,04	14,27	14,66

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2015

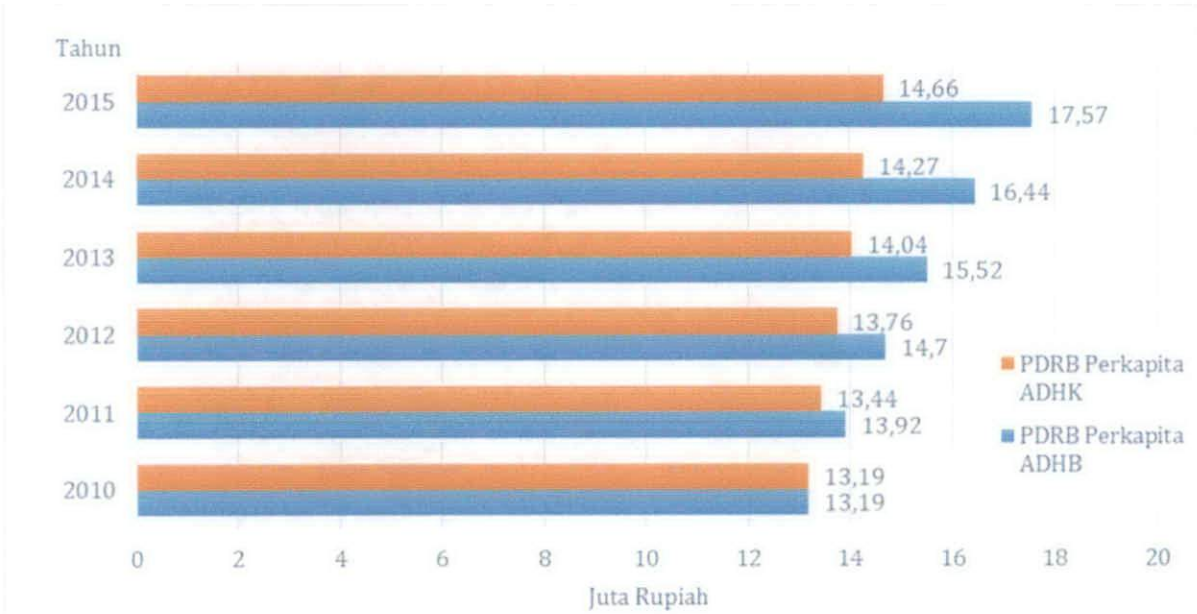

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2015

Gambar 2.24. Pendapatan Regional per Kapita tahun 2010 – 2015 (jutaan rupiah)

Dengan situasi seperti ini dapat disimpulkan walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita secara harga berlaku, tetapi kenaikan harga pada tahun tersebut juga tinggi, maka kenaikan pendapatan perkapita tidak akan membantu terhadap perbaikan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi apabila ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin melebar, maka tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik, semakin jauh dari harapan.

2.2.1.4. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya termasuk salah satu kategori daerah tertinggal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kemiskinan dan fasilitas infrastruktur dasar masyarakat

yang belum terpenuhi. Ada beberapa indikator utama yang menjadi dasar penilaian tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya oleh BPS diantaranya adalah pendapatan masyarakat yang masih rendah (lebih kecil dari Rp.10.000 per hari), banyaknya rumah yang tidak layak huni, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih minim.

Berdasarkan data BPS melalui pengolahan dari Tim TNP2K Tahun 2009, Indikator kinerja kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya berada pada 27,97 persen. Pada Tahun 2012 angka kemiskinan turun menjadi 24,35 persen dan tahun 2015 menjadi 21,40 persen, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun Angka kemiskinan Pidie Jaya masih tinggi di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu sebesar 17,08 persen dan Nasional sebesar 11,22 persen. Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya secara umum relevan dengan pencapaian penurunan angka kemiskinan pada tingkat Propinsi Aceh dan Nasional. Relevansi tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Propinsi Aceh dan Nasional seperti terlihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.25.

Tabel 2.16
Persentase penduduk Miskin Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 - 2015

No	Kabupaten	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pidie Jaya	27,97	26,08	24,35	22,70	21,78	21,40
2	Provinsi	20,98	19,57	18,58	17,72	16,98	17,08
3	Nasional	13,22	12,36	11,66	10,50	9,80	11,22

Sumber: BPS Aceh, 2015

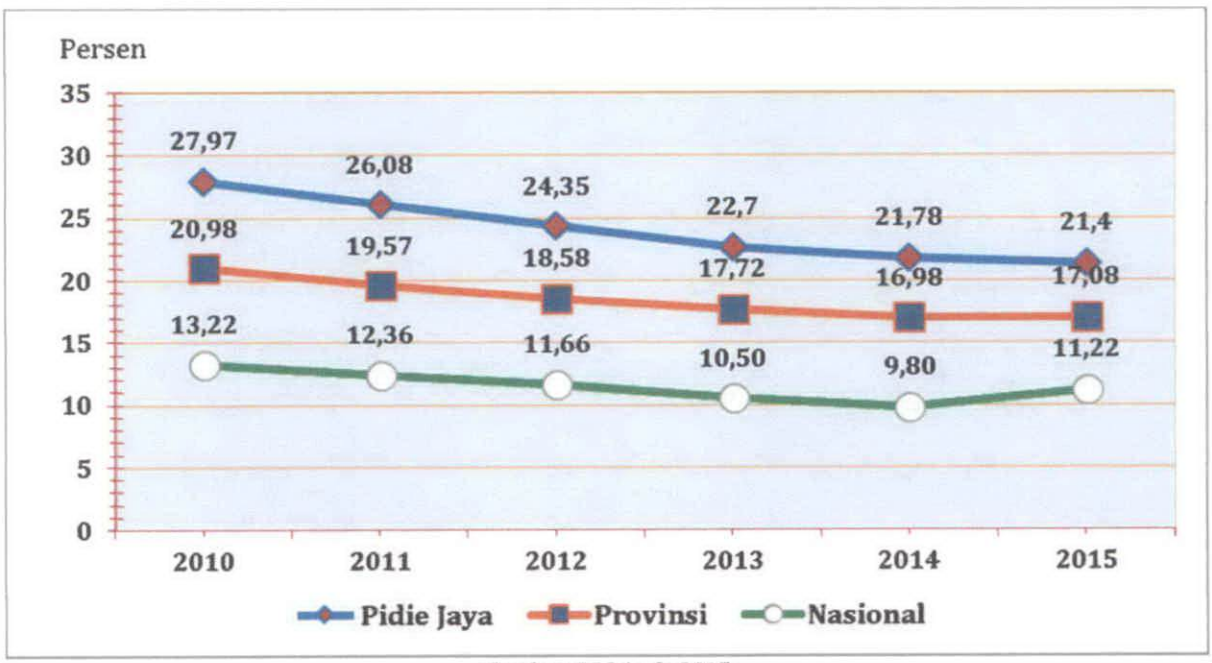

Sumber: BPS Aceh, 2015

Gambar 2.25. Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Provinsi dan Nasional

Berdasarkan data kemiskinan TNP2K tahun 2016, jumlah KK miskin di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 7.152 KK yang tersebar di delapan kecamatan. Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng dan Bandar Dua merupakan urutan tertinggi dengan jumlah KK miskin tertinggi.

Tabel 2.17 menunjukan jumlah KK Miskin Pidie Jaya berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016.

Tabel 2.17
Jumlah KK Miskin Per Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1	Bandar Baru	10.634	2.112	19,86
2	Panteraja	2.637	441	16,72
3	Trienggadeng	7.222	1.265	17,52
4	Meureudu	6.771	670	9,90
5	Meurah Dua	3.543	382	10,78
6	Ulim	4.422	766	17,32
7	Jangka Buya	2.774	446	16,08
8	Bandar Dua	7.693	1.070	13,91
Jumlah		**45.696**	**7.152**	

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Persentase KK miskin merupakan perbandingan jumlah KK miskin dengan jumlah KK menurut masing-masing kecamatan. Sebagai daerah yang penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Pidie Jaya, adalah Kecamatan Bandar Baru dengan jumlah KK Misikin tahun 2016 sebanyak 2.112 KK atau persentase 19,86 persen, kemudian disusul dengan kecamatan Trienggadeng sebanyak 1.265 KK dengan persentase sebesar 17,52 persen dan Kecamatan Bandar Dua sebanyak 1.070 KK dengan persentase sebesar 13,91 persen, hal ini didasari penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Rata-rata penghasilan masyarakat 200 ribu s.d 1 juta per bulan. KK miskin rata-rata berusia masih produktif yakni berkisar antara 20-40 tahun dengan tanggungan dalam keluarga 3-6 orang. Tingkat pendidikan KK miskin rata-rata hanya menempuh pendidikan dasar (SD). Grafik persentase penduduk miskin berdasarkan kecamatan dalam di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.26.



Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.26. Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 sebanyak 18.982 RT yang distribusinya dan katagori dapat dilihat pada Tabel 2.18 yaitu; Sangat Miskin (D1); Miskin (D2); Hampir Miskin (D3) dan Rentan Miskin (D4).

Tabel 2.18
Jumlah rumah tangga (RT) menurut status kesejahteraan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

NO	KECAMATAN	D1	D2	D3	D4	JUMLAH
1	Bandar Baru	759	1.353	1.297	1.128	4.537
2	Panteraja	129	312	327	349	1.117
3	Trienggadeng	412	853	948	997	3.210
4	Meureudu	156	514	729	889	2.288
5	Meurah Dua	87	295	374	520	1.276
6	Ulim	210	556	641	761	2.168
7	Jangka Buya	122	324	350	408	1.204
8	Bandar Dua	314	756	987	1.125	3.182
TOTAL		**2.189**	**4.963**	**5.653**	**6.177**	18.982

Sumber : TNP2K Tahun 2017

Permasalahan demografi yang di alami pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama ini adalah terkait dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jangka Buya, ini disebabkan karena luas wilayah yang tidak terlalu besar, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Meurah Dua karena luas wilayahnya merupakan terbesar dari 7 kecamatan lainnya. Untuk kecamatan Meureudu yang merupakan ibu kota Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kepadatan penduduk 161 jiwa/km^2.

2.2.1.5. Angka Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Laporan Sosial Ekonomi November 2015, diantaranya menyajikan data tentang kondisi ketenagakerjaan di seluruh Provinsi di Indonesia. Data Sosial Ekonomi BPS menunjukkan tingkat pengangguran di Aceh periode Agustus 2015 tertinggi di Indonesia bersama dengan Maluku. Tiga provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi (TPT) masing-masing yaitu; Aceh sebesar 9,93 persen, Maluku 9,93 persen, dan Banten 9,55 persen. Sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 1,99 persen dan 3,35 persen.

Publikasi BPS Aceh triwulan III 2015 pada 5 November 2015 juga menunjukkan angka pengangguran terus bertambah, di atas rata-rata nasional sebesar 6,18 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh per Agustus 2015 mencapai 217 ribu atau 9,93 persen, mengalami peningkatan sebesar 26 ribu dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 yaitu 191 ribu (9,02 persen) dan lebih tinggi 2,2 persen dari TPT Februari 2015 sebesar 7,73 persen. Kondisi ini sangat ironis bagi pembangunan Aceh ke depan. Apalagi bila dibandingkan dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh sejak tahun 2008 sampai 2015 telah

mencapai Rp. 42,2 triliun. Berlimpahnya dana Otsus ternyata belum mampu menekan tingginya angka pengangguran di Aceh.

Bila Dana Otsus tidak dikelola dengan profesional dan tepat sasaran, maka akan berdampak lebih buruk terhadap masa depan ekonomi Aceh karena alokasi Dana Otsus hanya tinggal 12 tahun lagi dari total 20 tahun yang akan diterima Aceh (2008 – 2027).

Tabel 2.19
Provinsi dengan Angka Pengangguran Tertinggi di Indonesia Tahun 2015

No	Provinsi	Jumlah pengangguran (000 Org)	Tingkat Pengangguran (Persen)
1	Aceh	216,8	9,93
2	Maluku	72,2	9,93
3	Banten	509,4	9,55
4	Sulawesi Utara	99,20	9,03
5	Jawa Barat	1.974,9	8,72
6	Papua Barat	33,40	8,08
7	Riau	217,10	7,83
8	Kalimantan Timur	115,50	7,50
9	DKI Jakarta	368,20	7,23
10	Sumatera Barat	161,60	6,89

Sumber: Laporan Sosial Ekonomi BPS Agustus 2016

Meningkatnya pengangguran dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : krisis ekonomi yang menyebabkan banyak usaha yang tutup, terbatasnya lapangan kerja sektor primer. Secara riil pada tahun 2008 dari jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 141,949 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu sebanyak 94,383 orang, penduduk usia kerja sebanyak 87,547 orang (62,63 %), dan jumlah pengangguran sebanyak 21,220 orang (14,95 %), hal ini mengidikasikan masih tingginya angka kemiskinan. Dengan indikator pendataan kemiskinan yang menggunakan indikator baru (PKIB) tahun 2004 dan PSE '05 kondisi kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2015 dapat di lihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang Bekerja, Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2009–2015

No	Kabupaten Pidie Jaya	Jenis Kegiatan		TPAK	TPT
		Bekerja	Pengangguran		
1	Tahun 2009	57.190	3.112	65,04	5,16
2	Tahun 2010	54.939	3.387	63,09	5,81
3	Tahun 2011	55.494	4.793	63,10	7,95
4	Tahun 2012	56.235	5.238	63,44	8,52
5	Tahun 2013	52.436	7.711	60,81	12,82
6	Tahun 2014	58.402	5.190	62,66	8,16
7	Tahun 2015	60.076	6.074	63,64	9,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pidie Jaya 2016

Pada tahun 2009 di Kabupaten Pidie Jaya persentase penduduk usia kerja sebesar 65,04 persen menurun menjadi 63,64 persen pada tahun 2015. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2009 persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 66,09 persen atau sekitar 60.121 jiwa. Persentase penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2009 yang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka) sebesar 5,16 persen meningkat menjadi 9,18 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya di atas normal yaitu 12,82 persen hal ini disebabkan pencacahan yang dilakukan secara Nasional yaitu Sakernas pada tahun itu bertepatan dengan minggu terakhir bulamn Ramadhan sehingga banyak penduduk saat itu menghentikan atau mengurangi aktivitas ekonominya dan juga banyak penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang berstatus pekerja bebas atau buruh lepas.

Jika dibandingkan dengan persentase pengangguran di Provinsi Aceh, pada tahun 2009 angka pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya hanya sebesar 5,16 persen dari total angkatan kerja sedangkan angka pengangguran di Provinsi Aceh mencapai 9,84 persen dari total angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sudah lebih rendah dibandingkan masyarakat kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Walaupun demikian angkatan kerja perlu terus ditingkatkan dengan upaya membuka peluang investasi dalam berbagai sektor seperti; perdagangan, jasa, koperasi, pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lainnya.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Kemampuan baca tulis penduduk di Provinsi Aceh tahun 2014 secara umum sudah baik, yaitu mencapai 97,04 persen. Sedangkan sisanya sebesar 2,96 persen penduduk Provinsi Aceh masih buta huruf dan kemungkinan besar adalah penduduk usia lanjut atau penduduk yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Sementara itu angka melek penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 sebesar 96,01 persen meningkat menjadi 96,32 persen pada tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa komponen kualitas sumberdaya manusia khususnya dilihat dari angka melek huruf di Kabupaten Pidie Jaya masih harus ditingkatkan.

Tabel 2.21 secara rinci menunjukkan tingkat perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2016

No	Uraian	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas (jiwa)	88.826	88.986	89.198	89.915	91.119	93.526	116.540	120.109
2	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (jiwa)	83.701	84.047	84.270	86.262	87.484	90.084	116.333	119.902
3	Angka Melek Huruf (%)	94,23	94,45	95,48	95,93	96,01	96,32	99,82	99,83
4	Angka Melek Huruf Provinsi Aceh (%)	96,39	96,88	95,84	96,75	96,75	98,25	-	-
5	Angka Melek Huruf Nasional (%)	92,58	92,91	92,99	93,25	93,92	93,57	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, 2017.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama bersekolah mencerminkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau sedang dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas. Pada usia ini dianggap penduduk sudah menyelesaikan seluruh tingkatan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Pidie Jaya menghabiskan waktunya untuk bersekolah sekitar 8,53 tahun, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sekitar 8,45 tahun. Waktu 8 tahun bersekolah berarti rata-rata penduduk yang berusia 15 tahun ke atas belum menamatkan pendidikan formal 9 tahun atau tamat SLTP, jadi mereka hanya sempat menamatkan setara kelas 2 SLTP. Rata-rata lama sekolah ditingkat provinsi sedikit lebih baik daripada Kabupaten Pidie Jaya. Rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh Tahun 2016 sebesar 8,85 tahun dan 8,77 tahun pada tahun sebelumnya. Semakin lama rata-rata lama sekolah akan semakin baik karena diharapkan pendidikan yang cukup dan berkualitas dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kehidupan seseorang kelak dikemudian hari. Selain komponen-komponen yang langsung terlibat dalam penghitungan angka IPM juga perlu diperhatikan indikator-indikator pendukung lainnya yang juga secara langsung ataupun tidak langsung turut berpengaruh dalam pembentukan angka indeks dari komponen langsung IPM, karena dari indikator-indikator itu dapat pula terbaca gambaran sisi lain keadaan sosial dari aktivitas masyarakat suatu wilayah.

Pendidikan adalah usaha dasar untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian anak didik. Dalam periode tinggal landas, pendidikan diamati sebagai suatu gejala jangka panjang. Pengertian pendidikan dalam jangka panjang ini dapat dipahami sebagai suatu proses pendidikan yang mempunyai kaitan erat dengan ketenagakerjaan khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 5 menegaskan bahwa (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dari ketentuan di atas maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bahkan bagi masyarakat terpencil dan terbelakang sekalipun. Jadi dengan diwajibkannya pendidikan dasar 9 tahun, semestinya tidak terdengar lagi adanya anak putus sekolah akibat ketiadaan biaya atau ketiadaan akses terhadap sarana pendidikan. Perbandingan capaian angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.22 dan Gambar 2.27.

Tabel 2.22
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Pidie Jaya

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016*
1	Kabupaten Pidie Jaya	7,90	7,93	7,95	8,30	8,45	8,53
2	Provinsi Aceh	8,32	8,36	8,44	8,71	8,77	8,85

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, 2017
**) Data sementara*

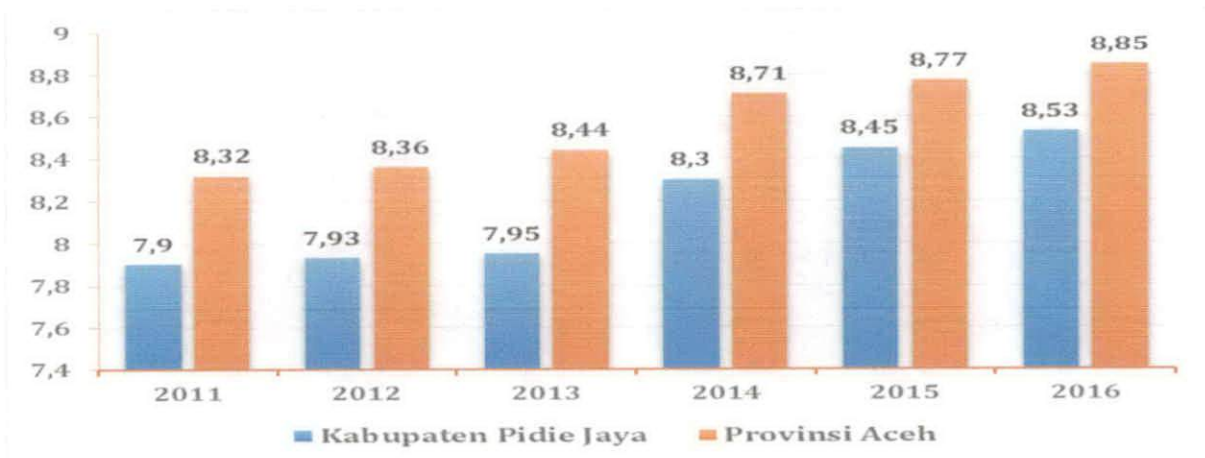

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Gambar 2.27. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2011- 2016

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat PAUD/SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 3 hingga 18 tahun atau rasio

jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ideal APK adalah nilai 100, yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sama dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berdasarkan UU No. 20 Th 2003 tentang Sisdiknas mengenai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah : suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkem-bangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jalur Penyelenggaraan PAUD (Pasal 28 UU No 20 Th 2003) Jalur Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain sederajat Jalur Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain sederajat Jalur Pendidikan Informal Pendidikan Keluarga atau Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Lingkungan.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2016

No	Tingkat Pendidikan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAUD	33,10	34,47	36,73	37,22	39,10	39,69	52,65
2	SD/MI	103,79	104,23	105,57	104,55	96,24	98,54	97,05
3	SMP/MTs	88,97	113,2	91,64	96,20	92,50	94,35	92,70
4	SMA/MA/SMK	78,97	83,9	78,03	81,56	95,06	96,85	56,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Jabaran data dari tahun 2010 sampai tahun 2016 seperti Tabel 2.23. diatas, Pembangunan pendidikan Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2016 APK tingkat PAUD hanya mencapai 52,65 persen, SD/MI baru mencapai 97,05 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 92,70 persen dan tingkat SMA/MA/SMK menurun drastis menjadi 56,80 persen, artinya APK di Kabupaten Pidie Jaya masih belum mencapai target 100 persen, perlu dilakukan upaya yang lebih keras lagi di bidang pendidikan untuk masa yang akan datang.

D. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0 - 100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan Contoh: APM SMP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebesar 64,71 persen, artinya sekitar 65 persen penduduk di Kabupaten Deli Serdang yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/sederajad, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 untuk jenjang pendidikan PAUD hanya mencapai 36,30 persen, SD/MI menurun dari tahun 2015 menjadi 88,34 persen, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 74,88 persen dan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK hanya mencapai angka sebesar 45,87 persen, angka ini masih jauh dari target yang seharusnya, oleh karena itu Pemerintah kabupaten Pidie Jaya harus berusaha lebih keras untuk mencapai target tersebut, untuk lebih jelasnya data perkembangan APM dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2016

No	Tingkat Pendidikan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAUD	20,01	22,11	24,37	30,67	33,96	34,63	36,30
2	SD/MI	98,85	92,84	92,01	92,24	93,12	98,81	88,34
3	SMP/MTs	81,29	70,71	73,80	73,80	83,42	91,99	74,88
4	SMA/MA/SMK	69,79	54,94	56,08	56,08	70,47	73,55	45,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.2.2.2. Kesehatan

Salah satu ciri daerah yang maju adalah mempunyai derajat kesehatan yang tinngi, karena derajat kesehatan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kualitas sumberdaya manusia. Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi mortalitas, morbiditas dan status gizi.

Status kesehatan masyarakat dapat digambarkan melalui beberapa indikator utama, antara lain: Angka kelangsungan hidup bayi, Angka Kematian Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu dan Angka Keluhan Sakit.

A. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah angka yang digunakan sebagai salah satu indikator di bidang kesehatan yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran, angka kelangsungan hidup bayi sering disebut dengan *Infant Mortality Rate* (IMR). Tabel 2.25 menunjukkan bahwa AKHB Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 masih mengalami fluktuasi dimana angka kelahiran menurun pada tahun 2012 dan stagnan di tahun 2013 lalu meningkat lagi pada tahun 2014 dan semakin tinggi di tahun 2015. Namun pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan drastis. Ini menunjukkan pelayanan kesehatan bayi yang sudah mulai membaik dan diharapkan dapat dipertahankan untuk kedepannya.

Tabel 2.25
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2016

Uraian	Tahun							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kematian Bayi <1 Tahun	-	4	27	21	21	22	40	20
Kelahiran Hidup	2.314	2.799	3.044	2.609	2.661	2.868	2.994	4.321
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran	-	1,42	8,86	8,04	8,04	7,67	8,0	5,0

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, 2017

B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak karena kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. AKB bersifat sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Usia bayi merupakan usia yang rentan baik terhadap kesakitan

maupun kematian sehingga banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi guna meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan Tabel 2.25 menunjukkan jumlah kematian bayi di Kabupaten Pidie Jaya sejumlah 20 kasus kematian. Hal tersebut disebabkan karena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Aspiksia dan kelainan bawaan.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum berusia 5 tahun yang mempresentasikan risiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kematian balita adalah akumulasi dari kematian bayi (usia 0-11 bulan) dan kematian anak balita (usia 12-59 bulan). Angka Kematian Balita di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 – 2016 dapat di lihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Angka Kematian Balita di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 – 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kematian Balita	6	40	37	41	17
Angka Kematian Balita	2,3	15,03	12,9	13,7	3,9

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, 2017

D. Persentase balita gizi buruk

Balita gizi buruk adalah balita yang mengalami kekurangan energi dan protein tingkat berat yang diakibatkan karena kurang mengkomsumsi makanan yang bergizi dan menderita sakit yang begitu lama. Keadaain ini dilihat dari status gizi sangat kurus (BB/TB) dan atau dari hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan gejala marasmus, kwasiorkor atau marasmus kwasiorkor.

Balita gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibanding anak seusianya. Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah secara menyeluruh terutama dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, persentase balita gizi buruk merupakan angka perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dibandingkan dengan jumlah balita dikalikan seratus persen. Tahun

2009 persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 0,34 persen atau 60 orang menurun sampai tahun 2016 persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 0,07 persen atau sebanyak 10 orang, Angka Persentase balita gizi buruk memang sudah kecil namun perlu diwaspadai dan ditingkatkan pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat agar memperhatikan pola makan makanan yang bergizi, karena resiko gizi buruk sangat besar berupa tingkat pertumbuhan badan dan mental akan terganggu. Persentase Balita Gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 - 2016

Uraian	Tahun							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Balita Gizi Buruk	60	12	12	13	10	6	7	10
Jumlah Balita	17.607	18.090	13.144	14.643	13.406	13.088	13.178	14.869
Persentase Balita Gizi Buruk	0,34	0,07	0,09	0,09	0,07	0,05	0,05	0,07

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, 2017

E. Angka usia harapan hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH orang Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2010-2015. UHH hanya sedikit meningkat dari 69,08 di tahun 2010 menjadi 69,50 di tahun 2015, akan tetapi masih berada di bawah angka Nasional yaitu sebesar 70,78 tahun 2015. Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2010 UHH sebesar 69,01 Tahun meningkat menjadi 69,49 tahun pada tahun 2015, secara keseluruhan Kabupaten/Kota di Aceh UHH yang tertinggi ada di Kabupaten Bireun sebesar 72,63 tahun dan Kabupaten yang terendah adalah Kabupaten simeulue. Jika dibandingkan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, angka harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan perempuan di Aceh relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kesehatan pada laki-laki gambaran UHH dari tahun 2010 sampai tahun 2015 seperti Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2015

Wilayah	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pidie Jaya	69,01	69,05	69,07	69,11	69,13	69,49
Aceh	69,08	69,15	69,23	69,31	69,35	69,50
Sumatera Utara	67,46	67,63	67,81	67,94	68,04	68,29
Nasional	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pidie Jaya, 2016

F. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah ibu yang meninggal akibat kehamilan, persalinan dan nifas di Aceh masih relatif tinggi, melebihi rata-rata nasional. SDKI 2007 melaporkan bahwa AKI di Aceh masih sebesar 238 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan rata-rata AKI nasional sudah mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup, dan target MGDs 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 berturut-turut adalah 8/100.000 LH, 5/100.000 LH dan 5/100.000 LH. AKI Provinsi Aceh pada tahun 2008 sebesar 238/100.000 LH sedangkan AKI Nasional 228/100.000 LH. Berdasarkan data tersebut, AKI Kabupaten Pidie Jaya menggambarkan kondisi yang masih bisa ditolerir berada di bawah angka Provinsi dan Nasional.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan mesyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas. AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya.

Menurut definisi WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (dalam masa nifas) akibat semua sebab yang terkait atau diperbuat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.

Tantangan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan kurang berfungsinya sistem deteksi dini ibu hamil yang berisiko tinggi dan sistem rujukan persalinan belum efektif disamping faktor medis seperti pendarahan, hipertensi saat hamil atau pre eklamasi dan infeksi (Kementerian Kesehatan, 2010). Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012-2016 secara rinci di sajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kematian Ibu	3	3	4	3	5
Angka Kematian Ibu	114,9	112,7	139,5	100,2	115,7

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, 2017

G. Angka keluhan kesehatan (sakit)

Angka Keluhan kesehatan adalah jumlah masyarakat pernah mengeluh menderita salah satu penyakit selama satu tahun, Angka kesakitan masyarakat Aceh hampir dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata angka kesakitan nasional yang hanya sebesar 15 persen. Di samping itu, disparitas antar kabupaten/kota juga relatif tinggi. Pada tahun 2007, angka keluhan kesehatan

yang terjadi di kabupaten Pidie Jaya sebesar 24,42 persen meningkat terus sampai tahun 2010 menjadi 53,61 persen, kemudian menurun kembali sampai tahun 2015 angka keluhan kesakitan di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 45,42 persen, angka ini merupakan angka terbesar dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, kemudian diikuti Kabupaten Nagan Raya sebesar 38,35 persen. sebagaimana disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2015

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pidie Jaya	53,61	47,55	46,40	42,30	46,94	45,42
2	Rata-rata ACEH	35,09	30,62	30,71	28,66	30,55	27,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2016

Selain beberapa permasalahan kesehatan di atas, di Kabupaten Pidie Jaya terdapat terdapat sepuluh penyakit dengan tingkat keluhan masyarakat terbanyak pada tahun 2016 sebagaimana di sajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Sepuluh Penyakit Terbanyak sesuai dengan Keluhan Masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No.	Nama Penyakit	Total
1.	Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA)	20.931
2.	Common Cold	13.308
3.	Rheumatik	10.710
4.	Penyakit Kulit Alergi	7.789
5.	Hyperensi	6.430
6.	Gastritis	5.605
7.	Diare	4.274
8.	Dyspepsia	4.030
9.	Chepalgia	2.449
10.	Vertigo	2.015

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.2.2.3. Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

a. Bidang Pemuda

Bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk secara serius menjadikan agenda pembangunan pemuda sebagai salah satu tema penting dari pembangunan nasional atau

pembangunan daerah secara keseluruhan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan (UU No. 40/2009 BAB I Pasal 1). Selanjutnya Undang-Undang ini mengamanatkan Pembangunan Kepemudaan yaitu "Proses memfasilitasi segala yang berkaitan dengan kepemudaan." Sedangkan "Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda" dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sasaran ini bisa dicapai dengan; Pembinaan karakter pemuda dan Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan.

Dinas Olahraga Pemuda dan Periwisata Kabupaten Pidie Jaya khusunya Bidang Pemuda terus berusaha secara maksimal untuk memberdayakan para pemuda dengan dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti pada tabel 2.32 di bawah ini :

Tabel 2.32
Daftar Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2017

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN (PESERTA)			
		2014	2015	2016	2017
1	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda (liff skil)	38	38	-	-
2	Kegiatan seleksi paskibraka tingkat nasional	2	2	2	2
3	Pembinaan organisasi kepemudaan	150	100	-	-
4	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda	-	111	-	-
5	Wirakarya pemuda prestasi	-	-	48	-
6	Pelatihan komputer	-	10	15	15
7	Pelatihan ketrampilan pemuda (menjahit)	-	-	6	-

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Dengan adanya penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan maka diharapkan adanya perbaikan tata kelola organisasi kepemudaan yang lebih moderen dan sesuai dengan tantangan zaman, sehingga organisasi kepemudaan sebagai tempat lahirnya kader-kader penerus bangsa dimasa yang akan datang.

b. Bidang Olahraga

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas yang berperan aktif dalam peningkatan aktifitas keolahragaan, kepemudaan dan pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menunjang program olahraga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga perlu dibangun secara bertahap oleh Pemerintah

Kabupaten Pidie Jaya agar segala even olahraga dapat terlaksana dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan standar kompetisi.

Pembangunan stadion pidie jaya yang merupakan salah satu kebanggaan para pelaku olahraga belum selesai dibangun dengan tuntas, begitu juga dengan lapangan olahraga kecamatan dan lapangan olahraga gampong yang belum memadai sesuai standar lapangan pada umumnya. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana dan prasarana olahraga dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33
Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Jenis sarana/prasarana olahraga (lapangan)					
		Stadion	Sepak Bola	Volly	Bulu Tangkis	Futsal	Tennis
1	Bandar Baru	-	9	10	1	-	-
2	Panteraja	-	6	8	-	-	-
3	Trienggadeng	-	4	2	-	-	-
4	Ulim	-	8	6	-	-	-
5	Jangka Buya	-	4	2	-	-	-
6	Meureudu	1	4	7	1	1	-
7	Meurah Dua	-	2	6	-	-	-
8	Bandar Dua	-	5	6	-	1	-
JUMLAH		**1**	**42**	**47**	**2**	**2**	**0**

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Berdasarkan tabel 2.33 diatas menunjukkan bahwa jumlah lapangan olahraga masih sangat minim dan terbatas. Stadion olahraga yang baru tersedia di tengah pusat ibukota belum selesai dibangun serta lapangan sepak bola dan lapangan volly merupakan lapangan yang dibangun oleh Pemerintah Gampong dan dibantu dengan dan rehab dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga belum sesuai dengan standar keolahragaan.

Jumlah lapangan sepak bola sebanyak 42 dan lapangan volly sebanyak 47 belum sebanding dengan jumlah 222 Gampong, hal tersebut sangat berpengaruh akan jalannya aktifitas olahraga bila sarana dan prasarana tidak mendukung.

Berdasarkan prestasi yang telah dicapai dari berbagai even olahraga yang diikiuti daerah maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga fokus pada pembinaan 6 (enam) cabang olahraga yaitu Bola kaki, Atletik, Pencak Silat, Tenis Meja dan Karate dan Taekwondo. Selanjutnya diharapkan berkembang pada cabang olahraga lainnya.

Adapun prestasi olahraga yang sudah diraih Kabupaten Pidie Jaya selama kurun 2008 sampai dengan 2016 ikut serta dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Peringat pada Keikutsertaan POPDA Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2008 - 2016

No	Kegiatan	Perolehan Medali	Peringkat
1	POPDA 2008 di Aceh Selatan	1 perak dan 1 Perunggu	19
2	POPDA 2010 di Aceh Tamiang	1 emas, 1 perak dan 1 perunggu	17
3	POPDA 2012 di Banda Aceh	2 emas, 3 perak dan 7 perunggu	9
4	POPDA 2014 di Lhokseumawe	4 emas, 6 perak dan 3 perunggu	7
5	POPDA 2016 di Kota Langsa	5 emas, 5 perak dan 5 perunggu	8

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2017

c. Bidang Pariwisata

Budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Sehubungan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, tercantum pada Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 34 huruf (h) tentang Kawasan Peruntukan Pariwisata dan Paragraf 8 tentang Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf (h)terdiri dari Objek Wisata Budaya; wisata Alam; Onjek Wisata Buatan; Objek Wisata Khusus atau Minat.

Objek Wisata Budaya terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, Sedangkan Kawasan Wisata Alam terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Bandar Dua, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya. Sedangkan untuk Objek Wisata Buatan dikembangkan di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Bandar Dua.dan Objek Wisata Khusus meliputi semua Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35
Jenis dan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Pidie Jaya

NO.	OBJEK WISATA BUDAYA	KAWASAN WISATA ALAM	OBJEK WISATA BUATAN	LOKASI
1	Makam Tgk Abdullah Syafi'i Blang Sukon Cubo	Pantai Krueng Cubo	Bendung Irigasi Jim Jim	Bandar Baru
2	Benteng Pertahanan Peninggalan Jepang Gampong tu	Pantai Pasi Panteraja	Embung uteun Pantang	Panteraja
3	Mesjid Kuno di Gampong Mesjid Trienggadeng	Pantai Wisata Khutang	Embung Peulandok	Trienggadeng
4	Makam Tgk Dipucok Krueng Beuracan	Pantai Kutaran Meunasah Balek	Irigasi Leubok dan Irigasi Beuracan	Meureudu
5	Makam Tgk Japakeh Gampong Dayah Kruet	Krueng Batee Meuadee Lhok Sandeng	-	MeurahDua
6	Makam Tgk Malem Dagang Gampong Mens Kumbang	Pantai Pasi Geulanggang	-	Ulim
7	Makam Tgk Pante Geulima Gampong Beurandeh Alue	Air Terjun Pucok Krueng Ulim dan Batee Krueng Lhok Ugob	Bendung Irigasi Lhok Ugob	BandarDua
8	-	Pantai Pasi Aron	-	Jangka Buya

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.2.3. Fokus Keistimewaan

2.2.3.1. Pelaksanaan Syariat Islam

Aceh memiliki tempat istimewa dalam kontalasi perjalanan sejarah Indonesia. Bukan karena sumbangannya yang yang tidak ternilai dalam perjuangan Nasional, tetapi juga karena karakteristik budaya dan masyarakatnya yang tergolong unik dan menarik perhatian banyak

kalangan. Disamping itu Aceh telah diberikan hak Otonomi Khusus oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pelaksanaan Syariat Islam. Kewenangan memberlakukan Syariat Islam di Aceh berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.

Untuk menindaklanjuti kedua Undang-Undang diatas, dibentuklah peraturan-peraturan daerah atau Qanun di Aceh khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dilapangan yakni Qanun no.11 tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian), dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentamg *Khalwat* (mesum). Dalam perkembangan selanjutnya perlakuan Syariat Islam tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh. melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, diterbitkan payung hukum yang terbaru terhadap pelanggaran syariat islam dalam bentuk qanun, yaitu: qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam dan qanun No.6 Tahun 2014 tentag Hukum Jinayah.

Gelegar pemberlakuaan Syariat Islam di Pidie Jaya dimulai sejak terbentuknya Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sebagai unit kerja Pemerintah Daerah dan instansi otonom yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, di mana pada pasal 72 disebutkan bahwa *Dinas Syariat Islam mempunyai tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang kekhususan dan Keistimewaan Pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.*

Syariat Islam merupakan urusan keistimewaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berfungsi pelayanan umum dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU-PA) pasal 125 dan pasal 127.

Pasal 125 UU-PA mengamanatkan:

1. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak
2. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Selanjutnya Pasal 127 UU-PA mengamanatkan :

1. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam.
2. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.
4. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan

Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam sebagai prioritas pembangunan daerah, yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syariat Islam adalah dengan penerapan aturan Islam untuk membentuk dan membudayakan perilaku islami dengan harapan membentuk kepribadian islami bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai aturan Islam dalam kehidupan beragama secara kesinambungan dan mensosialisasikan aturan islam tersebut pada kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Pidie Jaya ke depan.

A. Peningkatan Pemahaman Syariat Islam

Upaya untuk mendukung terwujudnya kabupaten yang Islami, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Syariat Islam menjadikan peningkatan dan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam sebagai prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syariat Islam. Selama tahun 2014 s/d tahun 2015 Dinas Syariat Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan pengajian rutin mingguan bagi masyarakat.

Pengajian rutin mingguan ini dihadiri oleh unsur pemerintah dan masyarakat luas dengan menghadirkan tokoh agama untuk memberikan bimbingan keagaamaan. Hal ini dikarenakan para tokoh agama merupakan pembimbing serta penuntun masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai agama yang mereka yakini. Selain itu Pemerintah Kaubupaten Pidie Jaya melalui Dinas Syariat Islam juga melakukan pengajian yaitu membaca Al-Quran berupa surat yasin pada ba'da shalat magrib yang diiringi dengan tausiah dengan mengunjungi mesjid-mesjid dan meunasah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Hal ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang Syariat Islam yang nantinya diharapkan akan timbul kekebalan dalam masyarakat terhadap hal-hal yang negative (yang dilarang) oleh Syariat Islam. Oleh karena iur, masyarakat akan lebih tahu dan faham tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Materi- materi yang disampaikan berhubungan dengan tauhid, fiqah, tasawuf dan materi-materi lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kepribadian islami masyarakat Kabupaten Pidie Jaya secara menyeluruh. Kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya selama kurun waktu 2014-2016 disajikan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Pengajian Rutin Peningkatan Pemahaman Syariat Islam

No	Uraian	Jumlah Pertemuan		
		2014	2015	2016
1	Pengajian Rutin Mingguan	46 Kali	46 Kali	46 Kali
2	Pengajian Rutin Bulanan	-	33 Kali	40 Kali
Jumlah		**46**	**79**	**86**

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

Tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun syariat belum semuanya dipatuhi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah temuan kasus pelanggaran Syariat Islam. Jumlah kasus pelanggaran yang menempati urutan terbanyak dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah pelanggaran terhadap implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Perkembangan jumlah penemuan kasus pelanggaran yang ditemukan pada tahun 2014-2016 sebagaimana tertera pada tabel 2. 37 berikut ini:

Tabel 2.37
Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2016

No	Jenis Pelanggaran	Tahun (kasus)			Penyelesaian Kasus
		2014	2015	2016	
1	Busana Muslim	-	15	26	Diselesaikan secara adat dan pembinaan di kantor
2	Khamar	-	-	-	
3	Maisir	5	-	3	Dicambuk 9 s/d 11 kali
4	Khalwat	6	-	15	Pembinaan Dilapangan
Jumlah Kasus		**11**	**15**	**44**	

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

B. Sarana Dan Prasarana Peribadatan

Dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat keberadaan rumah ibadah terutama mesjid dan meunasah, telah lazim digunakan sebagai sarana menghidupkan syiar-syiar Islam seperti pembacaan dalail khairat, pengajian, pengkajian ilmu-ilmu agama dan kegiatan syiar-syiar lainnya. Rumah ibadah di Kabupaten Pidie Jaya saat ini berjumlah 71 Mesjid dan 318 meunasah yang tersebar di delapan Kecamatan sebagaimana terlihat Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38
Jumlah Mesjid Dan Meneunasah Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2016

No	Kecamatan	Mesjid			Meunasah		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Bandar Baru	19	19	19	58	58	58
2	Panteraja	5	5	5	14	14	14
3	Trienggadeng	7	7	7	43	43	43
4	Meureudu	10	10	10	51	51	51
5	Meurah Dua	6	6	6	23	23	23
6	Ulim	8	8	8	33	33	33
7	Jangka Buya	3	3	3	20	20	20
8	Bandar Dua	13	13	13	76	76	76
Jumlah		**71**	**71**	**71**	**318**	**318**	**318**

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2017

Selain mesjid dan meunasah keberadaan Majelis Taklim dan juga Taman Pendididikan Al-Qur'an (TPA) merupakan bagian dari lembaga pendidikan keagamaan khas Islam yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Melalui majelis taklim, masyarakat yang terlibat didalamnya dapat merasakan betapa keberadaan lembaga ini menjadi sarana pembinaan moral spiritual serta menambah pengetahuan keislaman guna meningkatkan kualitas sumber daya muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Begitu juga halnya Taman pendidikan Al-Quran sangat berperan dalam meningkatkan pendidikan dasar bagi santri yang nantinya diharapkan menjadi anak yang saleh dan salihah serta fungsinya sebagai wahana pendidikan dan kesejahteraan santri

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melalui Dinas Syariat Islam telah memberikan biaya operasional kepada lembaga Majelis Taklim dan TPA sebanyak Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per-lembaga/ unit dengan rincian 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) lembaga Majelis Taklim dan 427 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2017 pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Majelis Taklim			TPA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Bandar Baru	77	77	77	89	89	89
2	Panteraja	49	49	49	16	16	16
3	Trienggadeng	19	19	19	47	47	47
4	Meureudu	63	63	63	80	80	80
5	Meurah Dua	29	29	29	48	48	48
6	Ulim	41	41	41	48	48	48
7	Jangka Buya	23	23	23	38	38	38
8	Bandar Dua	89	89	89	61	61	61
Jumlah		390	390	390	427	427	427

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2017

Tabel 2.40
Jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2017

No	Kecamatan	Guru TPA			Santri TPA		Santri TPA		Santri TPA	
		2015	2016	2017	2015		2016		2017	
					Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Bandar Baru	89	89	89	2.350	2.460	2.430	2.470	2.510	2.540
2	Panteraja	16	16	16	510	525	530	535	541	549
3	Trienggadeng	47	47	47	1.585	1.610	1.670	1.691	1.751	1.781
4	Meureudu	80	80	80	2.417	2460	2.457	2.472	2.491	2.510
5	Meurah Dua	48	48	48	1.907	1.950	1.930	1.957	1.951	1.967
6	Ulim	48	48	48	2.061	2.074	2.161	2.254	2.112	2.274
7	Jangka Buya	38	38	38	1.207	1.306	1.248	1.357	1.251	1.367
8	Bandar Dua	61	61	61	2.135	2.151	2.220	2.234	2.291	2.362

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2017

Dinas Syariat Islam untuk melakukan berbagai kebijakan dalam penerapan Syariat Islam secara optimal (kaffah) di Kabupaten Pidie Jaya yang seratus persen penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini pelaksanaan Syariat Islam bukan sebatas pelaksanaan hukum cambuk bagi yang melanggarnya, akan tetapi pelaksanaannya lebih ditekankan bagaimana warga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan berlakunya syariat Islam tersebut. Sebagai indikator untuk memenuhi pencapaian target tentang fasilitas keagamaan mulai tahun 2014 tempat peribadatan berupa masjid terdapat 71 unit, meunasah berjumlah 316 unit, dan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) sebanyak 427 unit yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.

C. Pengembangan Syiar Islam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam tidak hanya ibadah dan hukum. Tetapi pada pasal 125 Syariat Islam meliputi aspek ibadah,

ahwal al-syahshiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Sementara itu dalam dalam rangka untuk mengembangkan syiar Islam, Dinas Syariat Islam telah mengadakan pengembangan-pengembangan dalam rangka penguatan syiar Islam di Kabupaten Pidie Jaya seperti pelatihan manasik haji, perlombaan pestival anak shaleh,perlombaan zikir maulid, safari ramadahan, Perlombaan MTQ, perlombaan kegiatan perayaan 1 muharram yang bekerjasama denga bagian kessos setdakab Pidie Jaya.

Harapan yang diinginkan tentang kondisi Syariat Islam untuk 20 tahun ke depan adalah bahwa Kabupaten Pidie Jaya harus menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam hal pelaksanaan syariat Islam dan setiap penduduk Kabupaten Pidie Jaya harus berbudaya Islami yang dilandasi dengan amar makruf nahi munkar.

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Pidie jaya akan berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui program pengkaderan dan pemberdayaan ulama, hasilnya diharapkan akan lahir para ulama muda dan da'i yang mumpuni dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah sehingga dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat, untuk itu Pemerinta Kabupaten Pidie jaya akan bekerja sama dengan MPU Provinsi yang sudah menetapkan satu program Pendidikan Kader Ulama (PKU) sesuai dengan amanah Qanun nomor 2 Tahun 2009 merupakan tugas pokok Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Disamping itu, Pemerintah kabupaten Pidie Jaya juga turut mendukung usaha peningkatan peran ulama dalam mencari berbagai solusi permasalahan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga mendapat kejelasan hukum/fatwa syari'at baik yang berupa fatwa, taushiyah maupun himbauan/saran kepada masyarakat serta kepada instansi pemerintah berupa pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi, disamping itu, MPU Kabupaten Pidie jaya juga ikut serta melaksanakan sosialisasi fatwa MPU Aceh kepada para ulama, unsur pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur wanita dan jajaran pemerintah kab/kota dan instansi terkait lainnya. Sosialisasi ini telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir disebagian besar

Kab/Kota yang ada di Aceh. Selama periode 2015-2017 MPU Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya antara lain tersebut di dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2017

NO	Jensi Kegiatan	Keterangan
1	Pendidikan Kader Ulama Ke-1, Pembahasan tentang Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah dan Ilmu Falakiyah	Setiap Tahunnya
2	Sidang Hasil Telaah tentang Program PNPM berbasis Syariah	Sistem Bagi Hasil dengan Pemodal
3	Muzakarah masalah Keagamaan Tahun 2016, dengan Tema " Bersama Ulama dan Umara kita Tingkatkan Pemahaman Ummat dalam Menjalankan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya"	Dilaksanakan setiap Pertengahan Tahun
4	Penetapan Guru Pengajian pada Setiap SKPK Setdakap Pidie Jaya	Periode 6 bulan
5	Pengangkatan Anggota Majelis Syuyukh MPU Kabupaten Pidie Jaya	
6	Mengeluarkan berbagai rekomendasi terkait permasalahan keagamaan dalam masyarakat.	Jika dibutuhkan

Sumber: Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.2.3.2. Baitul Mal

Pengelolaan Harta Agama juga menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Dinul Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Penelitian potensi zakat di Aceh yang dilakukan pada tahun 2014 kerjasama Baitul Mal Aceh dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan (LP2M) UIN Ar-Raniry menyajikan angka yang cukup fantastis yaitu 1,3 triliun potensi zakat seluruh Aceh pertahun, sedangkan rata-rata potensi zakat Kabupaten/Kota berkisar 58 miliar pertahun. Sumber-sumber zakat mal terdapat pada beberapa sektor ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perusahaan, perhotelan, kuliner/restoran, jasa/pelayanan, komunikasi dan transportasi, sektor bisnis riil, industri rumah tangga dan sektor lembaga keuangan. Dengan potensi sebesar ini seharusnya pemerintah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kesenjangan sosial dan kemiskinan di Aceh. Demikian juga regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak.

Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya selama dua tahun terakhir adalah sebesar Rp. 6.546.676.358,50. Penerimaan pada Tahun 2015 Sebesar Rp. 3.181.633.351,50 bersumber dari Zakat dan Infaq dan pada Tahun 2016 dengan sumber yang sama terjadi peningkatan penerimaan yaitu sebesar Rp. 3.355.042.440,00. Selanjutnya Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 dan Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Sumber Dana	2015		2016	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Zakat	2.142.509.281,50	67,34	2.483.709.217,00	74,11
2	Infaq	1.039.124.070,00	32,66	871.333.223,00	25,89
3	Shadaqah	-	-	-	-
	Jumlah	**3.181.633.351,50**	**100**	**3.355.042.440,00**	**100**

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie JayaTahun 2017

Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan jenis penyaluran antara lain bantuan rumah layak huni kepada Fakir Miskin dan Muallaf, bantuan kepada Balai Pengajian. Disamping itu, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya juga memberikan bantuan beasiswa kepada Tahfidz MUQ dalam pengembangan Insan Qurani.

Sumber – sumber Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya saat ini merujuk kepada Qanun No.10 tahun 2007, Peraturan Bupati No.17 Tahun 2008 dan Intruksi Bupati No. 1 Tahun 2012, telah memberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik terhadap Lembaga Institusi Negara, baik instatusi pusat, daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta (private), dan juga zakat pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, Anggota Dewan, dan lain-lain.

Sistem Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan pembagian Senif yang didata dan diverifikasi oleh Baitul Mal Gampong (BMG) yang terdiri dari Keuchik dan Imuem Gampong. Pembagian kuota penyaluran berdasarkan Jumlah penduduk Gampong dalam Kecamatan yang kemudian di persentasekan. Selanjutnya Jumlah Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 dan Tahun 2016 di sajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Jumlah Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Uraian	JumlahPenerima	Satuan	Satuan	Total
Tahun 2015					
1.	Senif Fakir				
	Santunan Fakir	1496	Org	200.000	299.200.000
	BantuanPerumahan	4	Unit	70.000.000	280.000.000
	SenifMiskin				
	SantunanMiskin	682	Org	200.000	136.400.000
2.	PengembalianHak UPZ 17%	1	Tahun	-	254.997.321
	BantuanPerumahan	3	Unit	70.000.000	210.000.000
	Amil				
	BiayaPengukuhanBaitul Mal Gampong				54.000.000
3.	BantuanRumah 1 Unit	1	Unit	70.000.000	70.000.000
	SenifMuallaf				
4.	BantuanMuallaf	10	Org	1.500.000	15.000.000
	Senif Gharim				
	BantuanBalaiPengajian	30	Unit	1.000.000	30.000.000
5.	Fisabilillah				
	KaderisasiTahfidz MUQ	12	Bulan	84.000.000	84.000.000
	JumlahTahun 2015				**1.433.597.321**
Tahun 2016					
1.	Senif Fakir				
	Santunan Fakir	2700	Org	300.000	810.000.000
	Bantuan Rehab Perumahan	11	Unit	25.000.000	275.000.000
	Santunan Fakir Uzur	500	Org	500.000	250.000.000
	Bantuan Modal Usaha	35	Org	2.000.000	70.000.000
2.	Senif Miskin				
	Santunan Miskin	1916	Org	300.000	574.800.000
	SantunanSantriDayahMiskin	250	Org	500.000	125.000.000
	Bantuan Rehab Perumahan	11	Unit	25.000.000	275.000.000
3.	Amil				
	Bantuan Rehab Perumahan	5	Unit	25.000.000	125.000.000
4.	Senif Muallaf				
	Beasiswa Santri Muallaf	-	-	-	3.000.000
	Bantuan Muallaf	-	-	-	30.000.000
5.	Senif Gharim				
	Bantuan Balai Pengajian	43	Unit	1.000.000	43.000.000
	JumlahTahun 2016				**2.580.800.000**

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.2.3.3. Peranan Majelis Adat Daerah

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara', yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat

Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adat-istiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Hubungan adat dengan syariat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana petuah narit maja "Hukom ngon Adat lagei dzat ngon sifeut". Hubungan adat dengan syariat dimaksud, tidak dapat dipisahkan, dimana sisi syariat sebagai penyaring nilai-nilai adat dan pada sisi adat sebagai pilar pendukung terlaksananya syariat seperti petuah narit maja "Hukom meunyoe hana meu adat tabeu, Adat meunyoe hana hukom bateu". Artinya: Hukom (syari'at) tanpa adat hambar, adat tanpa syariat batal (tidak sah).

Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan). Namun pada saat ini penerapan norma-norma tersebut sudah mengalami kemunduran. Hal ini jelas terlihat di kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat.

Penyebab utama kemunduran tersebut adalah kurangnya kegiatan pembinaan pada pemuka adat, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu memberikan dampak pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat. Di samping itu, pengaruh globalisasi yang bernilai negatif melunturkan nilai-nilai adat di masyarakat. Selain itu tidak cukup kuatnya upaya perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat Aceh (Heritage) menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/ peradaban Aceh telah hilang dan dilupakan. Selain itu masih rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan prosesi adat dikalangan generasi muda, wanita, pelajar, mahasiswa dan aparatur pemerintah sehingga telah menyebabkan kehidupan adat semakin terpuruk. Di sisi lain, kurang optimalnya peran lembaga-lembaga adat, seperti Panglima Laot, Keujruen blang, peutua seuneubok, pawang glee, haria peukan, syahbanda, fungsi keuchik, imuem mukim (kepala Mukim), tuha peut gampong, tuha peut mukim, imuem meunasah (imam

kampung) dan sekretaris gampong/mukim. Terutama dalam menegakkan kehidupan adat dalam bidang sosial, pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat.

Sampai saat ini, jumlah pimpinan adat yang sudah dilatih dalam bidang lembaga adat, mencapai 92 orang, dalam bidang seumapa/narit maja 283 orang dan dalam bidang peradilan adat 1.299 orang. Padahal, jumlah pimpinan adat di seluruh Aceh diperkirakan mencapai 58.920 orang. Terdiri dari 3.044 orang pada tingkat mukim dan 55.876 orang pada tingkat gampong. Itupun jumlah anggota tuha peut di tingkat mukim dan di tingkat gampong diperkirakan minimal lima orang per mukim/gampong. Dengan demikian, masih sangat banyak sekali tokoh adat yang perlu mendapatkan pelatihan dalam bidang adat, adat istiadat dan peradilan adat.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adat maka perlu dilakukan sosialisasi adat/adat istiadat dan pendampingan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu kebijakan dan strategi penguatan adat dan adat istiadat di Daerah diarahkan kepada:

a. Upaya pelestarian, penguatan dan pengembangan nilai-nilai adat dan adat istiadat perlu memberikan apresiasi kepada yang berjasa dan konsisten melestarikan adat dan adat istiadat serta khazanah adat. Selain itu, penguatan lembaga adat, pembinaan prosesi adat istiadat, pengkajian, sosialisasi nilai-nilai adat perlu menjadi agenda strategis dalam pembangunan daerah.
b. Melindungi hak-hak adat masyarakat semukim, termasuk melindungi dan mempertahankan hak ulayat mukim atas sumber daya alam setempat.
c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim dan gampong.

Berdasarkan kerangka kebijakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama pihak Legislatif telah mengesahkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Adat dan Reusam dan akan memprioritaskan program/kegiatan pembinaan adat sebagai berikut :

a. Penguatan kapasitas pimpinan adat, khususnya imuem mukim, keuchik, imuem chik, imuem gampong, tuha peut dan tokoh masyarakat lainnya.
b. Peningkatan kapasitas dan kuantitas seniman di Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan acara seumapa, narit maja dan seni budaya lainnya yang ada di daerah.
c. Penguatan pemahaman adat di kalangan birokrasi Kabupaten Pidie Jaya, generasi muda dan tokoh masyarakat
d. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat setempat termasuk adat setempat.

2.2.3.4. Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah membentuk wadah yang memberikan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yaitu Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan Visinya "Terwujudnya pelayanan pendidikan yang religius, profesional, berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri, menguasai IPTEK, berdaya saing, berwawasan kebangsaan dan berkeadilan bagi masyarakat Pidie Jaya.

Untuk terwujudnya visi tersebut MPD mempunyai misi yaitu:

1). Mendorong peran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan kompetitis;
2). Menumbuh kembangkan ide/gagasan yang aspiratif dari masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui pemberdayaan komite sekolah/madrasah;
3). Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, ikut serta mencegah pengaruh negative melalui ide/gagasan/saran kreatif dan inovatif;
4). Mendorong terciptanya peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang demokrratis dan berkeadilan serta dijiwai oleh semangat kebangsaan;
5). Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten Pidie Jaya guna mewujudkan tujuan pendidikan Nasional;
6). Mendorong pengembangan dan pelestarian budaya sebagai basis pendidikan;
7). Memantapkan dan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan industri (DUDI) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan kompetitif secara berkelanjutan;
8). Mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
9). Mendorong dan memantapkan kondisi dan citra Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten Pendidikan yang Religius, berkualitas dan kompetitif.

Majelis pendidikan daerah (MPD) Kabupaten Pidie Jaya merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya, dengan tujuan:

1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya;
2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat Pidie Jaya dalam penyelenggaraan pendidikan;
3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Pidie Jaya.

Adapun peran yang dijalankan MPD Kabupaten Pidie Jaya adalah: 1). Pemberi pertimbangan (advisor agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di

Kabupaten Pidie Jaya; 2). Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pidie jaya; 3). Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan; 4). Mediator antara pemerintah dan DPRK Pidie Jaya dengan masyarakat Pidie Jaya. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017, MPD telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada Bupati Pidie Jaya terkait persoalan Pendidikan di kabupaten Pidie Jaya sebagaimana pada tabel 2.44 berikut :

Tabel 2.44
Rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017

No	URAIAN	NOMOR REKOMENDASI	TANGGAL REKOMENDASI
1	Implementasi Pendidikan Berbasis Islami agar Bupati dapat membuat suatu konsep aturan (Perbup) tentang pendidikan Islami yang sempurna	15/MPD/2017	22 Maret 2017
2	Kerja Sama dengan Tokoh Masyarakat (Tokoh Pendidikan, agama, tani, nelayan, pemuda dan perempuan) dalam hal : Bupati supaya membuat aturan (Perbup) tentang penggunaan Media Elektronik yang semakin tidak terkontrol dipidie jaya, dan hendaknya pidie jaya juga dapat membuka sekolah berbasis IT	33/MPD/2017	9 Agustus 2017
3	Kerja Sama dengan Pemerhati Pendidikan mengenai nota kesepahaman untuk menanggulangi kenakalan remaja di sekolah, membuat Blue Print pendidikan berbasis islami dan qanun mengenai penggunaan media elektronik.	33/MPD/2017	9 Agustus 2017
4	Kerja sama dengan pemerhati pendidikan mengenai pelanggaran HAM di sekolah, penggunaan narkoba, pemanfaatan warnet dan HP yang sangat memprihatinkan serta ujian berbasis komputer.	01/MPD/2017	3 Januari 2017
5	Kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya pendidikan dan menghilangkan sikap apatis serta ikut melakukan pengawasan terhadap sekolah	26/MPD/2016	4 April 2016
6	Kerjasama dengan pemerhati pendidikan mengenai Standar Kepala sekolah/madrasah, penugasan guru sebagai kepala sekolah dan tentang dewan pendidikan serta komite sekolah	37/MPD/2015	02 November 2015

Sumber: Sekretariat MPD Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Untuk menjalankan perannya MPD berfungsi sebagai: 1). Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang di Pidie Jaya; 2). Melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 3). Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; 4). Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah dan DPRK kabupaten Pidie Jaya mengenai: a). Kebijakan dan program pendidikan;

b). kriteria kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan; c). kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d). Kriteria fasilitas pendidikan; dan e). Hal lain yang terkait dengan pendidikan.

2.2.3.5. Pendidikan Dayah

Sebagai sebuah daerah yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan Syariat Islam dapat mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di bidang pendidikan dengan peningkatan kualitas umat dan kualitas penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, maka lembaga pendidikan dayah terus berkembang menjadi sistem pendidikan alternatif bagi generasi muda. Banyak lembaga pendidikan dayah yang terus berbenah dalam rangka menjamin mutu lulusannya dihampir semua kecamatan. Ada beberapa lembaga pendidikan dayah sudah eksis sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dengan mutu berkualitas seperti Dayah Jeumala Amal di Kecamatan Bandar Baru dan Darul Munawarah Kuta Krueng di Bandar Dua. Umumnya lembaga pendidikan dayah di Kabupaten Pidie Jaya menganut model pembelajaran Salafiyah sesuai dengan kearifan masyarakat Aceh.

Seiring dengan penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya dan di Aceh pada umumnya, maka Lembaga Pendidikan Dayah terus berkembang dalam mengemban tugas untuk mendidik generasi muda yang Islami. Ada beberapa lembaga Pendidikan Dayah yang sudah ada sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dengan mutu Pendidikan Dayah yang berkualitas seperti Dayah jeumala Amal Di Bandar Baru dan Darul Munawwarah di Bandar Dua. Perkembangan Lemabaga Pendidikan Dayah terus meningkat dari Tahun ke tahun dan diikuti dengan penyedaian dan perbaikan mutu saran dan prasarananya. Tahun 2012 Dayah di Kabupaten Pidie Jaya terdapat 36 Unit dayah terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2017 menjadi 48 unit. Jumlah Dayah, Guru, dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012-2017 secara rinci dapat di lihat pada Tabel 2.45

Tabel 2.45
Jumlah Dayah, Guru, dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012-2017

No	Kecamatan	Dayah (unit)						Guru (orang)						Santri (orang)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bandar Dua	13	12	12	13	13	13	343	368	308	347	347	347	4.444	3.372	3.372	2.742	2.742	2.795
2	Jangka Buya	4	3	3	4	4	5	69	52	58	49	49	49	660	648	648	752	752	752
3	Ulim	5	5	5	6	6	6	175	90	94	84	84	91	1.649	663	663	579	579	634
4	Meurah Dua	1	2	2	1	1	3	73	10	19	9	9	22	1.113	127	127	54	54	315
5	Meureudu	-	1	1	1	1	3	-	-	7	6	6	21	-	-	85	29	29	352
6	Trienggadeng	4	3	3	3	3	5	170	59	56	39	39	51	2.127	549	549	230	230	405
7	Panteraja	3	4	4	4	4	4	141	31	33	43	43	43	1.411	406	406	460	460	460
8	Bandar Baru	6	8	8	7	7	9	381	18	183	172	172	185	4.426	2.147	2.147	2.007	2.007	2.231
	Jumlah	36	38	38	39	39	48	1.352	628	758	749	749	809	15.830	7.912	7.997	6.853	6.853	7.944

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kab. Pidie Jaya, 2017

Peningkatan jumlah dayah seiring dengan bertambahnya jumlah santri yang dari tahun ke tahun di Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah santri terus meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2017 menjadi 7.944 orang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah santri terbanyak terdapat di Kecamatan Banda Dua yaitu sebanyak 2.975 orang dan kecamatan dengan jumlah santri paling sedikit adalah kecamatan Meurah Dua sebanyak 315 orang. Begitu juga jumlah guru pada tahun 2015 sebanyak 749 orang meningkat menjadi 809 orang pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh kecamatan. Selanjutya disamping pendidikan dayah di Kabupaten Pidie Jaya juga terdapat Balai Pengajian yang tersebesar di setiap Kecamatan sebagaimana secara rinci di sajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Jumlah Balai Pengajian, Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 dan 2017

No	Kecamatan	Balai Pengajian (unit)		Guru (orang)		Santri (orang)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Bandar Dua	63	65	302	304	3772	3772
2	Jangka Buya	20	20	76	94	1143	1312
3	Ulim	42	42	177	181	2259	2319
4	Meurah Dua	32	34	133	118	2062	1890
5	Meureudu	38	41	228	227	3360	3131
6	Trienggadeng	36	38	178	166	3014	2818
7	Panteraja	15	15	68	65	1189	1189
8	Bandar Baru	68	71	314	293	4558	4233
Jumlah		**314**	**326**	**1476**	**1448**	**21357**	**20664**

Sumber : Dinas Pendidikann Dayah Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupten Pidie Jaya, tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Pelayanan Dasar (Urusan Wajib)

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari layanan urusan wajib pembangunan guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, berkreasi, sehat dan berprestasi. Beberapa indikator yang dapat mengukur sejauh mana pembangunan pada layanan urusan wajib dapat dilihat sebagai berikut:

2.3.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS), indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkungan pendidikan dan

penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung bedasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

APS Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015 untuk kelompok usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI) adalah 100,00 persen, untuk kelompok usia sekolah pendidikan SMP/MTs adalah 97,57 persen, untuk tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) adalah 79,84 persen. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan tahun 2015 APS semua jenjang pendidikan sudah harus mencapai 100 persen sebagaimana pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2015
Kabupaten Pidie Jaya

No	Kelompok usia sekolah	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	**SD/MI** (usia 7-12 tahun)	99,82	97,97	99,37	100,00	99,57	100,00
2	**SMP/MTs** (usia 13-15 tahun)	97,60	91,66	92,74	94,61	96,25	97,57
3	**SMA/MA/SMK** (usia 16-18 tahun)	74,73	73,61	71,28	69,72	69,72	79,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pidie Jaya, 2016

B. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah perbandingan antara jumlah sekolah Jenjang pendidikan Dasar (SD/MI + SMP/MTs) dengan jumlah penduduk usia sekolah (7 thn sampai 15 tahun) dikalikan dengan 10.000, Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan yang diberikan sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah, rasio ketersedian sekolah di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2009 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009-2016
Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	**SD/MI**								
1.1.	Jumlah sekolah	114	114	114	114	114	114	116	117
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.672	16.872	17.092	17.155	17.155	17.445	18.450	17.850
2	**SMP/MTs**								
2.1.	Jumlah sekolah	33	33	33	33	33	33	40	42
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.152	8.292	8.315	8.390	8.390	8.441	9.423	8.570

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.3.	Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs)	147	147	147	147	147	147	156	159
2.4.	Jumlah Pddk (Usia 7 – 15 Thn)	24.824	25.164	25.407	25.545	25.545	25.886	27.873	26.420
2.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah untuk 10.000 Pddk	59,22	58,42	57,86	57,55	57,55	56,78	55,96	60,18
3	**SMA/MA/SMK**								
3.1.	Jumlah sekolah	18	18	20	21	21	21	24	24
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	-	-	-	8.290	8.409	8.567	8,552	9,074
3.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah untuk 10.000 Pddk	-	-	-	25,330	24,970	24,510	28,06	26,44

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Tabel 2.48 menjelaskan bahwa rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs) dari tahun 2009 sampai tahun 2016 berfluktuatif. Rasio ketersediaan sekolah sampai dengan tahun 2014 menurun dari 59,22 pada tahun 2009 menjadi 56,78 tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi peningkatn kembali menjadi 60,18 hal ini bermakna bahwa pelayanan yang diberikan oleh sekolah baru mencapai 60,18 per 10.000 penduduk. Bila ditinjau dari jumlah murid per sekolah untuk SD/MI tahun 2009 adalah 1: 146 (satu sekolah menampung 159 siswa) sedangkan standar Nasional 1 : 180 dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs 1 : 270 (satu sekolah menampung 270 siswa), demikian juga untuk jenjang pendidikan menengah.

C. Rasio Siswa per Sekolah dan Rasio Guru Terhadap Siswa

Rasio guru terhadap murid, adalah perbandingan antara jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTS) dibandingkan dengan jumlah murid, rasio ini mengidentifikasikan ketersediaan tenaga pengajar dengan jumlah murid yang ideal untuk 1 (satu) guru agar tercapai mutu pengajaran. Jumlah guru dan murid di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2009 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut:

Tabel 2.49
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 – 2016
Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	**SD/MI**								
1.1	Jumlah guru	1.210	1.210	1.223	1.223	1.223	1.239	1.166	1.160
1.2	Jumlah murid	17.001	17.111	19.671	19.850	19.850	20.163	16.677	17.324
	Rasio	1 : 14	1 : 14	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 14	1 : 15
2	**SMP/MTs**								
2.1	Jumlah guru	769	769	772	772	772	785	673	658

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.2	Jumlah murid	7.991	8.152	12.352	13.421	13.421	13.704	8.423	8.037
	Rasio	1 : 14	1 : 11	1 : 16	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 13	1 : 12
1	Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)	1.979	1.979	1.995	1.995	1.995	2.024	1.839	1.818
2	Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)	24.992	25.263	32.023	33.271	33.271	33.867	25.100	25.361
3	Perbandingan Guru : Murid (SD/MI, SMP/MTs)	1 : 13	1 : 13	1 : 16	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 14	1 : 14

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya, 2017.

Tabel 2.49 menggambarkan bahwa perbandingan antara Guru dengan murid tahun 2016 untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 1 : 15 dan Jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 12 (1 orang guru membimbing 15 orang siswa) sedangkan standar Nasional untuk SD/MI sebesar 1 : 17 dan untuk SMP/MTs 1 : 15, artinya rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Pidie Jaya sudah memadai, dan perlu dipersiapkan rekrutmen baru tenaga pengajar sebagai pengisi lowongan guru yang pensiun di masa yang akan datang, demikian juga halnya distribusi guru yang merata perlu menjadi perhatian.

D. Perkembangan Hasil Ujian Nasional (UN)

Berdasarkan perkembangan keberhasilan siswa dalam menghadapi ujian Nasional sejak tahun 2009 sampai tahun 2016 terjadi fluktuasi baik itu dari segi nilai rata-rata maupun persentase kelulusan untuk semua jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan SD/MI persentase kelulusan menurun sejak tahun 2009 sebesar 98,99 persen menjadi 99,80 tahun 2016 arahnya terus meningkat, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs nilai rata –rata sejak tahun 2009 sampai tahun 2016 terjadi fluktuasi karena pada tahun 2013 Cuma yang lulus hanya sebesar 94,61 persen, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 98,97 persen. Demikian juga halnya pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, perlu dilakukan upaya – upaya peningkatan tentang nilai rata – rata siswa yang lulus ujian Nasional demikian juga halnya dengan persentase kelulusan harus menjadi perhatian yang serius. Pekembangan Nilai dan angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK secara rinci disampaikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Nilai rata-rata dan Angka Kelulusan Ujian Nasional Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2016 Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenjang Pendidikan	Unsur penilaian	Tahun							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	Nilai Rata-rata	7,71	7,16	6,97	7,89	7,34	7,15	6,90	7,50
		Angka Kelulusan	98,99	99,06	99,46	99,34	99,27	99,36	99,90	99,80
2	SMP/MTs	Nilai Rata-rata	8,06	7,72	7,34	7,45	6,39	6,57	6,85	7,53
		Angka Kelulusan	98,79	94,34	99,01	99,55	94,61	99,80	99,50	98,97
3	SMA/MA	Nilai Rata-rata	7,16	7,27	7,28	7,77	7,34	7,45	7,58	7,75
		Angka Kelulusan	99,14	80,60	97,86	99,29	94.68	97,73	98,85	98,08
4	SMK	Nilai Rata-rata	-	-	4,14	6,45	6,58	6,85	6,68	6,75
		Angka Kelulusan	-	-	82,76	92,00	97,50	100	98,15	98,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya 2017

E. Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah rata-rata untuk SMA/SMK/MA adalah 1 : 488. Ini menggambarkan bahwa daya tampung sekolah masih berada dalam status mencukupi untuk menampung siswa jika semua penduduk usia sekolah masuk ke sekolah. Daya tampung sekolah maksimal adalah 864 siswa menurut standar nasional.

Rasio siswa per sekolah untuk SMA/SMK/MA tahun 2013 adalah 395, angka ini menunjukkan bahwa jumlah siswa setiap sekolahnya masih bisa ditolerir karena berdasarkan standar nasional jumlah siswa maksimal setiap sekolah tidak boleh melebihi 864 siswa agar proses belajar mengajar lebih efektif. Rasio guru terhadap siswa untuk SMA/SMK/MA tahun 2013 adalah 14, jika jumlah siswa dalam satu kelas 35 siswa maka rasio perbandingan guru dengan siswa adalah 2,5. Hal ini masih dalam batas kewajaran karena di tingkat SMA banyak mata pelajaran dengan guru yang harus mempunyai pendidikan kejuruan.

2.3.1.2. Fokus Seni dan Budaya

Kabupaten Pidie Jaya memiliki 241 group kesenian sampai dengan tahun 2011 yang tersebar di 8 kecamatan. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai kesenian seperti PMTOH, Boh Katok, Biola Aceh, Rebana/Nasyid, Seudati, Seumapa Linto, Rapaie Daboh, Doda Idi Aneuk, Rapaie Bubbee, Geudeu-geudeu, Tari Kreasi, Likee Maulid, Tari Tradisi, Dalail Khairat dan Meurukon.

Semua kesenian yang ada di Kabupaten Pidie Jaya mengandung unsur-unsur islami yang melekat tidak terpisahkan. Kesenian yang ada juga membawa simbol kekompakan masyarakat, energik dalam artian bersemangat dalam melakukan aktivitas dan dinamis serta mengandung unsur nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat.

Pembangunan seni budaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama ini bertujuan untuk memelihara budaya warisan leluhur yang begitu kaya, di samping itu untuk memberikan wawasan budaya kepada generasi muda. Derasnya arus informasi yang berdampak negatif akibat budaya global, yang sedikit demi sedikit akan merusak tatanan budaya masyarakat yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki keragaman budaya dari berbagai etnik penduduk yang mendiaminya. Namun sampai saat ini potensi tersebut relatif belum dapat dikembangkan secara maksimal sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah. Tantangan ke depan diperlukan kegiatan yang bisa mensinergikan antara potensi keragaman budaya tersebut dengan keberadaan Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Momentum sebagai jalur perdagangan dan daerah transit harus dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni dan keragaman budaya tersebut. Selain itu, perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan budaya dan kesenian, diperlukan dukungan yang kuat melalui berbagai promosi. Sedangkan pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan Landmark Pidie Jaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Terkait pengembangan aspek pelayanan umum di bidang budaya tersebut, Kabupaten Pidie Jaya juga tercatat pernah menjadi juara harapan pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-V Tahun 2009 yang lalu. Pengembangan seni dan budaya juga tidak terlepas dari keberadaan sanggar-sanggar (grup) kesenian yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Jenis kegiatan yang dikembangkan oleh sanggar-sanggar kesenian tersebut juga terbagi pada jenis kegiatan Tradisional (TR) dan Kreasi Baru (KB). Jumlah sangar seni budaya per kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Jumlah Sanggar Seni Budaya dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kesenian
1.	Bandar Baru	4	Seudati, Saman, Gayo, Likok Pulo, dan Tarian Kreasi.
2.	Panteraja	3	Rebana dan Tarian Kreasi
3.	Trienggadeng	9	Tari Bubei, Jeu-ei, Uram Trieng, Seudati, Rabbana, Drama Operet, Geudeu-Geudeu, dan Kreasi Baru.
4.	Meureudu	7	Rebana, Seudati, Rapa' ie, Biola Aceh, Rapa' ie, Bala Bari, Geudeu-Geudeu, dan Tarian Kreasi Baru.
5.	Meurah Dua	4	Rapa' ie Geleng, Likok Pulo, Meureukon, Seudati, Saman, Laweut, dan Kreasi Baru.
6.	Ulim	5	Rapa' ie, Rapa' ie Dadoh, Rebana, dan Kreasi Baru.
7.	Jangka Buya	1	Rebana
8.	Bandar Dua	5	Rapa' ie, Rebana, Meureukon, Rabani Wahid, dan Tarian Kreasi.

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2015

Jenis kesenian budaya yang paling digemari masyarakat Pidie Jaya adalah kesenian Rapa' ie, Rebana, dan Meureukon di samping kesenian-kesenian lain yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat seperti tarian Seudati dan Geudeu-Geudeu. Kesenian Geudue-Geudeu merupakan kesenian warisan asli masyarakat Pidie Jaya. Biasanya kesenian adu fisik ini dilakukan pemuda setelah panen padi. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selalu memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda untuk beratraksi menampilkan kesenian Geudeu-Geudeu pada kegiatan-kegiatan besar kebudayaan di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

2.3.1.3. Kesehatan

Kabupaten Pidie Jaya sudah memiliki rumah sakit rujukan yang bertipe C. Beberapa infrastruktur dasar sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung status rumah sakit bertipe C seperti ruang rawat inap, ruang radiologi, ruang operasi, IGD, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesahatan mayarakat Pidie Jaya tahun 2016 sudah mengalami peningkatan. Terdapat 11 Puskemas dan 98 Poskesdes serta sebanyak 226 Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di pedesaan. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Pidie jaya, baik dirumah sakit umum daerah, Dinas Kesehatan, Puskemas, dan Poskesdes sejak tahun 2012 berjumlah 801 orang, tahun 2013 berjumlah 1.773 orang, tahun 2014 berjumlah 1.824 orang namun pada tahun 2016 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya tinggal 1.057 orang hal ini dikarenakan banyak tenaga kesehatan yang pindah kerja keluar daerah. Lebih jelas jumlah sarana dan tenaga kesehatan dapat di lihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun 2012-2016
Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Tenaga Kesehatan				
				Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016
1	Bandar Baru	2	44	111	403	403	196	196
2	Pante Raja	1	10	47	121	121	60	60
3	Trienggadeng	1	27	92	184	184	108	108
4	Meureudu	1	30	89	162	162	100	100
5	Meurah Dua	1	19	72	106	106	79	79
6	Ulim	1	30	56	127	127	120	120
7	Jangka Buya	1	18	43	104	104	50	50
8	Bandar Dua	3	48	122	277	277	150	150
9	RSU	-	-	111	289	289	137	137
10	Dinkes	-	-	58	-	51	57	57
	Jumlah	11	226	801	1.773	1.824	1.057	1.057

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan MDG's, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan dana melalui berbagai sumber pendanaan. Kemajuan pembangunan bidang kesehatan dan pelayanan di Kabupaten Pidie Jaya dapat lihat dari jumlah tenaga kesehatan yang tersedia berdasarkan jenjang pendidikan pada sarana kesehatan, seperti diuraikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Distribusi SDM Kesehatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016

No	Jumlah Tenaga	Puskesmas					Dinkes					RSU					Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	4	2	3	3	4	-
2	Dokter Umum	16	16	22	20	20	-	-	-	-	-	7	15	15	13	13	25	31	31	35	20
3	Dokter Gigi	7	7	14	8	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8	8	8	15	8
4	S2 Kesehatan	-	-	-	-	-	5	-	4	4	3	-	-	-	-	-	5	-	4	4	3
5	SKM	60	60	64	40	40	13	-	-	-	16	12	20	20	20	20	53	80	80	84	4646
6	Bidan	645	645	385	182	182	7	-	-	-	-	12	79	79	16	16	216	724	724	401	182
7	Perawat Gizi	28	28	16	2	2	2	-	-	-	19	2	10	10	3	3	25	38	38	19	19
8	Perawat Gigi	22	22	12	12	12	1	-	-	-	-	1	6	6	3	3	16	28	28	15	12
9	Sanitarian	-	125	77	70	70	9	-	-	-	-	3	15	15	7	7	90	-	140	84	70
10	Fisioterapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
11	Kefarmasian	27	27	17	12	12	2	-	-	-	2	4	22	22	6	6	22	49	49	23	14
12	Analis kes	33	33	11	16	16	2	-	-	-	-	5	-	-	5	5	35	33	33	16	16
13	Apikes	-			3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	1	-	3
14	Rontgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	8	-	-	-	-
15	Anastesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-
16	Atem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
17	Non Kesehatan	-	-	-	-	-	10	67	67	67	-	-	-	-	-	-	48	67	67	67	55
	Jumlah	838	963	618	365	365	51	67	71	71	39	65	156	171	79	79	564	1.061	1.206	768	404

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Tenaga kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 berjumlah 398 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, agar tenaga kesehatan dapat ditingkatkan jumlahnya. Untuk sumber daya manusia kesehatan sampai dengan tahun 2016, rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk belum memenuhi target, seperti untuk tenaga dokter umum 20 yang tersedia untuk 148.719 penduduk Kabupaten Pidie jaya (seharusnya jumlah dokter umum sebanyak 59,49 orang atau 60 orang), dokter gigi 8 orang yang ada seharusnya 30 orang demikian juga dokter spesialis yang sampai dengan saat ini belum tersedia sedangkan kebutuhan Dokter Spesilias sebanyak 17 orang. Untuk mendapat gambaran secara rinci tentang distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Distribusi Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan dalam Kabupaten Pidie jaya tahun 2016

No	Puskesmas	Jenis Tenaga Kesehatan								
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi	Kesmas	Kesling	Analis
1	Bandar baru	3	1	25	25	0	5	10	5	2
2	Cubo	2	0	2	4	1	2	0	2	1
3	Pante raja	1	1	16	10	1	1	2	10	2
4	Trienggadeng	1	1	23	31	0	2	6	9	3
5	Meureudu	2	1	19	28	1	1	1	8	1
6	Meurah dua	-	1	18	18	2	2	3	6	3
7	Ulim	2	1	8	17	1	5	2	7	1
8	Jangka buya	3	1	9	13	0	1	0	5	1
9	Bandar dua	3	1	17	13	3	2	1	7	2
10	Kuta krueng	2	-	6	5	1	1	6	5	0
11	Blang kuta	1	-	22	13	1	1	3	1	0
12	RSU	13	1	59	16	4	3	20	7	5
13	Dinkes	-	-	6	5	3	2	12	5	0
Total		20	8	17	182	14	25	46	70	16

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya, 2017

A. Rasio puskesmas, polindes, pustu per satuan penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Sejak tahun 2011 seluruh kecamatan di Aceh sudah memiliki puskesmas, bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 325 unit. Jumlah ini terjadi peningkatan selama 2 tahun terakhir pada tahun 2013 total puskesmas di Aceh menjadi 334 unit yang terdiri dari puskesmas rawat inap 138 unit dan non rawat inap 196 unit sedangkan jumlah Kecamatan sebanyak 289 Kecamatan. Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 1976, kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000 jiwa sampai 50.000 jiwa.

Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2016 jumlah puskesmas sebanyak 11 unit yang tersebar diseluruh Kecamatan, Jumlah Puskesmas yang dibutuhkan didasarkan pada rata-rata penduduk 30.000 jiwa adalah sebanyak 4,96 unit atau 5 unit untuk jumlah penduduk 148.719 jiwa, artinya Puskesmas yang tersedia sudah melebihi kebutuhan sebanyak 6 unit, jadi rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 adalah 2,17 per 30.000 penduduk, demikian juga untuk fasilitas lainnya seperti Polindes dan Pustu, artinya

pembangunan Puskesmas, polindes dan pustu baru tidak diperlukan untuk sementara waktu namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya yang ada perlu ditingkatkan.

Tabel 2.55
Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun (jiwa)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11	11	11
2	Jumlah Polindes	98	98	98	98	98	98	104
3	Jumlah Pustu	19	19	19	19	19	19	19
Jumlah Penduduk		**132.956**	**136.000**	**138.415**	**140.769**	**145.584**	**148.719**	**151.472**
1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	2,50	2,43	2,38	2,34	2,26	2,22	2,17
2	Rasio Polindes per 30.000 penduduk	22,11	21,62	21,24	20,89	20,19	19,77	20.59
3	Rasio Pustu per 30.000 penduduk	4,29	4,19	4,12	4,05	3,91	3,83	3.76

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya, 2017

B. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk kabupaten Pidie Jaya tahun 2015 sebanyak 148.719 jiwa jumlah rumah sakit yang ada sebanyak 1 unit yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk 148.719 jiwa adalah sebesar 1,49 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Pidie masih memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas lainnya masih perlu ditingkatkan. Rasio Kapasitas Rumah Sakit dengan Jumlah Penduduk, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, maksud dari pasal ini adalah penyediaan rumah sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk.

Untuk fasilitas kesehatan yang merupakan salah satu unsur utama dalam pelayanan kesehatan bersumberdaya masyarakat disebut Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang terdiri atas posyandu, polindes, poskesdes dan desa siaga. Fasilitas kesehatan yang berasal dari pemerintah terdiri atas puskesmas (puskesmas rawatan, puskesmas non-rawatan), puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah (RSUD). Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut 2.56.

Tabel 2.56
Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dan Kepemilikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No	Jenis Sarana Kesehatan	Kepemilikan		Jumlah
		Pemerintah/ Masyarakat	Swasta	
1	RSU / RS Swasta	1	-	1
2	Puskesmas	11	-	11
3	Puskesmas Pembantu	19	-	19
4	Puskesmas Keliling	-	-	-
5	Balai Pengobatan/ Klinik	1	8	9
6	Rumah Bersalin	-	2	2
7	Apotik	-	4	4
8	Toko Obat Berijin	-	24	24
9	Praktek Bersama	-	1	1
10	Praktek dr. Spesialis	-	-	-
11	Praktek dr. Umum		37	37
12	Poskesdes	105	-	105
Jumlah		137	76	213

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

C. Rasio dokter per satuan penduduk

Berdasarkan ketentuan WHO, rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.500 orang penduduk (1 : 2.500), dokter spesilis 1 orang dokter melayani 5.000 orang penduduk (1 : 5.000) dan dokter Gigi 1 orang dokter melayani 9.000 orang penduduk (1 : 9.000). Data tahun 2016 jumlah dokter umum di Kabupaten pidie Jaya sebanyak 40 orang, dokter spesialis sebanyak 5 orang dan dokter gigi sebanyak 8 orang.

Jumlah dokter umum yang ideal tahun 2016 di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 60 orang namun yang tersedia hanya sebanyak 40 orang, artinya kekurangan dokter umum sebanyak 20 orang, dokter spesialis yang tersedia sebanyak 5 orang sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 30 orang demikian juga halnya dengan dokter gigi yang tersedia sebanyak 8 orang sedangkan kebutuhan sebanyak 17 orang. Untuk memenuhi kekurangan tersebut pemerintah daerah harus berusaha untuk mendatangkan dari luar daerah atau merekrut tenaga kesehatan baru, baik secara kontrak maupun kerja sama dengan lembaga donor, rasio dokter di Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel. 2.57 berikut.

Tabel 2.57
Rasio Dokter di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016

Tenaga Medis		Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dokter Umum	Tersedia	23	19	23	13	15	35	40
	Kebutuhan				56	58	60	60
Dokter Spesialis	Tersedia	-	-	-	1	2	4	5
	Kebutuhan	-	-	-	28	29	30	30

Tenaga Medis		Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dokter Gigi	Tersedia	3	7	8	6	6	15	8
	Kebutuhan	-	-	-	16	16	17	17
Jumlah Penduduk		132.956	136.000	138.415	140.769	145.584	148.719	151.472
Rasio Dokter Umum per 40/100.000 (1 : 2.500 pddk)		1 : 5.781	1 : 7. 158	1 : 6.018	1 : 5.631	1 : 9.706	1 : 4.249	1 : 3.786
Rasio Dokter Spesialis per 20/100.000 (1 : 5.000 Pddk)		-	-	-	1 : 70.385	1 : 72.792	1 : 37.180	1 : 30.294
Rasio Dokter Gigi per 11/100.000 (1 : 9.000 Pddk)		1 : 44.319	1 : 17.000	1 : 17.302	1 : 17.596	1 : 24.264	1 : 9.915	1 : 18.934

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya, 2017

D. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/ MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk di register, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama hamil, masa kehamilan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Jumlah bidan di kabupaten Pidie Jaya tahun 2015 tercatat sebanyak 401 orang jumlah penduduk sebanyak 148.719 jiwa maka rasio bidan sebesar 2,70 per 1.000 penduduk, artinya jumlah bidan sudah melebihi standar nasional (100 bidan per 100.000 penduduk).

Jenis tenaga kesehatan berikutnya adalah tenaga keperawatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Rasio tenaga keperawatan tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 117,5 per 100.000 penduduk. Tenaga kefarmasian di kabupaten Pidie Jaya tahun 2015 adalah 23 orang dengan rasio sebesar 15,47 per 100.000 penduduk, jika kita melihat rasio tenaga kefarmasian tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 10 per 100.000 penduduk. Tenaga nutrisionis atau gizi di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015 adalah 19 orang dengan rasio sebesar 12,78 per 100.000 penduduk, angka ini masih dibawah target nasional dan standar WHO sebesar 22 per 100.000 penduduk. Untuk pedoman selanjutnya standar ketenagaan puskesmas dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58
Standar Ketenagaan Puskesmas

No	Jenis Tenaga	Puskesmas kawasan Perkotaan		Puskesmas kawasan Pedesaan		Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
1	Dokter atau dokter layanan primer	1	2	1	2	1	2
2	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
3	Perawat	5	8	5	8	5	8
4	Bidan	4	7	4	7	4	7
5	Tenaga Kesehatan masyarakat	2	2	1	1	1	1
6	Tenaga kesehatan lingkungan	1	1	1	1	1	1
7	Ahli teknologi laboratorium medik	1	1	1	1	1	1
8	Tenaga gizi	1	2	1	2	1	2
9	Tenaga Kefarmasian	1	2	1	1	1	1
10	Tenaga Administrasi	3	3	2	2	2	2
11	Pekarya	2	2	1	1	1	1
Jumlah		**22**	**31**	**19**	**27**	**19**	**27**

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Keterangan: Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas:
d. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.
e. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

E. Cakupan peserta KB aktif

Cakupan peserta KB Aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumla Pasangan Usia Subur (PUB). Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2010 - 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 persentase cakupan peserta KB aktif sebesar 27,08 persen, tahun 2012 menurun menjadi 21,60 persen namun dua tahun terakhir meningkat lagi sampai tahun 2015 mencapai angka 61,05 persen, sebagaimana tabel di bawah, hal ini mmenggambarkan bahwa pencapaian program keluarga sejahtera sudah berjalan dengan baik, artinya pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab berkeluarga sudah baik, dan hal ini perlu ditingkatkan dan didorong masyarakat dan pemuka masyarakat untuk mendukung program tersebut di masa masa yang akan datang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010-2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pasangan Usia Subur (PUS)	20.965	19.570	20.075	21.314	34.354	26.768
Peserta KB Aktif	5.677	6.880	4.265	8.887	18.444	16.341
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	27,08	35,16	21,60	41,70	53,69	61,05

Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun- 2016

Masalah kependudukan pada hakekatnya menyangkut tiga aspek yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek mobilitas. Saat ini dari aspek kuantitas, Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km2. Sementara itu dari aspek kualitas Aceh memiliki kualitas penduduk yang rendah, tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia Aceh menempati peringkat ke-18 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010.

Kondisi di atas berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan diantaranya aspek sosial ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Besarnya dampak kependudukan ini memerlukan strategi yang memperhatikan perkembangan struktur penduduk, terutama penduduk usia muda dalam menyiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan daerah galcitas, kumuh, perkotaan dan kepulauan, dan menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin serta pengembangan pelayanan keluarga sejahtera yang komprehensif.

2.3.1.4. Lingkungan Hidup dan Persampahan

A. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Permasalahan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam hal membuang sampah, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, pendirian rumah hunian di sepanjang daerah aliran sungai, dan pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan perundangan.

Meskipun dana APBD yang di pergunakan untuk menangani pengelolaan persampahan dari tahun ke tahun semakin besar (ketika masih dalam wilayah kabupaten induk/Pidie), tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak di barengi dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan lingkungan hidup. Meningkatnya kepadatan lalu lintas di Kabupaten Pidie Jaya sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara langsung berpengaruh pada meningkatnya polusi udara di kabupaten Pidie Jaya. Masalah penurunan kualitas udara sehat dan bersih di Kabupaten Pidie Jaya di perparah dengan telah berkurangnya pepohonan kota akibat dari penggunaan lahan sebagai kebutuhan aktivitas manusia. Di samping itu, berkurangnya pepohonan di daerah penyangga yang berada di luar kewenangan Kabupaten Pidie Jaya akibat pengalihan lahan untuk

perumahan dan industri juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara di kabupaten Pidie Jaya.

Pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pidie Jaya, faktor yang akan terjaga untuk 20 tahun ke depan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kualitas lingkungan bersih dan sehat, semakin banyaknya penerapan green belt di Kabupaten Pidie Jaya. Meningkatnya sosialisasi akan arti hidup sehat dan bersih oleh berbagai lembaga, Di terapkannya uji kelaikan kendaraan bermotor untuk mengurangi tingkat polusi, selain itu, adanya pengembangan kawasan hijau kota.

Prediksi kondisi lingkungan hidup untuk jangka 20 tahun ke depan, antara lain : meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan, terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan, meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya polusi, berkembangnya ekowisata di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan, meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, dan bertambahnya ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam memprediksi kebutuhan air bersih total, dalam analisisnya dibedakan menjadi kebutuhan air domestik dan non domestik. Kebutuhan Domestik adalah kebutuhan air bersih untuk rumah tangga dengan standard kebutuhan air perkotaan sebesar 80 liter/orang/hari. Kebutuhan non Domestik adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, serta fasilitas sosial. Standard yang digunakan adalah 20 persen s.d 25 persen dari total kebutuhan air bersih untuk kegiatan domestik. Sedangkan untuk pelayanan umum 10 persen dari kebutuhan domestik. Selain itu dalam perhitungan kebutuhan air bersih untuk Kabupaten Pidie Jaya harus mempertimbangkan kehilangan air (tingkat kebocoran) dan kebutuhan pada beban maksimum.

Adapun proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2035 untuk rumah tangga adalah sebesar 4.092.240 liter/hari, untuk pelayanan umum sebesar 409.224 liter/hari, komersial 818.448 liter/hari, dan cadangan air bersih sebesar 81.845 liter/hari berada di kecamatan Bandar Baru, sementara proyeksi kebutuhan air bersih terendah di kecamatan Pante Raja, untuk kebutuhan rumah tengga sebesar 725.120 liter/hari, sedangkan untuk pelayanan umum sebesar 72.512 liter/hari, komersial sebesar 145.024 liter/hari, dan cadangan air bersih sebesar 14.502 liter/hari.

B. Persampahan

Penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2035 diperkirakan sebanyak 320.905 jiwa hal ini akan berimplikasi jumlah timbulan sampah yang diperkirakan sebanyak lebih kurang 920,00 m^3/hari, untuk dapat melayani persampahan pada tahun 2035 maka diperlukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan antara lain alat angkut sampah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara), system transfer depo, dan TPA (Tempat Pembuangan

Akhir). Wilayah yang memiliki aktivitas kegiatan yang relatif tinggi seperti Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Bandar Baru, dan Bandar Dua terutama khususnya untuk ibukota kecamatan. Wilayah tersebut potensial dalam memproduksi sampah, sehingga wilayah ini merupakan prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian rencana jaringan sistem persampahan di Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas: a). Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten; b). Pengembangan tekonologi komposing sampah organik dan sistem Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman; c). Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi: pasar; permukiman; perkantoran; dan fasilitas sosial lainnya. d). Optimalisasi TPS di Desa Cot Langien Kecamatan Bandar Baru. e). Pengembangan TPA di Rungkom Kecamatan Meureudu. f). Penyediaan TPA di Blang Awe seluas 10 Ha. g). Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan h). Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

Pola penanganan sistem pengelolaan persampahan dibagi atas 2 pendekatan yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat berskala lingkungan/kawasan dalam bentuk TPS 3R. Sedangkan pendekatan berbasis institusi berskala kota (TPA, TPST, FPSA, SPA) dan regional (TPA Regional).

Dalam usaha mencapai target target dan sasaran 100 persen cakupan pelayanan persampahan dibutuhkan pengelolaan di sumber yaitu dengan meningkatkan layanan penampungan dan pengangkutan serta pengelolaan akhir yaitu dengan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari Sistem Open Dumping dan Controlled Dumping menjadi Sanitary Landfill. Adapun upaya pengelolaan persampahan dilakukan dalam 2 yaitu program fisik dan non fisik dengan rincian sebagai berikut: a). Pengelolaan di Sumber (Fisik) berupa; 1). Pengadaan sarana layanan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPPS); 2). Pengadaan armada angkutan berupa Truck Pengangkutan Sampah, Armroll, Gerobak Sampah dan tong sampah; b). Pengelolaan Akhir (Fisik) yaitu ; 1). Peningkatan Pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); a). Program Non Fisik yaitu; b). Kampanye edukasi dan promosi; c). Advokasi pemda (eksekutif dan legislative); d). Bantuan teknis kelembagaan; e). Peningkatan kapasitas SDM; f). Sinkronisasi lintas sektor (implementasi/pendanaan). Saat ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pidie Jaya sebagai landasan hukum pengelolaan persampahan di lingkup Kabupaten Pidie Jaya.

2.3.1.5. Sarana dan Prasarana Jalan Raya

Jaringan transportasi wilayah merupakan hal yang penting untuk mempermudah pergerakan barang dan orang. Di samping itu, pelayanan transportasi perlu di tingkatkan guna

menciptakan keterkaitan spatial antar bagian-bagian wilayah di provinsi Aceh. Hal ini penting, karena di dasarkan pada asumsi bahwa suatu mekanisme perkembangan, dapat terjadi apabila terciptanya keterkaitan antar bagian wilayah. Berdasarkan sistem jaringan jalan di Aceh dibagi kedalam tiga koridor utama dalam pelayanan jaringan jalan yaitu : koridor utara, tengah, dan koridor selatan. Kota-kota yang masuk ke dalam koridor utara adalah: kota Kuala simpang, Langsa, Peureulak, Lhokseumawe, Bireuen, Beureuneun, Sigli, dan Banda Aceh. Kota-kota yang masuk koridor tengah yaitu : Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane. Sedangkan kota-kota yang masuk koridor selatan yaitu : Lamno, Meulaboh, Blang Pidie, Tapak Tuan, dan Subulussalam/Singkil.

Dari koridor-koridor tersebut, koridor utara jauh lebih ramai lalu lintasnya di bandingkan dengan koridor tengah dan selatan. Karena koridor utara merupakan koridor jalur penghubung kota Banda Aceh dengan kota Medan, serta di tunjang dengan jaringan jalan yang kondisinya lebih baik, ketersediaan berbagai fasilitas pendukung yang lebih lengkap di bandingkan dengan koridor lainnya. Pesatnya perkembangan transportasi di jalur utara membawa dampak yang sangat baik bagi perkembangan wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Dampak tersebut antara lain adalah : kemudahan pencapaian (aksesibilitas) yang tinggi dan menyebabkan berkembangannya kegiatan perdagangan, terutama kota-kota di sepanjang jalur regional tersebut.

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan raya, maka jalan dapat diklasifikasikan menjadi 2 klasifikasi jalan yaitu : Klasifikasi jalan menurut fungsi dan Klasifikasi menurut wewenang.

A. Klasifikasi jalan Menurut Wewenang

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. a). Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol; b). Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi; c). Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten; d). Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,

menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; e). Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

B. Klasifikasi Jalan Menurut peran dan fungsi

Jalan Arteri Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang kesatu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Primer adalah : a). Kecepatan rencana > 60 km/jam; b). Lebar badan jalan > 8,0 m; c). Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; d). Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai; e). Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal; e). Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota.

Jalan Arteri Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder lainnya atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Sekunder adalah : a). Kecepatan rencana > 30 km/jam; b). Lebar jalan > 8,0 m; c). Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata; d). Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat.

Jalan Kolektor Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang kesatu dengan kota jenjang ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Primer adalah : a). Kecepatan rencana > 40 km/jam; b). Lebar badan jalan > 7,0 m; c). Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata; d). Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu; e). Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal; f). Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota.

Jalan Kolektor Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Sekunder adalah : a). a. Kecepatan rencana > 20 km/jam; b). Lebar jalan > 7,0 m. Jalan Lokal Jalan Lokal Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Primer adalah: a). Kecepatan rencana > 20 km/jam; b). Lebar badan jalan > 6,0 m; c). Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa

Jalan Lokal Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Sekunder adalah : a). Kecepatan rencana > 10 km/jam; b). Lebar jalan > 5,0 m. Dari informasi tersebut diatas diharapkan selama priode RPJP kabupaten Pidie Jaya 2015 sampai 2035 nanti semua jaringan jalan yang ada sudah memenuhi standar yang disyaratkan dalam Undang undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan raya.

Sesuai dengan qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 4 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 – 2034 sistem jaringan jalan dalam wilayah kabupaten Pidie Jaya adalah: Jaringan Jalan Nasional sepanjang 38,71 Km meliputi : a). Jaringan jalan arteri primer meliputi : 1. Jalan Batas Kabupaten Pidie – Meureudu sepanjang 24,66 Km; 2. Jalan Meureudu – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 14,05 Km; b). Jaringan jalan kolektor primer (K1) berupa jalan Jl. High Grade - Highway Trans Sumatera batas Kabupaten Pidie - batas Kabupaten Bireuen sepanjang 34,41 Km. Sesuai dengan kriteria tersebut diatas jalan nasional yang ada di Kabupaten Pidie Jaya secara bertahap akan diupayakan untuk memenuhi standar jalan yang sudah ditetapkan secara nasional, terutama jalan masuk menuju jalan Nasional akan dibatasi secara efektif dan efisien dan juga aktifitas perdagangan atau pedagang musiman dipinggir jalan akan ditiadakan sehingga kecepatan dan kapasitas jalan tidak terganggu.

Jaringan Jalan Provinsi (K2) dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya sepanjang 23,44 Km meliputi :

1. Jalan Trienggadeng – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 19,48 Km;
2. Jalan Meureudu - Babah Jurong sepanjang 2,32 Km;
3. Jalan Sp Pangwa – Dayah Pangwa sepanjang 1,64 Km;.

Pada Tahun 2009 s.d 2014 telah dilakukan pembukaan jalan yang menghubungkan Meureudu (kabupaten Pidie Jaya) sampai ke Geumpang (kabupaten Pidie), namun akibat kendala hutan lindung dan konsisi keuangan daerah maka jalan tersebut belum selesai, diharapkan jalan tersebut dapat segera dituntaskan agar dapat dipergunakan secepatnya oleh masyarakat di dua Kabupaten bertetangga, dengan tembusnya jalan tersebut akan membuka keterisolasian dan mempermudah masyarakat berinteraksi dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survey total panjang jalan Meureudu-Geumpang ± 53 Km, yang sudah dilakukan terobosan sepanjang 18 Km dengan lebar 9 M dan yang sudah diaspal sepanjang 5,5 Km dengan lebar 5 M sedangkan sisanya belum diterobos sepanjang ± 35 Km, hal ini telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyediakan biaya pembangunannya sedangkan biaya ganti rugi lahan yang terkena pelebaran akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau melalui sumber dana lainnya yang sah.

Jaringan Jalan dalam Kabupaten sepanjang 520,834 Km meliputi 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Pembangunan jalan Kabupaten yang panjangnya sampai 520,834 Km membutuhkan biaya yang sangat besar namun hal itu sudah merupakan target yang harus diselesaikan secara bertahap akan dilakukan dari berbagai sumber dana Baik APBN, APBA, APBK maupun Swasta dengan tetap berpedoman kepada standarisasi yang ditetapkan, demikian juga terhadap jalan yang sudah dibangun masih diperlukan beberapa lokasi perbaikan tanjakan, bengkolan dan jarak pandang akan dilakukan secara bertahap. kondisi jaringan jalan berdasaran status di Kabupaten Pidie Jaya dapat di lihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Kondisi Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

No	Status Jalan	Panjang (Km)	Kondisi (Km)			
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Jalan Negara	38,8	32,8	-	6	-
2	Jalan Provinsi	23,44	15	-	-	8,44
3	Jalan Kabupaten	520,834	70,369	23,746	53,287	373,441

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Dilihat dari kondisi Jalan Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2017 dalam kondisi baik sepanjang 70.369 km (13,51 %), kondisi rusak ringan dan Rusak sedang sepanjang 23,746 Km (4,6%) dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 373.441 Km (71,70 %) dari panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Pidie Jaya, Hal ini merupakan target utama masa yang akan datang oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk menyediakan fasilitas transportasi yang baik dan nyaman kepada semua pengguna jalan raya. Selanjutnya kondisi jalan berdasarkan jenis menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Kondisi Jalan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Total Pjg (KM)	Jenis Perkerasan (Tahun 2017)				Kondisi Tahun 2017 (KM)				Yg Belum di Aspal (KM) / Perlu Pnngnan (KM)	% (Kndisi Baik)
			Aspal (KM)	Tanah (KM)	Kerikil/ Klas C (KM)	Klas B (KM)	Baik <11% (KM)	Rusak Sedang 11-<16% (KM)	Rsak Ringn 16-<23% (KM)	Rsak Berat >23% (KM)		
1	Bandar Baru	151,774	72,603	37	42,172		15,360	16,452	12,505	107,458	79,172	10,120
2	Pante Raja	39,51	16,985	12,152	10,373		7,804	2,55	3,046	26,11	22,525	19,752
3	Trienggadeng	67,646	31,893	13,395	22,358		6,093	1,194	3,268	57,091	35,753	9,007
4	Meureudu	62,438	34,149	19,942	8,347		6,460	0,35	14,016	41,612	28,289	10,346
5	Meurah Dua	23,943	9,73	2,728	11,485		2,950	2,45	2,372	16,171	14,213	12,321

No	Nama Kecamatan	Total Pjg (KM)	Jenis Perkerasan (Tahun 2017)				Kondisi Tahun 2017 (KM)				Yg Belum di Aspal (KM) / Perlu Pnngnan (KM)	% (Kndisi Baik)
			Aspal (KM)	Tanah (KM)	Kerikil/ Klas C (KM)	Klas B (KM)	Baik <11% (KM)	Rusak Sedang 11-<16% (KM)	Rsak Ringn 16-<23% (KM)	Rsak Berat >23% (KM)		
6	Ulim	58,155	24,012	3,532	30,611		6,910		3,295	47,95	34,143	11,882
7	Jangka Buya	16,482	14,436		2,046		4,036		6,287	6,159	2,046	24,487
8	Bandar Dua	100,895	50,522	15,194	35,181		20,756	0,75	8,495	70,892	50,374	20,572
JUMLAH		**520,843**	**254,33**	**103,943**	**162,573**		**70,369**	**23,746**	**53,284**	**373,443**	**266,515**	**14,811**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Di samping pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga memperhatikan kondisi jembatan yang memberikan kemudahan transportasi kepada masyarakat. Saat ini Pidie Jaya memiliki 122 unit jembatan baik kayu ataupun plat beton. Sebanyak 91 unti jembatan berkonstruksi plat beton, 12 unit merupakan jembatan lantai kayu. Sedangkan sisanya sebanyak 19 unit merupakan jembatan gantung yang ada di pedesaan. Dari keseluruhan jembatan tersebut sebanyak 48 unit atau 40 persen dalam kondisi baik. Jembatan gantung dengan kondisi baik sebanyak 16 persen dan jembatan lantai kayu kondisi baik sebanyak 17 persen. Berikut adalah jumlah dan panjang jembatan plat beton dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut.

Tabel 2.62
Jumlah dan Panjang Jembatan (plat beton/prestres) dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah (Unit)	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M^2)	Kondisi (unit)				Panjang yang Rusak (M)
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Bangun Baru	
1	Bandar Baru	26	395,90	110	43.549,00	16	3	7		87
2	Pante Raja	7	28,30	24,5	693,35	5		2		6
3	Trienggadeng	10	65,87	38,5	2.536,00	2	5	3		17,5
4	Meureudu	13	353,00	47	16.262,00	5	3	5		260
5	Meurah Dua	6	83,00	26	2.158,00	3	2	1		67
6	Ulim	8	31,40	28	879,20	3	1	4		20,9
7	Jangka Buya	10	68,90	35	2.411,50	2	5	3		7,9
8	Bandar Dua	23	149,26	86	12.836,36	10	5	8		33
Total		**103**	**1.168,63**	**395**	**81.323,40**	**46**	**24**	**33**		**546,3**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Selain Jalan nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten Pidie Jaya masih ada lingkungan yang harus menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten mengingat jalan lingkuangan tersebut sangat berhubungan dengan perumahan masyarakat pada suatu wilayah permukiman penduduk. Kondisi jalan lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 dapat di lihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Kondisi Jalan Lingkungan dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2017

No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Baik (Km)	Kondisi Kurang Baik(Km)	Kondisi Baik (%)
1	(BDB) Bandar Baru	17,79	14,09	3,71	79,18
2	(PTR) Pante Raja	16,06	11,13	4,93	69,32
3	(TRG) Trienggadeng	44,32	25,40	18,92	57,31
4	(MRD) Meureudu	34,65	12,09	22,56	34,88
5	(MDA) Meurah Dua	38,47	32,69	5,79	84,96
6	(ALM) Ulim	61,70	11,13	50,57	18,04
7	(JKB) Jangka Buya	8,22	3,76	4,46	45,74
8	(BDA) Bandar Dua	29,31	17,15	12,16	58,50
	Grand Total	**250,52**	**127,43**	**123,10**	**50,86**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.3.1.6. Daerah Irigasi

Berdasarkanperaturan Menteri PekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat nomor 04/PRTM/M/2015 tentang KriteriadanPenetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Pidie Jaya mempunyai Daerah Irigasi (DI) yang langsung di bawah pengelolaan kabupaten dan DI dibawah pengelolaan Provinsi yaitu DI Samalanga, DI Cubo Trienggadeng, DI Ulee Glee dan DI Meureudu. Luas potensi lahan pertanian sebesar 10.687 Ha yang terdiri dari sawah irigasi teknis, semi teknis, dan daerah irigasi perdesaan. Luas potensi pelayanan daerah irigasi teknis adalah 6.560 Ha; luas potensi pelayanan daerah irigasi semi teknis adalah 3.491 Ha, Luas pelayanan daerah irigasi perdesaan 633Ha dan jumlah embung yang ada sebanyak 4 buah. Panjang irigasi yang terbuat dari pasangan batu sepanjang 37.564 meter, dan panjang irigasi yang merupakan saluran tanah adalah 126.008 meter.

Daerah irigasi di Kabupaten Pidie Jaya terbagi sebanyak 4 (empat) Daerah Iirigasi: 1. Daerah Irigasi Ulim seluas 424 ha; 2. Daerah Irigasi Beuracan seluas 863 ha; 3. Daerah Irigasi Meureudu luas 1.729 ha; dan 4. Daerah Irigasi Cubo -Trienggadeng seluas 1.909 ha. Irigasi ini di kategorikan tipe A1 dan tipe B. Sumber air irigasi di Kabupaten Pidie Jaya berasal dari 5 aliran sungai besar yang masih alami, dan terdapat sebuah bangunan bendungan irigasi di desa Beuracan yang masih perlu ditingkatkan fungsinya agar mampu mengairi seluruh daerah pertanian di wilayah Kabupaten Pidie Jaya guna terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Daerah Irigasi kewenangan Nasional yang ada di kabupaten Pidie Jaya meliputi Irigasi Tiro (Baro Raya) Gampong Teupin Raya seluas 435 Ha; Daerah Irigasi kewenangan Provinsi seluas 4.838 Ha, meliputi: 1. Daerah Irigasi Cubo-Trienggadeng seluas 1.909 Ha. 2. Daerah Irigasi Ulee Glee seluas 1.200 Ha.dan 3. Daerah Irigasi Meureudu seluas 1.729 Ha. Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten seluas 5.411 Ha yang terdiri dari 53 DI. Permasalahan yang terjadi terhadap sungai yang ada antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran

sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu.

Selain sungai sebagai sumber daya air yang ada di Kabupaten Pidie Jaya juga masih tersedia Waduk dan Embung yang berpotensi sebagai sumber air baku, waduk yang ada saat ini adalah Waduk Krueng Meuruedu di gampong Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua, sedangkan pengembangan embung direncanakan di beberapa kecamatan yang mempunyai potensi seperti Kecamatn Bandar baru; Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Tringgadeng. Ditinjau dari luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Pidie Jaya dan dibandingkan dengan kemampuan penyediaan air untuk mengairi sawah tersebut masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kawasan peruntukan pertanian yang terdiri dari: a). pertanian lahan basah; b). pertanian lahan kering; c). hortikultura; d). perkebunan; dan e). peternakan.

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Luas kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan adalah 10.684 Ha, yang terdiri dari lahan basah seluas 7.739,21 Ha, yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di samping itu masih ada potensi pengembangan baru seluas 75,30 Ha. Demikian juga lahan pertanian lahan kering seluas 365,56 Ha, sedangkan lahan tanaman Hortikultura tersedia seluas 2.331,68 Ha, Kawasan perkebunan seluas 17.004,26 Ha. Panjang Saluran irigasi sampai tahun 2016 adalah 163.572meter yang terbuat dari pasangan batu sepanjang 37.564 meter, dan saluran tanah sepanjang 126.008 meter. Maka rasio jaringan irigasinya adalah 3,59 m/ha sudah sangat baik. Berdasarkan luas area pada tahun 2016 yang dapat diari seluas 5.480 Ha dengan DI sejumlah 85 yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

Tabel 2.64
Jumlah Daerah Irigasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah DI
1	Bandar Baru	1.044	31
2	Panteraja	132	6
3	Trienggadeng	459	18
4	Meureudu	1.016	9
5	Meurah Dua	356	4
6	Ulim	424	1

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah DI
7	Jangka Buya	200	1
8	Bandar Dua	1.849	15
Total		**5.480**	**85**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.3.1.7. Perumahan

Rumah adalah tempat tinggal manusia yang di dalamnya ada sosialisasi diantara penghuni dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, demikian juga fungsi rumah adalah sebagai penunjang untuk mengembangkan diri. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m^2. Sedangkan menurut pedoman umum Rumah Sederhana Sehat kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Menurut kementerian kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m^2. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,4 orang per rumah tangga maka suatu hunian dikatakan layak untuk ditempati di Aceh apabila telah melebihi 44 m^2 per rumah. Oleh sebab itu digunakan ukuran rumah lebih dari 50 m^2. Secara keseluruhan jumlah Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi jumlah RT berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dapat di lihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 - 2016

No	Kecamatan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Bandar Baru	5.158	5.266	5.426
2	Pante Raja	2.893	2.954	3.042
3	Trienggadeng	5.758	5.878	6.056
4	Meureudu	2.322	2.369	2.440
5	Meurah Dua	3.555	3.630	3.739
6	Ulim	5.369	5.757	5.932
7	Bandar Dua	8.218	8.390	8.644
8	Jangka Buya	1.910	1.950	2.009
Jumlah		**35.183**	**36.194**	**37.288**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

Pada tahun 2009 di Provinsi Aceh persentase rumah tangga yang menempati rumah/tempat tinggal kurang dari 50 m^2 per rumah tangga sebesar 56,28 persen. Pada tahun

2013 persentase terjadi penurunan menjadi 51,36 persen. Sedangkan untuk rumah tangga dengan luas lantai di atas 50 m^2 pada tahun 2009 sebesar 43,72 persen, meningkat menjadi 48,64 persen pada tahun 2013. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013 sebanyak 5.015 unit dan pada Tahun 2016 menurun menjadi 4.314 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Rumah Tidak Layak Huni dengan jumlah paling tinggi adalah Kecamatan Bandar Baru. Sampai tahun 2016 jumlah masyarakat yang tinggal di rumah masih tinggi hal ini diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ke depan agar jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni akan dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 1) membangun rumah dhuafa dengan sumber dana APBN, APBA dan APBK; dan 2) membantu bahan bangunan untuk rumah-rumah yang membutuhkan rehabilitasi.

Tabel 2.66
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016
1	Bandar Baru	1.673	1.652	1.559	1.532
2	Pante Raja	159	153	147	140
3	Trienggadeng	585	574	560	497
4	Meureudu	391	373	357	335
5	Meurah Dua	426	414	408	398
6	Ulim	709	599	481	465
7	Bandar Dua	304	295	724	275
8	Jangka Buya	769	747	286	669
Jumlah		**5.015**	**4.813**	**4.525**	**4.314**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Pembangunan dan Rehabilitasi Tidak Layak Huni (RTLH) dibiayai dari berbagai sumber dana dan dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Baitul Maal yang bertujuan untuk pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Rehabilitasi Rumah Tangga Layak Huni dan Pembangunan Rumah Dhuafa Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2016 (Unit) dapat dilihat pada Gambar 2.67.

Tabel 2.67
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tangga Tidak Layak Huni di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Bangun 2013	Rehab 2013	Bangun 2014	Rehab 2014	Bangun 2015	Rehab 2015	Bangun 2016	Rehab 2016
1	Bandar Baru	21	-	93	70	27	-	-	-
2	Pante Raja	6	-	6	-	7	-	-	-
3	Trienggaden g	11	-	14	-	13	-	-	-
4	Meureudu	18	-	16	-	22	-	-	-
5	Meurah Dua	9	-	9	-	10	-	-	-
6	Ulim	110	95	118	102	16	-	425	-

No	Kecamatan	Bangun 2013	Rehab 2013	Bangun 2014	Rehab 2014	Bangun 2015	Rehab 2015	Bangun 2016	Rehab 2016
7	Bandar Dua	9	-	9	-	11	-	-	-
8	Jangka Buya	21	-	23	-	25	-	-	-
Jumlah		**205**	**95**	**288**	**172**	**131**	**0**	**425**	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Terkait dengan infrastruktur air limbah pemukiman. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah pemukiman dalam meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan warga Pidie Jaya masih relatif rendah. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat kepemilikan jamban di Kabupaten Pidie Jaya adalah 69,5 persen dengan rincian 56,1 persen jamban pribadi dan MCK/WC Umum 13,4 persen. Untuk tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga manyoritas pembuangan adalah 69,5 persen pemilik kloset, sejumlah 54,5 persen terhubung ke tangki septik, sebanyak 1,0 persen ke pipa sewer, sebesar 2,1 persen cubluk/lobang tanah, sejumlah 0,7 persen langsung ke drainase, 18,6 persen ke sungai/danau/pantai, 1,7 ke kolam/sawah, sejumlah 2,6 persen ke kebun/tanah lapang, dan 18,8 persen masih sembarang.

Kondisi sistem drainase Kabupaten Pidie Jaya secara umum masih belum memadai. Berdasarkan hasil survei lapangan, terlihat bahwa tingkat pelayanan sistem drainase kota masih rendah. Kondisi ini dapat dilihat terutama pada kawasan perdagangan dan permukiman penduduk. Disamping itu masih terdapat beberapa daerah yang masih dalam katagori rawan banjir, baik itu yang disebabkan oleh air sungai yang meluap maupun air hujan.

Beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat pelayanan sistem drainase Kabupaten Pidie Jaya dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Banyaknya drainase yang tersumbat, baik oleh sedimentasi maupun akibat penumpukan limbah rumah tangga dan sampah;
b. Masih terdapat banyak rumah tangga yang belum memiliki saluran drainase;

Selain berfungsi sebagai penyalur air hujan, saluran drainase di beberapa kawasan permukiman di Kota Meureudu juga berfungsi sebagai penyalur air bekas mandi, mencuci, dan masak. Air limbah tersebut disalurkan langsung ke saluran-saluran drainase di tepi jalan yang umumnya terbuka. Panjang Dan Kondisi Drainase Perkotaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 secara rinci disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Data Panjang dan Kondisi Drainase Perkotaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

`	Kecamatan	Panjang	Satuan	Kondisi	
				Baik (%)	Kurang baik (%)
1	Bandar Baru	7.100	Meter	20	80

`	Kecamatan	Panjang	Satuan	Kondisi	
				Baik (%)	Kurang baik (%)
2	Panteraja	4.950	Meter	40	60
3	Trienggadeng	7.725	Meter	35	65
4	Meureudu	6.815	Meter	45	55
5	Meurah Dua	7.275	Meter	20	80
6	Ulim	8.202	Meter	20	80
7	Jangka Buya	6.082	Meter	15	85
8	Bandar Dua	5.150	Meter	20	80
Jumlah		**53.299**		**26,88**	**73,13**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.3.1.8. Perhubungan

Dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting terutama di bidang angkutan umum dan barang. Dengan semakin lancarnya arus transportasi, maka semakin pesat pula pertumbuhan ekonomi, sosial, dan wilayah. Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan lancar akan mempercepat arus transportasi, sehingga merangsang serta membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya di harapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah yang semakin pesat. Secara Geografis Kabupaten Pidie Jaya terletak pada posisi yang sangat strategis, karena merupakan sentral bertemunya berbagai moda transportasi darat, ditambah lagi dengan selesainya jalan tembus Meureudu – Mane/Geumpang (Kabupaten Pidie) dan adanya rencana pembangunan *Highway* dan *Rellway* dari Pemerintah Pusat yang pasti akan melewati Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mendukung program tersebut, tentunya membutuhkan beberapa usaha dan pembenahan antara lain :

- Pembangunan, Pengembangan, Pembinaan, Pemantauan Pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan dan transportasi.
- Penetapan Pengelolaan dan Pembinaan usaha perparkiran.
- Pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor angkutan umum dan barang dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
- Penyediaan, Penatausahaan, Penggunaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana di bidang Perhubungan dan transportasi.

Sampai saat ini teknik sarana dan keselamatan jalan dengan cakupan angkutan wilayah pelayanan dalam Kabupaten Pidie Jaya dan angkutan antar kota belum memenuhi syarat Standard Pelayanan Minimum. Untuk itu perlu terus dilakukan pembenahan agar arus

transportasi baik dari dan ke Kabupaten Pidie Jaya maupun dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya semakin lancar, tertib dan teratur. Adapun Sarana dan Prasarana Perhubungan di Pidie Jaya sebagaimana pada tabel 2.69 berikut :

Tabel 2.69
Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah tersedia di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Tersedia	Kebutuhan
1	Warning Light	8 unit	17 Unit
2	Traffick Light	1 unit	7 Unit
3	Running Teks	2 unit	5 Unit
4	Halte	5 unit	8 Unit
5	Cermin Cekung	30 Unit	70 Unit
6	Bus Sekolah	11 unit	14 Unit
7	Terminal Bus	1 unit	1 Unit
8	Terminal Mobar	2 unit	4 Unit
9	Jembatan Penyebrangan	1 unit	1 Unit
10	Gedung KIR	1 Unit	1 Unit
11	Marka Jalan	8 Km	500 Km
12	Rambu Lalu Lintas	97 Unit	478 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan daya beli masyarakat akan kendaraan semakin meningkat, maka akan terjadi penumpukan kendaraan pada titik dan jam tertentu yang mengakibatkan kemacetan dan rawan kecelakaan. Untuk mengantisipasi situasi tersebut maka dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana perhubungan serta personil Pengamanan Lalu Lintas (PAM LALIN) yang handal. Adapun titik yang rawan/kemacetan, Pemerintah Pidie Jaya menempatkan Petugas Lalu Lintas sebagaimana pada tabel 2.70 berikut :

Tabel 2.70
Titik Kemacetan pada Jalan tertentu dan Kebutuhan Personil PAM LALIN di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

No	Lokasi	Jumlah Personil Dibutuhkan	Jumlah Personil Tersedia (ditempatkan)
1	SMA/Dayah Jeumala Amal Bandar Baru	3 Orang	2 Orang
2	Depan Dayah Musa	2 Orang	-
3	Depan Jalan Layang Kantor Bupati	5 Orang	3 Orang
4	Depan SD/SMP III Meureudu	2 Orang	-
5	Depan MTSN Meureudu	2 Orang	1 Orang
6	Simpang Pendopo Wabup	3 Orang	2 Orang
7	Depan SMA/SMP 1 Meureudu	3 Orang	1 Orang
8	Simpang Mns. Balek Keude Meureudu	2 Orang	1 Orang
9	Simpang 4 Meurah Dua	3 Orang	1 Orang
10	Simpang Jangka Buya	2 Orang	-
11	Depan SDN 1 Ulee Glee	3 Orang	2 Orang

No	Lokasi	Jumlah Personil Dibutuhkan	Jumlah Personil Tersedia (ditempatkan)
12	Depan MIN/SMP Ulee Glee	4 Orang	3 Orang
13	Simpang Keude Trienggadeng	2 Orang	1 Orang
14	Simpang PLN Trienggadeng	2 Orang	1 Orang
	Jumlah	38 Orang	17 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Pidie Jaya 2014 sampai 2034, terminal penumpang dan barang tipe B telah dibangun terpadu di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua; sedangkan terminal pendukung akan dikembangkan beberapa sub terminal penumpang meliputi: 1). keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua; 2). keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru; dan 3). keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng, sedangkan sub terminal barang akan dibangun: 1). Lokasi Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua; 2). Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru; dan 3). Gampong Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng.

Untuk menginplementasikan rencana tersebut diharapkan pemerintah daerah perlu melakukan persiapan dokumen perencanaan (seperti dokumen Amdal, SID, DED dan lain-lain yang dibutuhkan), selain itu perlu juga dipersiapkan anggaran untuk pembangunan fasilitas tersebut secara bertahap, baik untuk pembebasan lahan maupun untuk biaya pembangunan fisik.

Mengenai terminal penumpang tipe B yang ada di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua telah diserahkan pengelolaannya sejak 1 Januari 2017 kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B menjadi kewenangan Provinsi.

Demikian juga halnya dengan Unit pengujian kendaraan bermotor yang sudah dibangun di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua. Dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016 Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pengujian kendaraan sebanyak 2250 unit sebagaimana rincian pada tabel 2.71

Tabel 2.71
Jumlah kenderaan yang di uji dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 - 2016

No	URAIAN	TAHUN							TOTAL (UNIT)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Mobil Angkutan Barang	505	565	300	201	107	276	296	**2.250**
2	Mobil Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Sejak akhir tahun 2016 Petugas KIR dan PPNS pindah tugas ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie sehingga kegiatan pengujian kendaraan tidak bisa dioperasionalkan lagi, namun pihak

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya berupaya untuk mengirim Peserta Diklat KIR dan PPNS ke Balai Pendidikan dan Latihan Bali atau Bekasi.

Demikian juga dalam rangka peningkatan jasa pelayanan angkutan jalan raya berupa jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan barang yang terbagi dalam 2 (dua) rute trayek layanan yang meliputi:

A. Trayek angkutan Penumpang

- Jaringan Trayek antar Provinsi (AKAP) yang meliputi satu rute (Meureudu – Medan/ Medan – Meureudu)
- Jaringan Trayek dalam Provinsi (AKDP) meliputi empat rute
- Jaringan Trayek angkutan Kecamatan meliputi empat belas rute

Adapun jenis dan jumlah angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana pada tabel 2.72 berikut :

Tabel 2.72
Jenis Angkutan Penumpang dalam Kabupaten Pidie Jaya

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah Angkutan	Asumsi Jumlah Penumpang/hari
1	AKAP	4 Unit	60 Orang
2	AKDP	24 Unit	120 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

B. Trayek Angkutan Barang meliputi empat rute dengan titik pangkal di Terminal Barang (Desa Mns. Bie), dengan tujuan Medan, Banda Aceh, Geumpang – Meulaboh, Takengon – Blangkejren dan Krueng Geukueh.

Adapun Jumlah dan Jenis Kendaraan serta Jenis Barang Angkutan yang terdaftar pada sebelas (11) Perusahaan Angkutan tidak termasuk milik perorangan di Kabupaten Pidie Jaya seperti pada tabel 2.73 berikut :

Tabel 2.73
Jenis Kendaraan dan Barang Angkutan di Kabupaten Pidie Jaya

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jenis Angkutan
1	Roda Enam (6)	36 Unit 25 Unit	Elpiji (khusus) Galian C/Umum
2	Roda Empat (4)	15 Unit	Barang Sembako
3	Roda Sepuluh (10)	14 Unit	Barang Bangunan/Umum

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Pembangunan Rell Kereta Api yang akan melewati Kabupaten Pidie Jaya sangat besar manfaatnya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai rencana lokasi yang akan dilewati dalam kawasan Kecamatan Bandar baru, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Bandar Dua. Untuk mendukung layanan perkereta Apian di Kabupaten Pidie Jaya akan dibangun beberapa stasiun yang meliputi

a). Gampong Jeulanga Mesjid Kecamatan Bandar Dua; b). Gampong Geulumpang Tutong Kecamatan Meureudu; dan c). Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru. Dalam upaya peningkatan pelayanan kereta api secara bertahap akan dilakukan berupa : a). Peningkatan akses terhadap layanan kereta api; b). Penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan c). Pengembangan sistem keamaman dan keselamatan kereta api.

Jaringan transportasi laut yang merupakan salah satu sarana transportasi yang murah dan aman di Kabupaten Pidie Jaya saat ini belum begitu ekonomis bila dibandingkan dengan jenis transportasi darat, hal ini dikarenakan untuk membangun fasilitas transportasi laut membutuhkan investasi yang sangat besar, namun investasi yang besar akan ekonomis apabila didukung oleh potensi yang akan diangkut melalui pelabuhan cukup memadai, baik itu angkutan barang maupun angkutan penumpang. Dari kondisi tersebut Kabupaten Pidie Jaya merencanakan sistem jaringan transportasi laut berupa Pelabuhan pengumpan yang berlokasi di Kecamatan Pante Raja dengan tujuan untuk mendukung Pelabuhan Krueng Geukuh, Pelabuhan Bebas Sabang, Pelabuhan Malahayati Krueng Raya dan Pelabuhan Kuala Langsa.

Sektor transportasi laut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2018 telah merencanakan Sarana Pendukung untuk Penerangan/Pemasangan Lampu Penerangan Kuala, guna memudahkan kapal-kapal yang keluar masuk kuala menuju pangkalan/pelabuhan. Pada saat ini hanya baru digunakan oleh kapal-kapal nelayan dari dalam maupun luar Pidie Jaya dengan ukuran berkisar 1 – 86 GT. Adapun rencana keseluruhan pemasangan lampu kuala adalah Kuala Meureudu, Panteraja, Beuracan, Ulim dan Kiran.

2.3.2. Fokus Pelayanan Penunjang

2.3.2.1. Penanaman Modal (Investasi) dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan publik telah menjadi isu yang mengglobal di seluruh Wilayah Indonesia. Sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang – undang tersebut didalamnya memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fenomena tersebut merupakan momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan-perubahan untuk perbaikan. Perubahan yang mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Termasuk didalamnya berbagai bidang pelayanan publik yang sebelumnya dianggap belum memenuhi hajat kebutuhan masyarakat. Undang–undang tersebut, memberikan peluang kepada pemerintah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang bersifat lokal, efektif dan efisien. Sekaligus sebagai jembatan dalam memperbaiki pelayanan publik yang pada saat ini banyak dikeluhkan

masyarakat dan memperoleh sorotan tajam dari berbagai pihak atas pelayanan publik yang dirasakan berbelit-belit dan mempersulit masyarakat.

Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik tersebut, juga diakibatkan oleh aparat pemerintah yang kerena kekuasaannya menempatkan diri sebagai objek yang meminta dilayani dari pada sebagai subjek pemberi layanan. Paradigma tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan dengan berusaha menempatkan posisi masyarakat di posisi yang sebenarnya, sebagai objek yang harus menerima layanan.

Untuk itulah, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, sebagai wujud kepedulian pemerintah atas pelayanan publik. Peraturan ini ditanggapi dengan positif oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan membentuk lembaga baru sesuai Qanun kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pidie Jaya.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk meningkatkan pembangunan daerah serta menggerakkan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat maka upaya menarik investasi merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagai bagian dalam pengembangan daerah. Hal itu memicu persaingan antar daerah untuk menarik investasi sebagai bagian dalam strategi pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya senantiasa berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha serta kemudahan perijinan. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan iklim investasi yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya.

Selama pemekaran terdapat beberapa Investor yang melakukan Investasi di Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan sebagai peluang investasi antara lain bidang perbankan, telekomunikasi, perdagangan, dan pariwisata.

a. Perbankan

Bank memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk masyarakat setempat, bank menyediakan akses ke dana dan jasa keuangan untuk keperluan bisnis lokal dan nasional, serta uang bank berinvestasi kembali ke masyarakat melalui penggajian karyawan, investasi bisnis, dan pajak. Pada skala yang lebih besar, bank-bank nasional menawarkan akses yang mirip dengan kredit dan jasa keuangan untuk bisnis yang lebih besar. Investasi yang dilakukan oleh bank-bank nasional yang tersebar luas di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu wilayah geografis.

Peran khusus dari bank dalam pembangunan ekonomi bervariasi, tergantung pada ruang lingkup. Terutama, partisipasi bank dalam fokus pembangunan ekonomi di sekitar memberikan kredit dan jasa untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian diinvestasikan kembali ke

masyarakat, lokal, nasional, maupun internasional. Peran bank tertentu bermain dalam pengembangan ekonomi dari komunitas kecil berbeda dari peran bank dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun peran dapat bervariasi, faktor-faktor seperti akses ke kredit dan kebijakan investasi bank atau praktek tetap konstan, tidak peduli lingkup pembangunan ekonomi. Perkembangan pada sektor perbankan adalah bertambahnya jumlah lembaga keuangan yang pada tahun 2011 berjumlah 8 unit Bank, pada tahun 2016 bertambah menjadi 13 unit Bank.

b. Telekomunikasi

Di sektor Telekomunikasi yaitu bertambahnya pembangunan beberapa menara telekomunikasi diberbagai kecamatan.

Tabel 2.74
Jumlah Peningkatan Tower Telekomunikasi
di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Jumlah Tower
1	2011	1
2	2012	4
3	2013	1
4	2014	5
5	2015	12
Jumlah		**23**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pidie Jaya, 2016

c. Perdagangan

Pembangunan dalam bidang perdagangan dari sisi perkembangan usaha perdagangan mengalami naik turun seperti yang tergambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.75
Jumlah Perkembangan Investasi (Perdagangan, Industri, Kontraktor, Jasa, dll)
di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2010 - 2016

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (RP)
1	2011	4	2.000.000.000,-
2	2012	27	72.511.000.000,-
3	2013	12	116.900.000.000,-
4	2014	14	23.410.000.000,-
5	2015	12	110.275.000.000,-
6	2016	7	7.360.000.000,-
Jumlah			**398.696.000.000,-**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pidie Jaya, 2016

Data tersebut diatas merupakan gabungan dari perusahaaan menengah dan perusahaan besar.

d. Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance),* kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian dan daya saing regional maupun nasional.

Berkaitan dengan tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya saat ini memfokuskan peningkatan kinerjanya secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan (*Public service*). Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dengan kepastian persyaratan, kepastian biaya dan kepastian waktu penyelesaian, karena semua proses pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat. Guna menjamin kepastian tersebut maka diperlukan standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

A. Tanpa Peninjauan Lapangan

1. Permohonan izin dan non izin diajukan secara tertulis oleh Pengusaha melalui petugas *Front Office.*
2. Petugas *front office* memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai yang dipersyaratkan dan menyesuaikannya dengan dokumen asli yang dibawa oleh pemohon. Jika lengkap dan benar, maka pedaftaran akan diregistrasi dan pemohon akan diberikan tanda terima. Jika permohonan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon.
3. Staf teknis Teknis izin dan non izin melakukan pengkajian penerbitan izin sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkas permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan diproses untuk pencetakan izin.
5. Izin yang telah dicetak diverifikasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang selanjutnya diserahkan Sekretaris untuk diparaf.
6. Izin yang telah dicetak dan diverifikasi diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani.

7. Petugas *front office* menghubungi pemohon untuk mengambil perizinannya di loket penyerahan.
8. Petugas *front office* penyerahan menyerahkan berkas izin kepada pemohon, setelah terlebih dahulu memeriksa keabsahan pemohon sesuai berkas pendaftaran izin.

B. Dengan Peninjauan Lapangan

1. Pemohon mendapatkan informasI tentang proses Perizinan dan Non Perizinan.
2. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap dan Front Office memeriksa kelengkapan berkas, jika lengkap langsung mengagendakan berkas permohonan serta memberikan resi tanda terima berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Membuat undangan peninjauan lapangan.
4. Melakukan peninjauan lapangan dan memberikan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Peninjauan (BAP) lapangan..
5. Membuat Surat Ketetapan Retribusi (SKR)..
6. Membayar Retribusi Perizinan dan Non Perizinan.
7. Membuat Surat Setoran Retribusi (SSR).
8. Mencetak Izin dan Non Izin.
9. Verifikasi dan Paraf Kepala Seksi, Kabid. Perizinan dan non Perizinan, Sekretaris.
10. Penandatanganan Izin dan Non Izin oleh Kepala Dinas.
11. Pemohon mengambil Sertifikat Izin dan Non Izin dengan menyerahkan resi tanda terima berkas dan pengarsipan.

Banyak faktor yang harus dibenahi agar investor mau menanamkan modal di Kabupaten Pidie Jaya, seperti izin-izin yang berkaitan dengan Investasi di kabupaten Pidie Jaya dipermudah, peningkatan kualitas SDM. Masalah lainnya adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanaman Modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikat, izin bangunan serta zonasi lahan serta masalah infrastruktur .

Pemerintah diharapkan harus memberikan kemudahan-kemudahan bagi Investor Asing, Nasional maupun Lokal untuk berinvestasi di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu juga, Pemerintah harus melakukan promosi-promosi terkait potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Promosi potensi dimaksud harus dilakukan baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Sedangkan di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ada 30 jenis perizinan dan Amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 dan Tentang Daftar Wajib Perusahaan mencakup: 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha. Rencana yang menjadi prioritas

Pemerintah Kaubpaten Pidie Jaya di bawah koordinasi DPMPTSP di bidang Perizinan dan Non Perizinan tahun 2015-2035 adalah antara lain: 1). Peninjauan Lapangan Proses Perizinan, 2). Pengawasan dan Penyelidikan Peninjauan Lapangan setelah proses perizinan; 3) Sosialisasi Proses Perizinan tentang IMB, SITU, TDP, SIUP; 4) Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Masyarakat; dan 8) Monitoring, Evaluasi, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan.

2.3.2.2. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKN) merupakan salah satu sektor strategis dalam menyerap tenaga kerja. Namun sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif seperti besarnya biaya transaksi akibat ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi, terbatasnya akses sumberdaya produktif terutama bahan baku, permodalan sarana prasana serta informasi pasar. Terkait berbagai permasalahan tersebut, tantangan utama ke depan adalah masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Tantangan kedepan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis agro industry, industri kreatif dan inovasi.

Menurut Data tahun 2016 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya, jumlah koperasi seluruhnya sebanyak 203 unit, koperasi aktif sebanyak 120 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 83 unit. Sedangkan jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 4.561 unit dan usaha kecil menengah sebanyak 4.653 unit. sedangkan banyak bidang lain yang belum bergerak ini merupakan tantangan pemerintah daerah kedepan untuk menggerakkan usaha usaha kecil dan menengah di daerah untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha kepada masyarakat. Jumlah koperasi, UKM dan UMK sebagaimana rincian pada tabel 2.76

Tabel 2.76
Jumlah Koperasi, UKM dan UMKM di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 - 2016

NO	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi Aktif	157	168	67	104	120
2	Jumlah Seluruh Koperasi	225	236	246	222	223
3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	1.470	1.220	2.239	3.083	3.649
4	Jumlah Usaha Menengah	71	1.470	2.573	3.627	4.561
5	Jumlah Seluruh UMKM	1.541	1.541	1.220	3.717	4.653

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya, 2017

2.3.2.3. Sosial dan Keluarga Sejahtera

Angka kemiskinan pada tahun 2015 masih sangat tinggi yaitu 21,40 persen. Meningkatnya kriminalitas khususnya perampokan, penodongan, dan penjarahan akibat akses dari konflik bersenjata yang terjadi di sebagian wilayah provinsi Aceh dan efeknya sampai ke Kabupaten Pidie Jaya. Banyaknya pengemis, yatim piatu, anak terlantar dan kelompok rentan lainnya akibat konflik bersenjata dan tsunami yang belum mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara serius. (perlu perbaikan narasi)

Penanganan penduduk yang mengalami permasalahan sosial telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah orang terlantar serta penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat bantuan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).

Tabel 2.77
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 - 2016

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Tahun (Jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Fakir Miskin	31.205	31.129	28.802	28.909	29.537
2	Anak Terlantar	382	303	300	295	291
3	Lanjut Usia Terlantar	501	508	473	451	434
4	Orang Dengan Kecacatan (ODK)	1.123	1.371	1.282	1.232	2.261
5	Anak Nakal	1	3	28	31	34
6	Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana (MTDRB)	2.347	2.154	2.289	5.021	5.115
7	Gelandangan dan Pengemis	92	109	78	71	64
8	Tuna Sosial (WTS)	2	2	-	-	-
9	Anak Korban Tindak Kekerasan	442	198	5	14	7
10	Eks Penyakit Kronis (EKPK)	232	245	239	239	236
11	Mantan Warga Binaan LP (Eks Narapidana)	49	59	96	104	111
12	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.980	3.245	3.352	3.215	3.211
13	Perintis, Pahlawan, Pejuang Kemerdekaan	58	66	84	84	81
14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	55	58	10	11	3
15	Korban Bencana dan Musibah Lainnya	446	320	574	380	22.381
16	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-
17	Anak Jalanan	2	9	0	-	-

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Tantangan yang muncul adalah adanya konflik horizontal dan vertikal yang dapat menimbulkan korban bagi masyarakat yang tidak berdosa, sehingga dapat menambah persoalan sosial lainnya. Arus globalisasi dan informasi yang menyebabkan pergerakan barang, modal, dan

orang menyebabkan tingkat kompetensi hidup yang semakin meningkat. Jika hal ini tidak di antisipasi, maka sebagian masyarakat akan tersisih dan dapat menimbulkan masalah sosial.

Secara internal, permasalahan yang muncul adalah adanya sikap malas dari sebagian masyarakat akibat ke tergantungan bantuan dari lembaga donor. Kurangnya tingkat kompetensi dan keterampilan hidup masyarakat untuk bersaing dalam kehidupan yang semakin kompleks. Faktor keberhasilan ke depan yaitu adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan hidup dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di kehidupan kota. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan dan etos kerja masyarakat sebagai akibat transfer pengetahuan dan keterampilan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Pidie Jaya. Semakin banyaknya program pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan.

Kondisi keluarga sejahtera dan sosial di Kabupaten Pidie Jaya untuk masa mendatang diharapkan akan lebih baik dengan melakukan berbagai upaya untuk mmeningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh antara lain : Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma, penyediaan dan pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (ex. Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), meningkatkan sumber daya kelembagaan kesejahteraan sosial, dan menerapkan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial kepada semua PMKS.

2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan dalam pembangunan di kabupaten Pidie Jaya secara umum sudah baik. Hal ini terbukti dari keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sudah sangat optimal, terbukti pada tahun 2016 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.991 orang atau 62,68 persen dari total jumlah PNS Kabupaten Pidie Jaya Sebanyak 3.176 orang. Diantaranya ada yang sudah menduduki beberapa jabatan Strategis.

Permasalahan internal yang mungkin muncul adalah adanya tekanan dari dalam rumah tangga sendiri dalam bentuk herarki kekuasaan tradisional, patriarki, kasta, maupun agama, termasuk praktik budaya. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terekspose menyebabkan sulitnya dalam memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak

Peraturan dan perundangan tersebut merupakan landasan hukum yang dapat dijadikan jaminan dalam rangka pemberdayaan perempuan, seperti undang-undang tentang HAM perempuan, anti diskriminasi terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Jumlah kasus KDRT sebagaimana rincian pada tabel 2.78

Tabel 2.78
Jumlah Kasus Kekerasan dalam rumah tangga
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2016

NO	Uraian	Tahun (Kasus)			
		2013	2014	2015	2016
1	Kekerasan Terhadap Perempuan	8	10	14	6
2	Kekerasan Terhadap Anak	5	5	11	8

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pidie Jaya, 2017

Berbagai konsep pembangunan yang di kembangkan seperti pro poor development dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik yang ada melalui mekanisme yang di jamin dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan tingkat keberhasilan tentang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, adanya kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan beberapa upaya untuk memberdayakan kaum perempuan seperti terlihat pada tabel 2.79 dibawah ini.

Tabel 2.79
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2016

NO	Uraian	Jumlah Penerima/ peserta	Tahun
1	Bantuan Mesin Jahit	20 orang	2013
2	Bantuan Mesin Jahit	20 orang	2014
3	Bantuan Mesin Jahit	20 orang	2015

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pidie Jaya, 2017

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan oleh Pemerintah daerah akan dilakukan antara lain: dengan meningkatnya angka GDI (*Gender Development Index*) dan GEM (*Gender Empowerment Index*), meningkatkan kualitas anak dan perempuan dengan adanya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuandan meningkatkan akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

2.3.2.5. Statistik, Kearsipan

Permasalahan statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi di Pidie Jaya diantaranya adalah masih terbatasnya alokasi anggaran yang menyebabkan pembuatan data base Kabupaten Pidie Jaya belum maksimal, masih terbatasnya sosialisasi/publikasi dokumen publik ke masyarakat, belum terjaganya dokumen publik dalam penyimpanannya, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk tujuan administrasi dan pendataan, masih kurangnya penguatan media lokal sebagai aktor penyeimbang dalam demokrasi, belum kompetennya

aparatur bagian hubungan masyarakat (humas) di pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menjalankan perannya sebagai *public relation*.

Pengembangan statistik, komunikasi dan informasi semakin gencar melalui penerapan teknologi untuk tujuan administrasi pemerintahan. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pers, adanya tuntutan penerapan *good governance* terutama terkait dengan transparansi, adanya berbagai NGO dan lembaga donor yang memberi bantuan dalam updating data cara pengolahannya dengan menggunakan teknologi baru. Penggunaan teknologi informasi internet sebagai wadah promosi dengan membuka *website* untuk dapat diakses oleh berbagai pihak demi kemajuan Kabupaten Pidie Jaya.

Dengan perkembangan arus globalisasi, komunikasi dan informasi dapat memunculkan banyak hal sehingga memberikan dampak terhadap kualitas dan validitas informasi yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain, sehingga diperlukan filter sebelum menyajikan informasi. Kebebasan pers yang begitu tinggi dan kadang-kadang tanpa memperhatikan kaidah dan kode etik serta niklai-nilai budaya daerah. Perkembangan teknologi informasi menjadi pemicu pemanfaatan data secara negatif dan merusak sistem pelayanan publik.

Kelemahan yang timbul dari penataan urusan statistik, kearsipan, komunikasi, dan informasi masih rendahnya ke profesionalan sumber daya komunikasi dan informasi. Kurangnya pemahaman aparatur akan pentingnya transparansi. Belum terjaganya dokumen/arsip daerah secara profesional, dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat dengan baik. Urusan statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi semakin bagus seiring dengan keinginan yang kuat dari masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara transparan. Tingginya kebutuhan data dan informasi daerah yang valid dan mudah di akses oleh masyarakat. Peranan media elektronik dan media cetak dalam membangun kebijakan dan penegakan demokrasi.

Ketersediaan data yang memadai dan akurat serta ditunjang oleh data kearsipan yang lengkap akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Pidie Jaya, sehingga kebijakan pembangunan dapat diambil secara tepat.

2.3.2.6. Ketertiban dan Keamanan

Persoalan ketertiban dan keamanan sangat terikat dengan persoalan politik, penegakan hukum, kesatuan bangsa dan perlindungan kepada masyarakat kebebasan politik sangat rawan/rentan terhadap ketertiban dan keamanan, akibat konflik yang berkepanjangan rasa truama dan rasa takut masyarakat dalam mengeluarkan pendapat dan berkarya masih sangat terasa sampai saat ini, sehingga kebebasan berbicara dan berpendapat atau mengkritisi kebijakan pemerintah menjadi sulit. Belum maksimalnya peran dari satuan polisi pamong praja dalam menegakkan kedisiplinan aparatur pemerintah, dan belum optimalnya peran wilayatul hisbah

dalam menjalankan penegakan hukum syariat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya menjadi satu kendala dalam rangka memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh pasca kesepakatan perdamaian antara pemerintah dan kelompok GAM telah membuka peluang bagi masyarakat Aceh untuk bebas berpolitik dan memberikan pendapat di muka umum. Demikian pula dengan adanya Undang-Undanga Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan hasil revisi Undang – undang No. 32 tahun 2004, masyarakat dapat menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasinya dalam berbagai bidang Pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Demikian juga peningkatan kualitas dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sangat diperlukan ke depan sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjamin sehingga kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang diharapkan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Perkembangan kesejahteraan salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2007-2009 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat pengeluaran per kapita sebagai proxy pendapatan. Pengeluaran per kapita sebulan terjadi peningkatan di tahun 2008 sebesar Rp 2.110.308,- yaitu menjadi Rp 5.615.148,-. Namun, pengeluaran penduduk tersebut menurun di tahun 2009 sebanyak 9,76 persen menjadi Rp 5.066.880. Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan bukan makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran bukan makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan data yang tersedia, pengeluaran bukan makanan terjadi peningkatan di tahun 2008 dan menurun di tahun 2009. Persentase pengeluaran untuk makanan tahun 2009 mengalami kenaikan sebanyak 7,4 persen menjadi 71,49 persen. Padahal sebelumnya terjadi penurunan sebesar 8,55 persen dibandingkan tahun 2007 yaitu menjadi 64,09 persen. Sebaliknya, persentase pengeluaran untuk bukan makanan menurun pada periode yang sama yaitu menjadi 28,51 persen. Padahal tahun sebelumnya meningkat sebesar 8,55 persen dibandingkan tahun 2007 yaitu menjadi 35,91 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kesejahteraan penduduk selama periode 2009 dibandingkan tahun sebelumnya, 2008.

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat menggambarkan pendapatan sebuah rumah tangga. Meningkatnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan meningkatnya pendapatannya. Secara menyeluruh pengeluaran konsumsi non pangan dan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kota merupakan gambaran Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Aceh, pengeluaran konsumsi perkapita terhadap PDRB Aceh dengan Tanpa Migas atas dasar harga berlaku tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengeluaran rumah tangga pada kurun waktu tersebut terutama pengeluaran untuk konsumsi makanan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada jumlah pengeluarannya. Tingginya komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB menunjukkan ekonomi Aceh saat ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Pola konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun dapat memperlihatkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat bila porsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk non makanan meningkat. Sebaliknya, apabila sebagian besar pendapatan masyarakat dihabiskan untuk pengeluaran makanan maka dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif menurun.

Tabel 2.80 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah mengalami perbaikan, hal ini terlihat pada bahwa perkembangan pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Aceh untuk jenis pengeluaran Non Makanan tahun 2010 - 2015 terjadi peningkatan. Perkembangan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat pada kurun waktu 2010 ke 2015 disebabkan tingginya angka inflasi yang bersumber dari harga-harga produk makanan.

Tabel 2.80
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2010 – 2015

Jenis Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Makanan (%)	61,15	59,52	58,60	59,84	58,38	55,22
Non Makanan (%)	38,85	40,48	41,40	40,16	41,62	44,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2016

2.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yang merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib), apabila NTP > 100, berarti petani mengalami surplus, artinya harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya berarti pendapatan petani naik

lebih besar dari pengeluarannya, NTP = 100 berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya dan apabila NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Secara rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh tahun 2015 belum begitu menggembirakan hal ini terlihat dari nilai rata – rata NTP masih angka dibawah 100 yaitu sebesar 97,50 kecuali sub sektor Hortikultura diatas 100 yaitu sebesar 101,40 artinya pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai jual petani kearah yang lebih baik berupa peningkatan SDM petani dan teknologi pertanian demikian juga halnya petani jangan menjual hasil pertaniannya berupa bahan baku atau bahan mentah tapi sebaiknya petani menjual bahan jadi atau bahan setengah jadi sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat. untuk lebih jelasnya distribusi NTP Aceh dari tahun 2009 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Tahun 2010 -2015

Sub Sektor	Tahun								Rata-rata 2013 - 2015
	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	
	Metode 2007				Metode 2012				
Sub Sektor Tanaman Pangan	101,37	106,78	107,99	111,82	100,00	99,17	97,29	95,91	97,46
Sub Sektor Hortikultura	99,21	103,04	102,56	100,01	100,00	98,79	99,85	105,55	101,40
Sub Sektor Perkebunan Rakyat	101,07	113,32	114,50	110,81	100,00	95,86	97,38	90,33	94,52
Sub Sektor Peternakan	98,56	99,58	98,55	99,22	100,00	98,00	98,99	100,57	99,19
Sub Sektor Perikanan	98,98	101,54	102,21	99,55	100,00	100,60	100,66	97,66	99,64
Rata-rata	**99,76**	**104,12**	**104,30**	**104,14**	**100,00**	**97,72**	**98,15**	**96,64**	**97,50**

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2016

2.4.1.4. Produksi Total Daerah

A. Pertanian

Sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya. Pola ruang yang ditetapkan bahwa kawasan budidaya terdiri dari: a). Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 4.865,11 Ha; b). Kawasan hutan rakyat seluas 1.225,39 Ha; c). Kawasan hutan pendidikan seluas 150,21 Ha; d). Kawasan peruntukan pertanian yang dibagi dalam pertanian 1). Lahan basah seluas 7.739,21 Ha, 2). Pertanian kering seluas 365,56 Ha, 3). Kawasan hortikultura seluas 2.331,69 Ha, 4). Lahan perkebunan 17.004,26 Ha, 5). Lahan kritis seluas 201,86Ha, 6). Kawasan peternakan seluas 1.271,55 Ha; e). Kawasan peruntukan perikanan seluas 1.686,72 Ha dan f). Lahan penggunaan lainnya. Luas Baku Lahan Sawah di Pidie Jaya Tahun 2010-2015 secara rinci di sajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82
Luas Baku Lahan Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016

No	Kecamatan	Luas Baku Sawah (Ha)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bandar Baru	1.365	1.365	1455	1455	1455	1455	1.490
2	Panteraja	222	222	332	332	332	332	335
3	Trienggadeng	1.376	1.376	1079	1079	1079	1079	1.092
4	Meureudu	1.100	1.100	1160	1160	1160	1160	1.180
5	Meurah Dua	650	650	574	574	574	574	609
6	Ulim	1.002	1.002	995	995	995	995	1.000
7	Jangka Buya	466	466	622	622	622	622	622
8	Bandar Dua	1.834	1.834	2547	2547	2547	2547	2.547
Total		**8.015**	**8.015**	**8.764**	**8.764**	**8.764**	**8.764**	**8.875**

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Untuk menghitung produksi salah satu komoditi dalam satu wilayah dibutuhkan luasan tanam, luasan panen, produktivitas tiap kali panen dan jumlah kali panen dalam satu tahun, tabel dibawah menggambarkan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2010 sampai 2016. Potensi sawah yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah 8.875 Ha dengan luas panen padi rata-rata setiap tahun mencapai 1,92 kali dimana yang tertinggi tahun 2015 seluas 16.815 Ha dengan produksi 98.217,83 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan produktivitas sebesar 5,84 ton/Ha GKG. Produktivitas padi dari tahun 2010 hingga tahun 2013 tinggi dikarenakan satuan ukur yang digunakan adalah Gabah Kering Panen (GKP), sedangkan untuk tahun 2014 sampai dengan saat ini menggunakan satuan ukur Gabah Kering Giling (GKG), lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.28 sampai 2.30 dan tabel 2.83 sampai 2.85 dibawah ini.

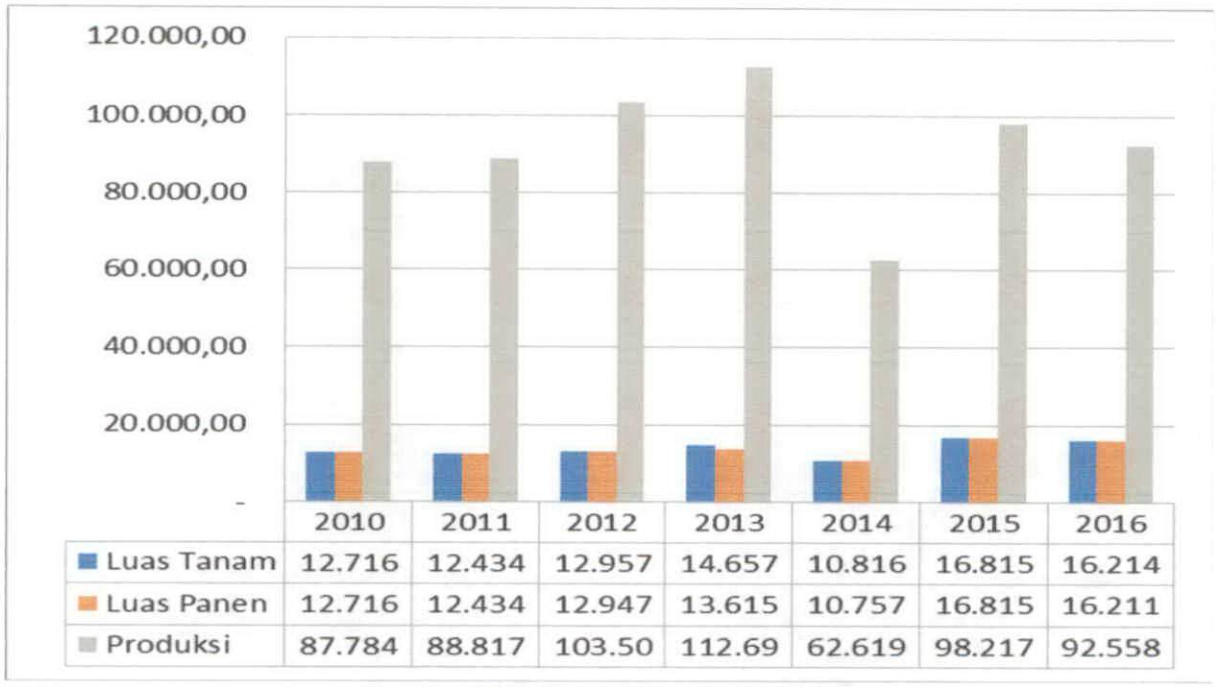

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Tanam	12.716	12.434	12.957	14.657	10.816	16.815	16.214
Luas Panen	12.716	12.434	12.947	13.615	10.757	16.815	16.211
Produksi	87.784	88.817	103.50	112.69	62.619	98.217	92.558

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Gambar 2.28. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi (Ha), 2010-2016

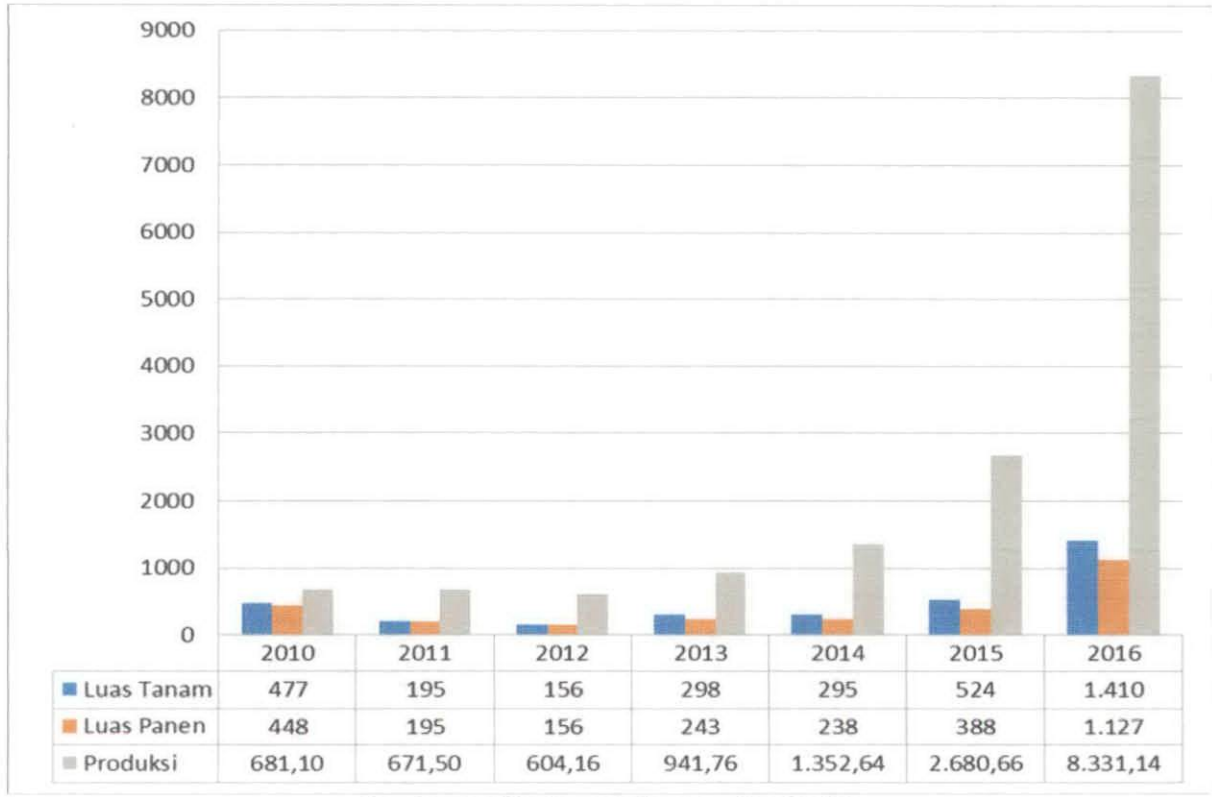

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Tanam	477	195	156	298	295	524	1.410
Luas Panen	448	195	156	243	238	388	1.127
Produksi	681,10	671,50	604,16	941,76	1.352,64	2.680,66	8.331,14

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Gambar 2.29. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Jagung (Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016

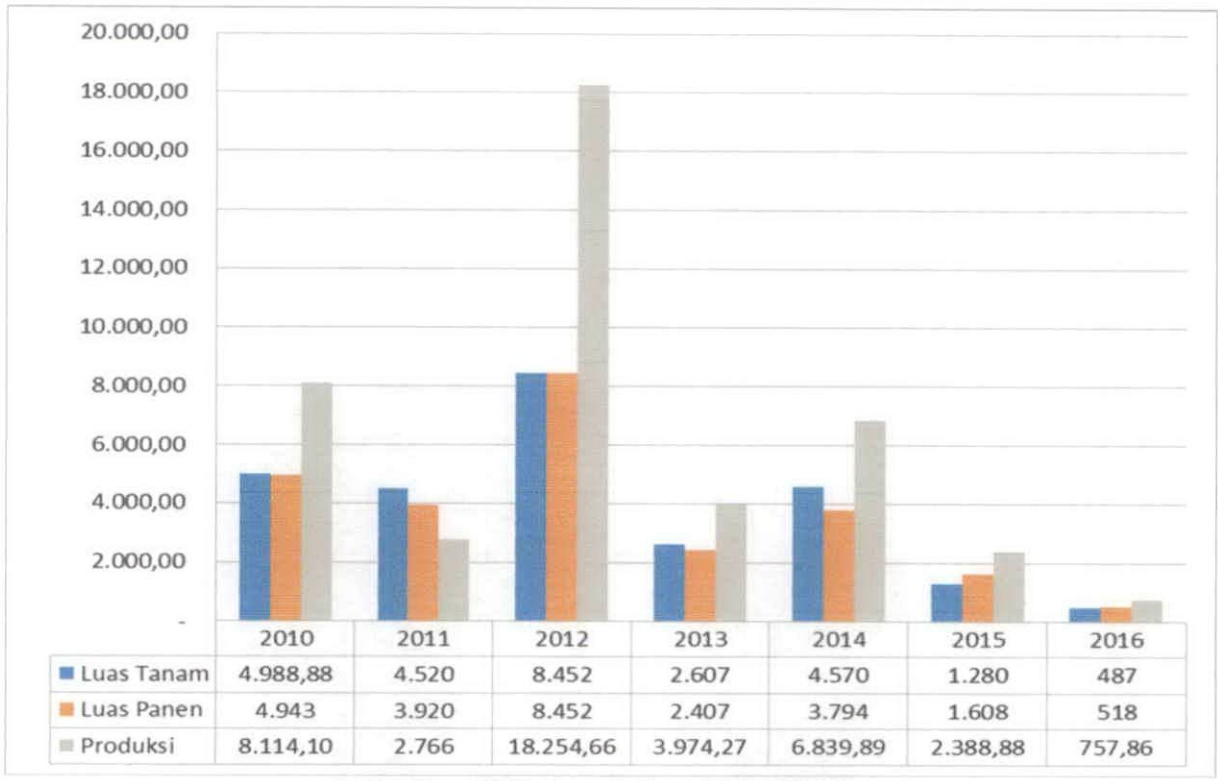

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Tanam	4.988,88	4.520	8.452	2.607	4.570	1.280	487
Luas Panen	4.943	3.920	8.452	2.407	3.794	1.608	518
Produksi	8.114,10	2.766	18.254,66	3.974,27	6.839,89	2.388,88	757,86

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Gambar 2.30. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Kedelai (Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016

Tabel 2.83
Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Pangan di Pidie Jaya Tahun 2010-2016

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)					Luas Panen (Ha)				
		Padi	Jagung	Kedelai	Cabe Merah	Bawang Merah	Padi	Jagung	Kedelai	Cabe Merah	Bawang Merah
1	2010	12.716,25	477	4.998,88	99	4	12.716,25	448	4.943	99	4
2	2011	8.015,25	195	4.520	99	4	12.434	195	3.920	99	4
3	2012	12.957	156	8.452	118	54	12.947	156	8.452	118	54
4	2013	14.657	298	2.607	77	19	13.615	243	2.407	72	18
5	2014	10.816	295	4.570	66	21	10.757	238	3.794	65	19
6	2015	16.815	524	1.280	72	12,50	16.815	388	1.608	72	12,50
7	2016	16.214	1.410	487	53	5	16.211	1.127	518	54	8

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Tabel 2.84
Produksi Komoditas Pangan di Pidie Jaya Tahun 2010-2016

No	Tahun	Produksi (Ton)				
		Padi	Jagung	Kedelai	Cabe Merah	Bawang Merah
1	2010	87.784	681,10	8.114,1	712,80	48
2	2011	88.817	6.715	2.766	714	48
3	2012	103.504	604,16	18.254,66	852,12	377,85
4	2013	112.691,13	41,76	3.974,27	519,90	126,08
5	2014	62.619,57 *)	1.352,64	6.839,89	479,37	135,35
6	2015	98.217,83 *)	2.680,66	2.388,88	528,76	93,25
7	2016	92.558,5 *)	8.331,14	757,86	334,10	58,20

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

**) Gabah Kering Giling (GKG)*

Tabel 2.85
Produktivitas Komoditas Pangan di Pidie Jaya Tahun 2010-2015

No	Tahun	Produktivitas Nasional (Ton/Ha)			Produktivitas Kabupaten Pidie Jaya (Ton/Ha)				
		Padi	Jagung	Kedelai	Padi	Jagung	Kedelai	Cabe Merah	Bawang Merah
1	2010	5,01	4,44	1,37	6,32	1,50	1,60	7,20	12,00
2	2011	4,98	4,57	1,37	7,14	3,44	4,71	7,20	12,00
3	2012	5,14	4,90	1,48	7,99	3,87	2,16	7,22	7,00
4	2013	5,15	4,84	1,42	8,28	3,88	1,65	7,22	7,00
5	2014	5,14	4,96	1,55	5,82 *)	5,68	1,80	7,37	7,12
6	2015	5,34	5,18	1,57	5,84 *)	6,91	1,49	7,34	7,46
7	2016				5,71 *)	7,39	1,46	6,19	7,28

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

**) Gabah Kering Giling (GKG)*

Secara nasional produktivitas padi di Kabupaten Pidie Jaya sudah diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,20 ton/Ha GKG . Demikian juga halnya dengan produktivitas jagung secara nasional sebesar 5,18 ton/Ha tahun 2015, sedangkan produktivitas jagung di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 6,91 ton/Ha.Untuk kedelai produktivitas nasional sebesar 1,57 ton/Ha, sedangkan produktivitas kedelai di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1,80 ton/Ha. Seperti ditampilkan pada Gambar 2.31 sampai 2.33 berikut.

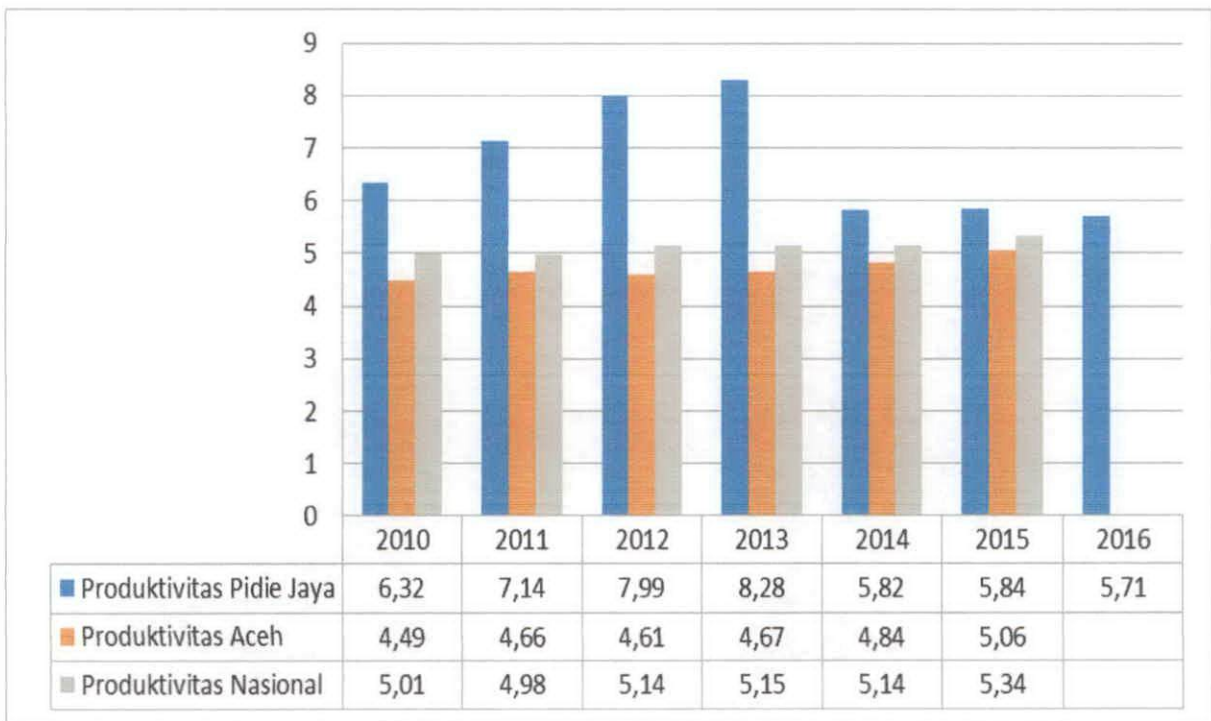

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktivitas Pidie Jaya	6,32	7,14	7,99	8,28	5,82	5,84	5,71
Produktivitas Aceh	4,49	4,66	4,61	4,67	4,84	5,06	
Produktivitas Nasional	5,01	4,98	5,14	5,15	5,14	5,34	

Catatan:
Produktivitas Pidie Jaya Tahun 2010-2013 satuan ukurnya Gabah Kering Panen (GKP)
Produktivitas Pidie Jaya Tahun 2014-2016 satuan ukurnya Gabah Kering Giling (GKG

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Gambar 2.31. Produktifitas Padi (Ton/Ha)
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016

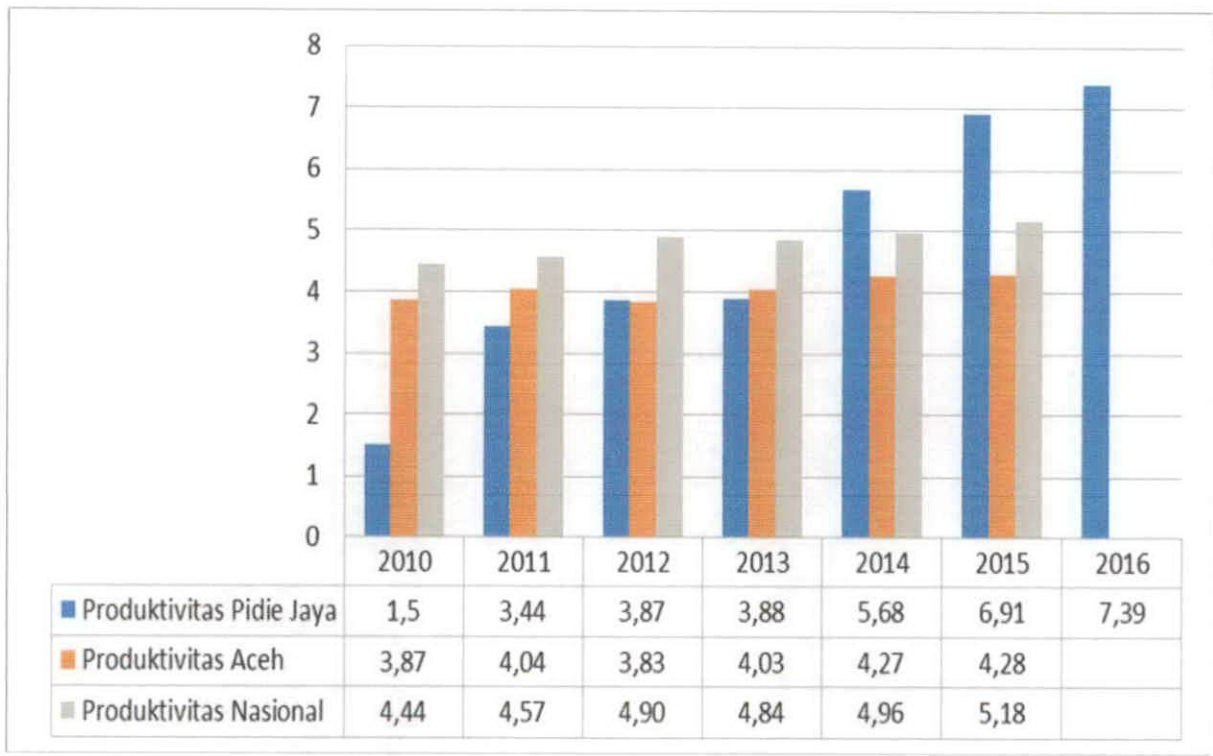

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktivitas Pidie Jaya	1,5	3,44	3,87	3,88	5,68	6,91	7,39
Produktivitas Aceh	3,87	4,04	3,83	4,03	4,27	4,28	
Produktivitas Nasional	4,44	4,57	4,90	4,84	4,96	5,18	

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Gambar 2.32. Produktifitas Jagung (Ton/Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016

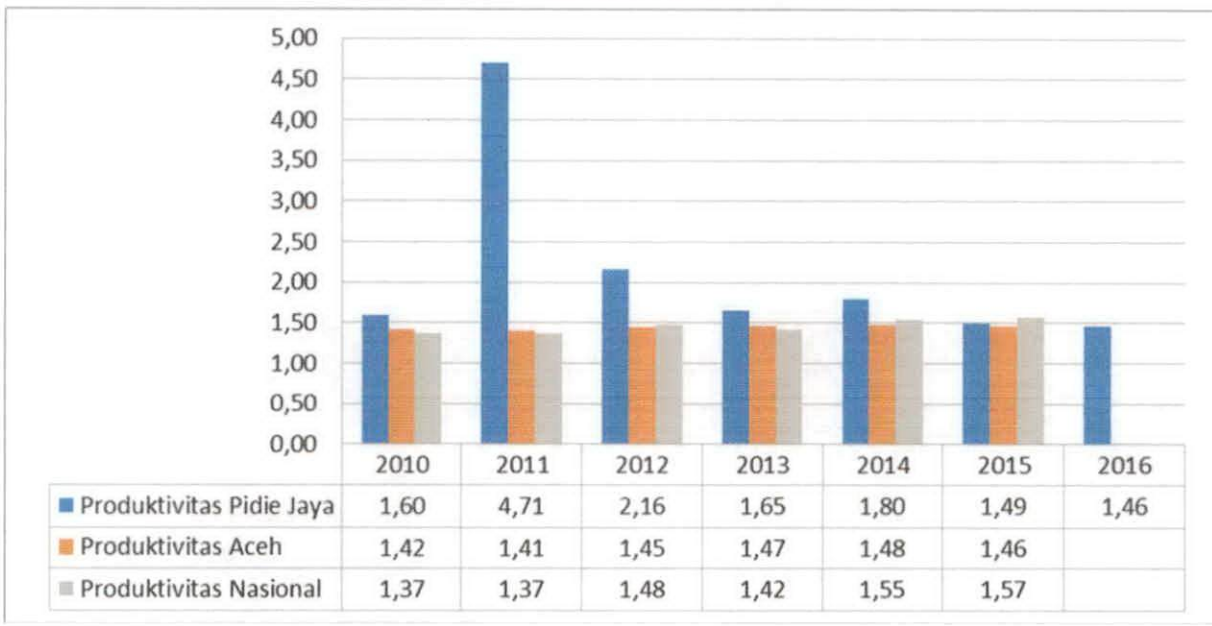

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktivitas Pidie Jaya	1,60	4,71	2,16	1,65	1,80	1,49	1,46
Produktivitas Aceh	1,42	1,41	1,45	1,47	1,48	1,46	
Produktivitas Nasional	1,37	1,37	1,48	1,42	1,55	1,57	

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2017

Gambar 2.33. Produktifitas Jagung (Ton/Ha) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2016

Untuk tercapainya tingkat produktivitas maksimal setiap komuditi yang ada di Kabupaten Pidie Jaya Pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut antara lain: 1) Peningkatan indeks tanam melalui optimalisasi penggunaan lahan dan penyediaan agro input; 2) Peningkatan luas tanam (termasuk integrasi dengan tanaman perkebunan) dengan

mengoptimalkan lahan yang tersedia; 3) Perbaikan sarana dan prasarana penunjang; 4) Peningkatan Fungsi Penyuluhan pertanian; 5) Peningkatan pengkajian teknologi dan penyediaan serta penggunaan varitas baru.

B. Perkebunan

Perkebunan mempunyai peranan penting dalam pengembangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya dalam pembangunan nasional dan daerah. Peranan penting dalam bidang ekonomi berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. sementara ekologi merupakan peningkatan konservasi tanah dan air penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Peran penting dalam sosial budaya adalah perekat sebagai pemersatu bangsa.

Tabel 2.86
Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2010 - 2015

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)						Luas Panen (Ha)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kelapa Sawit	1.069	1.081	680	680	736	736	15	63	194	335	296	312
2	Karet	3	3	3	443	543	543	3	2	3	3	3	3
3	Kopi	0	0	71	70	70	70	0	0	32	32	30	31
4	Kakao	10.433	10.433	12.654	13.304	13.504	13.897	3.001	4.551	5.812	6.077	6.277	7.898
5	Kemiri	19	29	29	28	32	28	16	21	23	22	22	21
6	Pinang	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	418	447	725	837	1.175	1.197
7	Melinjo	2.101	2.101	219	360	1.044	na	521	521	198	181	509	na
8	Kelapa dalam	3.338	3.272	3.272	3.272	3.268	3.360	2.654	2.641	2.711	2.736	2.718	2.719
9	Durian	1.168	1.168	92	313	321	na	161	161	75	94	158	na
10	Mangga	661	661	62	143	166	na	84	84	55	65	83	na

No	Komoditas	Produksi (Ton)						Produktivitas (Ton/Ha)						Produktivitas (Ton/Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Nasional
1	Kelapa Sawit	32	135	459	586	718	742	0,46	0,46	0,42	1,74	2,42	2,37	2,54
2	Karet	0,6	0	0,6	0,6	4	02.05	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2	0,68	0,77
3	Kopi	0	0	9	9	24	10	0	0	0,12	0,28	0,78	0,32	na
4	Kakao	2.182	2.795	3.619	4.349	4.688	7.015	0,2	0,26	0,28	0,71	0,74	0,88	0,52
5	Kemiri	12	7	7	8	6	6,15	0,63	0,24	0,24	0,3	0,28	0,29	na
6	Pinang	382	403	632	678	411	572	0,25	0,26	0,41	0,81	0,34	0,47	na
7	Melinjo	261	261	1.646	1.538	762	na	0,12	0,12	7,51	8,5	1,49	na	na
8	Kelapa dalam	2.040	966	999	1.008	2.833	2.349	0,61	0,3	0,86	0,36	1,04	0,86	na
9	Durian	805	805	978	453	2.019	na	0,68	0,68	10,63	4,82	12,78	na	na
10	Mangga	420	420	129	651	832	na	0,63	0,63	0,05	10,01	10,03	na	na

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka, 2016

Tabel 2.86, menggambarkan Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2015 luas lahan yang berpotensi untuk pengembangan sektor perkebunan sangat menjanjikan namun belum dikelola dengan baik, hal ini terlihat dari tingkat produktivitas komuditi perkebunan yang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan produktivitas komuditi di tingkat provinsi maupun nasional. Permasalahan perkebunan rakyat adalah rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) kurangnya pemeliharaan; 2) penggunaan bibit yang tidak direkomendasikan (bersertifikat); 3) rendahnya sumberdaya petani terkait teknologi pertanian; dan 4) belum intensifnya penyuluhan. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) meningkatkan pemeliharaan dan melaksanakan replanting; 2) penggunaan bibit unggul (bersertifikat); 3) peningkatan SDM petani dan penyuluh; dan 4) pengendalian hama dan penyakit yang terpadu.

Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk penguasaanya. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sektor perkebunan, Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tanaman kakao yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan terus menerus menggalakkan pengembangan dan pemberdayaan tanaman kakao tersebut. Menurut data dari Dinas Kehutanan dan perkebunan, pada tahun 2015, produksi kakao di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 7.015 ton yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan tingkat Produktivitasnya 0,88 ton/ha, hal ini sangat menggembirakan apabila dibandingkan dengan tingkat produktivitas kakao nasional yang baru mencapai 0,52 ton/ha, selain menghasilkan biji kakao mentah yang dipasarkan secara langsung oleh petani kakao, di Kabupaten Pidie Jaya juga terdapat kakao olahan yang sudah siap untuk dikonsumsi, baik berupa permen coklat, bubuk coklat atau olahan lainnya ini terdapat di Gampong Musa, adapun hasil olahannya berupa coklat batangan, aneka kue coklat dan aneka minuman coklat. Kakao olahan tersebut merupakan milik salah satu koperasi di Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk komoditi kelapa perkebunan rakyat sejak tahun 2010 hingga 2015 luas tanaman hampir tetap sama sebesar 3.268 ha dengan jumlah produksi 2.833 ton/tahun dan produktivitas berfluktuasi. Untuk Pinang luas areal pada tahun 2010 sampai 2014 relatif stabil yaitu 1.5.15 ha dengan hasil produksi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebanyak 678 ton/tahun sedangkan pada tahun 2014 produksinya sebanyak 411 ton. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi perkebunan yang ada di Kabupaten Pidie jaya belum diolah secara maksimal bila dibandingkan produktivitas masing-masing komoditi dengan produktivitas tanaman secara Nasional.

Berdasarkan agenda pembangunan Aceh, Dinas Perkebunan Aceh selaku koordinator dinas perkebunan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir akan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan kebijakan prioritas, sasaran dan indikator strategis, serta program penganggaran, dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan pokok yang telah ditetapkan. Kebijakan prioritas itu adalah: 1) Tercukupinya kebutuhan konsumsi dan bahan industri pengolahan perkebunan serta meningkatkan ekspor; 2) Terpelihara dan terehabilitasi kembali kebun rakyat yang terlantar akibat gempa/tsunami dan konflik; 3) Terbinanya mutu produk yang mempunyai daya saing di pasar dalam maupun luar negeri; 4) Terbentuknya Agribisnis perkebunan yang dapat mensejahterakan petani dan pelaku usaha; 5) Terfasilitasinya pembangunan perkebunan oleh investor dalam rangka terbukanya kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan; 6) Memberdayakan petugas, kelompok tani dan lembaga masyarakat lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan.

Tabel 2.87
Rekapitulasi Lahan Perkebunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Areal			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produktivitas (Ton/Ha/Thn)
		TBM	TM	TR			
1	Banda Baru	866	3.344	1.192	5.402	2.395	0,443
2	Panteraja	102	656	321	1.079	572	0,530
3	Trienggadeng	682	1.488	320	2.490	1.275	0,512
4	Meureudu	532	865	90	1.487	653	0,439
5	Meurah Dua	196	185	44	425	161	0,379
6	Ulim	539	826	201	1.566	665	0,425
7	Jangka Buya	-	50	35	85	26	0,306
8	Banda Dua	969	967	310	2.246	512	0,228
Jumlah		**3.886**	**8.381**	**2.513**	**14.780**	**6.259**	**0,423**

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabuapten Pidie Jaya, 2017

Tabel 2.88
Rekapitulasi Lahan Perkebunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Lahan yang digunakan	Lahan yang Belum Digunakan
1	Banda Baru	7.027	220
2	Panteraja	1.394	40
3	Trienggadeng	3.591	250
4	Meureudu	2.359	80
5	Meurah Dua	1.248	35
6	Ulim	3.104	120
7	Jangka Buya	378	
8	Banda Dua	3.252	300
Jumlah		**22.353**	**1.045**

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabuapten Pidie Jaya, 2017

Sasaran prioritas dalam pembangunan perkebunan di Pidie Jaya untuk masa yang akan datang masih di fokuskan pada beberapa program antara lain: 1) pemeliharaan perkebunan

rakyat yang sudah ada; 2) rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat; 3) penyediaan benih/bibit parsial; 4) Pembangunan perkebunan rakyat; 5) pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; 6) peningkatan sumber daya perkebunan; dan 7) membangun sarana dan prasarana yang mendukung perkebunan.

C. Produktivitas Peternakan

Historis menggambarkan para peternak tradisional di Pidie Jaya sejak dulu telah menghasilkan berbagai ternak dan hasil ternak, seperti daging dan telur, kebanyakan para peternak di Pidie Jaya belum mampu meningkatkan usaha peternakan tradisional secara komersial, cara – cara tradisional yang selama ini dilakukan dalam memelihara ternak, tentu saja berpengaruh terhadap populasi ternak didaerah Pidie Jaya, pertambahan populasi sangat lambat, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sapi bakalan dan daging untuk konsumsi di Pidie Jaya.

Permintaan akan daging dan produk peternakan lainnya cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini karena semakin membaiknya perekonomian daerah yang memberikan pengaruh langsung pada perekonomian masyarakat sebagai pelaku usaha pertanian/peternakan, dan berdampak posistif pada perekonomian pasar lokal dan pasar regional.

Salah satu usaha peningkatan produksi daging sapi yang sudah dikenal peternak di Pidie Jaya dan telah berlangsung cukup lama adalah penggemukan sapi sistem kereman, penggemukan sistem kereman ini merupakan penggemukan sapi jantan yang dikelola perorangan peternak secara terus menerus didalam kandang pada suatu periode tertentu, sapi tidak dipekerjakan tetapi hanya diberi pakan dengan nilai nutrisi yang optimal untuk menaikkan berat badan dan kesehatan sapi yang maksimal.

Usaha untuk meningkatkan populasi ternak khususnya ternak besar dengan cara pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alami (KA) yang didukung oleh pragram pemerintah pusat Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, perbaikan mutu genetik dan pengembangan pakan lokal, serta pengembangan SDM dan kelembagaan.

Kawasan peruntukan yang akan digunakan untuk kawasan peternakan adalah kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1). Kawasan dengan ketinggian <1.000 m dpl; 2). Kawasan dengan kemiringan 15 %; 3). Kawasan dengan jenis tanah /iklim sesuai untuk padang rumput. Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan peternakan serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal, Rencana penyedian ruang untuk kegiatan peternakan, diarahkan kepada lahan yang mempunyai kesesuaian sebagai peternakan sapi, kambing, domba.

Di Kabupaten Pidie Jaya Lahan yang tersedia untuk kawasan peternakan terdapat di beberapa kecamtan yaitu :

1. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 150 hektar yang berlokasi di gampong Sarah Panyang 50 ha, gampong Abah Lueng 60 ha, gampong aki Neungoh 40 ha
2. Kecamatan Panteraja dengan luas 30 hektar yang berlokasi di gampong panteraja tunong 20 ha, gampong lhok Puuk 10 ha.
3. Kecamatan Trienggadeng kurang lebih 100 hektar yang berlokasi di gampong tampui 60 ha, gampong Panton Raya 40 ha.
4. Kecamatan Meureudu dengan luas 350 hektar yang berlokasi di gampong mulieng dusun Alue demam 150 ha, gampong Blang Awe 100 ha dan gampong pohroh 100 ha
5. Kecamatan Ulim dengan luas 100 hektar yang berlokasi di gampong alue keumiki 30 ha, gampong Bidok 40 ha dan gampong Blang Cari 30 ha.
6. Kecamatan Meurah Dua dengan luas 110 hektar yang berlokasi di gampong lhoksandeng 50 ha. Gampong seunong 20 ha, gampong Sarah Mane 40 ha.
7. Kecamatan Bandar Dua dengan luas 170 hektar yang berlokasi di gampong kumba 60 ha, gampong Lhok Pusong 30 ha, gampong Cot Keng 50 ha, gampong Gharu 30 ha

Disamping kawasan gembala sebagaiman disebut diatas pemerintah daerah juga akan menertibkan peternakan masyarakat yang ada dipemukiman sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Sementara sub lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan Peternakan telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2015 yaitu 4,97 persen , sub lapangan usaha ini selain berperan sebagai penyedia pangan juga berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Masyarakat Pidie Jaya khususnya di pedesaan pada umumnya selain bertani dan berkebun juga beternak baik sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik.

Populasi ternak yang termasuk dalam kelompok ternak ruminansia besar seperti sapi tahun 2015 berjumlah 19.719 ekor meningkat sebanyak 742 ekor dibandingkan tahun 2014, kerbau tahun 2015 sebanyak 2.375 ekor meningkat 42 dari tahun 2014, ternak ruminasia kecil seperti Kambing tahun 2015 berjumlah 15.359 ekor dan domba 1.436 ekor juga terjadi peningkatan populasinya setiap tahun, hal ini juga gambaran bahwa perkembangan peternakan di Kabupaten Pidie Jaya mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan secara proporsional dalam bentuk usaha kelompok atau perseorangan sebagai usaha pokok, bukan lagi beternak itu sebagai usaha sampingan mengingat kebutuhan pasar daging sangat terbuka, Tabel 2.89 dan 2.90 menyajikan perkembangan populasi ternak dikabupaten Pidie Jaya sebagai berikut.

Tabel 2.89
Jumlah Populasi Ternak Ruminasia Besar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 - 2015

No	Kecamatan	Sapi		Tahun 2014	Tahun 2015	Kerbau		Jumlah 2014	Tahun 2015
		Jantan	Betina			Jantan	Betina		
1	Bandar Baru	1.430	2.905	4.335	4.508	160	383	543	553
2	Panteraja	263	529	792	823	47	107	154	157
3	Trienggadeng	1149	2344	3.493	3.621	189	341	530	539
4	Meureudu	1034	2100	3.134	3.259	97	224	321	326
5	Meurah Dua	353	718	1.071	1.113	14	16	30	32
6	Ulim	482	980	1.462	1.520	47	95	142	144
7	Bandar Dua	1168	2371	3.539	3.679	134	303	437	445
8	Jangka Buya	380	771	1.151	1.196	35	141	176	179
	J U M L A H	6.259	12.718	18.977	19.719	723	1.610	2.333	2.375

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya, 2016

Tabel 2.90
Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Kecil Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 - 2015

No	Kecamatan	Kambing		Domba	
		2014	2015	2014	2015
1	Bandar Baru	3498	3.958	221	231
2	Panteraja	1497	1.597	99	109
3	Trienggadeng	4518	4.618	266	276
4	Meureudu	1296	1.396	134	144
5	Meurah Dua	1512	1.612	76	86
6	Ulim	286	386	243	253
7	Bandar Dua	1146	1.246	195	205
8	Jangka Buya	806	906	122	132
	J U M L A H	14.559	15.359	1.356	1.436

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya, 2016

Tabel 2.91
Potensi Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Padang Penggembalaan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014

No	Kecamatan	Luas (Ha)	
		Kebun Rumput (HMT)	Padang Pengembalaan
1	Bandar Baru	20	26
2	Panteraja	7	9
3	Trienggadeng	8	10
4	Meureudu	26	32
5	Meurah Dua	9	12
6	Ulim	11	14
7	Jangka Buya	6	7
8	Bandar Dua	14	18
	J u m l a h	101	128

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya, 2015

Data menunjukkan (Tabel 2.91) bahwa Pidie Jaya memiliki lahan Hijau untuk Makanan Ternak (HMT) dan padang pengembalaan seluas 101 Ha dan padang pengembalaan seluas 128 Ha. Namum demikian masih banyak masyarakat yang melepaskan ternaknya bebas berkeliaran sehingga merusak tanaman pertanian dan tanaman pekarangan masyarakat lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penertiban ternak melalui penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyuluhan tentang cara beternak yang baik dan modern dimana ternak diupayakan selalu berada dikandang dan petani ternak harus menyuplai kebutuhan pakan dan nutrisi yang dibutuhkan ternak seperti sistem *cut* and *carry* bukan dengan cara konvensional seperti ternak dilepas bebas. Selain itu pemerintah juga mengupayakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan peternak dalam hal pemanfaatan limbah pertanian yang dapat dijadikan pakan alternatif untuk ternak diantaranya seperti fermentasi jerami, pemanfaatan kulit buah coklat. Pemanfaatan limbah ternak sendiri sebagai bioenergi seperti pembangunan biogas dan pelatihan pembuatan pupuk kandang.

Tabel 2.92
Jumlah Populasi Ternak Unggas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

NO	Kecamatan	Ayam			Itik		Merpati
		Buras	Ras		Itik	Itik Manila (entok)	
			Pedaging	Petelur			
1	Bandar Baru	45.751	160.129	22.876	31.290	3.914	98
2	Panteraja	14.225	49.787	7.112	5.662	2.359	72
3	Trienggadeng	33.886	118.600	16.943	32.180	1.087	98
4	Meureudu	54.506	190.772	27.253	22.646	3.358	109
5	Meurah Dua	13.910	48.686	6.955	19.849	3.605	130
6	Ulim	7.142	24.998	3.571	5.468	867	221
7	Bandar Dua	88.385	309.347	44.192	41.101	3.296	203
8	Jangka Buya	6.329	22.151	3.164	5.292	954	57
JUMLAH		**264.134**	**924.470**	**132.066**	**163.488**	**19.440**	**988**

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya, 2015

Tabel 2.92 menggambarkan kondisi komoditi ternak unggas (Itik, Ayam Potong dan Petelur) merupakan komoditas penghasil daging dan telur yang sangat laku keras di pasaran lokal. Saat ini belum banyak peternak atau investor yang bergerak dalam bidang budidaya ternak itik, ayam potong dan petelur yang dikelola secara modern/intensif. Meningkatnya permintaan daging itik, ayam potong dan telur ayam ras untuk keperluan rumah tangga dan restoran, menjadikan Kabupaten Pidie Jaya pengimpor daging ayam dan telur yang cukup besar. Ayam potong dan petelur merupakan komoditas yang memiliki prospek investasi yang cukup cerah di Kabupaten Pidie Jaya.

D. Produktivitas Kelautan dan Perikanan

Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang berisi potensi kelautan yang salah satunya berupa jalur transportasi, jasa angkutan laut dan perikanan yang dapat memberi nilai tambah bagi pendapatan masyarakat termasuk pendapatan asli daerah. Kabupaten Pidie Jaya yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka dengan panjang garis pantai mencapai 38,9 Km berdampak positif bagi masyarakat Pidie Jaya yang sebahagian besarnya bermata pencaharian

sebagai nelayan. Pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan 2 cara, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya antara lain ikan tuna, tongkol, teri, danlai-lain. Ikan tuna merupakan produk unggulan di Kabupaten Pidie Jaya yang berukuran sangat besar, sehingga banyak pengusaha ikan dari Sumatera Utara datang dan membeli langsung kenelayan tradisional dipesisir Kabupaten Pidie Jaya. Selain perikanan tangkap, Kabupaten Pidie Jaya juga mempunyai perikanan budidaya. Perikanan budidaya terbagi lagi menjadi perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air payau, dan ,perikanan budidaya air tawar (kolam).

Di Kabupaten Pidie Jaya dari 8 Kecamatan hanya 1 Kecamatan yang tidak memilki areal tambak dan areal budidaya ikan air payau yaitu kecamatan Bandar Dua, sedangkan 7 kecamatan lainnya secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Luas areal yang digunakan untuk budidaya air payau pada tahun 2016 seluas 2.078,23 Ha dengan jumlah pemilik tambak adalah sebanyak 2.158 KK, luas lahan tambak yang difungsikan baru mencapai 74,57 persen, artinya masih besar sekali potensi yang belum dimanfaatkan, salah satunya ada potensi yang dapat diusahakan seperti budidaya rumput laut jenis *glasilaria.sp* yang dapat di budidayakan pada tambak-tambak masyarakat yang terbengkalai, apabila diolah dengan baik tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani tambak. Untuk kondisi laut di Kabupaten Pidie Jaya sendiri tidak memungkinkan untuk budidaya rumput laut disebabkan tidak terdapatnya daerah yang arus lautnya tenang. lebih jelasnya luas areal tambak di kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2016 menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93
Luas Areal Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Tambak (Ha)	Area Produktif (Ha)	Persentase Pemakaian lahan (%)	Jumlah Petani (KK)
1	Bandar Baru	1.061,11	737,80	35,50	950
2	Pante Raja	92,36	69,55	3,35	111
3	Trienggadeng	242,56	198,00	9,53	311
4	Meureudu	116,90	103,00	4,96	118
5	Meurah Dua	83,35	79,10	3,81	112
6	Ulim	309,80	229,00	11,02	361
7	Bandar Dua	-	-	-	-
8	Jangka Buya	171,15	133,00	6,40	195
	Jumlah	**2.078,23**	**1.549,45**	**74,57**	**2.158**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Hasil produksi perikanan budidaya di kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 adalah 14.840,99 ton dengan rincian untuk hasil produksi budidaya ikan bandeng adalah 3.727,67 ton, budidaya udang windu dan udang vanamei 11.036,71 ton, budidaya ikan lele 15,52 ton, budidaya ikan nila 30.26 ton, budidaya ikan kakap 20.24 ton, dan budidaya ikan kerapu 10.59 ton, Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Jumlah Produksi Budidaya Air Payau Menurut Kecamatan di Pidie Jaya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jenis Ikan (ton)						Jumlah
		Bandeng	Udang	Lele	Nila	Kakap	Kerapu	
1	Bandar Baru	1.128,65	2.735,79	2,04	6,05	13,04	4,21	3.889,78
2	Pante Raja	192,81	1.153,73	1,54	5,34	-	-	1.353,42
3	Trienggadeng	303,56	1.197,96	5,60	3,08	-	-	1.510,20
4	Meureudu	152,64	1.139,25	1,20	2,30	-	-	1.495,39
5	Meurah Dua	0,24	1.791,32	2,31	1,28	-	-	1.795,15
6	Ulim	1.128,38	1.451,58	1,35	4,37	-	-	2.585,68
7	Bandar Dua	-	-	1,48	6,45	-	-	7,93
8	Jangka Buya	821,39	1.367,08	-	1,39	7,20	6,38	2.203,44
Jumlah		**3.727,67**	**11.036,71**	**15,52**	**30,26**	**20,24**	**10,59**	**14.840,99**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Tabel 2.95
Jumlah Hasil Tangkapan Ikan di Pidie Jaya Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jenis Ikan (ton)							
		Tuna	Tongkol	Teri	Cakalang	Ikan Layaran	Kembung	Lain-lain	Jumlah
1	Bandar Baru	120	153	57	45	60	98	496	**1029**
2	Panteraja	369	617	500	540	540	180	1274	4020
3	Trienggadeng	35	75	-	90	6	80	427	713
4	Meureudu	488	600	-	700	500	300	762	3350
5	Meurah Dua	290	305	4	75	5	19	506	1204
6	Ulim	43	290	375	25	46	160	338	1277
7	Bandar Dua			-				-	-
8	Jangka Buya	90	270	350	45	70	200	434	1459
Jumlah		**1435**	**2310**	**1286**	**1520**	**1227**	**1037**	**4237**	**13052**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya, 2017

Berdasarkan Tabel 2.95 di atas dapat dilihat, produksi perikanan tangkap di kabupaten Pidie Jaya sangat melimpah. Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya antara lain ikan tuna, tongkol, teri, dan lain-lain. Ikan tuna merupakan produk unggulan di Kabupaten Pidie Jaya yang berukuran sangat besar, sehingga banyak pengusaha ikan dari Sumatera Utara datang dan membeli langsung kenelayan tradisional dipesisir Kabupaten Pidie Jaya. Hasil perikana tangkap di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 13.052 ton pada tahun 2016, antara lain jenis ikan tuna sebesar 1.435 ton, jenis ikan tongkol 2.310 ton, jenis ikan teri 1.286 ton, jenis ikan Cakalang 1.520 ton, jenis ikan layaran 1.227 ton, jenis ikan kembung 1.037 ton serta jenis ikan lainnya sebesar 4.237 ton.

Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun) penduduk Aceh terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini terlihat pada tahun 2011 (38 kg/kapita/tahun), tahun 2014 (43,07 kg/kapita/tahun), tahun 2015 (45 kg/kapita/tahun) pada tahun 2016 konsumsi ikan ditargetkan akan mencapai 54,91 kg/kapita/tahun dimana angka konsumsi ikan perkapita di Aceh selama ini berada di atas rata-rata nasional (35 kg/kapita/tahun). Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 sebanyak 161.000 jiwa mengkonsumsi ikan 54,91 kg/kapita/tahun kebutuhan ikan di Pidie Jaya sebanyak 8.840 ton setahun, sedangkan jumlah

produksi ikan tangkapan dan tambak air payau setahun sebanyak 27.892 ton, artinya peluang ekspor sangat memungkinkan. Untuk itu perlu dipersiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya dan peningkatan SDM masyarakat nelayan.

2.4.1.5. Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pidie Jaya terkenal dengan salah satu industri rumah tangga, yaitu pembuatan kue adee. Produksi kue adee ini merupakan warisan turun temurun dari keluarga masyarakat setempat. Sampai saat ini, usaha home industry ini terus mengalami peningkatan. Pada akhir 2011 tercatat 16 unit usaha dengan kapasitas produksi 30.500 buah/tahun, dan angka ini terus meningkat seiring semakin terkenalnya makanan industri rumah tangga tersebut. Selain itu di Kabupaten Pidie Jaya juga terdapat industri sepatu dan sandal dari kulit dan bahan lainnya. Usaha ini merupakan usaha mandiri yang bertempat di Kecamatan Bandar Dua.Usaha tersebut terus berkembang di karenakan penggunaan bahan dan kualitas bahan yang tetap terjaga. Industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri pengolahan kakao yang terdapat di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru. Pengolahan coklat ini diproduksi oleh salah satu koperasi yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya. Pabrik pengolahan kakao tersebut mampu mengolah 10 kg coklat per hari yang terdiri dari coklat batangan, aneka makanan coklat, dan aneka minuman coklat.

Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri dengan kriteria yaitu ;

a) Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
b) Tersedia sumber bahan baku yang cukup;
c) Adanya sistem pembuangan limbah;
d) Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial; dan
e) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi atau yang berpotensi untuk pengembangan irigasi atau tidak terletak kawasan berfungsi lindung atau kawasan hutan produksi tetap dan terbatas.

Selanjutnya untuk kawasan peruntukan industri terdiri atas:

a) kawasan peruntukan industri besar;
b) kawasan peruntukan industri menengah;
c) kawasan peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga; dan
d) kawasan peruntukan industri lainnya. Kawasan peruntukan industri menengah seluas 91,27 Ha berlokasi di Kecamatan Panteraja di Gampong Reudeup, Gampong Peurade, Gampong Mesjid Panteraja, dan Gampong Lhok Puuk. Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di semua Kecamatan dan Kawasan peruntukan industri lainnya meliputi kawasan industri perikanan seluas 19,63 Ha terletak di Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid Panteraja.

2.4.1.6. Sumberdaya Energi dan Mineral

A. Sumber Daya Energi

Sumberdaya energi Aceh difokuskan kepada sumber energi terbaharukan untuk mengatasi krisis energi listrik. Pemerintah Aceh telah berupaya meningkatkan pelayanan listrik pada daerah terpencil yang belum terjangkau oleh PT.PLN antara lain pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTMH yang telah dibangun di beberapa Kabupaten seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Utara dan Aceh Timur. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga berupaya melakukan pengembangan energi skala besar seperti Power Plant Nagan Raya 2 x 100 MW, PLTA Peusangan 2 x 43 MW, PLTP Jaboi 1 x 50 MW, PLTP Seulawah Agam 1 x 180 MW dan PLTU Krueng Raya 1 x 100 MW, Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh secara berkelanjutan akan dilakukan pengembangan dan pembangunan sumber- sumber baru listrik sesuai potensi yang ada, seperti yang disajikan pada peta rencana pengembangan transmisi dan Gardu Induk (GI) 150 KV sampai tahun 2024.

Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan rencana tata ruang akan mengembangkan sumber daya energi berupa pembangunan pembangkit listrik Mikrohidro (PLTMH) yang berlokasi:
a). Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Meureudu dengan kapasitas 6 MW;
b). Gampong Lhok Gajah, Kecamatan Ulim dengan kapasitas 10 KW;

Pada tahun 2008 bulan Oktober Kantor PLN Cabang Sigli Ranting Meureudu, dalam melayani listrik belum dapat menjangkau seluruh wilayah gampong-gampong di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini disebabkan jumlah unit rumah yang tidak begitu signifikan di beberapa gampong. Pelayanan dilakukan oleh pembiayaan yang berasal dari APBN, adapun nama lokasi pembangkit listrik sampai saat ini masih berada di Gampong Tijue Kabupaten Pidie.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Pidie Jaya relatif telah terpenuhi, sebagai tolak ukur kemampuan pelayanan secara umum kebutuhan energi listrik dapat dibagi empat klasifikasi, yaitu: 1). Rumah Tangga; Kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga diklarifikasikan atas jenis persilnya yaitu: a). perumahan skala besar, 1.300 watt/unit; b). perumahan skala sedang, 900 watt/unit; perumahan skala kecil, 450 watt/unit. 2). Perdagangan dan Perkantoran, Standar kebutuhan energi listrik untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran maksimum 20 watt/m2 atau 25 persen dari kebutuhan rumah tangga. 3). Kegiatan Sosial dan Pelayanan Umum, Kegiatan sosial meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Kebutuhan listrik untuk kegiatan tersebut maksimum 15 watt/m2 atau 25 persen dari kebutuhan rumah tangga. 4). Penerangan Jalan, Standar yang digunakan adalah maksimum 18 watt/m2 atau 10 persen dari kebutuhan rumah tangga.

Pemerataan pelayanan terhadap kebutuhan listrik tersebut perlu diusahakan semaksimal mungkin mengingat salah satu indikator berkembangnya suatu kota atau wilayah adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan/listrik. Jenis pembangkit yang disediakan untuk tiap kawasan tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemungkinan pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang terjangkau. Hal tersebut dapat dilakukan, mengingat telah terdapat berbagai penelitian mengenai berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kesulitan penyediaan listrik oleh perusahaan listrik negara (PT PLN).

B. Sumber Mineral

Sumber daya migas adalah sumber daya yang meliputi sumber daya minyak dan gas yang ada di perut bumi Kabupaten Pidie Jaya. Sumber daya migas dapat memberikan kontribusi pada penerimaan daerah. Dalam hal ini bukan tidak mungkin Pidie Jaya memiliki potensi sumber daya migas yang dapat menjadi penerimaan daerah lainnya di luar sektor migas, sehingga setiap regulasi yang dibuat tentang sumber daya energi harus dapat mendorong masuknya investasi.

Sumber daya mineral yang ada sangat ini, masih berupa bahan galian C. Tetapi jumlah bahan galian ini cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari keberadaan sungai dan ketinggian daratan yang bervariasi (tebing). Berdasarkan pengamatan kegiatan penambangan bahan galian C, umumnya merupakan dipergunakan sebagai bahan bangunan dilakukan masih menggunakan cara tradisional dan beberapa diantaranya juga dengan mekanis.

Beberapa penilaian dasar terhadap potensial bahan galian, diantaranya sebagai berikut; 1). Endapan Aluvial, terbentuk pada daerah sungai laut dangkal yang dikontrol oleh air atau arus, pembentukan dari proses pelapukan batuan sampai pengendapan kembali. Dengan potensi sumber galian sebagai berikut: kerikil, pasir dan lempung (tanah liat). 2). Sedimen Kuarter Awal, Sedimen Kuarter Awal terbentuk pada daerah antara darat sampai laut dangkal, dengan indikator adanya mineral lignit dan napal. Bahan galian antara lain: pasir, kerikil, lempung, perselingan batu pasir, batu lempung. 3). Sedimen Tersier, Sedimen Tersier diendapkan pada daerah/lingkungan darat, laut dangkal dan laut dalam. 4). Sedimen/Metamorf Pratersier, terbentuk akibat dari tekanan/pembebanan batuan (P) dan temperatur (T) pada batuan dibawah permukaan tanah. Potensi bahan galian sebagai berikut : batu gamping pejal, schkiss mika, batu pasir, metawacke konglemerat, kuarsit, batu sabak schkiss, mika dan marmer. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.96 berikut :

Tabel 2.96
Potensi Material Galian di Pidie Jaya Tahun 2016

No	Jenis Bahan Galian	Berpotensi
1	Endapan Aluvial	- Kerikil - Pasir - Lempung (tanah liat)
2	Sedimen Kuarter Awal	- Kerikil - Pasir - Lempung (tanah liat) - Batu lempung - Perselingan batu pasir
3	Sedimen Tersier	-
4	Sedimen/Metamorf Pratersier	-

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab Pidie Jaya, 2017

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas daerah dapat ditinjau dari ketersedian fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Aksesibilitas Kabupaten Pidie Jaya hanya pada darat, sedangkan laut dan udara tidak tersedia. Berdasarkan sumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010, Panjang jalan kabupaten seluruhnya adalah 330,13 km, dengan kondisi baik (pemeliharaan rutin) mencapai 271,92 km (82,37%); kondisi sedang/rusak ringan (pemeliharaan periodik) sepanjang 47,35 km (14,34%) dan kondisi rusak berat (peningkatan) sepanjang 10,86 km (3,29%). Ini menandakan hampir keseluruhan jalan kabupaten dalam kondisi cukup memadai.

Jumlah jembatan yang ada 62 unit dengan rincian 43 unit jembatan konstruksi beton dan 19 unit jembatan gantung permanen. Keseluruhan kondisi jembatan tersebut bisa dikatagorikan masih bagus dan layak dipergunakan.

2.4.2.2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah difokuskan pada penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan Lindung terdiri dari; 1). Kawasan hutan lindung seluas 48.004,21 Ha, yang meliputi: a). Kecamatan Bandar Baru dengan luas 8.333,03 Ha, meliputi Gampong Abah lueng, Gampong Meunasah Jiem Jiem dan Gampong Sarah Panyang; b). Kecamatan Trienggadeng, dengan luas 1,32 Ha, terletak di Gampong Panton Raya; c). Kecamatan Meureudu dengan luas 4.859,48 Ha, meliputi Gampong Lampoh Lada, dan Gampong Glumpang tutong; d). Kecamatan Meurah Dua,

dengan luas 24.720,08 Ha, meliputi Gampong Lhok Sandeng; e). Kecamatan Bandar Dua, dengan luas 10.090,38 Ha, meliputi Gampong Kumba Ateueh, Cot Keng, Blang Miro, Krueng Kiran, Kumba, Cot Geurufai, Lhok Pusong, Gaharu, dan Alue Sane. 2). Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari; a). Sempadan pantai seluas 228,57 Ha; b). Sempadan sungai seluas 2.067,15 Ha; dan c). Ruang terbuka hijau harus esuai dengan ketetntuan 30 persen dari luasan kawasan perkotaan di seluruh Kecamatan.

Kawasan Budidaya terdiri dari; a). Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 4.865,11 Ha; b). kawasan hutan rakyat seluas 1.225,39 Ha; c). kawasan hutan pendidikan seluas 150,21 Ha; d). kawasan peruntukan pertanian yang dibagi dalam pertanian 1). lahan basah seluas 7.739,21 Ha, 2). pertanian kering seluas 365,56 Ha, 3). Holtikultura seluas 2.331,69 Ha; 4). lahan perkebunan 17.004,26 Ha, 5). Lahan kritis seluas 201,86 Ha; 6). Kawasan Peternakan seluas 1.271,55 Ha, e). kawasan peruntukan perikanan seluas 1.686,72 Ha; f). kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), yang terdapat hampir disemua kecamatan berupa kawasan pertambangan mineral logam ; kawasan pertambangan mineral bukan logam; kawasan peruntukan pertambangan batuan sedangkan dan kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dan gas alam di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Tringgadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Jangka Buya; g). kawasan peruntukan industri; yang dikelompokan dalam kawasan industri besar; kawasan industri menengah seluas 91,27 Ha yang berlokasi di Kecamatan Panteraja di Gampong Reudeup, Gampong Peurade, Gampong Mesjid Panteraja, dan Gampong Lhok Puuk, untuk kawasan industri kecil dan industri rumah tangga di semua kecamatan; dan kawasan peruntukan industri lainnya berupa kawasan industri perikanan seluas 19,63 Ha terletak di Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid Panteraja.; h). kawasan peruntukan pariwisata; yang dikelompokan dalam objek wisata budaya; kawasan wisata alam; objek wisata buatan; dan objek wisata khusus atau minat; i). kawasan peruntukan permukiman kawasan permukiman perkotaan seluas 2.754,51 Ha; dan kawasan permukiman perdesaan/pergampongan seluas 3.769,41 Ha; dan j). kawasan peruntukan lainnya terdiri dari Kawasan peruntukan transmigrasi seluas kurang lebih 561,28 Ha meliputi: Kecamatan Bandar Baru seluas 105,21 Ha; Kecamatan Tringgadeng seluas 128,23 Ha; Kecamatan Meureudu seluas 129,64 Ha; Kecamatan Meurah Dua seluas 39,14 Ha; Kecamatan Ulim seluas 145,78 Ha; dan Kecamatan Bandar Dua seluas 13,28 Ha; Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas 19,94 Ha terdiri atas; Kawasan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana meliputi: Kodim berada di Kecamatan Bandar Baru; Kipan B Yonif 113/Jaya Sakti di Kecamatan Bandar Baru; dan Kompi Armed di Kecamatan Bandar Baru, dan kawasan kepolisian disemua kecamatan, Kawasan peruntukan pelabuhan seluas 21,05 Ha di Kecamatan Panteraja, Gampong Mesjid Panteraja dan Gampong Reudeup. Kawasan peruntukan pendidikan seluas 110,16 Ha di Kecamatan Bandar Dua terletak di Gampong Baro dan Kecamatan

Meureudu terletak di Gampong Rungkom. Kawasan pola ruang laut Kabupaten Pidie Jaya seluas 21.978,37 Ha meliputi: kawasan daerah perlindungan laut dan atau konservasi laut meliputi seluruh kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil seluas 1.554,86 Ha di Kecamatan Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Muara Dua, Ulim, dan Jangka Buya; dan kawasan pemanfaatan umum meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 20.423,51 Ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil.

Kebijakan penataan lahan hutan untuk mendukung kelestarian dan keserasian lingkungan hidup dengan strategi; a). merehabilitasi lahan kritis; b). mengoptimalkan industri hasil hutan; c). mengembangkan hasil hutan bukan kayu; d). mengembangkan tanaman hutan; e). merehabilitasi tanaman tua; dan f). menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung. Kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan dan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi: a). menetapkan sistem hierarki kota-kota; b). mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di PKL dan PPK; c). mendorong pertumbuhan PPL; d). mengembangkan permukiman perkotaan dan Gampong sesuai daya dukung dan daya tampung; e). mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; dan f). mendorong berkembangnya pusat pelayanan berdaya saing eksternal.

Kebijakan pengelolaan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan strategi: a). mengembangkan kawasan agropolitan; b). menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan; c). mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan; d). mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering; e). mengembangkan kawasan Minapolitan; f). mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan tawar; g). memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan; h). mengembangkan daerah potensial peternakan; i). mengembangkan industri berbasis agro; j). merevitalisasi dan mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern; k). memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; dan l). menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern.

Kawasan strategis Kabupaten berupa kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi meliputi: a). KSK kawasan perkotaan Meureudu; b). KSK Agropolitan meliputi: 1). kawasan barat berpusat di Kecamatan Bandar Baru; dan 2). kawasan Timur berpusat di Kecamatan Bandar Dua. c). KSK Minapolitan meliputi: 1). kawasan barat berpusat di Kecamatan Panteraja; dan 2). kawasan timur berpusat di Kecamatan jangka Buya. d). KSK Agrowisata meliputi: 1). Kawasan Agrowisata Blang Cari – Blang Rheue – Lhok Gajah; 2). Kawasan

Agrowisata Paru terletak di Gampong Paru Keude. d). KSK Gampong Terpadu Mandiri di Kecamatan Ulim; f). KSK Blang Raweue di Kecamatan Meurah Dua; dan g). KSK Pariwisata Trienggadeng.

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan meliputi: a). kawasan sempadan sungai; b). kawasan pelestarian alam dan hutan; dan c). kawasan pelestarian alam laut dan hutan mangrove di kawasan pesisir. Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten tersebut.

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, terutama untuk minum, memasak mencuci, mandi, dan kakus. Menurut Kementerian Kesehatan RI, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Oleh sebab itu sumber air minum menggunakan ledeng dapat dikatakan sebagai sumber aitr minum yang baik.

Sumber Air Bersih yang dominan digunakan oleh masyarakat Aceh pada tahun 2009 adalah, bersumber dari Mata Air terlindung sebanyak 40,69 persen atau sebanyak 440.556 RT, yang bersumber dari Air Kemasan sebanyak 20,27 persen atau 219.446 RT dan Air yang bersumber dari ledeng meteran sebanyak 17,42 persen atau 188.608 RT dan sumber – sumber lainnya secara skala kecil, namun pada tahun – tahun berikutnya rumah tangga pengguna air bersih bergeser, sumber mata air terlindung tahun 2009 sebanyak 40,69 persen turun menjadi 4,70 persen tahun 2010, sumber air dari sumur terlindung naik secara signifikan tahun2009 sebanyak 1,32 persen menjadi 37,35 persen tahun 2010, air dari sumur tidak terlindung tahun 2009 sebanyak 4,75 persen menjadi 13,22 persen pada tahun 2010 demikian juga halnya dengan air yang bersumber dari air kemasan bermerek tahun 2009 sebanya 20,27 persen naik menjadi 25,49 persen pada tahun 2010 namun pada tahun – tahun berikutnya menurun sampai 1,01 persen pada tahun 2013.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan

dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Target penyediaan air minum disesuaikan dengan RPJMN 2014 – 2019 dimana untuk persentase akses masyarakat terhadap air minum adalah 100 persen seperti pada grafik di atas. Adapun upaya yang dilakukan adalah: Pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 40 Kawasan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota/IKK 400 liter/detik, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Pemekaran/Perluasan Perkotaan 100 liter/detik, Bantuan Program 4 PDAM, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Nelayan 15 liter/detik, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 10 liter/detik.

Kondisi pelayanan Air Minum di Kabupaten Pidie Jaya Dari total kapasitas terpasang 4.640 liter/detik air minum perpipaan, baru berproduksi 3.404 liter/detik, masih terdapat idle capacity 1.235 liter/detik. Kebutuhan Sambungan rumah berdasarkan idle capacity sebanyak 151.106 SR. Dalam hal ini masih dibutuhkan penanganan untuk pengembangan jaringan pelayanan dan sambungan rumah serta penambahan kapasitas yang besar untuk pencapaian target pelayanan 100 persen air minum pada tahun 2019.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Sistem jaringan air minum berupa pengembangan daerah pelayanan terdiri atas: a). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu dengan kapasitas 40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu melayani wilayah Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Meurah Dua, sebagian wilayah Kecamatan Ulim, sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng; b). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Panteraja dengan kapasitas 5 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja, melayani wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng dan sebagian wilayah Kecamatan Bandar Baru; c). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim dengan kapasitas 230 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu yang dialiri dari Gampong Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua melayani wilayah Kecamatan Ulim, wilayah Kecamatan Meurah Dua, wilayah

Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Jangka Buya dan wilayah Kecamatan Bandar Dua; d). Pengembangan WTP meliputi: 1). WTP Gampong Jiem-jiem Kecamatan Bandar Baru dengan kapasitas 100 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Bandar Baru, wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng; 2). WTP Gampong Lhok Puuk Kecamatan Pante Raja dengan kapasitas 40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Panteraja dan wilayah Kecamatan Trienggadeng; e). pengembangan pemanfaatan air tanah dan air sumber lain secara terkendali.

Sampai saat sekarang pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat, yaitu di Meureudu, Panteraja, Penyediaan air bersih untuk wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan memanfaatkan aliran sungai yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan. Aliran sungai yang dapat dimanfaatakan sebagai air baku diantaranya Krueng Meureudu dengan debit air dapat melayani air bersih untuk Kecamatan Meureudu dan sekitarnya termasuk Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Bandar Dua, dan sebagian Kecamatan Trienggadeng. Sedangkan sumber air baku Krueng Panteraja melayani air bersih untuk Kecamatan Panteraja, Kecamatan Bandar Baru, dan Sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng, proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan kecamatan sampai hingga tahun 2031 disajikan pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97
Proyeksi Kebutuhan Air Hingga Tahun 2031

Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih											
	2016			2021			2026			2031		
	Pddk	SR	(L/dt)	Pddk	SR	(L/dt)	Pddk	SR	(L/dt)	Pddk	SR	(L/dt)
Bandar Baru	41.224	8.245	48	47.443	9.489	55	54.600	10.920	63	61.096	12.219	71
Pante Raja	9.875	1.975	11	11.365	2.273	13	13.079	2.616	15	15.052	3.010	17
Trienggadeng	26.859	5.372	31	30.911	6.182	36	35.574	7.115	41	40.941	8.188	47
Meureudu	26.135	5.227	30	30.078	6.016	35	34.615	6.923	40	39.837	7.967	46
Meurah Dua	13.650	2.730	16	15.709	3.142	18	18.079	3.616	21	20.806	4.161	24
Ulim	18.024	3.605	21	20.744	4.149	24	23.873	4.775	28	27.475	5.495	32
Jangka Buya	11.011	2.202	13	12.681	2.536	15	14.594	2.919	17	16.795	3.359	19
Bandar Dua	29.603	5.921	34	34.069	6.814	39	39.208	7.842	45	45.123	9.025	52
JUMLAH	**176.381**	**35.276**	**204**	**203.000**	**40.600**	**235**	**233.622**	**46.724**	**270**	**267.125**	**53.425**	**309**

Sumber: Qanun RTRW Kab. Pidie Jaya 2014-2034

2.4.2.4. Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi

A. Fasilitas Listrik

Sumberdaya energi untuk kebutuhan Kabupaten Pidie Jaya saat ini masih dimasukkan oleh PT. PLN Aceh yang merupakan produk dari berbagai sumber penghasil energi, baik itu dari sumber fosil dan non fosil, Data dari PT. PLN. Wilayah Aceh kondisi Desember tahun 2014

adalah Beban Puncak sebesar 375 MW, yang terdiri dari sistem Grid 150 KW = 269 MW sebesar 72 persen, sistem Isolated sebesar 20 KV = 106 MW atau sebesar 28 persen, jumlah konsumen sebanyak 1.210.362 pelanggan, rasio elektrifikasi sebesar 92,55 persen dan rasio gampong berlistrik sebesar 96,98 persen, harga penjualan rata-rata sebesar 854 rupiah per kWh dan biaya pokok penyediaan (BPP) sebesar 2.683 rupiah per kWh. Untuk mengatasi krisis energi listrik kedepan Pemerintah Aceh akan berupaya meningkatkan pelayanan listrik kedaerah terpencil yang belum terjangkau oleh PT.PLN berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Kabupaten Pidie Jaya sesuai potensi yang ada masih memungkinkan dibangun PLTMH dilokasi sebagaimana tabel 2.98 berikut ini :

Tabel 2.98
Potensi Pembangunan PLTMH di Kabupaten Pidie Jaya

NO	Kegiatan	Lokasi
1	PLTMH 6 MW	Gampong Lampoh Lada Kec. Meureudu
2	PLTMH 10 MW	Gampong Lhok Gajah Kec. Ulim

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab Pidie Jaya, 2017

B. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2016 sudah mulai merata dengan baik dan sempurna setelah dilakukan pembangunan jaringan telekomunikasi berupa jaringan terestrial atau jaringan kabel dan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Jaringan terestrial atau jaringan kabel berupa pengembangan jaringan kabel serat optik di semua Kecamatan dalam Kabupaten dan jaringan nirkabel atau tanpa kabel untuk mendukung pengembangan menara BTS (Base Transciever Station) di semua Kecamatan dalam Kabupaten. (perlu perbaikan narasi/jangan berulang-ulang)

Untuk meningkatkan promosi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat lokal dan nasional/internasional Pemerintah Kabupaten Pidie jaya merencanakan Pembangunan pemancar Televisi Pijay TV di Kecamatan Ulim/Meurah Dua, demikian juga halnya untuk pemancar radio FM Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya direncanakan akan dibangun di Kecamatan Meureudu dan pemancar radio FM swasta lainnya di semua Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya, demikian juga halnya dengan Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Acces*) dan VSAT (*Very Small Avperture Terminal*); dan Pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Qanun.

Untuk bidang telekomunkasi, jumlah satuan sambungan telepon di Kabupaten Pidie Jaya hanya sebanyak 203 sst dikarenakan banyak rumah tangga yang sudah beralih menggunakan mobile

phone (*handphone*). Jumlah sentral telepon otomat telkom hanya 1 unit, sedangkan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 34 unit dengan rincian 23 unit Telkomsel, 1 unit Telkom, 6 unit XL dan 4 unit Indosat. Sedangkan warung Internet (warnet) yang ada hanya berjumlah 4 unit.

2.4.2.5. Ketersediaan Penginapan dan Restoran

Penginapan adalah perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum, termasuk dalam pengertian penginapan adalah hotel, gubuk pariwisata (*cottage*), motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel) dan pondok pariwisata. Di kabupaten Pidie Jaya hanya mempunyai wisma yaitu berjumlah 4 wisma yang semuanya terletak di kota Meureudu, sedangkan hotel, motel dan lain-lainya belum ada. Untuk jumlah rumah makan sebanyak 33 unit dan restoran sebanyak 4 unit dengan ketersedian rumah makan terbanyak berada di kecamatan Trienggadeng sebanyak 14 rumah makan. Setiap pembangunan penginapan dan restoran harus mengacu kepada Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.

Dalam rangka menghadapi perkembangan masa yang akan datang pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus menjalin kerja sama yang lebih inten dengan pihak swasta dan pengembang agar mau berinvestasi dengan cara memudahkan perizinan dan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh pengusaha, hal ini dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja dan lapangan usaha apabila wisatawan/turis banyak yang tinggal/singgah di Kabupaten Pidie Jaya.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan ketertiban

Perkembangan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya selama periode tahun 2010-2015 berfluktuasi, Pencurian dengan pemberatan dominan tahun 2013 sebanyak 10 kasus, pencurian biasa terjadi pada tahun 2015 sebanyak 26 kasus, Pencurian kendaraan bermotor meningkat pada tahun 2015 sebanyak 36 kasus dan Narkotika sebanyak 20 kasus meningkat dibandingkan tahun 2014, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99
Jumlah Tindak Pindana Menonjol di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 – 2015

No	Kasus	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pencurian dengan pemberatan (curat)	4	-	-	10	-	8
2	Pencurian kenderaan bermotor	10	9	-	25	17	36
3	Pencurian dengan kekerasan (curas)	2	1	-	7	1	2
4	Pencurian Biasa	2	11	12	11	19	26
5	Penganiayaan Berat/ringan	4	15	12	7	54	53
6	Kebakaran	-	2	1	1	0	-
7	Penggelapan	5	2	4	6	6	11
8	Perkosaan	1	2	-	4	2	-
9	KDRT	-	-	1	3	8	7
10	Perjudian	6	3	8	4	9	1

No	Kasus	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
11	Narkotika	16	12	27	13	9	20

Sumber: Badan Pusat Statistik Pijay, 2016

2.4.3.2. Pengenaan pajak daerah, perda (jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi)

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Beberapa Perda yang mendukung iklim usaha yang sudah dikeluarkan oleh Provinsi Aceh dan menjadi pedoman oleh Kabupaten Kota adalah :

1. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 tahun 2014 Tentang Pemberian Insentif dan Penanaman Modal di Aceh;
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;

Beberapa faktor penyebab belum berkembangnya investasi di Aceh dan di Kabupaten/Kota pada umumnya adalah: 1) belum optimalnya promosi investasi; 2) terbatasnya data ketersediaan lahan dan potensi investasi; 3) terbatasnya energi listrik; 4) lemahnya dukungan regulasi investasi dan 5) belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota harus melakukan beberapa hal antara lain: 1) peningkatan promosi investasi; 2) penyediaan data ketersediaan lahan dan potensi investasi; 3) peningkatan kapasitas energi listrik; 4) menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari rasio penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. Rasio penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 hanya

5.82 persen dan yang menamatkan SLTA sederajat sebesar 21.67 persen. Sedangkan rasio penduduk yang masih sekolah di perguruan tinggi sebesar 2.77 persen dan yang masih sekolah tingkat SLTA sederajat sebesar 6.91 persen, berdasarkan buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh.

Tahun 2016 jumlah penduduk kabupaten Pidie Jaya yang menempuh pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan akademi/tinggi berjumlah 105.841 orang atau 67,36 persen. Sedangkan yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau belum bersekolah sebanyak 51.275 orang atau 32,64 persen dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya seperti pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2014

No.	Jenis Pendidikan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Doktor/S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/S2	143	145	146
3	Sarjana/S1	4.699	4.901	5.074
4	Diploma 3	2.418	2.490	2.405
5	Diploma 2 /Diploma 1	-	1.949	1.689
6	SMU / SMK / Aliyah	35.693	36.450	34.928
7	SMP / Tsanawiyah	32.931	32.811	31.201
8	SD / Ibtidaiyah	32.430	32.650	30.398
9	Tidak Tamat SD	20.552	21.070	21.039
10	Belum / Tidak Sekolah	26.506	27.786	30.236
	Total	157.383	160.251	157.116

Sumber: Disdukcapil Kab. Pidie Jaya, 2017

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada sektor pertanian dan perkebunan, kemudian diikuti dengan wiraswasta, perdagangan dan nelayan serta sektor lainya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menempati porsi yang lumayan besar yaitu 9,12 persen atau sekitar 6.372 jiwa. Bedasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014, jumlah penduduk Pidie Jaya yang berkerja mencapai 54.586 jiwa atau 35,54 persen, dan sekitar 14.727 jiwa merupakan pekerja tidak tetap. ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah di perguruan tinggi dan lulusan dari perguruan tinggi masih sangat minim.

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Defndency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk umumr 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (angkatan kerja),

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.101 menujukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2010 sebesar 58,40 yang berarti setiap 100 orang penduduk harus menanggung biaya hidup orang lain sebanyak 58,40 orang yang tidak produktif dan angka ini sudah mulai mengalami perbaikan sampai tahun 2015 sudah menjadi 56,69, sebaiknya makin lama beban ganda ini semakin kecil sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Tabel 2.101
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010-2015

Tahun	Tahun			
	0 - 14 tahun	15 - 64 tahun	65 ke atas	Rasio ketergantungan
2010	41.946	84.543	7.429	58.40
2011	42.516	86.628	7.648	57.91
2012	43.020	88.525	7.854	57.47
2013	43.833	90.934	8.120	57.13
2014	44.433	92.787	8.364	56.90
2015	45.153	94.913	8.653	56.69

Sumber: Profil Kabupaten Pidie Jaya, 2016

2.4.4.3. Aparatur Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelanyanan publik secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah kabupaten akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan sumberdaya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang ada. Jumlah sumberdaya aparatur daerah/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2015 adalah 3.747 orang. Bila dilihat dari tingkat kepangkatan/golongan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah golongan IV sebanyak 1080 orang, golongan III sebanyak 1.967 orang, golongan II sebanyak 651 orang dan golongan I sebanyak 49 orang.

BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Kesejahteraan secara adil dan merata kepada masyarakat menjadi tujuan akhir dari suatu pembangunan. Hasil usaha sumber daya manusia yang mengelola potensi sumber daya alam, mengatasi permasalahan pembangunan dan memanfaatkan peluang yang tersedia menjadi penentu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pidie Jaya untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global yang dipengaruhi faktor-faktor multidimensional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun Tahun 2015-2035.

RTRW Aceh telah menetapkan 6 (enam) Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*). Satu diantara 6 (enam) Kawasan ATDC tersebut adalah Zona Utara yang terdiri dari Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Bireuen. Hal ini bermakna Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran penting sebagai kawasan pendukung agroindustri. Namun, produktivitas dan daya saing daerah untuk mendukung pengembangan agroindustri belum mampu diwujudkan.

Hasil dari analisis terhadap permasalahan dan potensi Kabupaten Pidie Jaya yang telah diuraikan sebelumnya serta dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat, beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Pidie Jaya diuraikan sebagai berikut.

3.1. Indikator Makro Pembangunan

Rendahnya indikator makro pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sehingga menjadi isu strategis pembangunan. Hal ini tergambar dari tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran dan rasio ketergantungan serta rendahnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Rata-rata angka kemiskinan Pidie Jaya periode lima tahun terakhir (2010-2014) sebesar 25,05 persen masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata angka kemiskinan Aceh untuk periode yang sama sebesar 19,18 persen. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah berupaya menurunkan angka kemiskinan dari 27,97 persen pada tahun 2010 menjadi 21,78 persen pada tahun 2014. Laju rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1,55 persen lebih baik dari laju rata-rata penurunan angka kemiskinan Aceh yang hanya sebesar 1 persen untuk periode yang sama. Sudah menjadi fenomena umum di Indonesia dan

Aceh, konsentrasi penduduk miskin di Kabupaten Pidie Jaya juga berada di pedesaan yang pada umumnya petani dan nelayan.

Isu pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya hingga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Angka pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2009 sebesar 7,21 persen meningkat menjadi 7,95 persen pada tahun 2011. Demikian juga dengan rasio ketergantungan Pidie Jaya cukup tinggi dan cenderung konstan. Untuk periode 2010-2014, rasio ketergantungan pada tahun 2010 sebesar 57 persen dan menurun tidak signifikan menjadi 56 persen pada tahun 2014. Tingginya rasio ketergantungan ini memberi makna bahwa semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

PDRB Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong rendah dan fluktuatif. PDRB Kabupaten Pidie Jaya cenderung konstan untuk tahun 2010 sebesar 5,38 persen dan tahun 2011 sebesar 5,35 persen. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 5,63 persen, namun dan 2013 menurun ke posisi 3,84 persen. PDRB Kabupaten Pidie Jaya yang masih rendah dan didominasi oleh sektor pertanian. Namun sektor pertanian belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya sehingga masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai tambah dari komoditi unggulan pertanian. Tantangan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai pendukung kawasan industri sesuai dengan rancangan RTRW Aceh. Selain itu, lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya juga dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan potensi daerah seperti sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan) dan yang terintegrasi dengan sektor lainnya dan pengembangan sektor ekonomi riil masyarakat.

3.2. Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan

Produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan yang rendah menjadi isu strategis Kabupaten Pidie Jaya untuk mendukung pengembangan kawasan agroindustri. Produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang rendah berdampak terhadap rendahnya Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Rata-rata produktivitas tanaman pangan selama periode 5 (tahun) terakhir untuk padi (7,11 ton/ha), jagung (3,32 ton/ha) dan kedelai (1,58 ton/ha). Sementara, produktivitas nasional pada periode yang sama untuk padi (5,20 ton/ha), jagung (4,96 ton/ha) dan kedelai (1,50 ton/ha). Hal ini memberikan informasi bahwa produktivitas jagung masih rendah dan perlu mendapat perhatian dibandingkan dengan produktivitas padi dan kedelai yang sudah lebih baik dari rata-rata produktivitas nasional. Komoditi unggulan perkebunan Pidie Jaya antara lain: Kakao, Pinang, Melinjo dan Kelapa Dalam. Produktivitas selama periode 5 (tahun) terakhir untuk Kakao (0,44 ton/ha), Pinang (0,41 ton/ha), Melinjo (3,55 ton/ha) dan Kelapa Dalam (0,63 ton/ha).

Potensi ternak ruminansia besar pada tahun 2013 seperti sapi berjumlah 18.505 ekor dan kerbau 2.275 ekor. Sedangkan untuk ternak ruminasia kecil seperti Kambing berjumlah 14.135 ekor dan domba 1.316 ekor. Potensi ternak ini diukung oleh lahan hijauan makanan ternak (HMT) seluas 309 Ha dan padang pengembalaan seluas 1.271,55 Ha. Jumlah populasi ternak unggas untuk ayam buras sebanyak 52.423 ekor dan ayam ras (pedaging 157.000 ekor dan petelur 7.621 ekor). Saat ini belum banyak peternak atau investor yang bergerak dalam bidang budidaya ternak ruminansia dan unggas yang dikelola secara modern. Meningkatnya permintaan daging dan telur untuk keperluan rumah tangga dan restoran, menjadikan Kabupaten Pidie Jaya pengimpor daging dan telur yang cukup besar. Peternakan merupakan komoditas yang memiliki prospek investasi yang cukup cerah di Kabupaten Pidie Jaya.

Komoditas unggulan kelautan dan perikanan untuk tambak pada tahun 2013 seluas 2.078,23 Ha dengan area produktif seluas 1.549,45 Ha dengan rata-rata persentase pemakaian seluas 74,55 persen. Produksi budidaya air payau pada tahun 2013 untuk Bandeng sebanyak 507.786 ton dan udang sebanyak 219.565 ton. Hasil tangkapan pada Tahun 2013 untuk Tuna (2.159 ton), Tongkol (1.643 ton) dan Teri (2.175 ton) serta jenis lainnya (4.732 ton). Konsumsi ikan penduduk Pidie Jaya sebesar 38 kg/kapita/tahun masih lebih rendah dari rata-rata Aceh sebesar 43,07 kg/kapita/tahun, namun lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 35 kg/kapita/tahun. Dengan konsumsi ikan Pidie Jaya tersebut, kebutuhan ikan setiap tahunnya sebanyak 5.532 ton, sedangkan jumlah produksi ikan tangkapan sebanyak 942.591 ton dan tambak air payau sebanyak 10.681 ton memberi peluang ekspor ikan. Untuk itu perlu dipersiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya dan peningkatan SDM masyarakat nelayan.

Nilai tambah dari komoditi unggulan berbagai sub sektor seperti: pertanian (pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan belum terlihat secara nyata. Namun, Pemerintah Pidie Jaya sudah berupaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditi tertentu seperti nilai tambah kakao yang menjadi bubuk dan minuman kakao yang dikelola secara modern melalui UMKM yang berlokasi di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Dua. Selanjutnya, nilai tambah melinjo menjadi emping dilakukan masih secara tradisional oleh masyarakat. Sementara itu, komoditi lainnya masih dijual oleh masyarakat dalam bentuk row *material* ke luar Pidie Jaya karena belum terwujudnya agribisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditi tersebut.

Selama periode 2009-2013, Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan sub sektor menunjukkan bahwa untuk subsektor tanaman, sub sektor hortikultura dan perkebunan rakyat sudah cukup baik dengan nilai rata-rata NTP berturut-turut sebesar 107,67, 100,87 dan 109,22. Namun, NTP untuk sub sektor perkebunan dan perikanan masih di bawah 100 yaitu NTP sub

sektor perkebunan sebesar 98,83 dan NTP sub sektor perikanan sebesar 99,99. Rata-rata NTP seluruh sub sektor sebesar 103,32. Hal ini memberikan gambaran bahwa produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya.

3.3. Pemanfaatan Sumberdaya Energi Terbaharukan

Dari sisi sumberdaya enegi, Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan rencana tata ruang akan mengembangkan sumber daya energi terbaharukan (*renewable energy*) berupa pembangunan pembangkit listrik Mikrohidro (PLTMH) yang berlokasi: a). Gampong Abah Lueng Jiem-Jiem, Kecamatan Bandar Baru dengan kapasitas 3 MW; b). Gampong Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua dengan kapasitas 5,03 MW; c). Gampong Lhok Pineng Kecamatan Meurah Dua dengan kapasitas 1,80 MW; d). Gampong Blang Minoh Kecamatan Bandar Dua dengan kapasitas 2,00 MW; dan e). Gampong Alue Sane Kecamatan Bandar Dua kapasitas 1,80 MW. Kondisi saat ini, kebutuhan energi listrik untuk Kabupaten Pidie Jaya masih disuplai dari PLN Cabang Sigli Ranting Meureudu dari energi Diesel. Oleh karena itu, peluang pemanfaatan PLMTH sangat besar untuk mewujudkan Pidie Jaya sebagai kawasan pendukung agroindustri.

3.4. Integrasi Infrastruktur

Infrastruktur yang terintegrasi mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pengembangan wilayah sebagaimana yang telah direncanakan RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035. Infrastruktur jalan dan jembatan belum optimal untuk mendukung daya saing daerah. Di sisi lain, sarana dan prasarana transportasi belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah terutama terkait dengan kondisi kinerja pelayanan, keselamatan transportasi, integrasi antar moda transportasi dan pengembangan sistem transportasi massal. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya air yang tersedia belum optimal untuk mendukung kebutuhan air baku dan sumber daya energi alternatif, pelayanan sanitasi layak, pengelolaan sampah, rumah tidak layak huni serta kelistrikan.

Infrastruktur yang terintegrasi juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Kabupaten Pidie Jaya secara regional dan nasional serta mengatasi kesenjangan antar wilayah terutama antara sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kecamatan dan wilayah pusat perkotaan dengan wilayah yang jauh dari kawasan perkotaan.

Berdasarkan arahan RTRW Aceh, Kawasan Perkotaan Meureudu ditetapkan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Diharapkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat memberikan pelayanan sosial, ekonomi dan infrastruktur terhadap penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Pusat-pusat

kecamatan seperti Lueng Putu, Trienggadeng dan Ulee Gle harus mampu memberikan pelayanan terhadap beberapa kecamatan termasuk kecamatan di luar Kabupaten Pidie Jaya, sehingga diharapkan bisa menjadi kawasan cepat tumbuh sebagai pusat kegiatan lokal untuk mendukung pusat pelayanan perkotaan Meureudu. Beberapa kecamatan di Pidie Jaya dilewati jalan arteri primer (jalan nasional) Banda Aceh – Batas Sumatera Utara. Kondisi ini berpotensi menumbuhkan perkembangan secara cepat pada di sepanjang koridor jalan tersebut terutama di Kawasan perkotaan Meureudu. Kabupaten Pidie Jaya adalah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Pidie sehingga saat ini Kabupaten Pidie Jaya masih dalam tahap pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh kegiatan Kabupaten. Adanya rencana pembangunan *Highway* yang melewati Kabupaten Pidie Jaya bisa memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan kawasan di sekitar koridor jalan. Adanya rencana jalur kereta api yang melewati Kabupaten Pidie Jaya memberikan peluang berkembangnya Pidie Jaya di masa yang akan datang.

3.5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Dalam hal ini, pendidikan dan kesehatan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya masih relatif rendah. Pemerintah daerah sudah menerapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Secara umum rendahnya kualitas SDM Pidie Jaya tergambar dari jumlah lulusan perguruan tinggi (Pasca sarjana/S2, Sarjana (S1), Diploma (D3/D2/D1)) sebanyak 9.271 orang atau 5,89 persen dari total penduduk Pidie Jaya (157.383 orang). Kemudian, lulusan sekolah menengah atas untuk SMA/SMK/Aliyah sebanyak 35.693 orang (22,68 %) dan lulusan SMP/Tsanawiah sebanyak 32.931 orang (20,92 %). Sementara, lulusan SD/Ibtidaiyah sebanyak 32.430 orang (20,61 %), Tidak Tamat SD sebanyak 20.552 orang (33,66 %) dan Belum/tidak sekolah sebanyak 26.506 orang (16,84 %). Tenaga pendidik dan distribusinya serta sebaran fasilitas sekolah belum merata. Mutu lulusan sekolah menengah atas masih rendah sehingga jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri masih terbatas. Ketersediaan sekolah kejuruan masih terbatas untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Generasi muda Pidie Jaya menghadapi tantangan degradasi moral seperti fenomena umum generasi muda Aceh. Munculnya banyak kasus narkoba, mesum, pelecehan seksual dan premanisme menggambarkan degradasi moral. Oleh karena itu, pembinaan generasi muda yang berakhlakulkarimah sangat diperlukan melalui sosialisasi terhadap bahaya penggunaan

narkoba, penguatan pemahaman keagamaan dan pembentukan akhlak yang baik kepada generasi muda. Hal tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah, tempat peribadatan dan melalui organisasi kepemudaan.

Isu strategis di bidang kesehatan tergambar dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini disebabkan oleh fasilitas kesehatan belum memadai, rendahnya kualitas tenaga kesehatan dan rendahnya pelayanan kesehatan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.6. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik yang rendah juga menjadi isu strategis Kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, organisasi pemerintahan yang ideal dan sumberdaya aparatur profesional merupakan penentu kualitas pelayanan publik. Struktur organisasi pemerintahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan penempatan sumberdaya aparatur yang tepat serta memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mepertimbangkan pengarusutamaan gender.

Kualitas pelayanan publik berkaitan dengan tersedianya aparatur pemerintah yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah kabupaten akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan sumberdaya aparatur yang handal dan potensial di bidangnya sesuai dengan kompetensi yang ada. Jumlah sumberdaya aparatur daerah/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 adalah 1.392 orang. Bila dilihat dari tingkat kepangkatan/golongan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah golongan IV sebanyak 316 orang, golongan III sebanyak 793 orang, golongan II sebanyak 253 orang dan golongan I sebanyak 30 orang. Namun, kualitas aparatur ini perlu ditingkatkan agar pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan.

3.7. Budaya Kreatif Inovatif

Isu strategis budaya kreatif inovatif masyarakat Kabupaten Pidie Jaya menjadi penentu untuk mewujudkan kesejahteraan. Budaya belajar seumur hidup harus terus digalakkan dan diarahkan agar mencapai hasil yang bermanfaat. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kabupaten Pidie Jaya mampu menguasai IPTEK untuk mendukung kawasan agroindustri serta mampu menjawab tantangan pada era persaingan global. Pengembangan budaya IPTEK tersebut dilakukan melalui pengembangan budaya

membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif yang mempertimbangkan kearifan lokal.

3.8. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Kebencanaan dan Lingkungan Hidup menjadi isu strategis karena wilayah Pidie Jaya rawan terhadap bencana baik disebabkan oleh bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor) maupun non alam (kebakaran). Pemerintah Pidie Jaya memberikan perhatian yang serius terhadap dampak yang ditimbulkan bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Tingkat kerusakan lahan dan hutan yang terjadi semakin tidak terkendali yang akan menyebabkan bencana di masa yang akan datang berupa bencana kekeringan atau banjir. Daerah yang rawan bencana yaitu daerah pesisir laut dan bantaran sungai-sungai. Daerah pesisir yang rawan terjadinya bencana abrasi adalah pesisir Panteraja, Meureudu, Trienggadeng, Bandar Baru dan Meurah Dua. Alih fungsi lahan produktif pertanian di sekitar koridor jalan nasional Banda Aceh – Medan penting untuk dikontrol secara intensif.

Seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari 8 kecamatan, 222 desa dan 34 Kemukiman merupakan daerah potensi rawan bencana gempa bumi. Wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berada di pesisir pantai merupakan daerah/ wilayah potensi rawan bencana tsunami/ gelombang pasang seperti: 1) Kecamatan Bandar Baru (Desa Cut Njong, Mns.Baro, Sawang, dan Lancang Paru), 2) Kecamatan Penteraja (Desa Keude Pante Raja, Reudeup, Peurade dan TU), 3) Kecamatan Trienggadeng (Desa Mns. Keude, Meue dan Cot Lheue Rheng), 4) Kecamatan Meureudu (Desa Meuraksa dan Mns. Balek), 5) Kecamatan Meurah Dua (Desa Mns Jurong dan Lueng Bimbe), 6) Kecamatan Ulim (Desa Tijien Husen, Gelanggang dan Buang), dan 7) Kecamatan Jangka Buya (Desa Gampong Cot).

Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 menyebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan trauma untuk kembali ke tempat tinggal asalnya. akibatnya terjadi pengungsian yang jumlahnya mencapai 59.058 orang tersebar di sekitar 55 titik, baik yang merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya maupun penduduk yang mengungsi ke Kabupaten Pidie.

Potensi banjir dipicu oleh keadaan luapan debit air delapan ruas sungai besar yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya. Kedelapan sungai itu adalah Sungai Lueng Putu, Sungai Cubo, Sungai Trienggadeng, Sungai Beuracan-Pangwa, Sungai Meureudu, sungai Ulim, sungai Jeulanga, dan Sungai Kiran. Gerusan erosi yang diakibatkan aliran sungai Beuracan Pangwa in mengancam beberapa fasilitas mulai dari Bangunan Irigasi Alue Demam, Jembatan Gantung di Desa Lampoh Lada dan Buloh, Jembatan Beton di Jalan Negara di perbatasan

Beuracan Pangwa. Aliran sungai juga mengancam kebun, pemukiman dan sawah penduduk di dua Kecamatan. Di Kecamatan Trienggadeng Desa Buloh, Meucat Panwa, Deah Pangwa, dan di Kecamatan Meureudu seperti Desa Rumpun, Grong-grong Krueng, Rambong, Kuta Trieng, Teupin Peuraho,sampai dengan Rhing Krueng. Muara sungai ini bersisian dengan tiga desa yaitu desa Rhing Krueng, Meuraksa, dan Rhing Blang di Kecamatan Meureudu.

Walaupun Pidie Jaya tidak memiliki gunung berapi yang aktif, namun dengan adanya Gunung Peut Sagoe yang berada 1 km dari perbatasan Kecamatan Meurah Dua (Pidie Jaya) dengan Kecamatan Geumpang (Pidie), telah memberikan ancaman potensi banjir lahar dan debu panas. Tercatat pada tahun 1974 Gunung Berapi Peut Sagoe yang berada pada Kabupaten tetangga Pidie Jaya (Kabupaten Pidie) pernah meletus dan mengirimkan lahar sampai memasuki kawasan Pidie Jaya sejauh 35 Km, mengakibatkan banyaknya endapan lahar yang menggenangi lembah Blang Raweu, sehingga menimbulkan endapan komposit mineral andesit yang cukup banyak. Sementara debu dan awan panas yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kenyamanan pada penduduk yang berada di beberapa desa seperti Sarah Mane, Lhok Sandeng di Kecamatan Meurah Dua, dan Lhok Gajah di Kecamatan Ulim.

Tanah longsor adalah fenomena geologis yaitu pergerakan tanah, misalnya jatuhnya bebatuan, aliran reruntuhan, yang bisa terjadi di lepas pantai, pinggir pantai dan di daratan. Klasifikasi gerakan tanah di Kabupaten Pidie Jaya antara lain: 1) Menengah (Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim), 2) Rendah (Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Pante Raja, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim), dan 3). Tinggi (Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Meurah Dua).

Kondisi kebencanaan angin puting beliung dipicu oleh kondisi pertemuan kondisi udara kering di pesisir Utara Pidie Jaya dengan kondisi kelembaban udara di daerah pegunungan bagian Selatan. Data historis menunjukkan angin puting beliung pernah melanda daerah Ujong Leubat dan Paru di Kecamatan Bandar Baru, daerah Peulandok Tengoh di Kecamatan Trienggadeng dan daerah Keudai Jangka Buya dan Jurong Tengoh.

Klasifikasi angin puting beliung yang ada di Kecamatan Pidie Jaya meliputi: 1). Bahaya Menengah: Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru; 2). Bahaya Rendah: Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Bandar Baru; 3). Bahaya Tinggi: Kecamatan Ulim, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru.

Pidie Jaya sebagai kabupaten pemekaran yang PDRB nya 68 persen tergantung dari Sektor Pertanian, umumnya memiliki pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan bangunan yang mudah terbakar. Kota-kota di Kecamatan yang menjadi pasar lokal bagi penduduk sekitar juga memiliki bangunan pertokoan yang berbahan kayu (semi permanen). Kebakaran besar yang terjadi dalam PB di Pidie Jaya adalah pada tanggal 8 Agustus 2012 yang menghanguskan 21 rumah penduduk di Kecamatan Panteraja.

Pengembangan budidaya di sepanjang pantai Kabupaten Pidie Jaya, kurang memperhatikan wilayah sempadan pantai, dan penebangan hutan bakau secara liar. Kondisi ini akan menyebabkan pengikisan pantai yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Abrasi pantai terutama terjadi pada wilayah sempadan pantai yang telah terpakai untuk kegiatan budidaya (pertambakan, industri pembuatan garam, industri arang kayu). Selain terjadi abrasi, sebagian wilayah di pantai Kabupaten Pidie Jaya telah terkena air laut (intrusi air laut) terutama di kecamatan Meureudu, Trienggadeng, Panteraja serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Pengaruh air laut ini telah merambah ke arah tengah, yang salah satunya di akibatkan terjadinya perambahan hutan bakau.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Kabupaten Pidie Jaya

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan permasalahan dan potensi Kabupaten Pidie Jaya saat ini serta isu strategis yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, maka visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 – 2035 adalah :

"Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera"

Visi pembangunan daerah Tahun 2015-2035 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pidie Jaya. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya yang diuraikan sebagai berikut.

Islami. Islami adalah kondisi masyarakat Pidie Jaya yang memiliki sikap, tingkah laku dan karakter sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Karakter yang islami tersebut tercermin pada praktek kehidupan masyarakat Pidie Jaya yang memiliki akhlak mulia, toleran, sopan santun, taat beribadah, beretika, giat bekerja, cinta damai, anti kekerasan, mencintai ilmu, taat aturan, kooperatif, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sikap Islami juga harus diwujudkan dalam pelaksana pembangunan dengan komitmen yang kuat dan bertindak secara konsisten, holistik, transparan, senergi, akuntabel dan *sustainable.* Konsisten memiliki makna kepatuhan terhadap apa yang telah ditetapkan sehingga tidak selalu terjadi perubahan yang dapat merubah apa yang telah dicita-citakan.

Berkualitas. Berkualitas adalah kondisi masyarakat Pidie Jaya yang memiliki taraf kehidupan yang tinggi yang meliputi kompetensi kualitas sumber daya manusia, kualitas kesehatan yang memadai, dan kualitas layanan publik lainnya serta kualitas sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas kehidupan masyarakat yang mencukupi. Kondisi kehidupan masyarakat Pidie Jaya yang berkualitas tersebut dicerminkan dengan:

1. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Tercapainya indikator *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's);

3. Meningkatnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan
4. Menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan rasio ketergantungan.

Adil. Adil adalah kondisi di mana ada pemerataan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara proporsional seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, pemerataan penyebaran pembangunan, dan kesempatan memperoleh keadilan di depan hukum. Kondisi adil tersebut dapat tercermin pada semakin kecilnya *Indeks Gini* (Rasio Kesejahteraan), Indeks Ketimpangan Regional dan Angka Pemerataan Pendapatan.

Makmur dan Sejahtera. Konsep makmur dan sejahtera menunjukkan kondisi suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin, adil, proporsional dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi;
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin;
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat;
5. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga;
6. Tersedianya infrastruktur yang memadai;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab.

4.2 Misi Kabupaten Pidie Jaya

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

Misi 1: Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam, Budaya dan Adat Istiadat.

Hal ini dilakukan melalui penerapan Syari'at Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan, memantapkan pelaksanaan amal ibadah, pendalaman ilmu agama Islam bagi pemeluknya, menghidupkan syi'ar Islam serta membina kerukunan hidup antar umat beragama dengan cara mengembangkan sistem informasi syariat Islam, dan meningkatkan

pengetahuan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam. Pembangunan juga diarahkan untuk mendorong upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai sektor pemerintahan dan aspek kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada Al Quran dan Hadist yang dijabarkan dalam undang-undang dan Qanun (peraturan daerah), hubungan perdagangan/ekonomi (muamalah) berdasarkan syariah, masyarakat yang berakhlak mulia, beretika dan beradab, kesadaran dalam berperilaku dan berpenampilan sesuai syariat Islam, pemberdayaan zakat melalui peran Baitul Mal secara profesional serta terwujudnya hubungan baik antar umat di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga menjadi cerminan kehidupan yang Islami. Selanjutnya pembangunan juga diarahkan untuk memantapkan ketahanan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal yang islami dalam upaya mendorong pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan.

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Hal ini dilakukan melalui reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dengan penerapan teknologi informasi, meningkatkan budaya taat dan tertib hukum serta disiplin kerja, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban serta pemberdayaan politik lokal, penegakan hukum secara adil tanpa diskriminatif, meningkatkan koordinasi antar sektor dan lembaga, transparansi dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terlaksananya program perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat.

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.

Hal ini dilakukan melalui pembangunan yang berkeadilan atau pro rakyat (*pro poor, pro job, pro-growth dan pro environment*) di segala bidang sebagai berikut;

a. memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua;
b. meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan, penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;
c. memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan dalam skala lokal, regional dan internasional;
d. mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat kelompok yang masih lemah; dan
e. menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Pro poor merupakan pembangunan yang berpihak kepada penurunan angka kemiskinan, *pro job* yaitu keberpihakan pembangunan pada perluasan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran, selanjutnya pembangunan yang berpihak kepada *pro-growth* adalah keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan *pro environment* adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Menata pola pembangunan yang meliputi pengembangan kawasan yang fungsional, kawasan pemekaran, perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata, perikanan tangkap dan budidaya dalam blok-blok peruntukan, arahan kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, garis sempadan, rencana pembangunan, serta pengendalian pemanfaatan kawasan, penetapan kawasan persampahan, pengelolaan lingkungan yang mengarah pada daerah yang bebas dari pencemaran.

Misi 4: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas diwujudkan melalui pemerataan pembangunan pendidikan, memenuhi hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan dayah serta pendidikan non formal; meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang handal melalui pelaksanaan sertifikasi guru, uji kompetensi bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, perlombaan guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi, perlombaan inovasi pembelajaran bagi tenaga pendidik. Di samping itu perlu mewujudkan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Selanjutnya, kesehatan yang berkualitas diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar minimal, kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang baik sesuai dengan standar pelayanan, penyediaan sumber daya manusia pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat Pidie Jaya secara luas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera.

Hal ini dilakukan melalui upaya:

a. penurunan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. mewujudkan kesetaraan dan keadilan peran, fungsi laki-laki dan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
c. menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin;
d. meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara optimal;
e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat infrastruktur perekonomian daerah berbasis keunggulan masing-masing sektor khususnya sektor agribisnis yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perdagangan, industri, kelautan dan perikanan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya pelayanan jasa dan perdagangan yang berpihak kepada ekonomi rakyat serta meningkatkan iklim investasi melalui regulasi dan penciptaan stabilitas keamanan.

Misi 6 : Mewujudkan Pidie Jaya yang Demokratis, Aman, Damai dan Bersatu Berlandaskan Hukum.

Hal ini dilakukan melalui:

a. pemantapan budaya demokrasi dalam masyarakat;
b. memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil;
c. menjamin kebebasan media secara bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;
d. meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;
e. melestarikan perdamaian secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan; dan
f. melaksanakan pembangunan yang berbasis peka konflik; serta menjaga keutuhan wilayah Aceh.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. Sasaran Pokok Pembangunan

5.1.1. Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam, Budaya dan Adat Istiadat yang dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;
2. Terciptanya perdagangan/ekonomi (muamalah) berdasarkan Syariah;
3. Terciptanya pengelolaan zakat secara profesional;
4. Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama;
5. Terpeliharanya budaya dan adat istiadat.

5.1.2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Terbangunnya koordinasi antar sektor dan lembaga, transparansi dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Tersedianya pelayanan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Terciptanya budaya taat dan tertib hukum serta disiplin kerja;
5. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban serta pemberdayaan politik lokal;
6. Terlaksananya program perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat.

5.1.3. Terwujudnya Pembangunan yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan yang dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya pembangunan yang pro rakyat (*pro poor, pro job, pro-growth dan pro environment*) di segala bidang;
2. Terciptanya perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah;
3. Terwujudnya pengurangan kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh yang berpihak kepada masyarakat lemah;
4. Terciptanya pemerataan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi.
5. Terciptanya pembangunan yang berkeadilan, terpadu, terkendali, aman dan tenteram serta berwawasan lingkungan.

5.1.4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas yang dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas secara merata;

3. Terwujudnya sistem dan pengelolaan pendidikan yang unggul;
4. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar minimal;
5. Tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata;
6. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan.

5.1.5. Terwujudnya Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera yang dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
3. Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin;
4. Meningkatnya daya beli masyarakat dan tumbuhnya ekonomi kerakyatan;
5. Terciptanya infrastruktur perekonomian daerah berbasis sektor agribisnis
6. Tersedianya regulasi dan stabilitas keamanan yang mendukung iklim investasi.

5.1.6. Terwujudnya Pidie Jaya yang Demokratis, Aman, Damai dan Bersatu Berlandaskan Hukum yang dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya budaya demokrasi dalam bermasyarakat dan pemerintahan;
2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan;
3. Terjaminnya kebebasan pers secara bertanggung jawab;
4. Terciptanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan;
5. Terjaganya keutuhan wilayah dan kelestarian perdamaian secara berkelanjutan;
6. Terjaminnya penegakan hukum secara adil, konsekuen tidak diskriminatif;
7. Terciptanya persatuan masyarakat dalam pembangunan.

5.2. Arah Kebijakan

5.2.1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam, Budaya dan Adat Istiadat.

Menciptakan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa diarahkan dengan penerapan pendidikan Islami melalui institusi pendidikan formal dan non formal untuk membentuk generasi yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan berdaya saing; pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan yang berbasis nilai islami yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan budaya gemar membaca dalam masyarakat; peningkatan jumlah dan kualitas guru mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam mata pelajaran keilmuan lainnya; peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan; penguatan peran ulama dan umara, keluarga, lingkungan sosial kemasyarakatan dalam membentuk karakter masyarakat yang Islami; peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur berdasarkan nilai-nilai Islami.

Menciptakan perdagangan/ekonomi (muamalah) berdasarkan Syariah diarahkan agar kegiatan perdagangan/ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi akan tetapi terdapat sandaran transendental yang bernilai ibadah seperti: menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi, memberikan toleransi, secara sukarela serta menghindari penipuan, kecurangan, penyelewengan dan riba serta meningkatkanya produk bersertifikat halal.

Meningkatkan pengelolaan zakat secara profesional diarahkan melalui peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan dana sosial keagamaan (zakat, infaq, dan sedekah), serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan. Selanjutnya, menciptakan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan cara: peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat perlu dikembangkan secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang damai dan harmoni dengan memelihara kerukunan antar individu, kelompok, dan umat beragama.

Pemeliharaan budaya dan adat istiadat diarahkan untuk memantapkan ketahanan budaya yang islami untuk mendorong pelestarian, pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat, menciptakan budaya daerah yang berintegritas, mewujudkan masyarakat islami yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya yang mampu mendorong pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan.

5.2.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat; peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah, penegakan hukum dan tertib sosial yang konsisten. Menyediakan pelayanan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan secara terintergrasi dan komprehensif dengan memperhatikan indeks kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Menciptakan budaya taat dan tertib hukum serta disiplin kerja diarahkan melalui pengembangan budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah. Melaksanakan program perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat diarahkan agar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagai mitra setara yang memiliki posisi, peran, tanggung jawab, dan kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan.

Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat diarahkan agar terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat untuk menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Selanjutnya pemberdayaan politik lokal masyarakat diarahkan agar masyarakat ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara.

5.2.3. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan diarahkan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara adil sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; meningkatkan akses pelayanan publik secara merata di seluruh aspek pembangunan daerah; pengelolaan sumber daya alam difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan; pengelolaan dan konservasi potensi sumber daya air; pemanfaatan dan pengelolaan struktur dan pola ruang yang serasi; pelestarian fungsi dan potensi keanekaragaman hayati sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan; penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pembangunan yang pro rakyat *(pro poor, pro job, pro-growth dan pro environment)* di segala bidang diarahkan pada pembangunan ekonomi produktif masyarakat dan penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu secara adil untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah diarahkan melalui pembangunan infrastruktur yang membuka isolasi wilayah yang menghubungkan kawasan-kawasan produksi pertanian dan industri dengan kawasan koleksi dan distribusi serta meningkatkan aksebilitas informasi, aktifitas perdagangan barang maupun jasa secara lokal, regional dan internasional; peningkatan kelembagaan jasa non perbankan sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengurangan kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh yang berpihak kepada masyarakat lemah diarahkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerataan pendidikan, kesehatan dan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi yang memadai.

Pembangunan yang berkeadilan, terpadu, terkendali, aman dan tenteram serta berwawasan lingkungan diarahkan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; peningkatan kesiapsiagaan bencana yang

menerapkan konsep mitigasi dalam manajemen penanganan bencana; penataan pola dan struktur ruang yang tepat dengan memperhatikan kawasan rawan bencana; penerapan sistem peringatan dini kebencanaan melalui penyebaran informasi yang efektif kepada masyarakat; peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat bersama pemerintah untuk siap dan tanggap menghadapi bencana yang berbasis pada pengurangan risiko bencana dan pengendalian bencana.

5.2.4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan diarahkan untuk menciptakan masyarakat mandiri dan memiliki daya saing berasis ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan cara: pembangunan sumber daya manusia harus mengarah pada peningkatan kualitas manusia sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan; peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya diarahkan agar sumberdaya manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing di era global, namun juga agar sumber daya manusia memiliki mental dan moral yang baik. Oleh karena itu, penyesuaian kurikulum pendidikan diperlukan di era global ini.

Selanjutnya pelayanan pendidikan diarahkan untuk penciptaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar difokuskan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan vocasional dan Balai Latihan Kerja (BLK) serta Puslitbang. Dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas secara merata sangat diperlukan yang didukung oleh sistem dan tatakelola pendidikan yang unggul (efektif, efisien dan akuntabel). Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan juga diarahkan untuk seluruh masyarakat dijalur formal, in-formal dan non-formal dengan memperhatikan kelompok rentan. Keberhasilan pembangunan pendidikan yang berkualitas memerlukan partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan pendidikan. Masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan pembiayaan pelayanan pendidikan. Dengan kata lain, institusi menjadi partner masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama diantara keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar minimal. Pembangunan kesehatan juga memerlukan dukungan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Peran serta masyarakat dalam setiap program kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu memelihara, meningkatkan kesehatannya

sendiri dan lingkungannya. Masyarakat juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pembiayaan pelayanan kesehatan; peningkatan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif secara seimbang; peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi terhadap ibu hamil, ibu menyusui bayi dan anak di Bawah Dua Tahun (BADUTA) diantaranya: dengan promosi dan intervensi paket gizi sejak remaja (untuk pencegahan anemia dan infeksi pada masa kehamilan); peningkatan pengetahuan tentang peningkatan kesehatan reproduksi; pemberian ASI eksklusif dan ASI lanjutan; penigkatan peran dan kerja sama lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan dan gizi (sarana dan prasarana jalan, air bersih, pangan, prilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan); reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi; penyediaan sumber daya kesehatan baik kuantitas maupun kualitas meliputi sumber daya manusia, pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan, obat dan alat kesehatan serta ilmu pengetahuan dan penelitian; pembangunan yang berwawasan kesehatan dan penanggulangan bencana serta kedaruratan kesehatan.

5.2.5. Mewujudkan Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera

Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, penciptaan lapangan kerja melalui upaya meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing di pasar domestik maupun manca negara; mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha; meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan produktivias yang sesuai dengan kebutuhan pasar; menerapkan hasil inovasi dan teknologi dalam iklim usaha yang sehat; pengembangan UKM yang terintegrasi dalam bentuk agribisnis; penyediaan regulasi dan stabilitas keamanan yang mendukung iklim investasi; penyediaan infrastruktur perekonomian daerah berbasis sektor agribisnis.

Masyarakat yang makmur dan sejahtera dicirikan dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini Nilai Tukar Petani (NTP) untuk sub sektor (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan) menjadi tolok ukur semakin makmur dan sejanteranya masyarakat.

Pembagunan kesejahteraan juga diarahkan untuk menciptakan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), fasilitas pelayanan publik, jaminan kesejahteraan sosial dan menciptakan kualitas hidup PMKS sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pegarusutamaan peran, fungsi laki-laki dan perempuan (gender) dalam pembanguan.

5.2.6. Mewujudkan Pidie Jaya yang Demokratis, Aman, Damai dan Bersatu Berlandaskan Hukum

Pemantapan budaya demokrasi dalam masyarakat dan pemerintah diarahkan melalui promosi dan sosialisasi regulasi yang menjadi pedoman dasar bagi proses demokrasi berkelanjutan; penataan hubungan antara lembaga politik dan lembaga masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan; menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat secara formal dan informal; peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penguatan partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil diarahkan untuk mendukung kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. Di samping itu, penataan peran masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata sosial kemasyarakatan, kearifan lokal, dan lembaga adat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan. Dalam ranah politik, penguatan peran masyarakat diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik.

Selanjutnya terjaminya kebebasan pers secara bertanggung jawab diarahkan untuk menjamin hak masyarakat luas dalam berpendapat dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan berlandaskan hukum; meningkatkan jangkauan dan pemerataan informasi dengan mendorong munculnya media massa daerah yang independen. Dalam hal ini, upaya yang harus dilakukan antara lain: menciptakan jaringan dan teknologi informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan pengambil keputusan politik; meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung proses pencerdasan masyarakat dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

Menciptakan keadilan dalam berbagai aspek pembangunan diarahkan melalui sinergitas pembangunan yang saling mendukung berdasarkan potensi wilayah, pengurangan disparitas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Penciptaan keutuhan wilayah dan pelestarian perdamaian secara berkelanjutan diarahkan melalui penegakan hukum yang adil dan tegas dengan mempertimbangkan kearifan lokal; merekatkan kembali struktur masyarakat sehingga kohesi sosial, ekonomi dan politik terjadi secara baik; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perdamaian secara berkelanjutan.

Penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif diarahkan melalui perwujudkan sistem hukum yang berkeadilan yang bersumber dari hukum nasional dan daerah; penciptaan masyarakat yang berbudaya hukum melalui pendidikan secara formal dan informal; keterbukaan informasi terhadap proses pengambilan keputusan kepada masyarakat; penegakan

hukum dilaksanakan secara konsekuen dan tidak diskriminatif sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi investasi. Penciptaan persatuan masyarakat dalam pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perdamaian; mengurangi resiko konflik akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak merata.

BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN

6.1. Tahapan dan Prioritas

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran RPJP Pidie Jaya 2015-2035 sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, pembangunan jangka panjang memerlukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap periode lima tahunan. Tahapan pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan serta potensi wilayah yang dikembangkan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, skala prioritas pembangunan dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang. Uraian tentang tahapan dan skala prioritas utama pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut.

6.1.1. Tahap Pembangunan Periode Pertama Tahun 2015-2019

Tahap pembangunan periode pertama, prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya difokuskan peningkatan lembaga pelaksana Syariat Islam seperti Baitul Maal, Wilayatul Hisbah, Badan Dayah, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diharapkan lebih berperan untuk mengintegrasikan Syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Pembangunan menuju masyarakat yang Islami juga ditandai dengan tercapainya tertib sosial, kerukunan dan harmonisasi dalam masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan Syariat Islam, terciptanya budaya daerah yang berintegritas, meningkatnya profesionalisme aparatur, serta peningkatan pelayanan publik untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Pada periode pertama ini juga difokuskan pada pencapaian target-target tujuan pembangunan millenium (MDG's) serta peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan yang mendukung pengembangan agroindustri. Tujuan MDG's di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, lingkungan dan kebencanaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum diharapkan dapat tercapai pada tahun 2019. Selanjutnya, produksi dan produktivitas komoditas unggulan seperti: Kakao dan kelapa dapat meningkat secara optimal. Hal ini ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur pendukung, input teknologi dan pemasaran hasil komoditas unggulan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan penyuluh melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang bekerja sama dengan institusi

vokasional/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Puslitbang dapat menjadi modal dasar untuk penciptaan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar sejalan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai pada tahun 2015. UMKM diharapkan semakin berkembang dan mandiri untuk penyediaan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Pada tahapan pembangunan pertama ini diharapkan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,0 – 5,0 persen, angka kemiskinan menurun berkisar 19-20 persen, dan tingkat pengangguran berkisar 10 – 11 persen.

Pembangunan infrastruktur pada tahap pertama ini dititikberatkan untuk mengembangkan kawasan potensi pertanian dan sentra pemasaran serta peningkatan kualitas pelayanan dasar meliputi: jalan, kelistrikan, akses jaringan air bersih, air baku, sanitasi, persampahan dan perumahan. Selanjutnya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDG's) yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, menurunkan angka kematian anak dan ibu serta meningkatkan kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular.

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan pada berbagai jenjang dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, peningkatan kompetensi/profesionalisme tenaga pendidik, meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders pendidikan, upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta peningkatan budaya gemar membaca dalam masyarakat. Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0–6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun non formal. Pelaksanaan konsep pendidikan Islami di seluruh institusi pendidikan dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis nilai Islami yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan global. Mendorong terciptanya pemerataan kesempatan dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi; mendorong terciptanya kerjasama yang sinergis antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha sehingga hasil kajian dan riset dapat dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan.

Prioritas kesehatan ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimum yang tersebar secara merata dan proporsional. Selain itu, upaya pencapaian tujuan MDGs yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; pencegahan penyakit menular; serta masalah kesehatan lingkungan tetap menjadi prioritas.

Pembangunan di bidang sosial dan budaya ditujukan untuk meningkatkan modal sosial (*social capital*) dalam masyarakat untuk mendukung industrialiasi pertanian berbasis perdesaan. Rasa saling percaya dalam masyarakat harus dibangun dengan merevitalisasi kearifan budaya lokal melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas (*community-based*) sehingga proses industrialisasi mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Modal sosial yang kuat dalam masyarakat juga membentuk iklim investasi yang baik. Demikian juga pembangunan sosial ditujukan untuk menjamin hak-hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu.

Peningkatan kualitas lingkungan dititikberatkan pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan melalui sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Aktivitas pembangunan dilakukan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan pengelolaan limbah Berat, Berbahaya, Beracun (B3) harus dilakukan secara baik untuk menjaga kualitas lingkungan. Selanjutnya pengelolaan sumber daya hutan diarahkan pada pengembangan wana tani (*agroforestry*) dan pemanfaatan jasa lingkungan seperti pariwisata alam (*eco- tourism*) dan hasil hutan non-kayu. Penyusunan sejumlah aturan dan regulasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian hutan dan kualitas lingkungan. Demikian juga dengan pembangunan di bidang kebencanaan difokuskan pada peningkatan peran, kapasitas dan kelembagaan masyarakat dan pemerintah guna memaksimalkan upaya pengurangan risiko bencana dalam hal kemampuan penilaian bahaya, peringatan dini, dan persiapan menghadapi bencana.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan melalui penyediaan regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif, penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi dan kondisi keamanan yang mantap serta meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha (investor) dalam dan luar negeri. Dalam hal ini, penegakan hukum secara konsekuen, adil, tidak diskriminatif dan transparan menjadi modal untuk menarik minat investor. Dari sisi sosial, budaya dan keagamaan, sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa semakin membaik yang dicirikan dengan kerukunan antar umat beragam, nilai-nilai dan keanekaragaman budaya yang berkembang di dalam masyarakat tetap terjaga.

6.1.2. Tahap Pembangunan Periode Kedua Tahun 2020-2024

Tahap pembangunan periode kedua merupakan lanjutan dari tahap pembangunan periode pertama. Pada bidang pelaksanaan syariat Islam difokuskan pada pelaksanaan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehingga menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta peningkatan produk bersertifikat halal.

Fokus pembangunan pada periode kedua ini juga melanjutkan pencapaian target MDG's yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan kakao dan kelapa serta sumber daya alam lainnya. Kemitraan perusahaan swasta dengan masyarakat yang dimediasi pemerintah menjadi kunci keberhasilan untuk mengembangkan agroindustri. Peran BLK dan SMK menjadi lebih profesional untuk menyediakan SDM terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntunan MEA. UMKM semakin mandiri melalui pendampingan oleh perusahaan mapan dan pemerintah. Pada tahapan pembangunan kedua ini diharapkan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 - 6 persen, angka kemiskinan berkisar 16-18 persen, dan tingkat pengangguran berkisar 8-9 persen.

Pembangunan infrastruktur pada tahap ke-2 lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi berbasis agro industri. Demikian juga penyediaan sarana air bersih, air baku, sanitasi, pengelolaan persampahan sudah semakin baik. Sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika diharapkan semakin berkembang sesuai dengan pengembangan Iptek dan peningkatan daya saing yang mendukung aktivitas perekonomian dan dunia usaha.

Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Pembangunan bidang pendidikan telah semakin baik yang antara lain ditandai oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; serta meningkatnya budaya gemar membaca dalam masyarakat Pada periode ini diprioritaskan pengembangan institusi pendidikan yang memiliki standar internasional sehingga dapat bersaing secara global.

Pengembangan pendidikan menengah kejuruan juga diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global (MEA). Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional.

Peningkatan aktivitas ekonomi berbasis agroindustri dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, penerapan imbal jasa lingkungan oleh pelaku dunia usaha kepada masyarakat dan penerapan sanksi hukum bagi pelaku perusakan lingkungan perlu diimplementasikan. Pembangunan ekonomi juga diarahkan untuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja melalui pembangunan wisata, penyediaan energi terbarukan (PLTMH) dan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Selanjutnya

pengembangan Agro industri dilakukan dengan meningkatkan jejaring (*networking*) dengan dunia usaha skala nasional dan internasional.

6.1.3. Tahap Pembangunan Periode Ketiga Tahun 2025-2029

Pembangunan periode ketiga merupakan kelanjutan dari pembangunan periode kedua yang yaitu setiap komponen masyarakat tetap syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehingga menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selanjutnya pembangunan dititikberatkan untuk mencapai target SDG's dan pengembangan Agro industri menuju pembangunan manufaktur berbasis sumber daya alam unggulan. Pada tahapan pembangunan ketiga ini diharapkan pertumbuhan ekonomi berkisar 6 - 7 persen, angka kemiskinan berkisar 13-15 persen, dan tingkat pengangguran berkisar 6-7 persen.

Infrastruktur dasar sudah semakin mantap untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis agroindustri dan manufaktur yang berwawasan lingkungan. Sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika sudah tersedia untuk mendukung aktivitas perekonomian dan dunia usaha sesuai tuntutan MEA. Pengembangan agroindustri dan industri manufaktur diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan sektor wisata, energi dan sumber daya mineral telah berkembang secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. Jejaring (*networking*) dunia usaha skala nasional dan internasional yang sudah terbentuk untuk mendukung agro industri dan industri manufaktur semakin meningkat. Daya saing ekonomi semakin kompetitif dengan semakin terpadunya antara industri manufaktur dengan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang handal. Pengelolaan kualitas rantai produksi (*supply chain management*) berjalan secara efektif dan efisien; budaya kualitas dan merk semakin tumbuh; sertifikasi dan standarisasi produk menjadi kebutuhan; kepuasan konsumen semakin meningkat; kemitraan untuk perdagangan nasional dan internasional semakin meningkat sesuai dengan tuntutan MEA.

Pembangunan bidang pendidikan telah menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing dan mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan pada tahap ini diharapkan sudah memiliki standar nasional dan internasional sehingga dapat bersaing secara global. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global (MEA), sudah mulai berkembang. Pelayanan kesehatan semakin berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional serta kehidupan berpolitik masyarakat sudah semakin maju yang dengan terlihatnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara.

6.1.4. Tahap Pembangunan Periode Keempat Tahun 2030-2035

Pembangunan periode keempat merupakan kelanjutan dari pembangunan periode ketiga. pada tahap ini pembangunan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera.

Pembangunan pada periode keempat ini sudah terlihat masyarakat Pidie Jaya yang religius dari berbagai aspek kehidupan, pembangunan pada periode ini dititikberatkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya. Keberhasilan dalam membentuk karakter budaya ini ditandai dengan semakin meningkatnya budaya santun, jujur, ramah, memiliki rasa malu dan sadar lingkungan. Pada akhir tahapan pembangunan periode keempat, pertumbuhan pertumbuhan ekonomi berkisar 7,5-8,5 persen, tingkat kemiskinan berkisar 11-12 persen, dan tingkat pengangguran berkisar 4-5 persen. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Infrastruktur dasar sudah terpenuhi untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika, Jejaring (*networking*) dunia usaha skala nasional dan internasional sudah mantap untuk mendukung aktivitas perekonomian dan dunia usaha serta daya saing ekonomi sudah semakin kompetitif. Pembangunan sumber daya manusia difokuskan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, berkarakter, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai- nilai Islami dan budaya lokal dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif. Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap ini difokuskan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan *e-government* sebagai sarana peningkatan layanan publik.

Pada periode ini, pelayanan kesehatan sudah memenuhi standar nasional dan internasional yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang mumpuni, kapasitas sumber daya kesehatan yang handal serta yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya diharapkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya semakin baik.

6.2. Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pidie Jaya Tahun 2015-2035 merupakan pedoman pembangunan Pidie Jaya yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJP Pidie Jaya Tahun 2015-2035 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Pidie Jaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kabupaten Pidie Jaya dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon wakil bupati Kabupaten dan wakil bupati Kabupaten Pidie Jaya harus mempedomani RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 dalam menyusun visi dan misi daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Bappeda Kabupaten Pidie Jaya perlu menyebarluaskan dokumen RPJP Kabupaten Pidie Jaya kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon bupati dan calon wakil bupati melalui Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya dan partai-partai politik di wilayah Kabupaten Pidie Jaya sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat dilaksanakan dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
3. Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya terpilih dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035.
4. RPJP Pidie Jaya Tahun 2015-2035 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menjamin konsistensi antara RPJP Pidie Jaya Tahun 2015-2035 dengan RPJM Kabupaten Pidie Jaya, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya berkewajiban melakukan evaluasi terhadap rancangan akhir RPJM Kabupaten Pidie Jaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya (SKPK) dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan yang termaktub dalam RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 dengan sebaik-baiknya.
6. Dalam rangka implementasi RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya berkewajiban untuk melakukan penjabaran RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 ke dalam Kabupaten RPJM Pidie Jaya.

6.3. Mekanisme Pengendalian Dan Evaluasi

6.3.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pidie Jaya

Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 meliputi:

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya.

2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035.
3. Pemantauan dan supervisi RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Pidie Jaya.
4. Hasil pemantauan dan supervisi RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya, telah dilaksanakan melalui RPJM Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 kepada Bupati Pidie Jaya.

6.3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya

Mekanisme evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya meliputi:

1. Evaluasi terhadap hasil RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035.
3. Penilaian digunakan untuk mengetahui;
   a. Realisasi antara sasaran pokok RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 dengan capaian sasaran RPJM Pidie Jaya;
   b. Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJP Pidie Jaya Tahun 2005-2035 dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.

5. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJM Kabupaten Pidie Jaya.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJP Pidie Jaya Tahun 2015-2035. Dalam hal evaluasi jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda Pidie Jaya melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
7. Hasil evaluasi RPJP Pidie Jaya Tahun 2015-2035 digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJP Kabupaten Pidie Jaya untuk periode berikutnya.
8. Kepala Bappeda Pidie Jaya melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJP Pidie Jaya tahun 2015-2025 kepada Bupati Pidie Jaya.
9. Bupati Pidie Jaya menyampaikan laporan kepada Gubernur Aceh.

BAB VII
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 –2035 yang memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJP Kabupaten Pidie Jaya ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 20 (dua puluh) tahun, menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya dan pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Pidie Jaya yang Damai, Mandiri, Sejahtera dan Islami perlu didukung oleh :(1) komitmen dari kepemimpinan Kabupaten Pidie Jaya yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah kabupaten; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS